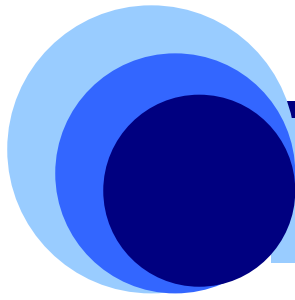




(LKPJ)

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.

Penyusunan dan penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati periode tahun 2016-2021 tahun kelima yang disampaikan oleh Bupati periode tahun 2021-2024.

Penyampaian LKPJ Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD, pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja perangkat daerah secara utuh sepanjang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati Kepala Daerah



bersama DPRD. Gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan ketepatan perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

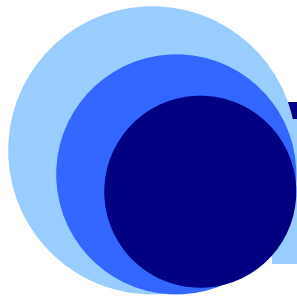
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berperan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember selama Tahun Anggaran 2020 kami ucapkan terima kasih, dan semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jember tahun berikutnya senantiasa mendapat kemudahan, perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridho Allah SWT.

Jember, Maret 2021

BUPATI JEMBER



HENDY S.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1-1
1.1 Dasar Hukum	1-3
1.2 Visi dan Misi	1-6
1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	1-13
1.4 Prioritas Daerah	1-38
1.4.1 Prioritas Utama	1-38
1.4.2 Prioritas Lainnya	1-40
1.5 Gambaran Umum Daerah	1-47
1.5.1 Kondisi Geografis.....	1-47
1.5.2 Gambaran Umum Demografis	1-63
1.5.3 Kondisi Ekonomi	1-67
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	 2-1
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	2-2
2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2-2
2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020	2-6
2.1.3 Permasalahan dan Solusi	2-15



2.2	Pengelolaan Belanja Daerah	2-16
2.2.1	Kebijakan Umum Keuangan Daerah	2-16
2.2.2	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2020	2-21
2.2.3	Permasalahan dan solusi.....	2-22
2.3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	2-23
2.3.1	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.....	2-23
2.3.2	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	2-24

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

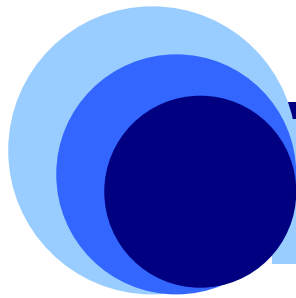
	YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	3-1
3.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	3-3
3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	3-3
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	3-92
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	3-195
3.1.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	3-226
3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	3-413
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2019	3-415

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

	DAN PENUGASAN.....	4-1
4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	4-2
4.1.1	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.....	4-5
4.1.2	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.....	4-30



4.2	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian	4-30
4.2.1	Hambatan/Permasalahan tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.....	4-30
4.3	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	4-34
4.3.1	Kerjasama Antar Daerah	4-36
4.3.2	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	4-39
4.3.3	Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	4-41
4.3.4	Pembinaan Batas Wilayah	4-42
4.3.5	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	4-43
4.3.6	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4-52
BAB V	PENUTUP	5-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Jember.....	1-14
Tabel 1.2	Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama	1-47
Tabel 1.3	Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember.....	1-49
Tabel 1.4	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat.....	1-49
Tabel 1.5	Kemiringan Lahan Kabupaten Jember	1-50
Tabel 1.6	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng.....	1-51
Tabel 1.7	Penggunaan Lahan Kabupaten Jember.....	1-59
Tabel 1.8	Statistik Pemerintahan Kabupaten Jember	1-61
Tabel 1.9	Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020.....	1.64
Tabel 1.10	Jumlah Penduduk, Luas Wlayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	1-65
Tabel 1.11	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2020 (dalam Miliar Rupiah).....	1-71
Tabel 1.12	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2020 (dalam Miliar Rupiah).....	1-72
Tabel 1.13	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar PDHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020	1-74

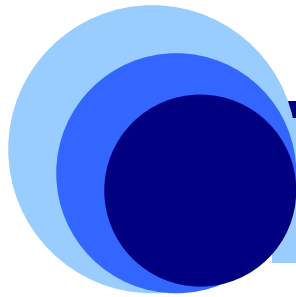


Tabel 1.14	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020.....	1-75
Tabel 1.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	1-75
Tabel 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	1-76
Tabel 1.17	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	1-78
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	2-7
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020	2-8
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020	2-9
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipindahkan Kabupaten Jember Tahun 2020	2-9
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	2-10
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Jember Tahun 2020	2-11
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Jember Tahun 2020.....	2-12
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Jember Tahun 2020.....	2-13
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	2-14
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	2-21



Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.....	2-25
Tabel 2.12	Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016-2020	2-26
Tabel 4.1	Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2020 Kabupaten Jember.....	4-5
Tabel 4.2	Perkembangan Hasil Pencapaian Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016 – 2020	4-46

KABUPATEN JEMBER



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan.....	1-61
Gambar 1.2	Perkembangan Jumlah dan Tahun 2016 – 2020.....	1-64
Gambar 1.3	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2020 Menurut Kecamatan.....	1-66
Gambar 1.4	Piramida Penduduk Kabupaten Jember (dalam persen) Tahun 2020.....	1-67
Gambar 1.5	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	1-70
Gambar 1.6	PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah).....	1-79
Gambar 2.1	Perbandingan Perkembangan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Langsung APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 – 2020	2-27
Gambar 4.1	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Jember Tahun 2015-2019.....	4-3



1

Pendahuluan

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam pasal 71 ayat 2 diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan tersebut merupakan upaya pembentukan keseimbangan (*checks and balances*)



antara dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah) dan fungsi legislatif (DPRD).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut memuat rencana pembangunan ke depan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jember di tahun mendatang.



1.1 Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar pijakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 ini mengacu dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam banyak hal masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup pelik.

Berpijak pada hasil-hasil pembangunan dan segenap permasalahan yang masih terjadi, maka periode berikutnya ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada upaya untuk mengatasi segenap permasalahan yang ada. Upaya untuk pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Pola yang akan dikembangkan adalah memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif, sebagaimana disebutkan dalam isu-isu pembangunan, diarahkan



untuk memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Hal ini ditandai dengan makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, yang diarahkan pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Jember lebih berdaya saing.

Slogan “Jember Baru Jember Bersatu” pada hakikatnya merupakan semangat untuk menuju masyarakat Jember yang sejahtera lahir dan batin, yang hendak dicapai melalui terciptanya aparatur pemerintah yang dilandasi cinta kepada kaum dhuafa. Hal tersebut mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Jember berpihak kepada masyarakat utamanya masyarakat pinggiran sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan/perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, jelas bahwa secara implementatif, pendekatan pembangunan Jember berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai harus berjalan sejajar dengan peningkatan kualitas daya beli masyarakat sampai pada pinggiran perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkualitas akan dilakukan melalui pengembangan industri hulu untuk memperkuat sisi hilir dan meningkatkan nilai tambah produktivitas baik di kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan dan industri jasa. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah beserta jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan (dhuafa) terus diupayakan. Pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas dan diversifikasi pangan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan



didorong oleh berbagai program yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang berpihak rakyat miskin, perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahun 2019 dimana merupakan tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah No. 5 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021 memuat tentang rencana pembangunan ke depan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Jember.

Untuk mengetahui visi, misi, strategi dan kebijakan daerah serta isu strategis prioritas daerah adalah sebagai berikut :

1.2 Visi dan Misi

“Memajukan Kesejahteraan Umum” merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, alinea IV, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Termasuk pembangunan Jember, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Jember yang sudah dilaksanakan selama ini, harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang. Visi sendiri memiliki arti merupakan pandangan ke depan tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Visi pembangunan Kabupaten Jember yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021 adalah :



***“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan, dan Mandiri”.***

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing - masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan.



Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun serta damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tentram, damai, sentosa, serta makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan yang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.



Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan “berdikari” (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun 2016.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergesur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya.

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam



konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tablet, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Berbekal visi tersebut, maka dirumuskan 3 misi yang diberi judul “*Jember Baru, Jember Bersatu*” sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten



Jember perlu ditetapkan Tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan dengan mengacu visi dan misi tersebut. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi satu, “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan public dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih.
 - b. Memperkuat kelembagaan Desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka Mewujudkan Jember Kuat dan Bersih.
2. Misi dua, “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan” dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Jember Sehat.
 - b. Meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu terhadap akses pendidikan dan menurunnya angka buta huruf secara signifikan dalam rangka mewujudkan Jember yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (JEMBER MAJU IPTEK).
 - c. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri.
 - d. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri.
 - e. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember yang Beriman dan Bertakwa (JEMBER IMTAK).



- f. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih.
 - g. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (*Local Wisdom*).
 - h. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih.
3. Misi tiga, “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan” dengan tujuan :
- a. Meningkatkan pendapatan para pedagang dan UMKM serta Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
 - b. Mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
 - c. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
 - d. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
 - e. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Utama
 - f. Meningkatkan konerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
 - g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya
 - h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya

- i. Meningkatkan penataan ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan Kabupaten Jember merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun, untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Jember disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 1.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Jember

VISI : JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI

Misi I : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), dan bersih (<i>clean government</i>), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	1. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip <i>e-government</i> yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan;	Membangun Kerjasama dengan Perusahaan Telekomunikasi dan meningkatkan koordinasi antar wilayah dan antar urusan	V	V	V	V		
		Mengembangkan sistem data yang terkoneksi berbasis IT di desa, kelurahan, kecamatan dan PD	V	V	V	V		
	2. Mewujudkan sinergi potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Optimalisasi pelaksanaan Musrenbang	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan Pemanfaatan media sosial on line	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi kegiatan sinergi bersama masyarakat	V	V	V	V	V	V
	3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja Pelayanan Publik	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Menyediakan data base kependudukan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk)	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika (TI) dan Meningkatkan kualitas SDM untuk mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan	V	V	V	V	V	V
		Menambah sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan kependudukan Dan Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan dokumen kependudukan	V	V	V	V	V	V
		Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku dan tidak menyimpang dari aturan - aturan atau tata tertib yang berlaku	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti administrasi kependudukan sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD	V	V	V	V	V	V
		Penentuan Kinerja PD Pelayanan Publik melalui SKM	V	V	V	V	V	V
		Identifikasi RT dan RW by name by address	V	V	V	V	V	V
	4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Optimalisasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan kapasitas serta koordinasi petugas penyusun LPPD	V	V	V	V	V	V
		Mengembangkan sistem data yang terkoneksi berbasis IT di desa, kelurahan, kecamatan dan PD	V	V				
		Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi guna menunjang transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	V	V				
	5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)	Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	V	V				
	6. Meningkatnya kualitas perencanaan,	Optimalisasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	penganggaran, pengendalian program dan kegiatan;	Optimalisasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan terus Pelayanan Administrasi Perkantoran	V	V	V	V	V	V
		Identifikasi kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Kabupaten Jember	V	V	V	V	V	V
	7. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset serta kearsipan daerah;	Meningkatkan kualitas sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana penunjang lain di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V	V	V	V	V	V
		Koordinasi dan konsolidasi dengan propinsi dan pusat kaitan perkembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset.	V	V	V	V	V	V
		Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya manajemen Pengelolaan Keuangan dan aset daerah	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan koordinasi dalam implementasi sistem manajemen Keuangan dan Aset Daerah	V	V	V	V	V	V
	8. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelola kearsipan	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola kearsipan	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	sumber-sumber pendapatan (pajak dan retibusi daerah dan sumber lain-lain) sesuai dengan ketentuan;	Monitoring dan Evaluasi pemungutan PAD serta koordinasi perumusan kebijakan peningkatan PAD	V	V	V	V	V	V
	9. Meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah berbasis kinerja disertai dengan upaya efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memberikan Tunjangan Kinerja kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja	V	V	V	V	V	V
		Mengoptimalkan fungsi SIMDA keuangan secara online dan berbasis web	V	V	V	V	V	V
		Melakukan up date aplikasi SIMDA Keuangan sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang	V	V	V	V	V	V
		Melakukan rekonsiliasi secara berkala dan pendampingan baik langsung maupun tidak langsung kepada PD	V	V	V	V	V	V
2. Memperkuat kelembagaan Desa/ kelurahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa/ kelurahan dalam rangka Mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	1. Meningkatkan Sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat Desa/ Kelurahan untuk penguatan kelembagaan masyarakat Desa/ Kelurahan	Pendampingan perguruan tinggi melalui gerakan satu desa satu dosen dalam rangka mempercepat penguatan kelembagaan masyarakat desa	V	V	V			
		Peningkatan kemampuan bendahara desa dalam aspek keuangan Desa		V	V	V	V	V
		Peningkatan kemampuan operator Desa dalam pengelolaan website Desa		V	V	V	V	V
	2. Meningkatkan akselerasi pelaksanaan kelembagaan Desa sesuai dengan UU Desa/Perda/Perbup	Pengembangan dan penguatan kelembagaan desa dan ketahanan masyarakat desa menuju desa Maju dan Mandiri	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Kerjasama dengan kabupaten sekitar untuk Pengembangan dan penguatan kelembagaan desa	V	V	V	V	V	V

Misi II : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Jember Sehat	1. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan nonmedis secara merata	Penguatan pelaksanaan Desa Siaga	V	V	V	V	V	V
		Pemenuhan Tenaga Kesehatan Profesional di Puskesmas melalui rekrutmen berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah	V	V	V			
		Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan non medis untuk mendukung Akreditasi Nasional	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan Kualitas pelayanan Puskesmas dengan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan Kualitas unit Pelayanan Kesehatan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat, Peningkatan serta penambahan Jumlah Sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh	V	V	V	V	V	V
	2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan;	Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	V	V	V	V	V	V
	3. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang Telah ditetapkan	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	4. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan;	Melakukan Upaya Akselerasi Pencapaian UHC (Universal Health Coverage)	V	V	V	V	V	V
	5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan kesehatan reproduksi dengan cara revitalisasi program KB melalui pelibatan peran serta masyarakat.	Peningkatan Advokasi KIE Program KKB	V	V	V	V	V	V
2. Meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu terhadap akses pendidikan dan menurunkan angka buta huruf secara signifikan dalam rangka mewujudkan Jember yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (JEMBER MAJU IPTEK)	1. Zero buta huruf di usia produktif;	Peningkatan akses Pendidikan kemasyarakatan	V	V	V			
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga perpustakaan	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;	Peningkatan perluasan akses Pendidikan dasar dan menengah yang bermutu	V	V	V	V	V	V
	3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	Peningkatan akses Pendidikan anak usia dini (PAUD)	V	V	V	V	V	V
	4. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;	Peningkatan profesionalisme pemerataan dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	V	V	V	V	V	V
	5. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga;	Peningkatan kualitas dan kuantitas atlet olahraga unggulan melalui kejuaraan singleevent, multi event, kelompok umur dan gender	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi pelatih	V	V	V	V	V	V
		Pembangunan sarana dan prasarana jenis olahraga unggulan di setiap kecamatan	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ industri dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan	V	V	V	V	V	V
		Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan bernegara	V	V	V	V	V	V
		Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman etika berbangsa dan bernegara	V	V	V	V	V	V
	6. Memberikan akses dan pemerataan beasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi bagi siswa yang berprestasi	Peningkatan akses Pendidikan tinggi bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi	V	V	V	V	V	V
3. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja dan penempatan transmigran;	Meningkatkan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja	V	V	V	V	V	V
		Mengurangi Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja	V	V	V	V	V	V
		Fasilitasi permasalahan buruh migran	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis Antara Pekerja Dan Pengusaha	V	V	V	V	V	V
4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan	1. Menurunnya persentase penduduk miskin;	Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kualitas hidup kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama dalam rangka menurunkan persentase : penduduk miskin (salah satunya melalui program CSR)	V	V	V	V	V	V
	2. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Pelatihan keterampilan dan bantuan pelayanan sosial bagi PMKS	V	V	V	V	V	V
	3. Meningkatnya jumlah unit usaha ekonomi kaum perempuan;	Membentuk LKMM yang beranggotakan mayoritas kaum perempuan	V	V	V	V	V	V
		Memberdayakan LKMM yang merupakan lembaga pra koperasi menjadi Koperasi Wanita	V	V	V	V	V	V
		Membentuk koperasi Wanita melalui pemberdayaan kelompok pengajian dan kelompok masyarakat lainnya	V	V	V	V	V	V

dalam rangka
Mewujudkan
Jember Mandiri



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Melaksanakan diklat dan pelatihan bagi LKMM dan koperasi wanita	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi pendirian koperasi wanita melalui fasilitasi pengurusan Badan Hukum Koperasi	V	V	V	V	V	V
		4. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	V	V	V	V	V	V
		Peningkatkan Advokasi, KIE tentang PPRG, Profil Gender, Data Terpilah dan penguatan PPT	V	V	V	V	V	V
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa (JEMBER IMTAK)	1. Meningkatkan peran khatib dan guru ngaji dalam program pembangunan;	Program verifikasi ulang dan validasi data guru ngaji	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru ngaji yang lulus verifikasi ulang	V	V	V	V	V	V
		Perbub tentang kriteria dan tugas guru ngaji	V	V	V	V	V	V
		Menggunakan Kajian Implikasi program bantuan pemerintah terhadap peningkatan kompetensi guru ngaji di Kabupaten Jember (2014)	V	V	V	V	V	V
		Menyusun kerangka kebijakan sebagai pedoman dalam pentuan kriteria serta pelaksanaan pendataan sampai dengan tahapan realisasi pemberian asuransi untuk khotib dan guru ngaji dan honorarium untuk guru ngaji	V	V	V	V	V	V
		- Program verifikasi dan validasi data khatib - Perbub tentang kriteria dan tugas khatib - Target : Ketua ta'mir yang menjadi khatib	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatnya fungsi masjid sebagai pusat layanan publik dan informasi pembangunan;	- Setiap hari jumat terdapat layanan publik yang berlokasi minimal di salah satu masjid jamik setiap kecamatan/desa secara bergilir - Informasi pembangunan kabupaten - Data masjid jamik	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		- Kegiatannya pelayanan kesehatan mobile, Perpustakaan keliling, penerbitan dokumen kependudukan						
		- Rehabilitasi Sarana Prasarana Pondok Pesantren						
		- Pedoman Standarisasi	V	V	V	V	V	V
		- Pondok pesantren online						
		- Harus ada verifikasi ulang dan validasi data pondok pesantren						
		Menyediakan fasilitas informasi publik di tempat keagamaan lain	V	V	V	V	V	V
		- 1.240 Musholla (248 X1/tahun x 5)						
		- Diklasifikasikan Bedah Ringan atau Berat						
		- Pedoman Standarisasi fasilitas dengan MCK, air mengalir	V	V	V	V	V	V
		- Perencanaan dari arsitek dan konsultan yang bekerja sama dengan Pemkab Jember (Berbayar dan tidak berbayar)						
		- 496 Masjid (248 X 1/tahun X 5)						
		100 : 100 : 100 : 100 : 96						
		- 2 Masjid sebagai Pusat Informasi	V	V	V	V	V	V
		- Penyediaan 2 Ruang						
	3. Meningkatnya komunikasi intern dan antar-umat beragama.	- Pedoman Standarisasi						
		- Dilakukan pemetaan pengajuan usulan						
		Memberdayakan organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui forum kerukunan antar umat beragama	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
6. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	1. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban	V	V	V	V	V	V
		Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dengan melakukan pendekatan humanitas dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah	V	V	V	V	V	V
		Penguatan SDM linmas untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dengan melakukan Pendekatan humanis dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	V	V	V	V	V	V
	2. Pengurangan resiko bencana	Efisiensi dan Efektifitas penanganan korban dan kerugian akibat bencana	V	V	V	V	V	V
		Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan	V	V	V	V	V	V
		Melaksanakan upgrading (peningkatan kapasitas) berupa pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan antar stakeholder kebencanaan	V	V	V	V	V	V
		Kerjasama dengan kabupaten sekitar dalam penanggulangan bencana	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
7. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (<i>Local Wisdom</i>)	1. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial;	Pembinaan sanggar seni budaya tradisional	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi partisipasi komunitas dan organisasi seni budaya daerah	√	√	√	√	√	√
		Pemberian penghargaan pada tokoh seni dan budaya	√	√	√	√	√	√
		Penyediaan fasilitas rumah budaya	√	√	√	√	√	√
		Penyediaan fasilitas museum	√	√	√	√	√	√
		Taman publik dengan kegiatan seni dan budaya yang aktif	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi duta seni Kabupaten Jember keluar daerah	√	√	√	√	√	√
	2. Mewujudkan Jember sebagai Bumi Sholawat	Jumlah kegiatan akbar kemasyarakatan berbasis religi	√	√	√	√	√	√
		Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat			√	√	√	√
		Peningkatan advokasi, KIE tentang PPRG, Profil gender, data terpilah dan penguatan PPT/Pusat Pelayanan terpadu	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan keterampilan bagi mantan napi dan pengguna narkoba		√	√	√	√	√
		Pembentukan KLA	√	√	√	√	√	√
		Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan	√	√	√	√	√	√



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat			V	V	V	V
8. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan penghormatan HAM;	Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM).	Pelayanan dan advokasi hukum kepada masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah dan kasus hukum dengan memberikan pendampingan hukum secara gratis baik pada tingkat mediasi, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pokok perkara	V	V	V	V	V	V
		Penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah diarahkan pada produk-produk hukum daerah yang mendukung percepatan penyelesaian pemerintahan dan pembangunan	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pembentukan produk hukum yg partisipatif sehingga mempunyai impact yang positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan	V	V	V	V	V	V
		Pemetaan obyek dan sasaran penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum & pengetahuan hukum masyarakat melalui pembinaan yang intensif kepada Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) baik kuantitas maupun kualitas	V	V	V	V	V	V

Misi III : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan pendapatan para pedagang dan UMKM serta Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri;	1. Meningkatnya omset dan aset UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi serta Pengembangan Ekonomi Perdesaan (BUMDesa);	Melaksanakan mapping jumlah, jenis, dan profil koperasi dan UMKM beserta potensi dan permasalahannya sebagai Database	V	V	V	V	V	V
		Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha, bintek /pelatihan dan peralatan bagi koperasi dan UMKM	V	V	V	V	V	V
		Fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi dan UMKM melalui keikutsertaan pada berbagai pameran	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi penumbuhan wirausaha baru melalui inkubator bisnis, pelayanan Klinik UMKM dan mobil bisnis	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM dengan membentuk warung kopi dan warung rakyat berjejaring	V	V	V	V	V	V
		Melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap industri rumah tangga kecil dan menengah dan membentuk sentra industri serta pelayanan outlet sentra	V	V	V	V	V	V
		Pelayanan dana bergulir bagi koperasi dan UMKM melalui UPT	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi pelayanan PLUT-KUMKM bagi koperasi dan UMKM dan display produk hasil produksi sebagai sarana promosi	V	V	V	V	V	V
		Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan penilaian kesehatan koperasi	V	V	V	V	V	V
		Penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan melalui Pengembangan BUMDesa	V	V	V	V	V	V
	1. Mengembangkan warung berjejaring non waralaba untuk menumbuhkan kemandirian lokal);	Memperkuat Daya Saing dan kecintaan pada produk-produk lokal dalam menghadapi MEA	V	V	V	V	V	V
		Memperkuat Daya Saing dan kecintaan pada produk-produk lokal dalam menghadapi MEA	V	V	V	V	V	V
	2. Merevitalisasi pasar agar mempunyai daya saing yang lebih tinggi;	Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana	V	V	V	V	V	V
		Penyediaan lahan untuk penataan pedagang kaki lima	V	V	V	V	V	V
		Mencari dan meningkatkan sumber PAD	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pembangunan pasar desa dalam rangka mewujudkan kesempatan berusaha masyarakat dan kemandirian ekonomi desa	V	V	V	V	V	V
	3. Menata PKL dalam kawasan yang ramah pembeli	Menertibkan sekaligus menata PKL dengan mengedepankan humanitas	V	V	V	V	V	V
	4. Meningkatkan jumlah wirausaha baru (WUB) untuk mengembangkan potensi	Mendorong Tumbuhnya industri rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal	V	V	V	V	V	V
		Mendorong Tumbuhnya industri rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal	V	V	V	V	V	V
		Mendorong Tumbuhnya industri rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal	V	V	V	V	V	V
2. Mewujudkan kedaulatan pangan; Dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (tana manpangan, pe rkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan);	Meningkatkan surplus produksi padi dan jagung mencapai surplus kedelai serta peningkatan produksi komoditas lainnya	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan nilai produksi sub kategori peternakan dengan meningkatkan jumlah populasi dan produksi ternak		V	V	V	V	V
		Penggalian potensi sumberdaya perikanan dengan teknologi tepat guna		V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan surplus produksi perikanan serta meningkatkan produksi komoditas hasil perikanan lainnya		✓	✓	✓	✓	✓
		Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry		✓	✓	✓	✓	✓
		- Optimalisasi Penerapan Teknologi Peternakan - Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular dan Meningkatkan Pengawasan Kesmavet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		- Meningkatkan Kualitas Hasil Produk Peternakan - Menumbuhkembangkan Kelompok Peternak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggalan Potensi Sumberdaya Perikanan dengan Teknologi Tepat Guna	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan pengelolaan perkebunan dengan penerapan GAP dan GMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan Kualitas Hasil Produk Perikanan dan Kelautan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menumbuhkembangkan Kelompok Perikanan dan Kelautan		✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualitas produk pangan segar dan mengembangkan olahan produk tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Meningkatkan nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan);	Mengenalkan teknologi peternakan tepat guna kepada peternak sehingga usaha peternakan memiliki nilai tambah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		- Menumbuhkembangkan Kelompok Perikanan dan Kelautan						



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Penggalian Potensi Sumberdaya Perikanan dengan Teknologi Tepat Guna		V	V	V	V	V
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan		V	V	V	V	V
		Meningkatkan Kualitas Hasil Produk Perikanan dan Kelautan		V	V	V	V	V
		Menumbuhkembangkan Kelompok Perikanan dan Kelautan		V	V	V	V	V
	3. Meningkatkan akses petani, peternak dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan, sehingga memiliki daya saing tinggi;	Peningkatan jumlah kelompok tani dan nelayan yang menerima bantuan sarana prasarana, permodalan	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dengan cara meningkatkan peremajaan tanaman, diversifikasi komoditas perkebunan dan meningkatkan kapasitas kinerja petugas penyuluh lapangan dan aparat PD		V	V	V	V	V
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan	V	V	V	V	V	V
		Menumbuh kembangkan Kelompok Perikanan dan Kelautan	V	V	V	V	V	V
		Mengembangkan SDM petani dan kelembagaan petani	V	V	V	V	V	V
		Mengembangkan SDM nelayan dan kelembagaan nelayan	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat (<i>food availability</i>)	V	V	V	V	V	V
		Memberikan perlindungan terhadap usaha tani dari resiko kegagalan	V	V	V	V	V	V
	5. Meningkatnya	Meningkatnya akses pangan masyarakat	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	akses pangan (<i>food acces</i>).	Memperkuat ketahanan pangan melalui sistem residu pangan	V	V	V	V	V	V
	6. Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan (<i>food utility</i>)	Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan (<i>food utility</i>)	V	V	V	V	V	V
3. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau dalam rangka	Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi tembakau dan pengembangan kemitraan dalam pengelolaan komoditas tembakau	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis Antara Pekerja Dan Pengusaha	V	V	V	V	V	V
		Mendorong Industri Kecil dan Menengah Tembakau yang berijin untuk mematuhi ketentuan cukai rokok	V	V	V	V	V	V
4. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	1. Meningkatkan potensi sumberdaya laut	Penggalan Potensi Sumberdaya Perikanan dengan Teknologi Tepat Guna	V	V	V	V	V	V
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan Kualitas Hasil Produk Perikanan dan Kelautan	V	V	V	V	V	V
		Menumbuhkembangkan Kelompok Perikanan dan Kelautan	V	V	V	V	V	V
	2. Perlindungan bagi nelayan.	Pembuatan Kartu Nelayan	V	V	V	V	V	V
5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri. Dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri	V	V	V	V	V	V
		Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, keamanan berusaha serta mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan Jember Kota sebagai salah satu destinasi Wisata Utama di Jawa Timur	1. Meningkatnya kunjungan wisata;	Pengembangan destinasi wisata unggulan	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan promosi pariwisata melalui media online	V	V	V	V	V	V
		Program pemberdayaan kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis)	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata	V	V	V	V	V	V
		Kerjasama dengan kabupaten sekitar dalam promosi pariwisata	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatnya kualitas seni budaya lokal.	Peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya di daerah	V	V	V	V	V	V
		Melakukan pembinaan pada pelaku seni budaya	V	V	V	V	V	V
7. Meningkatkan kinerja pelayanan modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Meningkatnya jumlah ijin lokasi PMA, PMDN, dan investasi daerah	Percepatan penyelesaian ijin lokasi serta penertiban usaha-usaha yang belum berijin lokasi	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan sistem pelayanan administrasi, informasi, potensi dan peluang investasi						
		Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, keamanan berusaha serta transparansi dalam perijinan	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya	1. Meningkatkan kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan	Meningkatkan status kelas Bandar Udara Notohadji Negoro dari kelas IV menjadi kelas III Embarkasi haji antara dan bandar udara komersial	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan pelayanan dan jumlah angkutan masal	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan ketertiban lalu lintas dalam rangka keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan pelayanan dan jumlah angkutan umum.	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan jumlah desa yang mendapatkan pelayanan angkutan pedesaan	V	V	V	V	V	V
		Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPPJ) sampai menuju ke dusun-dusun	V	V	V	V	V	V
		Penyediaan dan peningkatan kapasitas ruas jalan kabupaten dan jembatan	V	V	V	V	V	V
		Kerjasama Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) dengan Kabupaten Sekitar	V	V	V	V		
		Perbaikan kondisi jaringan jalan ringan hingga dalam kondisi baik dan sedang	V	V	V	V	V	V
		Pemantauan terhadap aspek keselamatan seluruh ruas jalan yang di Kabupaten Jember	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Penyediaan data dan informasi untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja kelembagaan	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya	Melakukan konservasi wilayah sumber mata air.	V	V	V	V	V	V
		Melakukan pendataan bangunan dan jaringan irigasi secara berkala	V	V	V	V	V	V
		Mengoptimalkan fungsi lembaga pengelola irigasi	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih	V	V	V	V	V	V
	3. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di desa dan kelurahan dalam mewujudkan e-village	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan pelayanan publik tentang informasi melalui internet	V	V	V	V	V	V
	4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan	Peningkatan Rehabilitasi Rumah Kurang Layak Huni (PRKLH)	V	V	V	V	V	V
		Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan	V	V	V	V	V	V
		Mengurangi area banjir karena drainase buruk	V	V	V	V	V	V
		Mengurangi pencemaran limbah	V	V	V	V	V	V



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan	V	V	V	V	V	V
		Pembangunan dan peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan kumuh	V	V	V	V	V	V
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya	1. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi	Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan dengan prinsip manfaat dan berkelanjutan	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air dan udara, serta melakukan pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	V	V	V	V	V	V
		Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang lingkungan hidup		V	V	V	V	V
10. Meningkatkan penataan ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya	1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatnya fasilitas tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian	Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	V	V	V	V	V	V

1.4 Prioritas Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam tabel-tabel sebelumnya, dan dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Sasaran yang hendak dicapai, maka bidang-bidang prioritas di Kabupaten Jember pada tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1.4.1 Prioritas Utama

Prioritas utama merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati saat berkampanye di seluruh wilayah Kabupaten Jember, yang dirumuskan sebagai 22 Janji Kerja, yang disusun berdasarkan pada isu strategis, permasalahan dan serap aspirasi masyarakat. Prioritas utama tersebut diantaranya :

Jember Maju Iptek dan Imtak

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK.
2. Memberikan 5.000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi.
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik.
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD.
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia.
6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji.

Jember Mandiri

7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi.
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.



9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan Koperasi.
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian.
11. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau.
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan.

Jember Sehat

13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Duafa.
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, yaitu Puskesmas, dengan :
 - Menyediakan 3 dokter di setiap Puskesmas
 - Ambulans di setiap Desa

Jember Kuat dan Bersih

15. Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja.
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS.
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW.

Jember Kota Wisata Berbudaya

19. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama.
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial.
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik.
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga kebutuhan khusus, ramah Ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

1.4.2 Prioritas Lainnya

Adapun prioritas lainnya di Kabupaten Jember, dengan tetap memperhatikan prioritas utama antara lain sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember yang sedikit lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur tetapi terjadi kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada wilayah Ibu Kota Kabupaten
- b. Peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, termasuk juga bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus;
- c. Peningkatan kualitas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin (kaum duafa);
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pemerintahan;
- e. Peningkatan pendapatan masyarakat diarahkan agar masyarakat yang berpendapatan rendah bisa meningkat penghasilannya sesuai dengan status pekerjaan dan usahanya;
- f. Penguatan Daya saing Koperasi Usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi lokal



- sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja;
- g. Peningkatan kualitas dan daya saing calon tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru dan masuk kerja formal serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang produktif dan kondusif;
 - h. Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses pariwisata secara terpadu meliputi wisata alam, buatan, religi dan kebudayaan sehingga memperbanyak kunjungan dan lama kunjungan wisata;
 - i. Mendorong penetapan Kabupaten Jember sebagai lokasi sasaran Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang Kepariwisata;
 - j. Pembangunan Infrastruktur fisik dan pranata sosial dalam rangka mewujudkan lingkungan yang layak huni dan nyaman bagi warga kota;
 - k. Peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat sebagai dasar pembangunan moral dan spiritual individu, serta menjamin terjadinya harmonisasi kehidupan antar umat beragama;
 - l. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - m. Pengelolaan agroindustri harus menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam upaya membangun dan mengembangkan kawasan agroindustri;
 - n. Perdagangan menjadi salah satu fokus perhatian yang tidak kalah pentingnya. Perdagangan yang terdapat di Kabupaten Jember mampu ditingkatkan daripada saat ini ketika sarana, prasarana serta fasilitasi dukungan pemerintah tersedia;
 - o. Luas RTH Kabupaten Jember masih belum memenuhi 20% untuk RTH publik;
 - p. Infrastruktur
 - Perlunya peningkatan dan penambahan panjang jalan antardesa dankecamatan;
 - Percepatan pengembangan Bandara Notohadinegoro dengan akses jalannya;



- Pembangunan terminal kargo;
- Mendukung percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jember;
- Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Jember;
- Pembangunan waduk/bendungan dan embung;
- Perbaikan total sanitasi perkotaan dan lingkungan kampus;
- Pengembangan sanitasi komunal di lingkungan perumahan;
- Penyediaan air minum sehat untuk umum di fasilitas-fasilitas umum;
- Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terintegrasi;
- Penghijauan DAS untuk menahan erosi dan meningkatkan debit sumber air
- Belum optimalnya kerjasama dengan Kabupaten perbatasan dalam hal pembangunan infrastruktur, penanganan bencana alam dan pengembangan wisata

q. Pengangguran

Isu strategis terkait pengangguran di Jember masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Di antaranya, upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skill/keahlian tenaga kerja yang masih minim.

Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang moderen dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- industri yang bertumpu pada sumber daya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah lebih;
- industri padat karya;



- industri padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki eraperkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

Selain itu, sekitar 45,34 persen dari penduduk berumur 15 tahun ke atas Kabupaten Jember bekerja di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dibandingkan sektorekonomi lainnya. Untuk mengurangi kemiskinan di Jember, pemerintah kabupaten butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Strategi pengembangan industri berbasis agrobisnis dan agroindustri juga dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha nontani, seperti industri perdesaan skala kecil.

r. Energi dan Lingkungan Hidup

Menurut Karakteristik, Persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan non listrik di Kabupaten Jember mencapai 0,95% sedangkan rumah tangga yang menggunakan penerangan Listrik PLN sejumlah 99,05%. Perkembangan Pelanggan dan KWh terjual Listrik PLN Menurut Tarif dan Penggunaan di Kabupaten Jember Tahun 2017-2018 adalah sebesar 640.687 pelanggan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup, maka kebutuhan energi juga akan meningkat. Kontribusi pertambangan sebesar 5,29 persen terhadap total PDRB Jember. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa izin atau belum sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pada masa mendatang, perlu diupayakan penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Jember.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas



manusia dan dampak perubahan iklim Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air,kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan.Sumber mata air yang mengalir ke Sungai Bedadung ataupun Sungai Sampeyan dan Mayang, pada umumnya sudah mengalami penurunan jumlah. Hal ini menggambarkan kerusakan vegetasi dan lingkungan hidup di daerah DAS sungai, yang padaumumnya berada di lereng Gunung Argopuro.

Di samping jumlahnya, kualitas air juga mengalami penurunan cukup signifikan,baik karena tinggnya kadar walet maupun bahan organik perkotaan/rumah tangga dan industri.

s. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Jember pada tahun 2019 capaian pembangunan manusia yang diukur dengan Ineks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 66,69. Kondisi IPM ini menunjukkan adanya peningkatan lebih baik. Dilihat dari angka harapan hidup juga semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuat angka IPM Kabupaten Jember semakin meningkat atau membaik.

Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septic tank. Artinya, banyak penduduk, yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikansecara serius akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup, yang akhirnyaberdampak pada nilai IPM.

Kenaikan IPM setiap tahun dikarenakan adanya berbagai program, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi dan peningkatan kualitassarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung padapola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana.



t. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jember memiliki luasan lahan sawah sebesar 86.069 Ha yang terdiri dari 85.231 Ha merupakan sawah irigasi dan sisanya 838 Ha merupakan sawah tadah hujan. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk produksi tanaman pangan diantaranya padi sebesar 1.006.042 Ton. Meskipun demikian, secara umum Jember sudah mampu mewujudkan sebagai daerah berswasembada pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat sesuai sumber daya dan budaya dengan metode ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil serta rakyat miskin rawan pangan.

Adapun beberapa isu strategis pada sektor pertanian di Jember adalah:

1. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
2. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
3. Kelembagaan petani memerlukan penanganan khusus untuk dikembangkan dan diperkuat;
4. Lemahnya akses petani terhadap permodalan dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan pendukung pengembangan sistem agribisnis);
5. Ketahanan pangan;
 - a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi;
 - b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman;



- c. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.

u. Kemiskinan

Program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jember dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya.

Program-program mengentas kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara, yaitu

- (i) Mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya: biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya
- (ii) Meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jember yang terus menunjukkan perbaikan, meskipun tidak terlalu signifikan. Untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember maka program dan strategi pembangunan berikut pembiayaannya dapat disinergikan melalui program pemerintah pusat, provinsi, daerah dan multi pihak (swasta, masyarakat, NGO) yang tersinergikan dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jember, salah satunya melalui pemanfaatan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

1.5 Gambaran Umum Daerah

1.5.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Jember berada pada posisi $7^{\circ}58'06''$ sampai $8^{\circ}33'44''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}15'47''$ sampai $114^{\circ}02'35''$ Bujur Timur berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan. Letaknya kurang lebih 200 km ke arah tenggara ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Tabel 1.2

Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama

No.	Nama Pulau	Perkiraan Luas (Ha)	Beberapa Penggunaan Tanah Utama	Fungsi Kawasan	Keberadaan Tempat Penting
1	Nusa Barong	7.482,00	Hutan	Suaka Alam	-
2	Gilen	6,25	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
3	Leande/ Bt. Mandi	1,87	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
4	Endokdokan	3,75	Semak Belukar / Rumput	-	-
5	Watuajir	0,89	Batu karang / Rumput	-	-
6	Matikan	7,50	Semak Belukar / Rumput	-	-
7	Sraja	16,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
8	Meran	6,78	Semak Belukar / Rumput	-	-
9	Moestaka	29,89	Semak Belukar / Rumput	-	-
10	Loe Toeng	42,26	Semak Belukar / Rumput	-	-
11	Karang Bolong	28,98	Semak Belukar / Rumput	-	-
12	Watoepager	1,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
13	Pisang	3,91	Semak Belukar / Rumput	-	-
14	Bandalit	33,94	Semak Belukar / Rumput	-	-
15	Singa	11,24	Semak Belukar / Rumput	-	-
16	Merue	8,75	Semak Belukar / Rumput	-	-

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)



Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km², dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km². Secara garis besar bagian timur Kabupaten Jember merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Bagian barat laut terdapat Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088m). Bagian selatan wilayah adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong, pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Terdapat sekitar 67 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama.

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian daerah perkotaan Jember lebih kurang 87 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 26 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 501 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut, 6,85% pada ketinggian 1.001 m sampai dengan 2.500 m dan 0,95% pada ketinggian lebih dari 2.500 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.



Tabel 1.3
Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember

No.	Ketinggian	Luas	
		Km ²	%
1	0 – 25 meter	591,2	17,95
2	26 – 100 meter	681,68	20,70
3	101 – 500 meter	1243,08	37,75
4	501 – 1000 meter	520,43	15,80
5	1001 – 2500 meter	225,62	6,85
6	> 2.500 meter	31,33	0,95
	Jumlah	3293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 (data diolah))

Tabel 1.4
Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat

No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)						Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-25	25-100	100-500	500-1000	1000-2005	>2005	
1	Kencong	65,92	-	-	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,47	1,16	0,34	0,01	-	-	82,98
3	Puger	81,8	45,7	21,49	-	-	-	148,99
4	Wuluhan	87,18	25	25	-	-	-	137,18
5	Ambulu	56,51	38,28	9,77	-	-	-	104,56
6	Tempurejo	17,97	178,12	240,48	85,94	1,95	-	524,46
7	Silo	-	0,39	167,79	137,87	3,93	-	309,98
8	Mayang	-	1,76	60,07	1,95	-	-	63,78
9	Mumbulsari	-	35,94	52,94	6,25	-	-	95,13
10	Jenggawah	-	50,7	0,3	0,02	-	-	51,02
11	Ajung	-	56,61	-	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	-	52,8	-	-	-	-	52,8
13	Balung	25,84	17,97	3,31	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	64,46	6,05	-	-	-	-	70,51
15	Semboro	17,93	19,6	7,9	-	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	24,1	31,64	75,67	15,55	19,42	-	166,38
18	Tanggul	7,08	40,54	64,88	42,19	45,16	0,14	199,99
19	Bangsalsari	6,64	52,15	61,8	17,97	27,34	9,38	175,28
20	Panti	-	7,81	50,78	28,12	61,02	12,98	160,71
21	Sukorambi	-	11,72	24,17	19,27	5,47	-	60,63
22	Arjasa	-	-	33,53	9,67	0,55	-	43,75
23	Pakusari	-	-	29,11	-	-	-	29,11
24	Kalisat	-	-	53,48	-	-	-	53,48
25	Ledokombo	-	-	72,06	44,55	25	5,31	146,92

No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)						Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-25	25-100	100-500	500-1000	1000-2005	>2005	
26	Sumberjambe	-	-	49,96	62,11	23,05	3,12	138,24
27	Sukowono	-	-	44,04	-	-	-	44,04
28	Jelbuk	-	-	32,64	19,29	12,73	0,4	65,06
29	Kaliwates	-	3,69	17,34	3,91	-	-	24,94
30	Sumbersari	-	0,36	11,72	24,97	-	-	37,05
31	Patrang	-	3,69	32,51	0,79	-	-	36,99
	Jumlah	591,20	681,68	1243,08	520,43	225,62	31,33	3293,34

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jember memiliki ketinggian yang bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jember berada pada area dataran rendah, sehingga Kabupaten Jember sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan pengembangan ekonomi lainnya.

Tabel 1.5
Kemiringan Lahan Kabupaten Jember

No.	Kelas Lereng	Luas	
		Km ²	%
1	Datar (0 – 2°)	1205,47	36,60
2	Landai (2 – 15°)	673,76	20,46
3	Agak curam (15 – 40°)	384,04	11,66
4	Sangat Curam (> 40°)	1030,07	31,28
	Jumlah	3293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 (data diolah))

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2°, sehingga daerah ini baik untuk kawasan kegiatan pertanian tanaman semusim. Untuk wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40° menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15° menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40° menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air.

Tabel 1.6
Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng

No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah Luas
		0-2°	2°-15°	15°- 40°	Di atas 40°	Wilayah (km ²)
1	Kencong	65,92	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,56	-	0,75	0,67	82,98
3	Puger	68,6	0,94	24,12	55,34	149
4	Wuluhan	92,23	2,01	4,95	38	137,19
5	Ambulu	82,55	2,09	8,34	11,58	104,56
6	Tempurejo	84,63	33,22	41,13	365,48	524,46
7	Silo	-	89,06	76,81	144,12	309,99
8	Mayang	23,77	15,12	18,71	6,19	63,79
9	Mumbulsari	58,37	15,05	21,71	-	95,13
10	Jenggawah	48,55	2,01	-	0,46	51,02
11	Ajung	56,61	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	51,58	1,22	-	-	52,8
13	Balung	47,12	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	70,52	-	-	-	70,52
15	Semboro	43,71	1,72	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	38,44	54,83	37,97	35,13	166,37
18	Tanggul	27,81	45,81	44,24	82,14	200
19	Bangsalsari	54,76	59,62	14,24	46,66	175,28
20	Panti	12,44	36,28	14,83	97,16	160,71
21	Sukorambi	12,94	24,29	2,97	20,43	60,63
22	Arjasa	5,63	13,03	6,98	18,11	43,75
23	Pakusari	26,84	2,27	-	-	29,11
24	Kalisat	8,31	45,03	0,15	-	53,49
25	Ledokombo	3,03	69,75	33,22	40,92	146,92
26	Sumberjambe	10,43	73,5	18,38	35,94	138,25
27	Sukowono	8,98	34,91	0,15	-	44,04
28	Jelbuk	1,02	24,61	9,32	30,11	65,06
29	Kaliwates	22,76	2,18	-	-	24,94
30	Sumbersari	37,05	-	-	-	37,05
31	Patrang	5,03	25,25	5,08	1,64	37
Jumlah		1.205,49	673,80	384,05	1.030,08	3.293,42

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang yang akan ditetapkan, baik dipandang dari segi potensi, kendala lingkungan, maupun dari segi dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahannya. Di samping itu topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah penempatan aktivitas yang akan dikembangkan pada suatu daerah.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Jember stratigrafi batuan penyusun wilayah Kabupaten Jember terdiri atas :

a. *Formasi Merubetiri (Tomm)*

Terdiri dari perselingan breksi gunungapi, lava dan tuf. Di bagian atas formasi ini terdapat Anggota Batugamping terdiri dari batugamping bersisipan batugamping tufan dan batunapal. Satuan ini diduga berumur Oligosen Akhir – Awal Miosen Tengah. Formasi Merubetiri menjemari dengan Formasi Sukamade dan Formasi Batuampar.

b. *Anggota Batugamping Formasi Merubetiri*

Terdiri dari batugamping bersisipan batugamping tufan dan napal, umumnya berlapis baik, berwarna abu-abu dengan tebal lapisan 7 – 100 cm. Napal mengandung foraminifera besar.

c. *Formasi Sukamade (Toms)*

Terdiri dari batulempung bersisipan batulanau dan batupasir. Umumnya berwarna abu-abu kehijauan sangat keras dan berlapis baik. Tebal lapisan rata-rata 30 cm, struktur sedimen yang banyak ditemukan adalah perarian sejajar, perarian silang siur, perarian konvolut, lapisan bersusun, setempat-tempat pejal. Batuan klastika halusanya banyak mengandung foraminifera. Formasi ini diendapkan dalam lingkungan laut terbuka pada lereng bawah laut dan menjemari dengan batuan gunungapi Formasi Merubetiri. Formasi ini diduga berumur Oligosen Akhir – Awal Miosen Tengah.

d. *Formasi Batuampar (Tomb)*

Terdiri dari perselingan batupasir dan batulempung bersisipan tuf, breksi dan konglomerat, umumnya berlapis baik. Batupasir berwarna abu-abu kehijauan, berukuran halus sampai kasar, berstruktur lapisan bersusun. Batulempung berarian sejajar, pejal, berwarna abu-abu, padu dan keras. Tuf berwarna abu-abu, berputir pasir halus sampai kasar, padu dan tebal lapisan tidak lebih dari 25 cm. Breksi berukuran seragam, pejal, kemas terbuka dan bermassa dasar tuf pasiran. Konglomerat tersusun oleh kerakal andesit, batupasir, batulempung dan batugamping, terpilah baik, berstruktur silang siur, tebal 10 – 50 cm, dengan massa dasar pasir halus. Formasi ini diendapkan pada laut dangkal terbuka dan menjemari dengan Formasi Merubetiri.

e. *Batuan Terobosan (Tmig, Tmid, Tmida)*

Tubuh batuan terobosan terdiri dari granodiorit, tonalit, diorit dan dasit. Granodiorit (*Tmig*) berwarna abu-abu muda sampai putih, menghablur penuh. Mineral utamanya berupa kuarsa, plagioklas, ortoklas, biotit, hornblende dan sedikit piroksen dengan mineral ikutan apatit, zirkon dan titanit (*oksida Fe-Ti*). Tonalit berwarna kelabu kehijauan, berhablur penuh, berkomposisi kuarsa, felspar, mika dan mineral bijih. Mineral bijihnya tersebar pada urat kuarsanya. Diorit (*Tmid*) berwarna abu-abu dan berhablur penuh. Dasit (*Tmida*) berwarna putih, berhablur hipokristalin dan porfiritik, tersusun oleh mineral plagioklas, kuarsa, biotit, mineral bijih dan kaca.

f. *Formasi Puger (Tmp)*

Berupa batu gamping terumbu bersisipan breksi batu gamping dan batugamping tufan. Batugamping terumbu berwarna putih keruh dan merah muda, terdiri dari gamping, kerakal gampingan dan koral. Breksi batugamping dan batugamping tufan berwarna abu-abu, padu, berlapis baik, tebalnya 40 cm.

g. *Formasi Mandiku (Tmm)*

Terdiri dari breksi gunungapi dan tuf breksi, berkomponen andesit dan basal bersisipan tuf. Breksi gunungapi berwarna abu-abu, padat, komponennya meruncing berukuran seragam (20 cm), terpilah baik, bermassa dasar tuf halus. Tuf breksi bersisipan tuf sela, tuf abu dan tuf kaca, komponennya agak meruncing, berbutir lapili kasar dan tersebar tak merata. Formasi ini menindih tak selaras dengan Formasi Batuampar dan tertindih tak selaras oleh Tuf Argopuro. Umurnya diperkirakan akhir Miosen.

h. *Tuf Argopuro (Qvat)*

Terdiri dari tuf, tuf sela, tuf abu dan tuf kaca. Tuf merupakan bagian utama satuan ini terdiri dari tuf sela, tuf abu dan tuf kaca. Tuf sela terdiri dari pecahan batuan bersusunan andesit piroksen dengan tekstur porfiritik. Fenokrisnya plagioklas yang mengapung dalam massa dasar mikrolit dalam massa dasar mikrolit plagioklas dan kaca. Tuf abu tersusun oleh mikrolit plagioklas dan sejumlah mineral hitam. Tuf kaca tersusun sebagian besar oleh kaca gunung api. Satuan ini menindih tidak selaras Formasi Mandiku dan tertindih selaras oleh batuan gunungapi Kuartar.

i. *Breksi Argopuro (Qvab)*

Terdiri dari breksi gunungapi bersusunan andesit dan bersisipan lava. Breksi andesit berwarna abu-abu dengan massa dasar tuf. Sisipan lava terdapat setempat, bersusunan andesit. Satuan ini merupakan hasil kegiatan G. Argopuro yang terakhir. Batuannya sudah sangat lapuk sehingga membentuk tanah laterit yang cukup tebal berwarna merah bata.

j. *Formasi Bagor (Qvb)*

Terdiri dari breksi/konglomerat, batupasir tufan dan batupasir. Breksi/konglomerat berkomponen aneka bahan, berbutir pasir kasar-kerakal, menyudut-membundar, tuf, batuapung, obsidian, pasir gunungapi dan kaca gunungapi, pilahannya buruk, menunjukkan kemas terbuka dan tidak tebal. Batupasir tufan berwarna kelabu coklat, halus-

kasar, tersusun oleh pecahan batuan, tuf dan obsidian, mudah hancur. Batupasir berwarna kelabu berbutir menengah-kasar, tersusun oleh pecahan batuan, obsidian dan kaca gunungapi, repui dan hadir sebagai sisipan, berstruktur silang siur, perarian dan lapisan bersusun.

k. *Batuan Gunungapi Raung (Qhvr)*

Terdiri dari lava breksi gunungapi, breksi lahar dan tuf. Breksi berwarna abu-abu, terpilah buruk dengan komponen yang meruncing, berukuran lapili sampai bongkah. Di beberapa tempat terdapat lapisan bersusun. Pada breksi lahar komponennya lebih membundar dengan massa dasar lempung lumpuran. Lava berwarna abu-abu, sarang (porous) dan masih segar. Di beberapa tempat lava ini menyusup di antara tuf dan breksi. Tuf terdiri dari tuf breksi, tuf sela dan tuf.

l. *Gumuk Gunungapi (Qvs)*

Terdiri dari sisa-sisa lava, breksi, tuf sela dan tuf abu. Batuan umumnya bersusunan andesit dan basal, membentuk bukit-bukit kecil dan rendah.

m. *Endapan Kipas Argopuro (Qan)*

Merupakan endapan kipas hasil rombakan dari batuan gunungapi Argopuro komponennya berukuran bongkah, kerakal dan kerikil.

n. *Aluvium (Qa)*

Terdiri dari kerakal, kerikil, pasir dan lumpur yang terutama terlampar di daerah dataran banjir. Tebalnya tidak lebih dari 3 m. Penyebaran endapan permukaan ini mendominasi daerah pantai dan sungai terdiri dari lempung, lumpur, pasir kerikil dan kerakal. Khususnya endapan pantai terdiri dari pasir lempungan dan pasir yang mengandung magnetit (pasir besi)

Secara fisiografi, Lembar Jember dapat dibagi atas : bagian selatan termasuk Lajur Pegunungan Selatan, bagian tengah Lajur Depresi Tengah dan bagian utara Lajur Gunungapi Kuarter. Secara morfologi daerah ini dapat dibagi atas lima satuan yaitu : kerucut gunungapi, pegunungan, perbukitan, gumuk gunungapi dan pedataran.



Kerucut gunungapi dengan ketinggian antara 1.400 dan 2.280 m di atas permukaan laut, dicirikan oleh beberapa bentuk kerucut gunung api, kaldera dan barangko (*barranco*) yang terbuka ke arah selatan (G..Pinggang, 2.286 m). Beberapa puncaknya yaitu : G. Kukusan (2.223 m), G. Putri (2.186 m), G. Cemarakandang (1.252 m), G. Ladingan (1.892 m) dan G. Krong (761 m) di barat laut Lembar, dan G. Malang (641 m) di timur laut.

Pegunungan menempati bagian selatan dan sudut tenggara dan dikenal sebagai Pegunungan Merubetiri. Puncaknya, yaitu G. Betiri (1.223.m), G. Mandilis (843 m), G. Sanen (403 m) dan G. Sumbadadung (520 m).

Pebukitan terdapat di bagian selatan dan timur G. Argopuro, dengan ketinggian yang melandai dari 50 sampai 500 m di atas permukaan laut.

Gumuk gunung api berupa bukit kecil dan rendah yang terletak pada ketinggian dari 300 sampai 742 m di atas muka air laut. Tinggi bukitnya antara 20 dan 450 m dari permukaan pedataran. Satuan ini tersebar di kaki barat G. Raung dan dikenal sebagai "Bukit Sepuluh Ribu".

Pedataran melampar di sudut barat daya, membentang dengan arah barat daya – timur laut di sepanjang aliran S. Mayang yang merupakan sungai terbesar di daerah ini. Ketinggiannya antara 0 dan 50 m di atas permukaan laut.

Dataran wilayah Kabupaten Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm.

Tekstur tanah didominasi oleh tekstur sedang (lempung), meliputi 79,32% dari luas daerah. Kecamatan yang memiliki tekstur sedang terluas adalah Kecamatan Tempurejo sedangkan yang memiliki area tersempit adalah Kecamatan Gumukmas. Untuk tanah yang bertekstur halus sebesar 19,50% dari luas wilayah yang mayoritas terdapat di Kecamatan Puger. Adapun untuk tanah yang bertekstur kasar sebesar 1,18% dari luas wilayah banyak terdapat di Kecamatan Sumberjambe.

Kabupaten Jember mempunyai jenis tanah yang sangat bervariasi. Ada 16 jenis tanah di Kabupaten Jember yang terdistribusi secara menyebar, yaitu :

1. Asosiasi andosol coklat kekuningan dan regosol coklat kekuningan.
 - Komplek mediteran merah dan litosol.
 - Alluvial coklat kekelabuan.
 - Alluvial hidromort.
 - Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan.
2. Asosiasi gley humus rendah dan alluvial kelabu.
 - Regosol kelabu.
 - Komplek regosol kelabu dan litosol.
 - Regosol coklat kekelabuan.
 - Regosol coklat, bahan induk endapan pasir.
 - Regosol coklat.
 - Komplek regosol dan litosol.
 - Komplek latosol kemerahan dan litosol.
 - Latosol coklat kemerahan.
3. Asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu.
 - Komplek latosol coklat kekuningan dan litosol.

Tingkat erosi di Kabupaten Jember cukup rendah. Sekitar 94,12% merupakan daerah bebas erosi dengan jenis tanah alluvial, gley, regosol, andosol, mediteran, dan latosol. Ditinjau dari segi drainase, 99,60% dari wilayah Kabupaten Jember merupakan daerah bebas genangan. 0,39% merupakan daerah tergenang periodik, dan hanya 0,01% merupakan daerah tergenang rawa.

Secara keseluruhan sungai-sungai di wilayah Jember mengalir ke selatan dan umumnya berasal dari G. Argopuro, G. Raung dan Pegunungan Meru Betiri. Pola aliran sungainya, mendaun sejajar dan memancar, dengan sifat perenial hingga epimeral atau periodik.

Kabupaten Jember mempunyai banyak sungai/kali yang bermanfaat untuk pertanian. Beberapa sungai yang cukup besar adalah :



1. Kali Bedadung, merupakan sungai yang membelah Kabupaten Jember di tengah-tengah. Hulu sungai berasal dari pegunungan Hyang yang banyak terdapat mata air.
2. Kali Mayang, merupakan sungai yang bermata air dan hulu sungai berasal dari Pegunungan Raung yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.
3. Kali Sanen, merupakan sungai yang bermata air dan hulu sungai berasal dari Pegunungan Raung. Kali Sanen bertemu dengan Kali Mayang di Desa Sumberrejo dan bermuara di Samudera Indonesia.
4. Kali Jatiroto, merupakan perbatasan dengan Kabupaten Lumajang yang bermata air dan hulu sungai dari Pegunungan Hyang, bermuara di Samudera Indonesia.

Ditinjau dari sudut geografisnya wilayah Kabupaten Jember seluas 3.293,34 Km² (329.334Ha) terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan rincian sebagai berikut :

Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas : (1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur; (2) Kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember (100 m), sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air; (3) Kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang; (4) Kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa; (5) Kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo, Tempurejo dan Mumbulsari.

Tabel 1.7
Penggunaan Lahan Kabupaten Jember

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Hutan	121.039,61	36,75
2	Perkampungan	31.877,00	9,68
3	Sawah	86.568,18	26,29
4	Tegal	43.522,84	13,22
5	Perkebunan	34.590,46	10,50
6	Tambak	368,66	0,11
7	Rawa	35,62	0,01
8	Semak/padang rumput	289,06	0,09
9	Tanah rusak/tandus	1.469,26	0,45
10	Lain-lain	9.574,26	2,91
Jumlah		329.334,00	100,00

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Jember Tahun 2016 – 2021

Kawasan budidaya terdiri dari : (1) Pertanian Tanaman Pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota; (2) Perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditi kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditi tembakau, tebu dan kelapa; (3) Perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong; perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari; (4) Pertambangan/Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Summersari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji; (5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi; (6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Summersari dan Arjasa; (7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan.



Kondisi lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Jember sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini sangat sesuai mengingat mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Jember adalah di sektor pertanian.

Kawasan hutan produksi yang ada di Kabupaten Jember adalah berupa hutan kayu dan hutan non kayu. Persebaran kawasan hutan produksi ini berada di kawasan perbatasan Kabupaten Jember dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Misalnya, pada sebelah utara Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebelah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, kawasan hutan produksi juga banyak ditemui di bagian selatan Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Untuk kawasan industri, di Kabupaten Jember mayoritas berupa industri pengolahan hasil pertanian dan pergudangan yang mengolah tembakau. Persebaran lokasi industri ini berada di wilayah bagian barat dan timur Kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Bangsalsari, Rambipuji, Balung, Jenggawah, Arjasa, Pakusari, Kalisat, dan Sukowono.

Untuk kawasan permukiman, persebarannya merata di Kabupaten Jember dengan kepadatan rendah – sedang. Sedangkan untuk kawasan permukiman di wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari memiliki kepadatan sedang – tinggi.

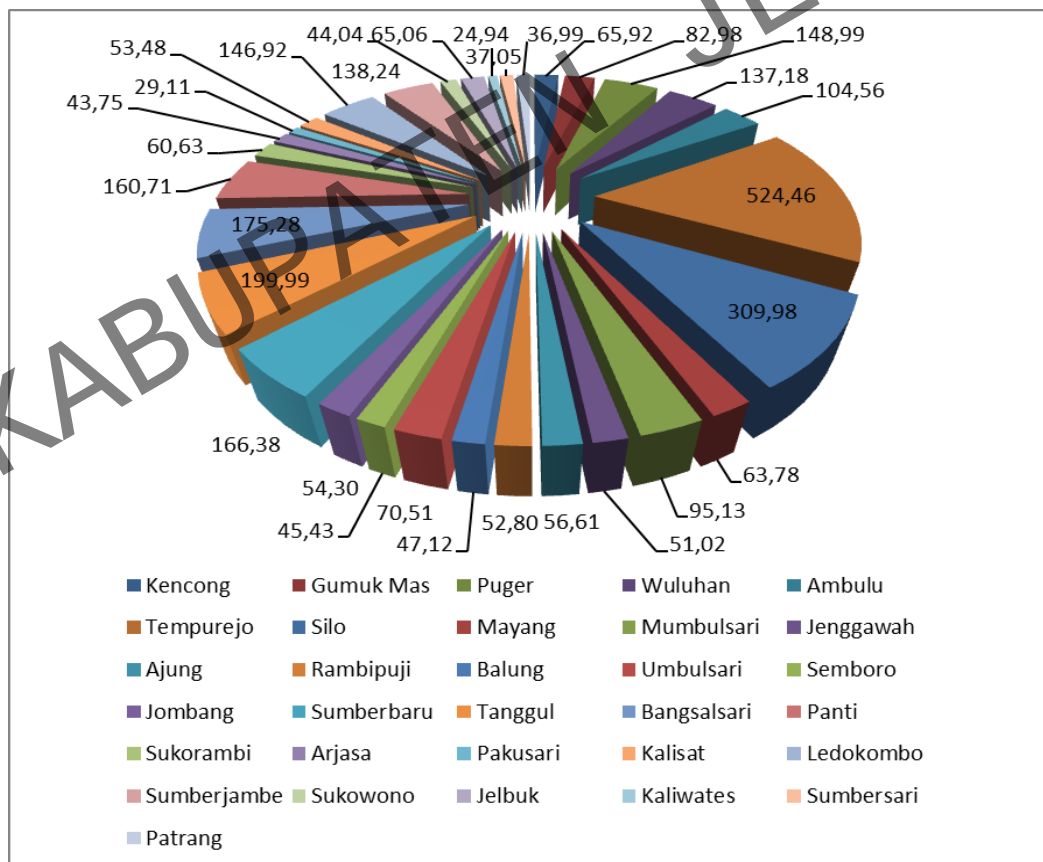
Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 972 dusun/lingkungan, 4.146 RW dan 14.215 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 536,91 Km² atau 16,24% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 25,61 Km² atau 0,77%. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember sebagai berikut.

Tabel 1.8
Statistik Pemerintahan Kabupaten Jember

Wilayah Administratif	2017	2018	2019
Kecamatan	31	31	31
Desa	226	226	226
Kelurahan	22	22	22
Dusun/Lingkungan	972	972	972
RW	4.146	4.146	4.146
RT	14.215	14.215	14.215
Jumlah PNS	14.291	13.190	13.111
Laki-laki	7.571	6.901	6.725
Perempuan	6.720	6.289	6.386

Sumber : BPS Kab. Jember (Statistik Daerah Kabupaten Jember 2020)

Gambar 1.1
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 (data diolah))

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dalam melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

Adapun kawasan rawan bencana tersebut terdiri dari :

1. Kawasan rawan bencana tanah longsor, yaitu kawasan yang memiliki Patahan atau sesar (atau istilah geologi-nya "*fault*") pada lapisan batuan bumi yang memungkinkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lainnya. Wilayah rawan bencana terutama rawan gempa, gerakan tanah dan tanah longsor, banjir lumpur, erosi, dan wilayah aliran lahar gunung berapi terutama yang mempunyai tekstur tanah halus dan ketebalan soil melebihi 90 cm. Kawasan ini meliputi Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Sukorambi, Bangsalsari, Tanggul, Sukowono, Sumberjambe, Silo, Tempurejo, Sumberbaru, Panti, Rambipuji, Mumbulsari, Ledokombo, Patrang dan Mayang.
2. Kawasan rawan angin kencang dan putting beliung meliputi seluruh Kecamatan di kabupaten Jember.
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Panti, Tempurejo, Kencong, Rambipuji, Jenggawah dan Silo.
4. Kawasan rawan tsunami meliputi Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu dan Tempurejo.
5. Kawasan letusan gunung berapi meliputi Kecamatan Sukowono, Ledokombo, Sumberambe, Silo, Kalisat, Mayang, Jelbuk, Arjasa, Patrang, Sukorambi, Tanggul dan Sumberbaru
6. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh Kecamatan.
7. Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi Kecamatan Patrang, Jelbuk, Arjasa, Bangsalsari, Tanggul, Sumberbaru, Panti, Summersari, Tempurejo, Pakusari dan Silo.



Akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam ini sangat merugikan serta penderitaan bagi manusia karena dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk terus menjalankan estafet pembangunan, menanamkan investasi yang lebih besar, menciptakan kegiatan baru maupun melaksanakan upaya pengembangan gagasan bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Arahan pengembangan yang dilakukan pada kawasan rawan bencana adalah dengan menciptakan kesempatan yang sama bagi penduduk untuk dapat merasa aman di daerah tempat tinggalnya. Pengembangan ini berarti memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menangani masalah bencana di daerahnya.

1.5.2 Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data “Kabupaten Jember Dalam Angka 2021” yang dirilis BPS Kab. Jember, proyeksi penduduk Kabupaten Jember pada Tahun 2020 mencapai 2.536.729 jiwa yang terdiri atas 1.264.968 jiwa penduduk laki-laki dan 1.271.761 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jember pada Tahun 2020 mencapai 770,26 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kaliwates dengan kepadatan sebesar 5046,31 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Tempurejo sebesar 150,49 jiwa/Km².

Pada Tahun 2020 proyeksi Penduduk Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 3,51% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 5% dan penduduk perempuan sebesar 2,07%. Sedangkan angka rasio jenis kelamin Tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,46.

Tabel 1.9

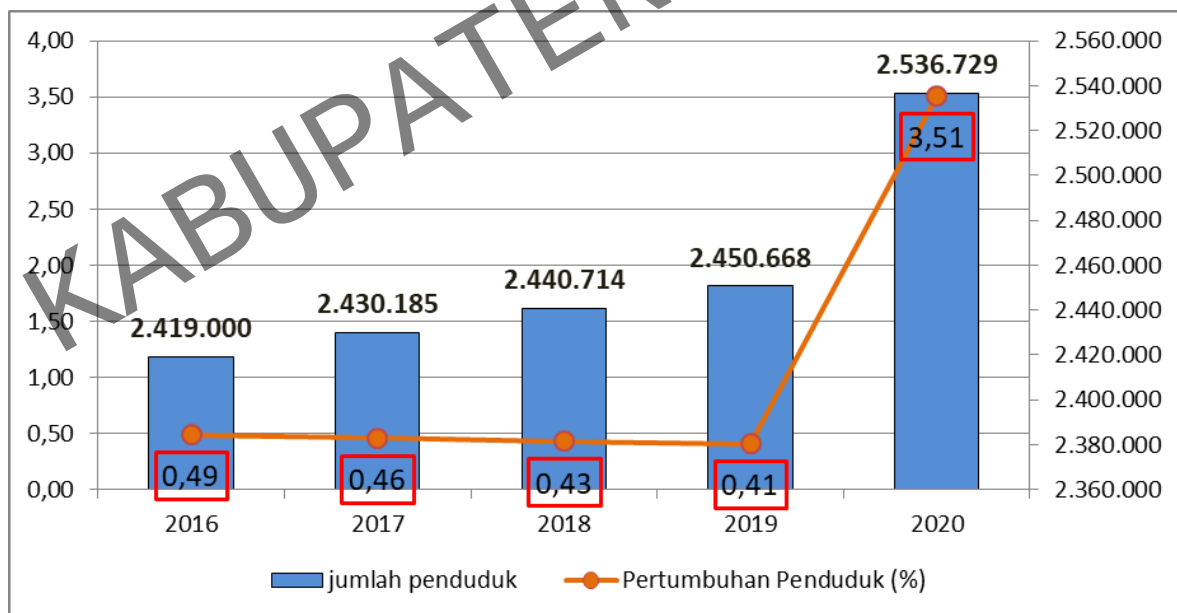
Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.419.000	2.430.185	2.440.714	2.450.668	2.536.729
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,49	0,46	0,43	0,41	3,51
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	734,51	737,91	741,11	744,13	770,26
Sex Ratio (L/P) (%)	96,64	96,67	96,69	96,68	99,46
% Penduduk Menurut Kelompok Umur					
0 – 14 tahun (%)	23,64	29,14	23,06	22,78	20,86
15 – 64 tahun (%)	68,61	62,16	68,76	68,48	70,35
> 65 tahun (%)	7,75	8,70	8,17	8,74	8,79

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

Gambar 1.2

Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020



Tabel 1.10

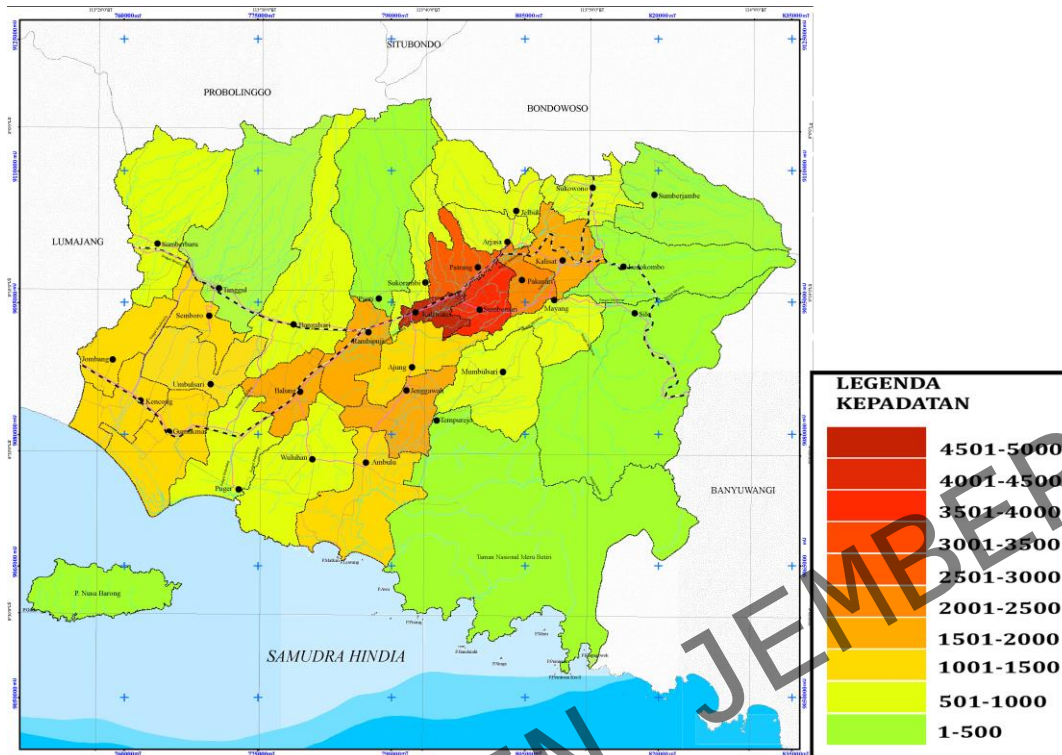
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Jember Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total	Luas	Kepadatan Penduduk
1	Kencong	71.430	2,82	65,92	1.083,59
2	GumukMas	87.724	3,46	82,98	1.057,17
3	Puger	123.763	4,88	148,99	830,68
4	Wuluhan	123.999	4,89	137,18	903,91
5	Ambulu	116.361	4,59	104,56	1.112,86
6	Tempurejo	78.926	3,11	524,46	150,49
7	Silo	108.150	4,26	309,98	348,89
8	Mayang	50.971	2,01	63,78	799,17
9	Mumbulsari	68.009	2,68	95,13	714,91
10	Jenggawah	87.682	3,46	51,02	1.718,58
11	Ajung	82.046	3,23	56,61	1.449,32
12	Rambipuji	86.834	3,42	52,8	1.644,58
13	Balung	81.680	3,22	47,12	1.733,45
14	Umbulsari	78.245	3,08	70,51	1.109,70
15	Semboro	49.070	1,93	45,43	1.080,12
16	Jombang	55.553	2,19	54,3	1.023,08
17	Sumberbaru	115.270	4,54	166,38	692,81
18	Tanggul	93.057	3,67	199,99	465,31
19	Bangsalsari	124.264	4,90	175,28	708,95
20	Panti	65.084	2,57	160,71	404,98
21	Sukorambi	41.161	1,62	60,63	678,89
22	Arjasa	41.295	1,63	43,75	943,89
23	Pakusari	45.059	1,78	29,11	1.547,89
24	Kalisat	78.428	3,09	53,48	1.466,49
25	Ledokombo	68.193	2,69	146,92	464,15
26	Sumberjambe	62.635	2,47	138,24	453,09
27	Sukowono	60.317	2,38	44,04	1.369,60
28	Jelbuk	32.339	1,27	65,06	497,06
29	Kaliwates	125.855	4,96	24,94	5.046,31
30	Sumbersari	132.802	5,24	37,05	3.584,40
31	Patrang	100.527	3,96	36,99	2.717,68
Jumlah/Total		2.536.729	100	3.293,34	770,26

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 (data diolah))

Gambar 1.3

Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2020 Menurut Kecamatan

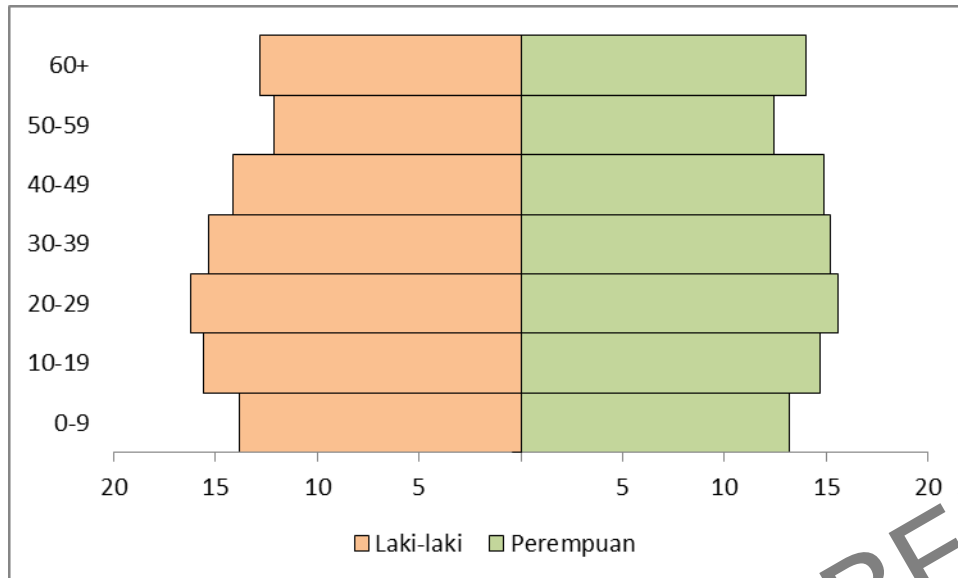


Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 (data diolah))

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Jember tahun 2020 menunjukkan penduduk Kabupaten Jember didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal yang menarik dari piramida penduduk Kabupaten Jember tahun 2020 adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk pada usia 65 tahun ke atas. Penduduk usia 65 tahun keatas (penduduk tua) jumlahnya lebih kecil dibanding kelompok penduduk dengan usia yang lebih muda. Pemerintah mampu menekan pertumbuhan penduduk disbanding dua tahun sebelumnya. Juga terjadi bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih besar dari usia non produktif.

Gambar 1.4

Piramida Penduduk Kabupaten Jember (dalam persen) Tahun 2020

*Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 (data diolah))*

1.5.3 Kondisi Ekonomi

Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Jember memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial bagi pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan potensi wilayah yang ada, perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor basis sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun katub pengamanan bagi masalah-masalah sosial yang timbul.

a. Potensi Unggulan Daerah

Berbagai potensi sumberdaya ekonomi banyak terdapat di Kabupaten Jember, namun tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan prioritas penanganannya. Beberapa potensi unggulan yang ada di Kabupaten Jember, diantaranya adalah :



1. Bidang Pertanian

- Sub Bidang Pertanian : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kol, kacang panjang, durian, alpukat, buah naga, jeruk, mangga, rambutan.
- Sub Bidang Peternakan : unggas (ayam dan itik), sapi kereman, sapi perah dan domba.
- Sub Bidang Perikanan : budidaya ikan (lele, nila, gurami) dan perikanan tangkap (cakalang, tuna).
- Sub Bidang Perkebunan : tembakau, kopi, tebu dan kelapa.

2. Bidang Pariwisata : Hotel dan Pemandian Rembangan, Hotel dan Pemandian Kebon Agung, Pantai Watu Ulo, Tanjung Papuma, Pantai Bandalit, Pantai Puger, Pantai Payangan, Pantai Paseban, Air Terjun Tancak

3. Bidang Pertambangan : Batu gamping, mangan dan pasir

4. Bidang Industri : Berbagai produk industri kecil kerajinan (batik, manik-manik, sangkar burung) dan industri pengolahan

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember mulai tahun 2014 sudah menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun 2010. Berdasarkan rekomendasi PBB dan menggunakan System National Account tahun 2008. Oleh karenanya penghitungan PDRB tahun 2010 – 2014, dihitung mundur menggunakan tahun dasar 2010.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi

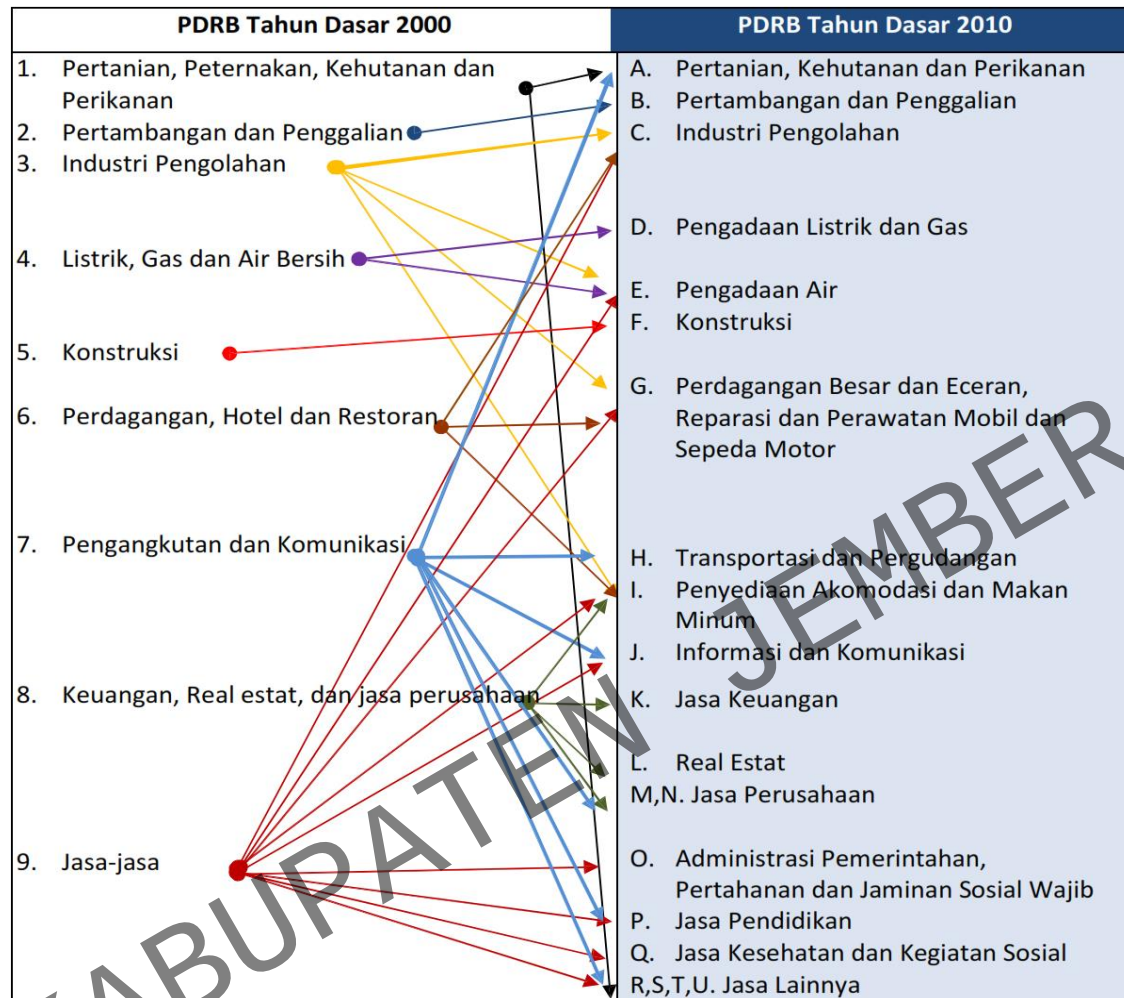


yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);
6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Gambar 1.5

Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sumber : BPS Kab. Jember (PDRB Kabupaten Jember 2015 – 2019)

Perekonomian Kabupaten Jember diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diestimasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. PDRB dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010. PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2016-2019 terus menunjukkan peningkatan sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.11

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.885,38	19.603,76	19.795,45	20.378,61	20.462,57
B Pertambangan dan Penggalian	2.779,59	2.987,50	3.208,12	3.293,83	3.148,22
C Industri Pengolahan	12.218,89	13.417,04	14.599,60	15.805,38	15.107,72
D Pengadaan Listrik dan Gas	27,23	32,41	35,31	37,55	37,69
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,98	43,83	47,3	51,1	53,66
F Konstruksi	4.721,52	5.273,62	5.850,63	6.424,98	6.030,70
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.081,02	9.006,17	9.994,33	10.965,71	10.480,34
H Transportasi dan Pergudangan	1.032,64	1.161,61	1.283,70	1.409,87	1.333,86
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.404,97	1.571,20	1.751,98	1.963,24	1.737,36
J Informasi dan Komunikasi	3.779,45	4.149,52	4.489,62	4.971,70	5.489,92
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487,63	1.600,34	1.731,59	1.829,73	1.831,39
L Real Estat	868,29	929,5	999,8	1.077,34	1.117,58
M,N Jasa Perusahaan	215,67	238,53	262,82	290,09	282,4
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.197,39	2.335,71	2.565,31	2.736,78	2.777,71
P Jasa Pendidikan	3.621,54	3.880,49	4.166,19	4.511,39	4.708,69
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	464,08	515,27	568,31	630,02	700,11
R,S,T,U Jasa lainnya	687,39	728,46	785,64	848,39	740,05
Produk Domestik Regional Bruto	62.512,68	67.474,97	72.135,70	77.225,71	76.039,97

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

PDRB ADHB Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebesar 76.039,98 miliar Rupiah atau mengalami penurunan sebesar 1.194,26 miliar Rupiah dibandingkan PDRB ADHB Kabupaten Jember tahun 2019. Penurunan PDRB ADHB pada tahun 2019 ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 sehingga berdampak pada sektor utama PDRB ADHB yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan



Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Sektor Konstruksi.

Tabel 1.12

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.559,73	13.851,70	13.845,12	14.046,58	13.895,89
B	Pertambangan dan Penggalan	2.296,42	2.427,18	2.564,80	2.588,33	2.417,34
C	Industri Pengolahan	9.713,59	10.258,48	10.988,41	11.656,83	10.867,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,37	26,58	27,88	29,32	29,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,53	31,45	33,44	35,58	37,02
F	Konstruksi	3.164,71	3.404,78	3.667,65	3.995,00	3.725,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.887,74	6.344,25	6.878,31	7.410,80	6.990,66
H	Transportasi dan Pergudangan	711,97	764,71	822,19	892,77	838,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.002,09	1.092,51	1.191,21	1.309,02	1.135,42
J	Informasi dan Komunikasi	3.318,20	3.574,30	3.864,89	4.225,31	4.648,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.035,18	1.078,94	1.138,42	1.189,96	1.188,50
L	Real Estat	658,88	694,38	739,38	788,62	808,54
M,N	Jasa Perusahaan	150,89	160,82	172,46	185,24	176,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.654,96	1.699,56	1.816,49	1.872,52	1.830,95
P	Jasa Pendidikan	2.426,11	2.558,47	2.717,99	2.903,62	2.976,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	348,24	371,95	398,49	429,05	468,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	549,95	572,9	605,86	641,49	550,69
Produk Domestik Regional Bruto		46.533,56	48.912,96	51.472,98	54.200,04	52.586,56

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

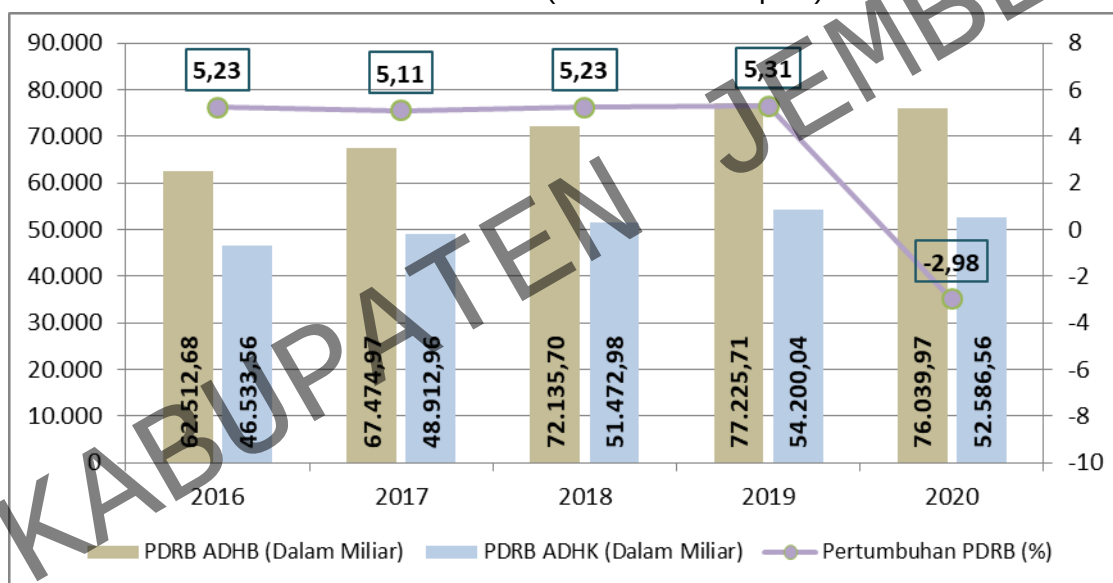
PDRB ADHK Kabupaten Jember pada tahun 2020 juga memiliki pola yang sama dengan PDRB ADHBnya yang mana terjadi penurunan

dibandingkan data tahun sebelumnya. Sektor yang terdampak penurunan PDRB ADHK adalah penurunan produksi lapangan usaha Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Indikator lain yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah indikator pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember. Pertumbuhan PDRB memberikan informasi tentang perubahan nilai PDRB ADHK tiap tahun dalam bentuk persentase. Gambar berikut ini menyajikan pergerakan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2016 sampai dengan 2020.

Gambar 1.6

PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 bergerak di kisaran 5-6 persen pertahun lalu menurun drastic pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 5,31 persen atau meningkat sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis hingga mencapai -2,98 persen akibat dampak dari Pandemi Covid-19.

Tabel 1.13
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar PDHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,29	2,08	0,02	1,46	-1,07
B	Pertambangan dan Penggalian	4,99	5,69	5,67	0,92	-6,61
C	Industri Pengolahan	4,25	5,71	7,01	6,08	-6,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,74	4,76	4,9	5,18	0,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,23	6,49	6,32	6,4	4,06
F	Konstruksi	6,92	7,59	7,72	8,93	-6,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,14	7,75	8,42	7,8	-5,72
H	Transportasi dan Pergudangan	7,42	7,41	7,52	8,58	-6,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,35	9,02	9,03	9,89	-13,26
J	Informasi dan Komunikasi	8,45	7,72	8,13	9,33	10,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	4,23	5,51	4,53	4,40
L	Real Estat	6,19	5,39	6,48	6,66	2,53
M, N	Jasa Perusahaan	6,16	6,59	7,41	7,41	-4,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	2,7	3,08	3,08	-2,22
P	Jasa Pendidikan	5,78	5,46	6,83	6,83	2,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,25	6,81	7,67	7,67	9,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,84	4,17	5,88	5,88	-14,15
Produk Domestik Regional Bruto		5,23	5,11	5,23	5,31	-2,98

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

Hampir seluruh lapangan usaha lainnya mengalami penurunan laju pertumbuhan akibat adanya Pandemi Covid-19, tetapi adapun lapangan usaha yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan diantaranya adalah



lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02% dan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,29%.

Tabel 1.14

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. PDRB Jember					
ADHB (juta rupiah)	62.513.680,50	67.476.071,80	72.312.525,60	77.234.241,80	76.039.970,00
ADHK (juta rupiah)	46.533.560,00	48.912.959,80	51.472.979,10	54.204.138,70	52.586.560,00
Pertumbuhan PDRB terhadap ADHK (%)	5,23	5,11	5,23	5,31	-2,98
2. PDRB Perkapita					
ADHB (ribu rupiah)	25.842,78	27.765,82	29.627,61	31.515,59	29.975,60
ADHK (ribu rupiah)	19.236,69	20.127,26	21.089,31	22.118,11	20.730,07

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2021)

c. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan Tahun 2020

Sisi penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, secara umum pada Tahun Anggaran 2020 realisasi Pendapatan Daerah hampir mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Pendapatan Daerah tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 3.665.003.964.118,68 dan direalisasikan sebesar Rp 3.531.445.557.371,07. Persentase realisasi Pendapatan Daerah terhadap targetnya adalah sebesar 96,36 persen.

Tabel 1.15

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA LEBIH / (KURANG)
		(Rp)	(Rp)		
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	660.367.999.055,62	593.181.286.369,07	89,83%	(67.186.712.686,55)
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	213.458.018.646,00	183.641.795.462,00	86,03%	(29.816.223.184,00)



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA LEBIH / (KURANG)
		(Rp)	(Rp)		
1.2	Pendapatan Hasil Retribusi Daerah	27.514.827.730,00	32.377.693.018,00	117,67%	4.862.865.288,00
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.702.248.169,00	5.391.983.375,00	94,56%	(310.264.794,00)
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	413.692.904.510,62	371.769.814.514,07	89,87%	(41.923.089.996,55)
2.	DANA PERIMBANGAN	2.240.229.530.000,00	2.208.327.873.867,00	98,58%	(31.901.656.133,00)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	118.203.880.000,00	138.178.862.696,00	116,90%	19.974.982.696,00
2.2	Dana Alokasi Umum	1.644.233.797.000,00	1.611.693.896.000,00	98,02%	(32.539.901.000,00)
2.3	Dana Alokasi Khusus	477.791.853.000,00	458.455.115.171,00	95,95%	(19.336.737.829,00)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	764.406.435.063,06	729.936.397.135,00	95,49%	(34.470.037.928,06)
3.1	Pendapatan Hibah	222.648.675.065,06	192.347.853.583,00	86,39%	(30.300.821.482,06)
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	213.166.303.798,00	208.997.087.352,00	98,04%	(4.169.216.446,00)
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.980.919.200,00	10.980.919.200,00	100,00%	0,00
3.5	Pendapatan Dana Desa APBN	302.669.947.000,00	302.669.947.000,00	100,00%	0,00
3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	14.940.590.000,00	14.940.590.000,00	100,00%	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.665.003.964.118,68	3.531.445.557.371,07	96,36%	(133.558.406.747,61)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

d. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2020

Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 secara garis besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.673.960.829.952,36	2.127.002.537.002,47	79,55%	(546.958.292.949,89)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.427.880.862.792,14	1.258.122.468.064,63	88,11%	(169.758.394.727,51)
2.1.4	Belanja Hibah	175.108.597.000,00	170.727.926.999,00	97,50%	(4.380.670.001,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	175.891.683.000,00	125.977.374.000,00	71,62%	(49.914.309.000,00)



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.065.196.660,22	22.065.196.660,22	100,00%	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	472.014.490.500,00	472.014.490.500,00	100,00%	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	401.000.000.000,00	78.095.080.778,62	19,48%	(322.904.919.221,38)
2.2	Belanja Langsung	1.597.960.654.005,52	1.170.609.127.290,49	73,26%	(427.351.526.715,03)
2.2.1	Belanja Pegawai	324.305.732.947,00	247.109.724.936,00	76,20%	(77.196.008.011,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	955.421.703.907,97	735.188.450.923,78	76,95%	(220.233.252.984,19)
2.2.3	Belanja Modal	318.233.217.150,55	188.310.951.430,71	59,17%	(129.922.265.719,84)
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.271.921.483.957,88	3.297.611.664.292,96	77,19%	(974.309.819.664,92)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2020 mencapai 77,19 persen atau sebesar Rp 3.297.611.664.292,96 dari target anggaran yang sebesar Rp 3.297.611.664.292,96. Berdasarkan angka tersebut, maka anggaran belanja daerah yang tidak terserap adalah sebesar Rp 974.309.819.664,92.

Pada Realisasi Belanja Tidak Langsung, anggaran yang dapat diserap dalam kurun waktu selama satu tahun adalah sebesar 79,55 persen. Dengan demikian maka Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp 2.127.002.537.002,47 dari anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 2.673.960.829.952,36. Anggaran yang tidak dapat terserap sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 546.958.292.949,89.

Sementara itu, Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2020 adalah sebesar 73,26 persen atau sebesar Rp 1.170.609.127.290,49 sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp 1.597.960.654.005,52. Anggaran tidak dapat terserap sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp 427.351.526.715,03.

e. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2020

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2019 adalah sebesar 100,37 persen atau dengan selisih lebih sebesar Rp 2.251.743.603,76. Anggaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 606.917.519.839,20 namun realisasinya melebihi anggaran yaitu sebesar Rp 609.169.263.442,96. Bertambahnya realisasi Pembiayaan Daerah dikarenakan pada pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir terdapat tambahan anggaran yang mulanya dianggarkan nol Rupiah namun diakhir periode terdapat penerimaan sebesar Rp 34.672.458,00.

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2020

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	627.717.519.839,20	629.969.263.442,96	100,36%	2.251.743.603,76
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	627.717.519.839,20	629.934.590.984,96	100,35%	2.217.071.145,76
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	34.672.458,00	0,00%	34.672.458,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.800.000.000,00	20.800.000.000,00	100,00%	0,00
3.2.1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.800.000.000,00	20.800.000.000,00	100,00%	0,00
Pembiayaan Netto		606.917.519.839,20	609.169.263.442,96	100,37%	2.251.743.603,76

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)



2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

*P*engelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Melalui Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dalam implementasi arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan program prioritas.

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengelolaan Keuangan Daerah mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan dikelompokkan menjadi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja



Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, sedangkan Belanja Langsung antara lain berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang berhubungan langsung dengan program serta kegiatan yang mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember berusaha dalam mengelola Keuangan Daerah telah mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan agar seluruh sumberdaya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien dan berkesinambungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah secara umum diukur dengan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan persentase kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri meliputi penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama PAD yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai kegiatan operasional baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-



upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Meningkatkan pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah secara profesional;
3. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Peningkatan penerimaan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan);
6. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak Daerah;
7. Sosialisasi pendapatan asli daerah dan PBB melalui media sosial, dan media cetak;
8. Melakukan operasi secara sinergi kepada penunggak pajak;
9. Monitoring dan penertiban pemasangan reklame;
10. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
12. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
13. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan Daerah;
14. Optimalisasi pemungutan piutang PAD;
15. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;
16. Revisi dan evaluasi Perda/Perbub dalam penyesuaian dasar penetapan tarif Daerah;
17. Penentuan target pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum;



18. Pengembangan program/kegiatan berupa data/sistem, standar pengelolaan, keterampilan SDM dan sebagainya dalam pemungutan PBB perkotaan/pedesaan yang akan berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan;
19. Pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah;
20. Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
21. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan; dan
22. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PAD dengan meminimalisir beban yang ditanggung masyarakat, maka kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan, Samsat *Mobile*, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;



5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001- 2008;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
7. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui penyertaan modal daerah, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
10. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
11. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD Penghasil;
12. Optimalisasi pemungutan piutang PAD; dan
13. Memberi penghargaan kepada Camat dan Kepala Desa yang prosentase realisasi PBB nya tertinggi.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sumber ini adalah melalui:



1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
4. Pembinaan usaha pertembakauan, dan pemberantasan cukai ilegal; dan
5. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, serta Pendapatan Dana Desa APBN.

2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

Sisi penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, secara umum pada Tahun Anggaran 2020 realisasi Pendapatan Daerah hampir mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 3.665.003.964.118,68 dan direalisasikan sebesar Rp 3.531.439.337.987,65. Persentase realisasi Pendapatan Daerah terhadap targetnya adalah sebesar 96,36 persen.



Penerimaan Pembiayaan telah melampaui target yang dianggarkan sebelumnya. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jember bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir. Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 627.717.519.839,2 dan direalisasikan sebesar Rp 629.934.590.984,96. Persentase realisasi Penerimaan Pembiayaan terhadap targetnya adalah sebesar 100 persen. Rincian Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA LEBIH / (KURANG)
		(Rp)	(Rp)		
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	660.367.999.055,62	593.175.066.985,65	89,82%	(67.186.712.686,55)
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	213.458.018.646,00	183.641.795.462,00	86,03%	(29.816.223.184,00)
1.2	Pendapatan Hasil Retribusi Daerah	27.514.827.730,00	32.377.693.018,00	117,67%	4.862.865.288,00
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.702.248.169,00	5.391.983.375,00	94,56%	(310.264.794,00)
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	413.692.904.510,62	371.763.595.130,65	89,87%	(41.929.309.379,97)
2.	DANA PERIMBANGAN	2.240.229.530.000,00	2.208.327.873.867,00	98,58%	(31.901.656.133,00)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	118.203.880.000,00	138.178.862.696,00	116,90%	19.974.982.696,00
2.2	Dana Alokasi Umum	1.644.233.797.000,00	1.611.693.896.000,00	98,02%	(32.539.901.000,00)
2.3	Dana Alokasi Khusus	477.791.853.000,00	458.455.115.171,00	95,95%	(19.336.737.829,00)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	764.406.435.063,06	729.936.397.135,00	95,49%	(34.470.037.928,06)
3.1	Pendapatan Hibah	222.648.675.065,06	192.347.853.583,00	86,39%	(30.300.821.482,06)
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	213.166.303.798,00	208.997.087.352,00	98,04%	(4.169.216.446,00)
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.980.919.200,00	10.980.919.200,00	100,00%	0,00
3.5	Pendapatan Dana Desa APBN	302.669.947.000,00	302.669.947.000,00	100,00%	0,00
3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	14.940.590.000,00	14.940.590.000,00	100,00%	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.665.003.964.118,68	3.531.439.337.987,65	96,36%	(133.564.626.131,03)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)



Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara umum PAD pada Tahun Anggaran 2020 kurang dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 89,82 persen atau sebesar Rp 593.175.066.985,65. Realisasi tersebut kurang sebesar Rp 67.186.712.686,55 dibandingkan targetnya yang sebesar Rp 660.367.999.055,62. Detil Realisasi PAD adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah adalah sebesar Rp 183.641.795.462,00 sedangkan target pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp 213.458.018.646,00. Berdasarkan hal tersebut, realisasi pendapatan pajak daerah adalah sebesar 86,03 persen atau kurang Rp 29.816.223.184,00 dari targetnya. Berikut disajikan rincian realisasi pendapatan pajak daerah.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Pajak hotel	2.193.898.267,00	2.092.070.911,00	95,36%	(101.827.356,00)
2.	Pajak restoran	14.100.000.000,00	13.157.879.997,00	93,32%	(942.120.003,00)
3.	Pajak hiburan	1.816.840.679,00	1.103.866.628,00	60,76%	(712.974.051,00)
4.	Pajak reklame	2.502.841.450,00	3.508.451.801,00	140,18%	1.005.610.351,00
5.	Pajak penerangan jalan	81.180.000.000,00	71.259.134.814,00	87,78%	(9.920.865.186,00)
6.	Pajak parkir	1.500.000.000,00	1.008.093.096,00	67,21%	(491.906.904,00)
7.	Pajak Air Bawah Tanah	450.000.000,00	435.212.035,00	96,71%	(14.787.965,00)
8.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	614.438.250,00	1.891.776.260,00	307,89%	1.277.338.010,00
9.	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan Perkotaan	71.600.000.000,00	45.724.014.797,00	63,86%	(25.875.985.203,00)
10.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	37.500.000.000,00	43.461.295.123,00	115,90%	5.961.295.123,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		213.458.018.646,00	183.641.795.462,00	86,03%	(29.816.223.184,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)



2. Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 27.514.827.730,00 dan dapat terealisasi melebihi target yaitu sebesar Rp 32.377.693.018,00. Dengan demikian, persentase realisasi pendapatan retribusi daerah adalah sebesar 117,67 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp 4.862.865.288,00 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut disajikan rincian realisasi pendapatan retribusi daerah

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	Retribusi Jasa Umum	22.686.872.855,00	28.528.752.494,00	125,75%	5.841.879.639,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.810.954.875,00	2.054.240.125,00	73,08%	(756.714.750,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.017.000.000,00	1.794.700.399,00	88,98%	(222.299.601,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		27.514.827.730,00	32.377.693.018,00	117,67%	4.862.865.288,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perolehan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 5.391.983.375,00 sedangkan targetnya adalah sebesar Rp 5.391.983.375,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 94,56 persen. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum - LRA	600.000.000,00	0,00	0,00%	(600.000.000,00)
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Pendapatan Deviden Bank Jatim - LRA	5.102.248.169,00	5.391.983.375,00	105,68%	289.735.206,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.702.248.169,00	5.391.983.375,00	94,56%	(310.264.794,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah kurang dari target anggaran dengan tingkat persentase sebesar 89.86 persen. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 371.763.595.130,65. Realisasi ini kurang sebesar Rp 41.929.309.379,97 dibandingkan target anggarannya yang sebesar Rp 413.692.904.510,62. Tabel berikut menyajikan detil anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA	216.200.000,00	276.024.067,00	127,67%	59.824.067,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LRA	17.500.000.000,00	6.298.126.325,39	35,99%	(11.201.873.674,61)
3	Penerimaan Bunga Deposito - LRA	15.000.000.000,00	19.187.876.787,53	127,92%	4.187.876.787,53
4	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	12.100.000.000,00	15.081.876.715,34	124,64%	2.981.876.715,34
5	Pendapatan BLUD - LRA	270.043.308.826,62	251.465.388.189,18	93,12%	(18.577.920.637,44)
6	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	98.833.395.684,00	79.454.303.046,21	80,39%	(19.379.092.637,79)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		413.692.904.510,62	371.763.595.130,65	89,86%	(41.929.309.379,97)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)



B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan direalisasikan sebesar 98,58 persen dari target anggaran Tahun Anggaran 2020. Target anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.240.229.530.000,00 dan direalisasikan sampai akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.208.327.873.867,00. Terdapat empat pos anggaran dana perimbangan yaitu 1) Dana Bagi Hasil Pajak; 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam); 3) Dana Alokasi Umum; 4) Dana Alokasi Khusus. Rincian penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Tabel berikut menyajikan detail realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020. Dana Bagi Hasil Pajak dapat terealisasikan sebesar

Rp 92.399.907.792,00 atau sebesar 95,24 persen dari target sebesar Rp 97.015.441.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak adalah sebesar Rp 45.778.954.904,00 atau sebesar 216,06 persen.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
Dana Bagi Hasil Pajak					
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	30.537.783.000,00	32.078.165.803,00	105,04%	1.540.382.803,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	50.626.691.000,00	48.129.717.657,00	95,07%	(2.496.973.343,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	15.850.967.000,00	12.192.024.332,00	76,92%	(3.658.942.668,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		97.015.441.000,00	92.399.907.792,00	95,24%	(4.615.533.208,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak					
1	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	16.122.415.000,00	37.803.687.552,00	234,48%	21.681.272.552,00



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
	- LRA				
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	1.750.250.000,00	5.382.490.341,00	307,53%	3.632.240.341,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	44.295.000,00	31.628.750,00	71,40%	(12.666.250,00)
4	Bagi Hasil dari Sumber Daya Mineral dan Batubara	402.089.000,00	605.759.638,00	150,65%	203.670.638,00
5	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58%	(630.084.711,00)
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1.451.029.000,00	1.167.112.334,00	80,43%	(283.916.666,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		21.188.439.000,00	45.778.954.904,00	216,06%	24.590.515.904,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi DAU pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 98,02 persen, dengan demikian maka anggaran sebesar Rp 1.644.233.797.000,00 dan realisasi DAU adalah sebesar Rp 1.611.693.896.000,00. DAU terbagi menjadi 1) Dana Alokasi Umum – LRA; dan 2) Dana Alokasi Umum Tambahan – LRA. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	Dana Alokasi Umum - LRA	1.607.493.887.000,00	1.607.493.887.000,00	100,00%	0,00
2	Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan - LRA	8.400.018.000,00	4.200.009.000,00	50,00%	(4.200.009.000,00)
3	Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Penggajian P3K - LRA	28.339.892.000,00	0,00	0,00%	(28.339.892.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum		1.644.233.797.000,00	1.611.693.896.000,00	98,02%	(32.539.901.000,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)



3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi DAK pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 95,95 persen atau sebesar Rp 458.455.115.171,00 sedangkan target anggaran adalah sebesar Rp 477.791.853.000,00. DAK sendiri terbagi menjadi 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA; dan 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	99.808.805.000,00	94.832.656.525,00	95,01%	(4.976.148.475,00)
	DAK Bidang Pendidikan (SD dan SMP) – LRA	37.403.594.000,00	36.789.171.000,00	98,36%	(614.423.000,00)
	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar – LRA	9.923.667.000,00	2.007.385.690,00	20,23%	(7.916.281.310,00)
	DAK Bidang Jalan – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Bidang Pertanian – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Bidang Keluarga Berencana – LRA	1.574.674.000,00	0,00	0,00%	(1.574.674.000,00)
	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Pelayanan Rujukan – LRA	32.940.760.000,00	31.324.469.339,00	95,09%	(1.616.290.661,00)
	DAK Pelayanan Bidang Farmasi – LRA	3.788.825.000,00	3.775.259.940,00	99,64%	(13.565.060,00)
	DAK Penugasan Bidang Irigasi – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Pariwisata – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Penugasan Bidang Sanitasi – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Bidang Air Minum – LRA	0,00	12.232.000.000,00	0,00%	12.232.000.000,00
	Dak Fisik Penugasan Air Minum – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	DAK Penugasan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – LRA	12.845.911.000,00	8.560.654.056,00	66,64%	(4.285.256.944,00)
	DAK Penugasan Penurunan AKI dan AKB – LRA	425.829.000,00	143.716.500,00	33,75%	(282.112.500,00)
	DAK Penugasan Penguatan Intervensi Stunting – LRA	865.170.000,00	0,00	0,00%	(865.170.000,00)
	DAK Penugasan Penurunan Stunting (KB) – LRA	40.375.000,00	0,00	0,00%	(40.375.000,00)
	DAK Penugasan Keselamatan Jalan – LRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	377.983.048.000,00	363.622.458.646,00	96,20%	(14.360.589.354,00)
	DAK Bantuan Operasional	42.669.000.000,00	39.671.110.000,00	92,97%	(2.997.890.000,00)



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
	Penyelenggaraan PAUD – LRA				
	DAK Bantuan Operasional Kesehatan – LRA	26.308.197.000,00	40.769.283.000,00	154,97%	14.461.086.000,00
	DAK Jaminan Persalinan (Jampersal) – LRA	6.049.799.000,00	0,00	0,00%	(6.049.799.000,00)
	DAK Bantuan Operasional KB – LRA	7.942.264.000,00	3.971.132.000,00	50,00%	(3.971.132.000,00)
	DAK Tunjangan Profesi Guru (PNSD) – LRA	272.293.043.000,00	272.293.043.000,00	100,00%	0,00
	DAK Akreditasi Puskesmas – LRA	2.335.672.000,00	0,00	0,00%	(2.335.672.000,00)
	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LRA	7.850.850.000,00	5.239.882.646,00	66,74%	(2.610.967.354,00)
	DAK Pengawasan Obat dan Makanan – LRA	279.615.000,00	0,00	0,00%	(279.615.000,00)
	DAK BOP Pendidikan Kesenjangan – LRA	1.833.200.000,00	916.600.000,00	50,00%	(916.600.000,00)
	DAK Dana Pelayanan Pariwisata – LRA	344.050.000,00	344.050.000,00	100,00%	0,00
	DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM – LRA	417.358.000,00	417.358.000,00	100,00%	0,00
	DAK Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan – LRA	9.660.000.000,00	0,00	0,00%	(9.660.000.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus		477.791.853.000,00	458.455.115.171,00	95,95%	(19.336.737.829,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 1) Pendapatan Hibah; 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya; dan 5) Pendapatan Dana Desa APBN. Detil Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Pendapatan Hibah - LRA	222.648.675.065,06	192.347.853.583,00	86,39%	(30.300.821.482,06)
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	213.166.303.798,00	208.997.087.352,00	98,04%	(4.169.216.446,00)
	1. Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	54.361.657.894,00	47.294.155.401,00	87,00%	(7.067.502.493,00)



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
	2. Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	32.012.052.632,00	26.078.416.667,00	81,46%	(5.933.635.965,00)
	3. Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	60.934.497.504,00	50.204.424.628,00	82,39%	(10.730.072.876,00)
	4. Bagi Hasil dari Pajak Rokok – LRA	65.567.964.190,00	85.068.045.959,00	129,74%	19.500.081.769,00
	5. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LRA	290.131.578,00	352.044.697,00	121,34%	61.913.119,00
3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya – LRA	10.980.919.200,00	10.980.919.200,00	100,00%	0,00
	1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi – LRA	10.980.919.200,00	10.980.919.200,00	100,00%	0,00
4	Pendapatan Dana Desa APBN – LRA	302.669.947.000,00	302.669.947.000,00	100,00%	0,00
5	Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	14.940.590.000,00	14.940.590.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		764.406.435.063,06	729.936.397.135,00	95,49%	(34.470.037.928,06)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar 95,49 persen pada Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian anggaran sebesar Rp 764.406.435.063,06 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp 729.936.397.135,00.

2.1.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerimaan daerah, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dijumpai di lapangan yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan daerah, diantaranya adalah:

1. Kurang optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
2. Kurang optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; dan
3. Adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi semua sektor termasuk didalamnya pencapaian target Pendapatan Daerah.



Secara garis besar, permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan daerah adalah belum optimalnya upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19. Dengan demikian realisasi pendapatan daerah belum mencapai target yang diharapkan. Solusi yang dapat dilaksanakan guna terus meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui:

1. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
2. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan, penegakan hukum dan penyesuaian regulasi tarif pemungutan;
3. Peningkatan pelayanan pemungutan pendapatan kepada masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
4. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/ nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan.

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/ kegiatan.



Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tetap diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan, pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Penurunan *Stunting* dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang mendukung target-target tersebut di atas diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

1. Pendanaan program dan kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
2. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJPN Tahun 2005-2025 dan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2008;
3. Pendukung percepatan Pembangunan Nasional (Inpres No. 1/2010) dan program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres Nomor 3/2010);
4. Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program);
5. Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru);
6. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Jember secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember;
7. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu : belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), belanja asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan), Alokasi Dana Desa unsur penghasilan perangkat desa dan dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK);

Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:

1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan;



2. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan;
3. Alokasi anggaran untuk bidang infrastuktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB, dan BBNKB sesuai dengan pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (6 urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan Pemerintahan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai tugas dan fungsi OPD;
5. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 15%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli;
6. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi Umum untuk Kelurahan, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, dan dana BOS pemerintah;
7. Pengalokasian Alokasi pendanaan kepada desa baik berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah Kepada Desa.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintahan daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.



Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi: (1) Perencanaan yang tepat, (2) Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas, (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel, (4) Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif, (5) Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin. Sedangkan arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 adalah pada:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik disektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif sesuai kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020, disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan/ hambatan dan tantangan utama, menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan



kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah adalah mengoptimalkan belanja daerah dalam membiayai program-program OPD, lintas OPD dan program-program kewilayahan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran sesuai dengan target-target pembangunan Tahun Anggaran 2020. Seperti pada tahun – tahun sebelumnya, pada kelompok belanja tidak langsung, kebijakan umum anggaran diarahkan pada:

1. Khusus untuk belanja pegawai, kebijakan belanja daerah ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil berupa pembayaran gaji bulanan, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, dan penyesuaian tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai (TPP). Belanja pegawai juga mencakup gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Belanja Hibah dipergunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
3. Belanja Bantuan Sosial diarahkan pada bantuan keuangan yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pendampingan maupun bantuan langsung bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak resiko sosial;
4. Belanja Bagi Hasil/ Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagi hasil dari realisasi pajak dan retribusi daerah;
5. Belanja Tidak Terduga, arah kebijakan belanja untuk jenis belanja ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan, diluar kendali pemerintah daerah serta untuk penanganan kondisi darurat yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun peristiwa darurat lainnya yang harus segera memperoleh penanganan, dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.



2.2.2 Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 secara garis besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.673.960.829.952,36	2.127.002.537.002,47	79,55%	(546.958.292.949,89)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.427.880.862.792,14	1.258.122.468.064,63	88,11%	(169.758.394.727,51)
2.1.4	Belanja Hibah	175.108.597.000,00	170.727.926.999,00	97,50%	(4.380.670.001,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	175.891.683.000,00	125.977.374.000,00	71,62%	(49.914.309.000,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.065.196.660,22	22.065.196.660,22	100,00%	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	472.014.490.500,00	472.014.490.500,00	100,00%	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	401.000.000.000,00	78.095.080.778,62	19,48%	(322.904.919.221,38)
2.2	Belanja Langsung	1.597.960.654.005,52	1.170.609.127.290,49	73,26%	(427.351.526.715,03)
2.2.1	Belanja Pegawai	324.305.732.947,00	247.109.724.936,00	76,20%	(77.196.008.011,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	955.421.703.907,97	735.188.450.923,78	76,95%	(220.233.252.984,19)
2.2.3	Belanja Modal	318.233.217.150,55	188.310.951.430,71	59,17%	(129.922.265.719,84)
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.271.921.483.957,88	3.297.611.664.292,96	77,19%	(974.309.819.664,92)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 77,19 persen atau sebesar Rp 3.297.611.664.292,96 dari target anggaran yang sebesar Rp 4.271.921.483.957,88. Berdasarkan angka tersebut, maka anggaran belanja daerah yang tidak terserap adalah sebesar Rp 974.309.819.664,92.

Pada Realisasi Belanja Tidak Langsung, anggaran yang dapat diserap dalam kurun waktu selama satu tahun adalah sebesar 79,55 persen. Dengan demikian maka Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah



sebesar Rp 2.127.002.537.002,47 dari anggaran Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp 2.673.960.829.952,36. Anggaran yang tidak dapat terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 546.958.292.949,89.

Sementara itu, Realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 73,26 persen atau sebesar Rp 1.170.609.127.290,49 sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp 1.597.960.654.005,52. Anggaran tidak dapat terserap sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 427.351.526.715,03.

2.2.3 Permasalahan dan solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang menonjol dalam pengelolaan belanja daerah meskipun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi. Permasalahan tersebut dikarenakan oleh

1. OPD belum tertib dalam penyerapan anggaran belanja sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam anggaran kas atau DPA-OPD, sehingga pelaksanaan program/ kegiatan menjadi terlambat atau menumpuk di akhir tahun.
2. Masih ada OPD yang kurang cermat dalam penyusunan rencana program/ kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya, anggaran belanja di OPD tidak dapat diserap secara optimal.
3. Adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor, termasuk pelaksanaan program/ kegiatan OPD.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, permasalahan utama adalah karena kurang optimalnya OPD dalam mengelola anggaran belanja masing-masing OPD. Berkaitan dengan hal tersebut, solusi yang dapat digunakan adalah:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin kepada OPD agar penyerapan anggaran belanja lebih tepat waktu dan optimal;
2. Meningkatkan pemahaman kepada OPD melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi maupun rapat koordinasi



berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan agar dalam pengelolaan keuangan lebih ekonomis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan Daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit atau surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan Daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit melalui penyertaan modal atau investasi pada BUMD. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; dan
3. Peningkatan ekonomi Daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.



A. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2020;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
6. Penerimaan piutang Daerah.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan yang antara lain terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
3. Pembayaran Pokok Utang; dan
4. Pemberian Pinjaman Daerah.

2.3.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	627.717.519.839,20	629.969.263.442,96	100,36%	2.251.743.603,76
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	627.717.519.839,20	629.934.590.984,96	100,35%	2.217.071.145,76
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	34.672.458,00	0,00%	34.672.458,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.800.000.000,00	20.800.000.000,00	100,00%	0,00
3.2.1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.800.000.000,00	20.800.000.000,00	100,00%	0,00
Pembiayaan Netto		606.917.519.839,20	609.169.263.442,96	100,37%	2.251.743.603,76

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 100,37 persen atau dengan selisih lebih sebesar Rp 2.251.743.603,76. Anggaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 606.917.519.839,20 namun realisasinya melebihi anggaran yaitu sebesar Rp 609.169.263.442,96. Bertambahnya realisasi Pembiayaan Daerah dikarenakan pada pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir terdapat tambahan anggaran yang mulanya dianggarkan nol Rupiah namun diakhir periode terdapat penerimaan sebesar Rp 34.672.458,00.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut disajikan kerangka fiskal Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Tabel 2.12

Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 – 2020

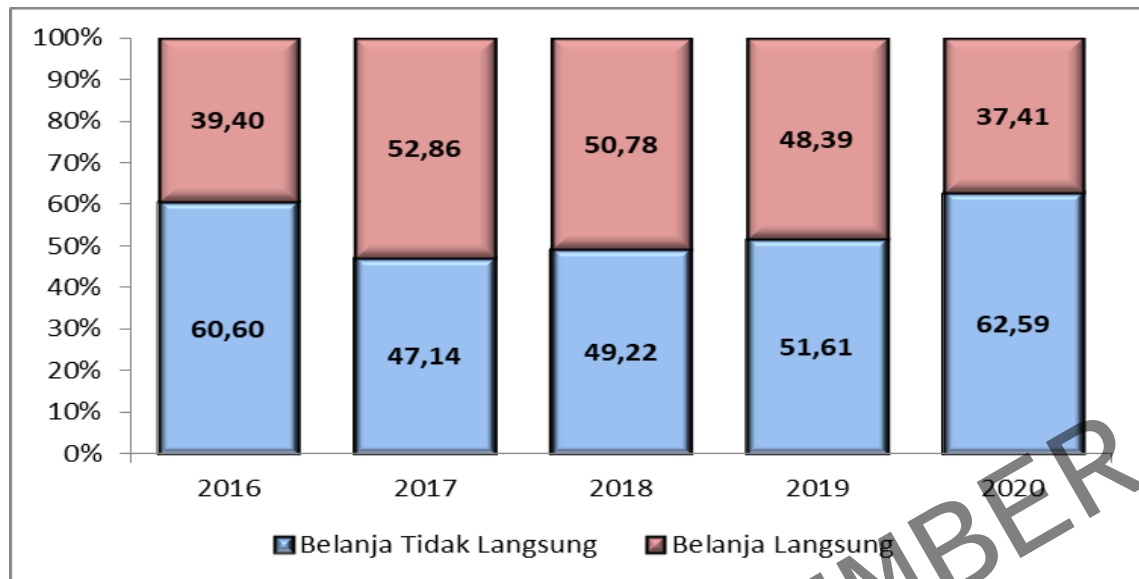
URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	3.208.223.357.577,00	3.540.406.991.356,11	3.601.294.429.685,50	3.815.931.626.881,96	3.665.003.964.118,68
Pendapatan Asli Daerah	519.190.673.159,00	736.927.109.103,11	609.304.818.610,50	667.598.426.909,96	660.367.999.055,62
Dana Perimbangan	2.293.383.771.870,00	2.408.256.485.000,00	2.380.522.046.000,00	2.402.647.387.288,00	2.240.229.530.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	395.648.912.548,00	395.223.397.253,00	611.467.565.075,00	745.685.812.684,00	764.406.435.063,06
Belanja	3.645.689.713.637,69	4.187.962.514.392,59	4.163.624.940.931,97	3.876.912.578.274,08	4.271.921.483.957,88
Belanja Tidak Langsung	2.209.109.035.082,11	1.974.122.824.305,30	2.049.530.240.244,35	2.000.732.096.702,49	2.673.960.829.952,36
Belanja Langsung	1.436.580.678.555,58	2.213.839.690.087,29	2.114.094.700.687,62	1.876.180.481.571,59	1.597.960.654.005,52

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Secara umum alokasi Belanja Langsung APBD Kabupaten Jember yang bersentuhan langsung dengan obyek pemangku kepentingan mengalami peningkatan dimana hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember telah mengarah kepada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi, belanja tidak langsung juga digunakan untuk pemberian bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial yang memang mengarah langsung kepada obyek pembangunan, yaitu masyarakat Jember.

Gambar 2.1

Perbandingan Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 – 2020



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Belanja pembangunan dirumuskan kedalam komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang efektif dan efisien dan memperhatikan perencanaan yang konsisten dan memegang komitmen sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan belanja anggaran ini tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Belanja daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi, khususnya dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya terhadap aspek pembiayaan diarahkan akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3**Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, pembagian urusan juga mengalami penyesuaian yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, Kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, meliputi bidang urusan Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan,



Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan.

KABUPATEN JEMBER



3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berikut adalah Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang mencakup Realisasi Anggaran dan capaian Kinerja yang disusun berdasarkan urusan :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.1	Pendidikan	Dinas Pendidikan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pesertase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Opd	100	5.602.529.500	100	3.262.536.234	-	-	
1.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12	4.500.000	12	1.743.000	-	-	
1.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi	12	403.800.000	12	238.172.987	-	-	
1.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan Anggaran Atk	12	250.000.000	12	196.218.550	-	-	
1.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Diadakan	12	50.000.000	12	45.838.250	-	-	
1.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan	12	10.000.000	12	1.200.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Perundang-Undangan	Perundang-Undangan Yang Disediakan							
1.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Ketersediaan Makanan Dan Minuman Kegiatan/Rapat	12	447.727.500	12	435.495.550	-	-	
1.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	150.000.000	12	51.318.000	-	-	
1.01.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	12	2.180.880.000	12	1.200.528.197	-	-	
1.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	12	150.000.000	12	51.900.000	-	-	
1.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Peralatan Dan Bahan Pembersih	12	54.000.000	12	53.956.700	-	-	
1.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah Administrasi Dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	12	1.901.622.000	12	986.165.000	-	-	
1.01.15		Dinas Pendidikan	Meningkatkan Pemerataan, Perluasan Akses Pendidikan yang Bermutu dan Menurunnya	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	114	29.843.520.000	79.63	22.703.322.600	Insentif Tenaga Pendidik Paud Yang Ditargetkan 5.000 Orang X 12 Bulan Terealisasi 4378 Orang, Kurang Lebih 622 Orang Berhenti, Meninggal Dll Dan Untuk Belanja Dak Bop	Serapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			a Angka buta Huruf secara Signifikan							Paud		
1.01.15.59				Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD	225	5.945.400.000	0	20.200.000	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Persyaratan Belum Lengkap	Kegiatan Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.15.69				Bantuan Operasional Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Anak	Jumlah Bulan Penyaluran Yang Diberikan Kepada Penerima Satuan PAUD	2	295.200.000	2	280.200.000	-	-	
1.01.15.72				Pengembangan dan Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kreatifitas Peningkatan Mutu	1000	0	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Wabah Covid-19	Kegiatan Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.15.74				Pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan satuan PAUD	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Insentif Glt PAUD	12	23.602.920.000	12	22.402.922.600	-	-	
1.01.16		Dinas Pendidikan	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI/SDLB Dan SMP/MTs	0	275.234.484.734	96.45	197.502.670.375	-	-	
1.01.16.58				Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	350	0	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Wabah	Kegiatan Diusulkan Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Covid-19		
1.01.16.63				Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Juknis BOS Dan Bantuan Operasional Manajemen BOS	12	335.050.000	12	232.150.000	-	-	
1.01.16.64				Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Manajemen Operasional PPDGS	12	175.450.000	12	163.337.500	-	-	Pemerintah Daerah Kab. Jember lebih memperhatikan Program Pengembangan Kreativitas melalui Pendidikan Non Formal dengan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan formal negeri maupun swasta, keagamaan, pondok pesantren maupun komunitas belajar masyarakat (KBM)
1.01.16.69				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	100	0	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Wabah Covid-19	Kegiatan Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.16.70				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa	1150	0	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Wabah Covid-19	Kegiatan Diusulkan Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.16.7.3				Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	300	53.990.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Wabah Covid-19	Kegiatan Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.16.8.3				Pelaksanaan/Ujian Sekolah/Ujian Nasional SD/SDLB/MI	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/ UNAS	40000	50.300.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Wabah Covid-19	Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.16.8.4				Pelaksanaan/Ujian Sekolah/Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/UNAS	38000	62.350.000	38000	48.900.000	-	-	
1.01.16.8.5				Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMP/SMPLB	Jumlah Siswa Yang Mengikuti PSB	25000	266.900.000	25000	246.675.000	-	-	
1.01.16.9.2				Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jenjang SD/MI	Jumlah Bulan Penyaluran Yang Diberikan Penerima PPG SD (164039 Siswa)	12	55.943.981.867	12	47.721.318.459	-	-	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember harus lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru terutama Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai bagian unsur tenaga pendidik seperti gaji yang diterima GTT/P'IT sangat kecil dan sering telat, bahkan ditambah persoalan kebijakan pemutasian yang semrawut serta masih banyak GTT yang tidak menerima surat keputusan (SK). 2. Melakukan pengadaan Formasi CPNS yang merupakan alternatif pintu harapan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												GTT untuk memperbaiki kesejahteraannya. Peluang bagi sebagian para guru (GTT) untuk jadi CPNS. 3. Membuat alternatif kebijakan untuk memperhatikan mereka yang tertutup peluangnya sebagai CPNS karena batasan umur. 4. Pemerintah Daerah Kab. Jember lebih memperhatikan Program Pengembangan Kreativitas melalui Pendidikan Non Formal dengan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan formal negeri maupun swasta, keagamaan, pondok pesantren maupun komunitas belajar masyarakat (KBM)
1.01. 16.9 5				Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jenjang SMP dan MTs	Jumlah Bulan Yang Diberikan Penerima PPGSMP (46606 Siswa)	12	18.803.111.300	12	16.303.484.457	-	-	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember harus lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru terutama Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai bagian unsur tenaga pendidik seperti gaji yang diterima GTT/P'IT sangat kecil dan sering telat, bahkan ditambah



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												persoalan kebijakan pemutasian yang semrawut serta masih banyak GTT yang tidak menerima surat keputusan (SK). 2. Melakukan pengadaan Formasi CPNS yang merupakan alternatif pintu harapan GTT untuk memperbaiki kesejahteraannya. Peluang bagi sebagian para guru (GTT) untuk jadi CPNS. 3. Membuat alternatif kebijakan untuk memperhatikan mereka yang tertutup peluangnya sebagai CPNS karena batasan umur. 4. Pemerintah Daerah Kab. Jember lebih memperhatikan Program Pengembangan Kreativitas melalui Pendidikan Non Formal dengan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan formal negeri maupun swasta, keagamaan, pondok pesantren maupun komunitas belajar masyarakat (KBM)
1.01.				Bantuan Operasional	Jumlah Bulan	12	198.222	12	132.228.	-	-	1. Pemerintah Daerah



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
16.9 6				Sekolah (BOS) Pusat	Penyaluran Yang Diberikan Kepada Penerima BOS SD (155210 Siswa) Dan SMP (44670 Siswa)		.101.56 7		004.959			Kab. Jember harus lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru terutama Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai bagian unsur tenaga pendidik seperti gaji yang diterima GTT/P'IT sangat kecil dan sering telat, bahkan ditambah persoalan kebijakan pemutasian yang semrawut serta masih banyak GTT yang tidak menerima surat keputusan (SK). 2. Melakukan pengadaan Formasi CPNS yang merupakan alternatif pintu harapan GTT untuk memperbaiki kesejahteraannya. Peluang bagi sebagian para guru (GTT) untuk jadi CPNS. 3. Membuat alternatif kebijakan untuk memperhatikan mereka yang tertutup peluangnya sebagai CPNS karena batasan umur. 4. Pemerintah Daerah Kab. Jember lebih memperhatikan Program Pengembangan Kreativitas melalui



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												Pendidikan Non Formal dengan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan formal negeri maupun swasta, keagamaan, pondok pesantren maupun komunitas belajar masyarakat (KBM)
1.01.16.41				Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhabilitasi	20	67.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Karena Persyaratan Belum Lengkap	Kegiatan Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.16.80				Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhabilitasi	179	0	0	0	-	-	
1.01.18		Dinas Pendidikan	Meningkatkan Pemerataan, Perluasan Akses Pendidikan yang Bermutu dan Menurunnya Angka Buta Huruf secara Signifikan	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Pada Buta Huruf Usia Produktif	100	23.088.085.000	93.89	19.953.037.750	-	-	
1.01.18.1				Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah Tahap Tersedianya Anggaran Insentif Guru Ngaji	3	23.088.085.000	3	19.953.037.750	-	-	
1.01.2		Dinas Pendidikan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Tingkat Pemenuhan	100	383.250.000	100	285.893.009	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Aparatur	Kebutuhan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kerja Sesuai Standart							
1.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara	12	40.000.000	12	25.361.151	-	-	
1.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	12	250.000.000	12	186.673.858	-	-	
1.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga Dan Komputer	12	75.250.000	12	73.858.000	-	-	
1.01.2.14				Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Dll Yang Diadakan	100	0	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Persyaratan Belum Lengkap	Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor Yang Dipelihara	12	0	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Persyaratan Belum Lengkap	Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.2.42				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung/Bangunan Yang Direhabilitasi	10	18.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Persyaratan Belum Lengkap	Diusulkan Tahun Berikutnya	
1.01.22		Dinas Pendidikan		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Kebijakan OPD Yang Berdasarkan Dapodik	100	151.240.000	100	87.166.600	-	-	
1.01.22.5				Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Manajemen Dewan	2	77.250.000	2	18.000.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					Pendidikan							
1.01.22.7				Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Manajemen Dapodip	12	73.990.000	12	69.166.600	-	-	
1.01.23		Dinas Pendidikan	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Laporan Pengelolaan Manajemen Aset OPD	100	326.400.000	100	300.138.000	-	-	
1.01.23.1				Peningkatan dan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Manajemen Aset	12	326.400.000	12	300.138.000	-	-	
1.01.24		Dinas Pendidikan	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia melalui Beasiswa S-1	Jumlah Mahasiswa Yang Lulus S-1	5000	2.607.969.250	4000	1.462.995.750	Sebagian Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Dan Jasa Tidak Direalisasikan, Dikarenakan Ketidak Sesuaian Dengan Peruntukan	Serapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	
1.01.24.1				Fasilitasi Beasiswa Prestasi S-1	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Manajemen, Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi Kelompok I p 4,0 Dan Hafid / Hafidah	12	2.607.969.250	12	1.462.995.750	-	-	
1.01.7		Dinas Pendidikan		Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SPM Yang Mencapai Target	100	38.008.195.000	0	32.377.507.225			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.7.4				Bantuan khusus siswa miskin	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen operasional BKSM	12	144.600.000	12	138.800.000	-	-	Pemerintah Daerah Kab. Jember lebih memperhatikan Program Pengembangan Kreativitas melalui Pendidikan Non Formal dengan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan formal negeri maupun swasta, keagamaan, pondok pesantren maupun komunitas belajar masyarakat (KBM)
1.01.7.5				Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Perpustakaan dan jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	334	37.863.595.000	251	32.238.707.225	Tidak Dilaksanakan Karena Kondisi Ruang Kelas Masih Baik	Lokasi Penerima Kegiatan Dialihkan Ke Lembaga Yang Lebih Membutuhkan	1. Pihak sekolah harus cepat dalam merespon untuk melakukan updating Dapodik. 2. Melakukan pemerataan kemampuan SDM dan manajemen sekolah dalam melakukan updating data sehingga sekolah terutama dipinggiran yang kondisi mengenaskan dan tidak layak masuk dalam prioritas pembangunan atau perbaikan. 3. Dinas Pendidikan harus lebih meningkatkan pengawasan pembangunan sehingga tidak terjadi banyak kejadian bangunan yang



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												runtuh rusak sebelum diserahterimakan serta menghindari pembangunan yang dijalankan karena pekerjaan waktunya tidak mencukupi sehingga berimplikasi pada serapan pada program Rehabilitasi sekolah yang tidak sesuai target. 4. Kedepan perlu dipertimbangkan kembali kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dan pemerataan dan tentunya harus benar benar melibatkan kepentingan sekolah yang tidak menyalahi aturan. 5. Dinas pendidikan harus lebih maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan bukan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan.
1.02.1	Kesehatan	Dinas Kesehatan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan dasar operasional Dinas Kesehatan	100	6.029.758.683	15	5.595.468.654	Tidak Ada Permasalahan	-	
1.02.				Penyediaan Jasa Surat	Prosentase	100	20.150.	22	13.300.0	Buku Cek	Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.1				Menyurat	Perlengkapan Surat-Menyurat yang disediakan		000		00	Puskesmas Masih Tersedia Sesuai Kebutuhan Kegiatan Selama Tahun 2020	Dilaksanakan Perencanaan Kebutuhan Di Tahun 2021 Terkait Dengan Pemenuhan Buku Cek Dan Kebutuhan Operasional Jasa Surat-Menyurat Lainnya	
1.02.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	529.000.000	6	378.857.752	Kebutuhan Hanya Difokuskan Untuk Pembayaran Air, Listrik Kantor Dan Juga Jasa Telepon	Penyesuaian Dan Pemaksimalan Anggaran Di Tahun 2021	
1.02.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentase Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	100	20.000.000	33	19.880.550	Usulan Perbaikan Peralatan Diusulkan Oleh Bidang/seksi Pada Akhir Triwulan Ke Iii Sehingga Pelaksanaan Dilakukan Pada Triwulan Iv Dan Sudah Sesuai Kebutuhan Peralatan Kerja Yang Akan Diperbaiki	Memaksimalkan Anggaran Pada Tahun 2021 Sesuai Urgensi Dan Kebutuhan Hasil Dari Identifikasi Kebutuhan Pada Awal Tahun	
1.02.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase ATK yang disediakan	100	47.871.500	33	46.929.630	Alat Tulis Kantor Yang Diajukan Sudah Disesuaikan Dengan Usulan	Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Alat Tulis Kantor Mulai Dari Triwulan I S/d	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kebutuhan Di Masing-Masing Bidang Pada Triwulan Iii	Iv Di Masing-Masing Bidang/seksi	
1.02. 1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pencetakan Dokumen dan penggandaan yang disediakan	100	35.950.000	29	31.352.180	Pada Tahun 2020 Masih Belum Ada Usulan/kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	Dilakukan Identifikasi Secara Menyeluruh Bidang/seksi Yang Membutuhkan Cetak Barang Dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan	
1.02. 1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	10.000.000	25	9.999.500	Alat Penerangan Gedung Kantor Masih Berfungsi Dengan Baik, Dan Pada Tahun 2020 Hanya Mengganti Beberapa Komponen Alat Listrik Kantor	Dilakukan Proses Perencanaan Yang Berdasarkan Pada Identifikasi Komponen Alat Listrik Yang Dapat Diproyeksikan Akan Terjadi Kerusakan	
1.02. 1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	20.000.000	33	19.550.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor Baru Terlaksana Di Triwulan Ke Iv Dikarenakan Menyesuaikan Usulan Dari Bidang/seksi	Akan Dilakukan Proses Identifikasi Kebutuhan Mulai Dari Triwulan I S/d Triwulan Iv	
1.02. 1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase makanan dan minuman yang disediakan	100	80.825.000	30	71.690.500	Proses Pekerjaan Dilakukan Pada Triwulan 1 Dan 4 Dikarenakan Pandemi Covid-19 Sehingga	Penyesuaian Anggaran Pada Tahun 2021 Menyesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Serta	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pada Tahun 2020 Kegiatan Rapat Dikurangi Sesuai Urgensitas	Usulan Kebutuhan Yang Ada	
1.02. 1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Rapat-rapat di Propinsi dan pusat yang diikuti	100	90.000.000	32	86.154.301	Penundaan Perjalanan Dinas Selama Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Sesuai Urgensitas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah	
1.02. 1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Prosentase tersedianya tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	100	3.063.914.183	32	2.945.499.025	Penyediaan Tenaga Pendukung Operasional Kantor Hanya Difokuskan Pada Honor/gaji Non Pns	Pemaksimalan Anggaran Sesuai Kebutuhan Di Tahun 2021	
1.02. 1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Persentase Rapat-rapat di Propinsi dan pusat yang diikuti	100	69.850.000	9	15.412.000	Penundaan Perjalanan Dinas Selama Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Dan Kegiatan Sesuai Urgensitas Di Tahun 2021	
1.02. 1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Prosentase Peralatan bahan kebersihan yang disediakan	100	15.000.000	33	14.998.500	Peralatan Kerja Yang Dilakukan Sudah Sesuai Usulan Kebutuhan	Melakukan Identifikasi Perencanaan Kebutuhan Dan Memaksimalkan Anggaran Pada Tahun Selanjutnya	
1.02. 1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase pengelola keuangan dan barang jasa	100	2.027.198.000	25	1.941.844.716	Pelaksanaan Kinerja Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Terdapat Beberapa Sub	Pemaksimalan Anggaran Pada Tahun Selanjutnya Sesuai Prioritas Dan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Karena Tidak Adanya Usulan Dari Bidang/seksi Terkait		
1.02.19		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100	57.170.466.000	50	44.918.167.606	Belum Optimalnya Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Rendahnya Capaian Masyarakat Di Desa/kelurahan Terhadap Akses Sanitasi Dasar/rumah Sehat	Melakukan Pembinaan Pada Ukm, Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor, Melakukan Peningkatan Kie	
1.02.19.6				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Prosentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dilaksanakan	100	21.202.269.000	59	19.757.252.390	Terdapat Bencana Covid 19 Pada Tahun In Sehingga Beberapa Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Secara Maksimal	Prioritas Kegiatan Yang Mendesak Untuk Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Serta Pencegahan Penyebaran Covid 19	
1.02.19.7				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Angka kematian ibu melahirkan (AKI)/100.000 KH	86	35.968.197.000	86	25.160.915.216	-	-	
1.02.2		Dinas Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana	100	115.000.000	99.66	112.182.150	Tidak Ada Permasalahan	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					prasarana kerja sesuai standar daerah							
1.02.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan	100	30.000.000	99.26	29.777.600	Nihil	Nihil	
1.02.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang dilakukan	100	25.000.000	99.99	24.475.900	Nihil	Nihil	
1.02.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	100	60.000.000	99.96	57.928.650	Nihil	Nihil	
1.02.22		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prosentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dilakukan	100	9.858.654.220	95	9.490.615.611	kurangnya Validasi Data Di Tingkat Puskesmas,tidak Ada Kegiatan Tuk Rca Di Puskesmas, Penemuan Kasus Tb Belum Mencapai Target, Angka Keberhasilan Pengobatan Untuk Tb Ro Masih Rendah	memaksimalkan Dana Bok Untuk Kegiatan Validasi Rutin Dari Rca, Meningkatkan Penemuan Kasus Melalui :1.investasi Kontak 2.skrining Pada Kelompok Beresiko Dan Khusus 3.libatan Lintas Sektor	
1.02.22.1				Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Jumlah Kasus Demam Berdarah yang ditangani	100	59.160.000	100	58.789.555	Anggaran Bbm Penyemprotan Tidak Mencukupi Sehingga Tidak Dimungkinkan	Penganggaran Tahun Berikutnya Disesuaikan Dengan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dilakukan Penyemprotan Kembali	Berdasarkan Angka Kejadian Kasus Tahun Terakhir	
1.02.22.2				Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	Prosentase Alat dan Bahan Fogging yang dipenuhi	100	43.909.600	100	40.900.000	-	-	
1.02.22.4				Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah	Prosentase Balita dan Anak Sekolah yang dilakukan Vaksinasi	95	0	0	0	Kegiatan Vaksinasi Anak Balita dan Sekolah Pada Tahun 2020 Belum Dilakukan Pengalihan Anggaran Dikarenakan Adanya Pandemi Covid-19	Kegiatan Ini Direncanakan Ulang Dan Dianggarkan Pada Tahun 2021	
1.02.22.5				Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prosentase kasus penyakit menular yang ditangani	100	7.178.554.620	41	7.037.737.000	Masih Tingginya Angka Covid-19 Dan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Program Secara Daring/virtual	
1.02.22.6				Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Prosentase Kasus Penyakit Endemik dan Epidemik yang ditangani	100	5.880.000	33	5.880.000	Kasus Penyakit Endemik Dan Epidemik Yang Ditangani Pada Tahun 2020 Terkendala Pandemi Sehingga Kegiatan Yang Dilakukan Tidak Maksimal	Akan Dilakukan Perencanaan Ulang Dan Memaksimalkan Penanggaran Pada Tahun Berikutnya	
1.02.22.7				Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Prosentase kasus penyakit menular yang ditangani	100	42.250.000	100	0	-	-	
1.02.				Peningkatan Imunisasi	Prosentase Anak yang	70	2.525.7	24.49	2.344.30	Kegiatan Tidak	Memaksimalkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
22.8					diimunisasi		75.000		9.056	Bisa Dilakukan Secara Maksimal Karena Pandemi	Perencanaan Dan Penaggaran Di Tahun Berikutnya	
1.02.22.9				Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah	Prosentase Laporan Pengamatan Penyakit	80	3.125.000	80	3.000.000	-	-	
1.02.26		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	39.191.799.609	80	37.575.508.948			
1.02.26.1				Pembangunan Rumah Sakit	-	100	6.251.039.609	0	6.251.039.609	Adanya Pandemi Covid 19, Serta Perubahan Alokasi Anggaran	Memaksimalkan Anggaran Dan Perencanaan Di Tahun Berikutnya	
1.02.26.18				Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan	100	32.940.760.000	0	31.324.469.339	Adanya Pandemi Covid 19, Serta Perubahan Alokasi Anggaran	Memaksimalkan Anggaran Dan Perencanaan Di Tahun Berikutnya	
1.02.32		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Prosentase Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang dilaksanakan	100	6.311.849.000	70	5.654.085.054	angka Kematian Ibu Menjadi Salah Satu Indikator Sasaran Yang Perlu Diperhatikan Karena Capaian Untuk Indikator Ini Masih Pada Kategori Cukup. Kematian Ibu Merupakan Masalah Yang Bersifat Multidimensional. Kematian Ibu Di	peningkatan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak Secara Menyeluruh	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan Bidan. 2. Segera menuntaskan pemetaan yang ideal untuk jumlah tenaga kesehatan puskesmas melalui Dinas Kesehatan,



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kab. Jember Kebanyakan Diakibatkan Oleh Masalah Kekurangan Gizi, Anemia Dan Hipertensi, Selain Itu Ketersediaan Infrastruktur Kesadaran Keluarga Juga Merupakan Penyebab Lain Yang Secara Tidak Langsung Bisa Menyebabkan Angka Kematian Ibu		
1.02. 32.4				Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap kasus AMP	12	262.050.000	11	62.370.000	-	-	
1.02. 32.5				Jaminan Persalinan	Angka kematian bayi (AKB)/1000 KH	6	6.049.799.000	5	5.591.715.054	Adanya Bencana Covid 19, Serta Perubahan Alokasi Jampersal, Tetap Ada Persalinan Tetapi Untuk Keuangan Belum Terbayar	Segera Memproses Untuk Bisa Dilakukan Pembayaran Klaim Persalinan Dari Rs Dan Puskesmas	
1.02. 35		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase Pembinaan Lingkungan Sosial yang dilaksanakan	100	45.476.911.768	87	17.444.099.893	Efisiensi Enggaran		
1.02. 35.5				Penyediaan/Peningkatan /Pemeliharaan	Prosentase Penyerapan Anggaran	100	45.476.911.768	38	17.444.099.893	Penyerapan Anggaran Dbhcht	Memaksimalkan Penganggaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	DBHCHT yang dilaksanakan					Di Lakukan Penyesuaian Untuk Covid 19, Selanjutnya Anggaran Covid Sudah Dipenuhi Dari Btt Sehingga Penyerapan Anggaran Dbhcht Belum Maksimal	Dbhcht Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Ketentuan Yang Belaku Pada Tahun Berjalan	
1.02.38		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prosentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang dilaksanakan	100	131.672.280	65	129.404.000	Terdapat Permasalahan Mengenai Validitas Data Hipertensi, Data Pis-Pk Belum Semua Terintegrasi Di Data Spm Hipertensi, Tingginya Angka Prevalensi Hipertensi Di Kab. Jember, Hasil Pendataan Riil Tidak Ditemukan Odgj Sesuai Target Sasaran	Memaksimalkan Data Pis-Pk, Meningkatkan Skrining Kesehatan Melalui Posbindu, Pengoptimalisasian Sistem Penemuan Kasus Dan Deteksi Odgj	
1.02.38.1				Pengendalian Faktor Resiko PTM	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	60	130.672.280	60	128.404.000	Pelaksanaan Skrining Tidak Dapat Maksimal Karena Adanya Pembatasan Kegiatan (karena Kasus Covid-19 Belum Menurun)	Memaksimalkan Kegiatan Skrining Di Fktp.	
1.02.				Deteksi Dini PTM	Persentase	60	1.000.0	52	1.000.00	Kegiatan Deteksi	Memaksimalkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
38.2					Keberhasilan Deteksi Dini PTM yang dilakukan		00		0	Dini Masih Belum Maksimal Karena Sebagian Masyarakat Masih Takut Keluar Rumah (covid-19) Untuk Melakukan Deteksi Dini	Kegiatan Deteksi Dini Di Bps Wilayah Puskesmas	
1.02.40		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Puskesmas BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Status BLUD	50	0	0	0			
1.02.40.1				Peningkatan Pengelolaan Keuangan Puskesmas	Prosentase Puskesmas dengan Realisasi Anggaran diatas 80%	100	0	0	0	Blud Puskesmas Tahun 2020 Masih Belum Menjadi Prioritas Untuk Dilakukan Sehingga Dilakukan Pergeseran Anggaran	Perencanaan Kembali Dan Melakukan Tinjauan Ulang Lebih Lanjut Terkait Dengan Kesiapan Puskesmas Untuk Manjadi Blud Sehingga Bisa Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.02.42		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Prosentase Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan	100	13.508.635.917	70.86	7.630.466.225	pencapaian Mutu Pelayanan Yang Masih Belum Mencapai Target Yang Ditentukan	perbaikan Kinerja Pelayanan Kesehatan Dengan Mengacu Pada Ketercapaian Indikator Mutu Pelayanan Dan Memaksimalkan Pelayanan Kesehatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Rujukan Dengan Pemanfaatan Jsc	
1.02.42.1				Pelayanan Kesehatan Primer	Prosentase Skrining Kesehatan melalui Pusling	48	5.212.924.813	48	2.338.466.225	-	-	
1.02.42.2				Pelayanan Kesehatan Rujukan	Prosentase Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilaksanakan	100	5.868.379.904	64	5.292.000.000	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tidak Semua Kegiatan Dilaksanakan Dikarenakan Terdapat Refokusing Kegiatan	Memaksimalkan Anggaran Dan Perencanaan Di Tahun Berikutnya	1. Memperbaiki program atau sistem aplikasi yang sering terjadi eror ketika bidan menginputkan data kesehatan ibu. 2. Mensosialisasikan sistem aplikasi dimana Fitur yang disediakan dalam JSC With FAI dapat dipahami oleh bidan, sehingga sehingga partisipasi bidan dalam menginputkan data hasil pemeriksaan kesehatan ibu ke dalam sistem informasi JSC with FAI bisa maksimal. 3. Menyempumakan Aplikasi maps untuk melacak lokasi ibu hamil dengan konsep Panic buttons yang bisa melacak banyak titik sehingga mampu memberikan informasi persebaran lokasi di seluruh puskesmas. 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya SDM pelaksana.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.42.3				Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Penyehat Tradisional yang dilakukan pembinaan	1516	6.000.000	72	0	Dikabupaten Jember Belum Ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Berkelompok Yang Berijin (griya Sehat)	Merencanakan Terselenggaranya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Berkelompok Yang Berijin (griya Sehat) Di Kabupaten Jember	
1.02.42.4				Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Primer dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi Gedung Puskesmas	45	2.421.331.200	45	0	50 Puskesmas Sudah Dilakukan Rehabilitasi Dan Perbaikan Sesuai Standar	Penyesuaian Target Dan Kebutuhan Di Tahun Berikutnya	
1.02.46		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pembiayaan Kesehatan	Prosentase pembiayaan Kesehatan yang dilaksanakan	100	228.872.749.612	100	193.583.622.945	-	-	
1.02.46.3				Jaminan Kesehatan Nasional Non-Kapitasi	Prosentase Jaminan Kesehatan Nasional Non-Kapitasi yang dilaksanakan	100	17.552.601.116	92	9.662.087.422	Tidak Ada	Tidak Ada	
1.02.46.4				Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang dibiayai dengan SPM (Surat pernyataan Miskin)	1500	113.273.728.022	991	110.805.711.049	Sinkronisasi Dan Pendataan Maskin Masih Mengalami Kendala	Perbaikan Data Dan Memaksimalkan Pendataan Penduduk Miskin Untuk Dialakukannya Pembiayaan Kesehatan	Setiap program kerjasama yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan pemerintah Jember dengan pihak ketiga yang menggunakan sumber dana APBD harus melalui persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												tentang tata cara kerjasama daerah.
1.02.46.2				Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi	Prosentase Pelayanan JKN di Puskesmas sesuai standar	100	98.046.420.474	100	73.115.824.474	1. Puskesmas Membelanjakan Dana Kapitasi Menunggu Kecukupan Pendapatan Atau Anggaran Kas Pada Dana Kapitasi. 2. Kegiatan Di Puskesmas Terkonsentrasi Pada Penanganan Covid-19	Perencanaan Kegiatan Dan Belanja Lebih Dioptimalkan.	
1.02.47		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Prosentase pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standart CPOB dan CPAKB (Cara Produksi Obat yang Baik dan Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik)	100	11.974.827.220	100	8.756.344.678	Tidak Ada Permasalahan	-	
1.02.47.1				Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapatkan Obat, BMHP dan Bahan Laboratorium	51	7.775.338.220	51	6.939.854.640	-	-	
1.02.47.2				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan alat kesehatan dan pemeliharaannya	50	3.895.099.000	50	1.702.237.638	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.47.3				Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Prosentase Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang dilakukan	100	304.390.000	0	114.252.400	Kegiatan Peningkatan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Masih Belum Dilakukan Karna Adanya Bencana Covid-19 Sehingga Beberapa Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan	Pendataan Dan Pengawasan Bahan Berbahaya Akan Di Maksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
1.02.48		Dinas Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan	Prosentase Upaya kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan Yang dilaksanakan	100	10.385.200.000	41.17	34.380.000	Tidak Ada Permasalahan	-	
1.02.48.1				Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Frekuensi Pelaksanaan Kebugaran Jasmani yang dilakukan	4	45.200.000	4	14.575.000	-	-	
1.02.48.2				Upaya Kesehatan Lingkungan	Persentase Upaya Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan	100	10.340.000.000	42.22	19.805.000	Adanya Bencana Covid 19 Sehingga Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Maksimal	Prioritas Kegiatan Yang Mendesak Dan Upaya Untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19	
1.02.5		Dinas Kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk mengikuti pelatihan fungsional umum dan tertentu	18	3.731.065.000	0	2.415.054.190	permasalahan Pencapaian Indikator Program Yaitu Masih Ada Nakes yang Masih Belum	solusinya Yaitu mengidentifikasi Kembali Untuk Pengiriman Pelatihan Nakes	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Mengikuti Pelatihan		
1.02.5.6				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang dipenuhi dan dilaksanakan	100	3.731.065.000	57	2.415.054.190	Tidak Ada Rekrutmen Tenaga Dokter, Perawat,apoteker	Menunggu Peraturan Untuk Rekrutmen Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat,apoteker)	
1.02.6		Dinas Kesehatan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Usulan Kebutuhan Anggaran Perkantoran dan Sistem Informasi Kesehatan sesuai target/rencana	80	40.000.000	80	24.546.800	Tidak Ada Permasalahan	-	
1.02.6.11				Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan keterisian data SIK diatas 80 %	50	40.000.000	50	24.546.800	-	-	
1.02.34		Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi - BLUD	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan jember sehat	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional RS	100	177.317.065.697	59.51	165.811.905.441	1. jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Yang Menunjang Pelayanan Belum Sesuai Standar 2. peralatan Medis Belum Terpenuhi Sesuai Kelas Rumah Sakit Kelas B Pendidikan 3. resiko Bad Debt Yang Tinggi 4. sistem Rumah Sakit Belum Memadai 5. maintenance Dan Tingkat	1. mengusulkan Kepada Bupati Untuk Penambahan Tenaga Medis Dan Non Medis 2. mengusulkan Alat Medis Yang Belum Terpenuhi Melalui Anggaran Dak, Dau, Apbd Dan Blud 3. meningkatkan Koordinasi Dengan Pihak Terkait Untuk Mempercepat Penagihan 4. melakukan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Utilitas Peralatan Medis Belum Optimal 6. evaluasi Mutu Pelayanan Yang Belum Menyeluruh 7. etos Dan Etika Kerja Sdm Yang Belum Optimal 8. tarif Pelayanan Belum Sesuai Kondisi Terkini	Review Ulang Pembuatan Blue Print Sim Rs Dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 5. melakukan Maintenance Secara Teratur Dan Berkala 6. melakukan Koordinasi Yang Efektif Setiap Unit-Unit Pelayanan 7. meningkatkan Profesionalitas Sdm Melalui Penganggaran Kepegawaian Dengan Disertai Reward Dan Punishment 8. menyusun Dan Menyesuaikan Tarif Dengan Kondisi Saat Ini	
1.02. 34.1				Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional RS	100	177.317 .065.69 7	59.51	165.811. 905.441	1. Bor Atau Efisiensi Penggunaan Tempat Tidur Sangat Rendah Karena Adanya Pandemi Covid-19 2. Kunjungan Pasien Baik Rawat Jalan Maupun Rawat	1. Membantu Pemerintah Daerah Menyukseskan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19 Di Kabupaten Jember. 2. Melakukan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Inap Menurun Karena Adanya Pandemi Covid 19 3. Beberapa Ruangan Sempat Ditutup Dan Tidak Melayani Pasien Karena Dokter Dan Perawat Terinfeksi Covid-19 Sehingga Menurunkan Jumlah Pelayanan Kepada Pasien. 4. Pengisian Dokumen Rekam Medis (drm) Masih Banyak Yang Tidak Lengkap, Mencapai 50% Dari Total Drm Yang Masuk. Paling Banyak Tidak Mengisi Jam Kedatangan Pasien, Tanggal Pasien Masuk, Dan Nama Pasien. 5. Penyetoran Drm Juga Masih Banyak Melebihi Waktu Yang Sudah Ditetapkan Yakni 1 X 24 Jam.	Edukasi Dan Evaluasi Sehingga Pengisian Dan Penyetoran Drm Lengkap Dan Tepat	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Ketidaktepatan Penyetoran Mencapai 80%. Artinya Banyak Dm Yang Disetor Lebih Dari 1 X 24 Jam		
1.02.34		Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung - BLUD	Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Tingkat Pemenuhan Dasar Kebutuhan Rumah sakit	95.24	57.726.243.130	79.51	43.714.757.311	pada Tahun Anggaran 2020 Target Awal Pendapatan sebesar Rp 53.932.588.000, Sehubungan Dengan Terjadinya covid-19 target Pendapatan Dilakukan Refocusing Pada Bulan Mei 2020 Menjadi Rp. 44.926.412.498 Dan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2020 Mengalami Perubahan Kembali Pada Akhir Tahun Menjadi Sebesar Rp. 57.726.243.129,6 2. permasalahan Yang Dihadapi Oleh Rsd Balung Adalah Kegiatan	memaksimalkan Pendapatan Yang Diperoleh Untuk Kegiatan Operasional Rs, Yakni Dengan Mengacu Pada Pendapatan Sebesar Rp. 44.926.412.498.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Operasional Rumah Sakit Tergantung Dari Pendapatan Dan Pencairan Dana Yang Diperoleh, Namun Karena Dengan Terjadinya covid-19 target Pendapatan ditetapkan Oleh Keputusan Bupati sebesar Rp. 44.926.412.498.		
1.02.34.1				Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Tingkat Pemenuhan Dasar Kebutuhan Rumah Sakit	95.24	57.726.243.130	75.73	43.714.757.311	1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Kesehatan Di Rsd Balung Yang Terdiri Atas 3 Belanja Utama (pegawai, Barang Dan Jasa Serta Modal) Sudah Selesai Dilaksanakan. 2. Pada Tahun 2020 Terjadi Pandemic Covid-19 Dan Dilakukan Refocusing Anggaran Oleh Pemerintah	1. Mempercepat Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Kesehatan Di Rsd Balung, Namun Masih Mengacu Pada Realisasi Pendapatan S/d 28 Desember 2020 Dengan Pagu Anggaran Pendapatan Rp.44.926.412.498. 8. Pada Tanggal 29 Desember 2020 Jam 21.00 Wib, Aplikasi Simda Baru	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kabupaten Jember Sehingga Target Pendapatan Diturunkan Menjadi Rp.44.926.412.498. Kemudian Pada Akhir Tahun Anggaran Target Pendapatan Dinaikkan Menjadi Rp.57.726.243.129,62. Namun Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Masih Mengacu Pada Pagu Anggaran Pendapatan Rp.44.926.412.498	Mengakomodir Belanja Sebesar Rp.57.726.243.129,62.	
1.02.34		Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat - BLUD	Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan pengembangan RS	86	35.000.000.000	75.18	26.297.665.514	Program Pelayanan Kesehatan Blud Yang Terdiri Atas Tiga Belanja Antara Lain Belanja Pegawai Blud, Belanja Barang Dan Jasa Blud Serta Belanja Modal Blud Murni Di Dana Dari Pad Atas Pendapatan	Dilakukan Pengajuan Usulan Pendanaan Dari Apbd (dak) Serta Melakukan Efisiensi Pada Belanja Rutin Untuk Dapat Disisihkan Pada Belanja Modal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pelayanan Kesehatan Di Rs, Sehingga Perkembangan Rs (belanja Modal) Kurang Bisa Tercukupi Yang Juga Berpengaruh Pada Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Modern.		
1.02.34.1				Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan pengembangan RS	86	35.000.000.000	75.18	26.297.665.514	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Karena Pandemi	Membuat Skala Prioritas Pelaksanaan Kegiatan Serta Penyesuaian Dengan Pendapatan	
1.03.1	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran	100	6.018.550.000	100	4.366.630.296	penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Program Tersebut Selama Tiga	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Tahun Terakhir	
1.03. 1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan kelistrikan	12	311.025.000	12	259.276.799	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03. 1.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	12	101.510.000	12	48.779.525	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03. 1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya	12	200.000.000	12	195.099.135	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					kebutuhan alat tulis kantor							
1.03.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah dokumen yang digandakan dalam satu tahun	5400	125.000.000	4158	66.866.623	Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat kelistrikan dan penerangan bangunan kantor	200	50.000.000	63	5.955.580	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Pada Tahun Berikutnya	
1.03.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor penunjang administrasi	10	176.875.000	3	20.025.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dalam satu tahun	9600	6.000.000	7600	3.000.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahun Berikutnya	
1.03.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah sajian makan dan minum pegawai yang disediakan	216000	505.000.000	115148	182.573.630	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan akan rapat koordinasi ke luar daerah	12	200.000.000	12	124.056.189	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Rapat-	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi honor bagi tenaga pendukung kelancaran operasional	12	2.654.200.000	12	2.609.124.000		-	
1.03.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan akan rapat koordinasi dalam daerah selama 1 tahun	12	50.000.000	12	14.660.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan	160	115.000.000	18	12.741.815	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Penyediaan Peralatan Dan Bahan Kebersihan	Peralatan Dan Bahan Kebersihan Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah Bulan Terpenuhinya honor bagi tenaga administrasi dan operasional rutin	12	1.523.940.000	12	824.472.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penunjang Administrasi Dan Operasional Rutin Kantor/kedinasan Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.15		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan yang dibangun	83	31.295.447.000	65	3.553.159.551	- Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Kabupaten Tidak Dilakukan Karena Menunggu Hasil Review Trase Dari Kementrian	- kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Kabupaten Menunggu penetapan Trase Dari Kementrian Pu - Untuk Kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pu - Untuk Kegiatan peningkatan Jalan Dan pembangunan/pe ningkatan Jembatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	peningkatan Jalan Dan pembangunan/pe ningkatan Jembatan akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.15.7				Pengadaan Tanah utk. Pelebaran Jalan Kab.	Luas lahan yang dibebaskan	25	267.400.000	0	0	Pembebasan Lahan Tidak Dilakukan Karena Menunggu Hasil Review Trase Dari Kementrian Pu	Penetapan Trase Dari Kementrian Pu	
1.03.15.9				Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	135	21.051.547.000	23	3.543.179.551	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.15.10				Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan	7	9.976.500.000	1	9.980.000	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	Semua kegiatan/pekerjaan harus sesuai dengan target dalam RKPD maupun RPJMD dengan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi perpanjangan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												pekerjaan dan denda pada pihak ketiga (perusahaan) yang menjalankan kegiatan serta tidak berdampak pada pengembalian anggaran.
1.03.16		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang jaringan drainase dan trotoar kondisi baik	102459	9.374.820.000	43816	1.091.632.848	program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.16.3				Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang jaringan drainase yang dibangun	14100	8.676.720.000	659	591.716.902	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	Semua kegiatan/pekerjaan harus sesuai dengan target dalam RKPD maupun RPJMD dengan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi perpanjangan pekerjaan dan denda pada pihak ketiga (perusahaan) yang menjalankan kegiatan serta tidak berdampak pada pengembalian anggaran.
1.03.16.6				Pembangunan/Pemeliharaan Drainase	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara	1100	698.100.000	7347	499.915.946	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.18		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	100	48.525.063.000	100	14.086.341.977	program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.18.3				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan kabupaten yang perlu dilakukan pemeliharaan rutin	100	43.737.024.000	37.29	13.995.318.580	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.18.4				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jemb. yang perlu dilakukan pemeliharaan	55	4.788.039.000	1	91.023.397	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.2		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	1.156.600.000	100	444.815.978	penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan	akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Program	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi kebutuhan Untuk Program Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin maupun berkala	33	200.000.000	32	137.219.910	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah bulan mobil jabatan dalam kondisi laik beroperasi	12	32.000.000	12	8.353.492	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Mobil Jabatan	Mobil Jabatan Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03. 2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional dalam kondisi laik beroperasi	12	849.600.000	12	234.269.381	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03. 2.31				Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Jumlah taman yang dipelihara secara rutin/berkala	1	75.000.000	1	64.973.195	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Taman	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.20		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan yang telah terinspeksi	200	647.582.000	6	40.340.000	program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.20.2				Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah jembatan yang telah terinspeksi	200	647.582.000	6	40.340.000	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.23		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase tingkat kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana BM dan SDA	85	1.100.000.000	82	63.753.798	- Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-Alat Berat	- Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-Alat Berat Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										- Untuk Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan Dan rehabilitasi/pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir - untuk Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan Dan rehabilitasi/pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.23.6				Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan	Jumlah terpenuhinya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmagaan	4	93.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Terlaksana Karena Adanya Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.23.10				Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah bulan ketersediaan alat berat dalam kondisi	12	920.000.000	12	63.753.798	Penyerapan Anggaran Disesuaikan	Akan Memproyeksikan Kembali Target	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					laik beroperasi					Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-Alat Berat	Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-Alat Berat Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.23.12				Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmargaan yang dirawat / diperbaiki	9	87.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Terlaksana Karena Adanya Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.24		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi yang terpelihara	100	467.460.000	100	98.803.935	program Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Lainnya Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19 Dan Penyerapan	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Anggaran Terealisasi Untuk Rapat Dan Perjalanan Dinas		
1.03.24.19				Manajemen Sumber Daya Air dan Irigasi	Pengelolaan sumber daya air dan irigasi	100	467.460.000	21.14	98.803.935	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19 Dan Penyerapan Anggaran Terealisasi Untuk Rapat Dan Perjalanan Dinas	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.53		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	Persentase tersedianya Jaringan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	81	5.180.824.605	60	3.110.488.873	program Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Air tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.53.3				Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Drainase, dan Bangunan Pelengkap	% Jaringan irigasi yang direhabilitasi	81	5.180.824.605	60.04	3.110.488.873	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										19	2020	
1.03.54		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air		Program Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Persentase beroperasinya jaringan irigasi dengan baik	100	10.052.306.100	68.65	2.502.875.207	program Operasi Jaringan Irigasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	akan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.54.3				Penyediaan dan Pembagian Air Irigasi, serta Penetapan Tata Kerja dan Tata Tanam	Jumlah Daerah Irigasi yang dilakukan penyediaan dan pembagian air	448	2.559.900.000	200	700.000.954	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.54.4				Pengendalian Operasi Jaringan Irigasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja operasi jaringan irigasi	1	470.700.000	1	268.153.726	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.54.5				Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Drainase, dan Bangunan Pelengkap	Total panjang saluran irigasi yang terpelihara	59000	1.437.781.420	1978.28	273.573.300	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.54.6				Pengendalian dan Penanggulangan Banjir	Persentase luasan daerah genangan banjir yang telah bebas banjir	80	5.243.424.680	62	1.261.147.227	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Akan Direncanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Banjir Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.54.8				Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Jumlah HIPPA yang Berbadan Hukum	18	340.500.000	0	0	Kegiatan Tidak Terlaksana Karena Pandemi Covid Sehingga Tidak Diperbolehkan Mengadakan Pertemuan	Kegiatan Akan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.6		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah	100	70.900.000	100	0	Penyerapan Anggaran Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	akan Direncanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Program Peningkatan Pengembangan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.6.1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3	11.350.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	Akan Direncanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (lakip) Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020	
1.03.6.9				Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah di SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan administrasi barang daerah di OPD	12	14.800.000	12	0	Penyerapan Anggaran Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	Akan Direncanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Anggaran Untuk Penatausahaan Dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah Di Skpd Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.6.10				Implementasi Sistem Penatausahaan Pendapatan Daerah di SKPD	Jumlah bulan implementasi penatausahaan pendapatan daerah di OPD	12	44.750.000	12	0	Penyerapan Anggaran Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi	Akan Direncanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Implementasi Sistem Penatausahaan Pendapatan Daerah Di Skpd Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
1.03.1		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	54.283.030.000	100	52.192.064.066	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		n Dan Cipta Karya										
1.03.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan surat/paket/data dll yang dikirim	12	120.300.000	12	21.330.000	-	-	
1.03.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	49.857.000.000	12	49.496.560.174	-	-	
1.03.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1	52.500.000	1	51.209.388	-	-	
1.03.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	1	304.000.000	1	154.985.631	-	-	
1.03.1.11				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1	27.500.000	1	21.098.308	-	-	
1.03.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1	19.000.000	1	15.544.758	-	-	
1.03.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	253.250.000	1	82.651.936	-	-	
1.03.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan minum	1	232.000.000	1	75.562.911	-	-	
1.03.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12	106.000.000	12	103.339.348	-	-	
1.03.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah pembayaran honorarium tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	12	1.171.590.000	12	1.120.690.000	-	-	
1.03.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan	12	203.000.000	12	17.355.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					konsultasi dalam daerah							
1.03.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan kebersihan	1	45.000.000	1	24.092.612	-	-	
1.03.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah Pembayaran Honorarium Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	12	1.891.890.000	12	1.007.644.000	-	-	
1.03.2		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	88	1.996.470.000	100	1.430.805.204	-	-	
1.03.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan secara rutin/berkala	4	167.360.000	4	159.743.631	-	-	
1.03.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1	36.650.000	1	14.665.670	-	-	
1.03.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	74	1.675.100.000	69	1.156.279.158	-	-	
1.03.2.31				Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Jumlah unit pemeliharaan taman yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3	117.360.000	3	100.116.745	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.38		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Lingkungan Permukiman	Panjang jalan baru yang terbangun	130000	2.752.800.000	100	2.606.800.597	pelaksanaan Program Tidak Ada Realisasi Maupun Pembangunan, Tetapi Hanya Membayar Hutang Kepada Pihak Ketiga Pada Tahun Anggaran 2019.	Program Ini Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021	
1.03.38.1				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Luas jalan lingkungan yang dibangun	130000	2.752.800.000	0	2.606.800.597	Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19	Akan Di Anggrkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.41		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih	Jumlah KK dengan air bersih	448342	881.870.000	100	261.539.000	pelaksanaan Program Ini Hanya Terealisasi Di 3 Lokasi Yaitu Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono, Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Dan Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Dengan Cakupan Pelayanan 843 KK.	Program Ini Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021	
1.03.41.1				Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Jumlah sarana dan prasarana Air Bersih yang terbangun	30	256.620.000	3	168.990.000	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19		
1.03.41.2				Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	30	388.800.000	0	61.284.000	Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.41.3				Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	30	24.100.000	0	0	Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.41.4				Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah kelompok hippam yang mandiri	223	212.350.000	15	31.265.000	Target Tidak Bisa Tercapai Dengan Maksimal Disebabkan Karena Adanya Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020 Kegiatan Yang Dapat Terlaksana Hanya Pembinaan Pada 15 Kelompok Hippam.	Kegiatan Akan Direncanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Berdasarkan Tren Realisasi Kegiatan Selama 3 Tahun Terakhir.	
1.03.42		Dinas Perumahan Rakyat,	Mengarahkan dan fasilitasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air	Persentase penduduk yang mendapatkan akses sanitasi	93	699.870.000	0	120.515.000	pelaksanaan Program Ini Tidak Terealisasi Di	Program Ini Akan Dianggarkan Kembali Pada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	perwujudan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Limbah						Karenakan Anggaran Dialihkan, covid-19 Tetapi Realisasinya Untuk Pembayaran Personil/tenaga Penjaga Ponton (wc-Umum) Di Alun-Alun Jember.	Tahun 2021	
1.03.42.1				Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah IPAL yang terbangun	35	122.200.000	0	0	Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.42.2				Pembangunan MCK	Jumlah MCK yang terbangun	40	395.120.000	0	0	Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.42.3				Pembangunan Jamban	Jumlah Jamban yang terbangun	500	0	0	0	Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.42.6				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IPAL dan IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara	1	182.550.000	1	120.515.000	-	-	
1.03.43		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan sarana dan prasarana lingkungan	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang terbangun	1240	3.676.613.500	100	1.162.326.500	pelaksanaan Program Hanya Sebatas Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (pju) Sedangkan	Program Ini Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			permukiman							Pembangunan Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Anggaran Di Alihkan Kegiatan Covid-19.		
1.03.43.1				Peningkatan/Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah titik PJU yang berfungsi baik	1240	39.633.500	0	9.333.500	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19.	Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.43.2				Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Titik Lampu PJU terpelihara dengan baik	8200	3.636.980.000	7600	1.152.993.000	-	-	
1.03.45		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Meningkatkan kualitas tata ruang dan keandalan bangunan gedung	Program Pemanfaatan Ruang	Luas lahan yang dibebaskan untuk layanan publik	1	8.778.498.308	100	7.905.864.008	-	-	Terkait perencanaan Desain Pembangunan RTH harus memperhatikan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan sebagaimana Peraturan Menteri PU No 05/PRT/M/2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan nasional Bab Xi Prasarana Dan Sarana Olahraga Pasal 67 ayat 7



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.45.16				Pemeliharaan RTH dikecamatan se-Kabupaten Jember	Jumlah RTH di Kecamatan yang terpelihara	5	1.373.360.000	5	961.925.700	-	-	
1.03.46		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Meningkatnya kualitas tata ruang dan keandalan bangunan gedung	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan (%)	107	1.076.860.000	100	516.165.000	-	-	
1.03.46.2				Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen yang terselesaikan	1	865.060.000	1	502.415.000	-	-	
1.03.46.5				Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi bangunan gedung yang terbit IMB	500	211.800.000	500	13.750.000	Realisasi Rekomendasi Imb Melebihi Dari Nilai Target, Sebesar 2.069.	Akan Di Targetkan Sesuai Dengan Kebutuhan Di Tahun Berikutnya	
1.03.47		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya		Program Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik yang ramah ibu dan anak (%)	80	36.173.349.884	100	2.927.713.104	-	-	
1.03.47.1				Fasilitasi Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen bangunan gedung	1	338.400.000	1	86.870.000	-	-	
1.03.47.5				Pembangunan Gedung Negara	Jumlah gedung negara terbangun	1	3.694.832.879	0	1.914.485.879	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19. Penyerapan	Akan Di Anggrkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Anggaran Untuk Sisa Pembayaran Proyek Fisik Tahun 2019 Kepada Pihak Ketiga		
1.03.47.7				Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan gedung negara yg direhab	96	32.140.117.005	0	926.357.225	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19. Penyerapan Anggaran Untuk Sisa Pembayaran Proyek Fisik Tahun 2019 Kepada Pihak Ketiga	Akan Di Anggrkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.03.6		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	80	15.600.000	100	15.600.000	-	-	
1.03.6.9				Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah di SKPD	Jumlah dokumen yang diselesaikan	1	15.600.000	1	15.600.000	-	-	
1.03.44		Bagian Tata Pemerintahan	Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi	Program Perencanaan Tata Ruang	% rupa bumi unsur alami yang terinventarisir	67.74	181.600.000	67	178.640.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			daerah									
1.03.44.13				Survey dan Pemetaan	Jumlah rupa bumi unsur alami dan unsur buatan yang terinventarisir	5	181.600.000	7	178.640.000	-	-	
1.04.15	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah aset PSU	3	186.085.000	0	13.130.000	Pelaksanaan Program Ini Hanya Sebatas Pendataan Di Wilayah Kabupaten Jember	Program Ini Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021	
1.04.15.3				Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah kawasan perumahan yang sudah menyerahkan Fasum/Fasos	3	186.085.000	3	13.130.000	-	-	
1.04.20		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Makam yang bersih dan indah	9	764.740.000	8	413.915.209	Pelaksana Program Hanya Bersifat Pemeliharaan Di Areal Pemakaman Seperti Pembelian Obat Pembasmi Rumpur Dan Membayar Personil Pemakaman	Program Ini Akan Dianggarkan Kembalipda Tahun 2021	
1.04.20.7				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah makam yang dikelola dengan baik	9	764.740.000	9	413.915.209	-	-	
1.04.21		Dinas Perumahan Rakyat,	Mengarahkan dan fasilitasi	Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Kawasan Tertentu	Jumlah Perbaikan Rumah Kurang Layak Huni (PRKLH)	11197	4.308.975.000	100	2.430.730.229	pelaksanaan Program Ini Hanya Untuk	Program Ini Akan Dianggarkan Kembalipda	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	perwujudan sarana dan prasarana lingkungan permukiman							Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ke Tiga Pada Tahun Anggaran 2019	Tahun 2021	
1.04.21.1				Pembangunan dan Peningkatan Prasarana. Sarana. dan Utilitas pada Kawasan kumuh/tertentu	Luas kawasan kumuh yang tertangani	10	35.000.000	0	0	Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.04.21.2				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH tertangani	700	3.734.675.000	0	2.380.540.229	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	1. Pelaksanaan program bantuan sosial harus sesuai dengan ketentuan permenag no 13 tahun 2018 pasal 23 A, pemberian bantuan sosial yang diserahkan pada individu/keluarga harus disampaikan nama, alamat dan besaran bantuan sosial yang diberikan. 2. Melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan program bantuan sosial di lapangan.
1.04.21.5				Pemeliharaan Trotoar Jalan	Panjang trotoar yang terpelihara	1000	539.300.000	0	50.190.000	1. Adanya Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19 2. Pendataan	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Volume Pekerjaan Yang	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kembali Panjang Trotoar Yang Akan Di Bangun Di 3 Kecamatan Kota	Sama.	
1.04.23		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Meningkatnya kualitas tata ruang dan keandalan bangunan gedung	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase wilayah dusun yang memperoleh aliran listrik	95	85.158.800	100	40.498.800	pelaksana Program Ini Hanya Sebatas Pendataan Dan Koordinasi Karena Anggaran Dialihkan/refocusing Kegiatan Covid -19.	Program Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021	
1.04.23.1				Pengembangan dan Pemeliharaan Kelistrikan	Jumlah Paket pengembangan dan pemeliharaan kelistrikan	4	85.158.800	0	40.498.800	Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19. Penyerapan Anggaran Untuk Sisa Pembayaran Proyek Fisik Tahun 2019 Kepada Pihak Ketiga	Akan Di Anggrkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
1.05.1	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Satpol PP	100	2.096.493.000	65	1.955.783.155	Koordinasi Yang Belum Menghasilkan Persamaan Persepsi Yang Optimal	Perlu Penambahan Intensitas Koordinasi, Sehingga Membuahkan Persamaan Persepsi Yang Optimal Dalam	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Pelaksanaan Program Di Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	20	55.000.000	20	45.027.155	Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Beberapa Daerah	Melaksanakan Kegiatan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan	
1.05.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	-	20	1.422.000.000	20	1.384.878.000	Limitasi Pagu Anggaran	Pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (pak)	
1.05.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	-	20	14.500.000	5	4.990.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Karena Adanya Pandemi Covid - 19 Sehingga Harus Mengikuti Anjuran Untuk Menjaga Jarak Dan Mengurangi Kerumunan	Kegiatan Akan Dilaksanakan Kembali Secara Optimal Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Untuk Kegiatan Yang Dilaksanakan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan	
1.05.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	-	20	604.993.000	20	520.888.000	Tidak Ada Kendala Yang Membatasi Laju Kegiatan	Kegiatan Dapat Dilaksanakan Dengan Tertib Dan Lancar	
1.05.11		Satuan Polisi Pamong Praja		Program Peningkatan Disiplin dan Penguatan Wawasan Kebangsaan	% peningkatan disiplin aparaturnya Satpol PP	25	370.861.500	42.9	140.009.500	Adanya Kendala Terkait Dengan Ketidacukupan Persyaratan	Konsistensi Perencanaan Dan Administrasi Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Administrasi Dalam Pelaksanaannya		
1.05.11.1				Penyelenggaraan Apel Besar. Upacara Bulanan. Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase terselenggaranya Apel Besar, Upacara Bulanan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	25	370.861.500	5.46	140.009.500	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Karena Adanya Pandemi Covid - 19, Sehingga Harus Mengikuti Anjuran Untuk Menjaga Jarak Dan Mengurangi Kerumunan	Kegiatan Akan Dilaksanakan Kembali Secara Optimal Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Untuk Kegiatan Yang Dilaksanakan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan	
1.05.15		Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan kehidupan masyarakat yg aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat	18	0	15.28	0	1. tidak Terlaksananya Pembinaan Dan Pelatihan Satlinmas Terkait Trantibum 2. adanya Kendala Terkait Dengan Ketidacukupan Persyaratan Administrasi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pelatihan Trantibum	1. meningkatkan Koordinasi Dengan Stakeholder/ Opd Terkait 2. konsistensi Perencanaan Dan Jadwal Pelaksanaan	
1.05.15.1				Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan	Presentase peningkatan	18	0	0	0	Kegiatan Tidak Dapat	Kegiatan Akan Dilaksanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				dan Kenyamanan Lingkungan	keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat					Dilaksanakan Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran (anggaran dialihkan Untuk Penanganan Covid-19)	Kembali Secara Optimal Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Untuk Kegiatan Yang Dilaksanakan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan	
1.05.16		Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan kehidupan masyarakat yg aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	% pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100	286.000.000	20,78	132.600.000	Adanya Kendala Terkait Dengan Ketidakcukupan Persyaratan Administrasi Dalam Pelaksanaannya	Konsistensi Pencanaan Dan Administrasi Pelaksanaan	
1.05.16.7				Pengamanan Pejabat dan Aset Pemkab	Terjaganya pejabat, aset Pemkab Jember dan masyarakat dari berbagai gangguan Trantibum	20	286.000.000	6,46	132.600.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Karena Adanya Pandemi Covid-19, Sehingga Harus Mengikuti Anjuran Untuk Menjaga Jarak Dan Mengurangi Kerumunan	Kegiatan Akan Dilaksanakan Kembali Secara Optimal Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Untuk Kegiatan Yang Dilaksanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan	
1.05.19		Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan kehidupan masyarakat yg aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	% Pembentukan satuan linmas di masyarakat	100	6.528.153.700	34.35	1.172.335.000	1. tidak Terlaksananya Pembinaan Dan Pelatihan Satlinmas Terkait Trantibum 2. adanya Kendala Terkait Dengan Ketidacukupan Persyaratan Administrasi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pelatihan Trantibum	1. meningkatkan Koordinasi Dengan Stakeholder/ Opd Terkait 2. konsistensi Perencanaan Dan Jadwal Pelaksanaan	
1.05.19.1				Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Persentase pembentukan satuan linmas di masyarakat	35	6.528.153.700	23.65	1.172.335.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Karena Adanya Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Tahapan Kampanye, Kegiatan Tatap Muka Ditiadakan Diganti Dengan Vicon	Kegiatan Dilaksanakan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan	
1.05.2		Satuan Polisi Pamong Praja		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standart	20	282.080.000	40.9	147.958.300	Pemeliharaan Mobil Jabatan Dan Dinas/operasional	Mengedepankan Skala Prioritas, Kendaraan Yang Paling	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					daerah					Disesuaikan Dengan Kebutuhan.	Membutuhkan Perawatan	
1.05.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	-	20	34.600.000	18.33	13.452.550	Kegiatan Mobilitas Kasat Tidak Dapat Terlaksana Secara Optimal Karena Adanya Pembatasan Kegiatan Akibat Pandemi Covid-19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Target Dan Kebutuhan Anggarannya, Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	20	247.480.000	17.32	134.505.750	Kondisi Kerusakan Yang Berbeda Pada 1 Unit Sama Mengakibatkan Pemeliharaan Dalam 1 Triwulan Sampai 2 Atau 3 Kali Pemeliharaan.	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Target Dan Kebutuhan Anggarannya, Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.20		Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan kehidupan masyarakat yg aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	20	0	0	0	Adanya Kendala Terkait Dengan Ketidacukupan Persyaratan Administrasi Dalam Pelaksanaannya	Konsistensi Perencanaan Dan Jadwal Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			Kuat dan Bersih									
1.05.20.1				Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Persentase Jumlah Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	20	0	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran (anggaran dialihkan Untuk Penanganan Covid -19)	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Target Dan Kebutuhan Anggarannya, Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.22		Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan kehidupan masyarakat yg aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam	25	0	2.12	0	1. tidak Terlaksananya Pembinaan Dan Pelatihan Satlinmas Terkait Dengan Jejaring Kerja Bencana Alam 2. adanya Kendala Terkait Dengan Ketidacukupan Persyaratan Administrasi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pelatihan Jejaring Kerja Bencana Alam	1. meningkatkan Koordinasi Dengan Stakeholder/opd Terkait 2. konsistensi Perencanaan Dan Jadwal Pelaksanaan	
1.05.22.1				Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi	Persentase pencegahan dini penanggulangan	25	0	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Bencana Alam	korban bencana alam					Secara Optimal Karena Adanya Refocusing Anggaran (anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid -19)	Dengan Memproyeksikan Target Dan Kebutuhan Anggarannya, Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.28		Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan kehidupan masyarakat yg aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	% penanganan bencana kebakaran	20	682.128.000	56.47	532.261.863		-	
1.05.28.1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		20	15.000.000	13.66	11.532.500	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Secara Optimal, Sisa Anggaran Merupakan Efisiensi Anggaran.	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Secara Optimal, Jadi Tidak Ada Kendala Yang Berarti	
1.05.28.2				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	20	251.400.000	11.44	119.070.863	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Karena Suku Cadang Unit Kendaraan Susah Untuk Didapat, Mengingat Unit	Pemeliharaan Menyesuaikan Dengan Ketersediaan Suku Cadang	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Yang Melebihi Masa Azas Manfaat		
1.05.28.3				Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	20	415.728.000	11.42	401.658.000	Dinamika Pengaduan Masyarakat Cenderung Fluktuatif	Mengutamakan Pelayanan Menyeluruh Pada Masyarakat	
1.05.9		Satuan Polisi Pamong Praja		Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda	% Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan	33	244.700.000	35.75	33.963.500	1. kendala Ketidacukupan Persyaratan Administrasi Dalam Pelaksanaan, 2. belum Adanya Kerjasama Dengan Pn.	1. konsistensi Perencanaan Dan Administrasi Pelaksanaan 2. perlu Nota Kerjasama Dengan Pn	
1.05.9.2				Pengawasan dan Inventarisasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah (Perda)	Persentase pengawasan dan inventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan daerah	33	139.600.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Terkendala Adanya Pandemi Covid - 19 Dan Belum Dapat Dipenuhinya Persyaratan Administrasi	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggarannya, Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.9.3				Penanganan Pelanggaran Perundang-undangan dan Peraturan Daerah (Perda)	Persentase penanganan pelanggaran	33	105.100.000	13.2	33.963.500	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Karena Adanya Pandemi Covid - 19	Pelaksanaan Kegiatan Mematuhi Protokol Kesehatan; Bersama Dengan Jajaran Samping Serta Satgas	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Covid Melaksanakan Operasi Yustisi	
1.05. 16		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui kerukunan antar umat beragama dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan penghormatan HAM	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100	479.900.000	45.05	0	Anggaran Yang Tersedia Tidak Memungkinkan Untuk Di Serap Karena Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Yang Mendesak	Kegiatan Tetap Terlaksana Berdasarkan Tupoksi Bidang Kajian Strategis Dan Politis Kedepan Untuk Dapat Diannggarkan Kembali	
1.05. 16.1 0				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memahami Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat	Pelaksanaan Deteksi Dini dalam Rangka Antisipasi Permasalahan Keamanan	100	479.900.000	40	0	Anggaran Yang Tersedia Tidak Memungkinkan Untuk Di Serap Karena Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Yang Mendesak	Kegiatan Tetap Terlaksana Berdasarkan Tupoksi Bidang Kajian Strategis Dan Politis	
1.05. 16.1 1				Peningkatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas	Peningkatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan dini masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kantrantibmas.	100	0	40	0	Dialihkan Untuk Anggaran Covid	Kedepan Untuk Dianggarkan Kembali Untuk Meningkatkan Peran Fkdm Di Wilayah	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.17		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa (JEMBER IMTAK)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya wawasan kebangsaan	58	0	13.4	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Sesuai Rencana Karena Ada Efisiensi Anggaran, Namun Koordinasi Tetap Dilakukan	Kedepan Untuk Dapat Dianggarkan Kembali	
1.05.17.4				Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Bangsa	Tumbuhnya kesadaran bela negara dalam rangka memperkokoh ketahanan bangsa	16.5	0	20	0	Dialihkan Untuk Anggaran Covid	Kedepan Untuk Dianggarkan Kembali Guna Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Kader Bela Negara Di Kabupaten Jember	
1.05.21		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	95	1.072.830.000	88.33	289.400.000	Kegiatan Terlaksana Sesuai Dengan Rencana Akan Tetapi Anggaran Tidak Terserap Keseluruhan Di Karenakan Efisiensi	Kedepan Untuk Dianggarkan Kembali	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			rangka mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa (JEMBER IMTAK)							Anggaran Dan Membatasi Pertemuan Secara Langsung Karena Pertemuan Dilakukan Secara Daring		
1.05.21.6				Peningkatan Peran dan Efektifitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu (DESK)	Persentase jumlah peserta yang mengikuti situasi pemilu yang jujur dan adil	19.67	928.080.000	19	289.400.000	Kegiatan Desk Terlaksana Sesuai Dengan Rencana Akan Tetapi Anggaran Tidak Dapat Terserap Keseluruhan Di Karena Efisiensi Dan Membatasi Pertemuan Secara Langsung Karena Pertemuan Dilakukan Secara Daring	Kedepan Untuk Di Angarkan Kembali Apabila Ada Kegiatan Desk	
1.05.21.8				Sosialisasi Dalam Rangka Penciptaan Situasi Pemilu Yang Aman Jujur dan Adil	Persentase Partisipasi masyarakat di dalam Pemilu semakin meningkat	19.67	144.750.000	0	0	Anggaran Dialihkan Untuk Covid	Kedepan Untuk Di Anggarkan Kembali Ketika Ada Penyelenggaraan Pemilu Guna Menekan Pemilih Untuk Tidak Golput	
1.05.26		Badan Kesatuan	Meningkatkan	Program Peningkatan Monitoring dan	Jumlah parpol penerima bantuan	10	57.140.000	63	0	sesuai Surat Dirjen Politik Dan	Kedepan Untuk Dapat	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Bangsa Dan Politik	penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	sosial yang telah dimonitoring dan dievaluasi					Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 7 Januari 2019, Nomor : 213/074/polpum, Penhal Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Dilakukan 2 Tahapan Tahun Anggaran 2019. kegiatan Tidak Terlaksana Sesuai Dengan Rencana, Akan Tetapi Pelaksanaan Dengan Tim Verifikasi Dan Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tetap Di Laksanakan Sampai Dengan Tersalurkan Bantuan Keuangan Tahun 2020	Dianggarkan Kembali	
1.05.26.1				Fasilitasi dan Verifikasi Pelaksanaan PAW Anggota DPRD dan Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik	Jumlah parpol penerima bantuan dana partai politik yang terfasilitasi	10	57.140.000	10	0	Bertambahnya 1 Kursi Parpol Menjadi 11 Parpol Dan Kegiatan Tidak Berjalan Sesuai Dengan	Perencanaan Kedepan Lebih Sesuai	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Rencana, Akan Tetapi Pelaksanaan Dengan Tim Verifikasi Dan Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tetap Di Laksanakan Sampai Dengan Terselurkannya Bantuan Keuangan Tahun 2020.		
1.05.22		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengurangan resiko bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	angka kerentanan	100	336.278.750	64.63	217.335.500	1. Belum Adanya Peraturan Daerah Ttg Penanggulangan Bencana Dan Rencana Kontijensi 2. Belum Tersusunnya Rencana Kontijensi Sebagai Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat 3. Minimnya Anggaran Untuk Pemasangan Sistem Peringatan Dini Dan Rambu/ Papan Informasi Benacana 4. Belum Terpetakannya Jawasan Rawan	1. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana Dan Rencana Kontijensi 2. Penambahan Anggaran Untuk Pemasangan Ews Pd Wilayah Rawan Bencana 3. Segera Memetakan Kawasan Rawan Bencana 4. Membentuk Desa Tangguh Bencana Utk Seluruh Desa	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Bencana Untuk Disebarluaskan Ke Masyarakat		
1.05.22.1				Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	jumlah baliho, spanduk, siaran radio dan televisi	100	88.500.000	100	78.960.000	Target 100 Buah Sedangkan Realisasi 115 Buah, 15 Buah Spanduk Swadana	Akan Memproyeksikan Kembali Target Kebutuhan Untuk Penyediaan Kegiatan Pemantauan Dan Penyebaran Informasi Di Masa Yg Akan Datang Berdasarkan Trend Realisasi Kebutuhan Untuk Ini Selama 3 Tahun Terakhir	
1.05.22.8				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Kontejensi. Rencana Aksi. Rencana Operasi Kebencanaan. serta SOP Kebencanaan dan Kebakaran	jumlah RPB yang tersusun	100	0	0	0	Adanya Refokusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid 19	Akan Di Anggaran Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.22.9				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana serta Fasilitas Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destan) yang di bentuk dan Jumlah kade tanggap bencana yang terbentuk (500 org)	5	247.778.750	5	138.375.500	Jumlah Desa Yang Dibentuk Destana Sebanyak 5 Desa Yang Seharusnya 15 Desa, Tidak Terealisasi Karena Terkendala Dengan Adanya Pandemi Covid 19 Sehingga	Akan Dilaksanakan Dan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Thn 2020 (15 Desa)	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Tidak Mengadakan Pertemuan Untuk Melaksanakan Kegiatan Ini		
1.05.25		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengurangan resiko bencana	Program Penanganan Darurat pada saat Bencana	-	100	906.330.100	95.28	863.539.330	Kurangnya Peralatan Dan Sarana Prasarana Dalam Proses Penanganan Bencana Dalam Evakuasi Korban Bencana Alam. minimnya Personel /petugas Kebencanaan. Dibanding Dengan Luas Wilayah Kabupaten Jember	Penambahan Sarana Dan Prasarana Peralatan Evakuasi Dan Alat Pelindung Diri. karena Itu Perlu Penambahan Jumlah Personel Relawan /trc D Seluruh Kabupaten Jember	
1.05.25.1				Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasi	Jumlah pusdalops, TRC, Relawan didaerah rawan bencana	100	691.200.000	99.22	685.800.000	-	-	
1.05.25.2				Penanganan Korban Bencana	jumlah dapur umum dan huntara didaerah bencana	100	70.262.250	47.13	33.116.480	Karena Pada Triwulan Ke Iv Bencana Alam Yang Terjadi Tidak Begitu Banyak, Justru Banyak Terjadi Setelah Diawal Tahun 2021	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dan Target Minimal Sama Denagn Tahun Berikutnya	
1.05.25.3				Sertifikasi Relawan Bencana	Jumlah relawan bencana yang memiliki sertifikasi	310	0	0	0	Adanya Refokusing Kegiatan Dan	Akan Dianggarkan Kembali Pada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid 19	Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.25.4				Pengadaan Sarana Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana	jumlah pembelian matras, velbed, tenda dll	100	12.600.000	98.06	12.355.000	Adanya Refokusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Akibat Dari Dampak Pandemi Covid 19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.25.5				Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Tinggal Penampungan	jumlah Pembelian logistik dan obat2an	100	132.267.850	100	132.267.850	Adanya Refokusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Akibat Dari Dampak Pandemi Covid 19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.27		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengurangan resiko bencana	Program Penanganan Pasca Bencana	persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100	400.000.000	74.77	299.088.525	1. Minimnya Anggran Utk Perbaikan Rumah Yg Rusak Pasca Bencana Dan Pengadaan Bahan Bangunan Untuk Pemulihan Rumah 2. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Yg Menagani Pemulihan	1. Penambahan Anggaran utk Perbaikan Rumah Yg Rusak Pasca Bencana Dan Pengadaan Bahan Bangunan Untuk Pemulihan Rumah 2. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Yg Menagani Pemulihan Rumah 3. opd Terkait	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Rumah 3. Hasil Kaji Cepat Dari Tim Jitupasna Belum Di Manfaatkan Oleh Opd Teknis Terkait	Menindak Lanjuti hasil Kaji Cepat Dari Tim Jitupasna	
1.05.27.1				Rehabilitasi Sarana Prasarana Korban Bencana Alam	jumlah sarpras yang di rehabilitasi	100	250.000.000	88.39	220.978.525	Pada Kegiatan Ini Ada Sub Kegiatan Trauma Healing Yang Tidak Di Laksanakan Karena Dampak Dari Pandemi Covid 19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.05.27.2				Rekontruksi Sarana Prasarana Korban Bencana Alam	jumlah sarpras yang di rekonstruksi	100	150.000.000	52.07	78.110.000	Kegiatan Tidak Sepenuhnya Terlaksana Karena Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
1.06.1	Sosial	Dinas Sosial		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tertib Administrasi Perkantoran	100	2.853.149.800	88.83	1.968.657.595	-	-	
1.06.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadministrasian dan pengiriman surat menyurat	12	10.500.000	9	6.053.000	Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dilaksanakan Efisiensi	Melengkapi Pengadministrasian Dalam Pelaksanaan Pengiriman Surat Menyurat Untuk Tertib Administrasi Perkantoran	
1.06.				Penyediaan Jasa	Peningkatan	100	254.550	88.8	129.031.	Merupakan	Dilaksanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.2				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Kebutuhan Kantor akan air, listrik dan komunikasi		.000		229	Kegiatan Rutin Kantor Jumlah Kebutuhan Pembayaran Rekening Air. Listrik Dan Telekomunikasi	Berdasarkan Besar Kebutuhan Tagihan Dan Dilaksanakan Dengan Tertib Administrasi	
1.06.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	1	6.000.000	1	2.620.073	Merupakan Kegiatan Rutin Kantor Dalam Hal Ini Belum Terdapat Permasalahan	Meningkatkan Tertib Administrasi Dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Arahan Dan Petunjuk	
1.06.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Penyediaan ATK utk Kelancaran Tugas Administrasi Kantor	100	150.000.000	47.29	70.930.890	Pada Kegiatan Penyediaan Atk Dilaksanakan Efisiensi	Dalam Proses Pelaksanaan Penyediaan Atk Dilakukan Tertib Admisistrasi	
1.06.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan tertib administrasi Kantor dengan Penyediaan Foto Copy, Cetak dll	100	105.000.000	65.3	68.564.672	Dilaksanakan Efisiensi Pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Lebutuhan Cetak dan Penggandaan Dilaksanakan Secara Tertib Administrasi Untuk Menunjang Kelancaran Kegiatan Rutin Kantor	
1.06.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Penerangan Kantor	100	78.500.000	41.21	32.350.782	Dilaksanakan Efisiensi Pada Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Untuk Pemenuhan Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Dilaksanakan Dengan Tertib Administrasi Berdasar Pada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Bangunan Kantor	Kebijakan Dari Pimpinan	
1.06.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur dengan Sarana Prasarana Kantor yang Memadai	100	87.500.000	57.72	51.383.492	Dilaksanakan Efisiensi Pada Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dalam Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Dan Kelengkapan Kantor Secara Tertib Administrasi Untuk Kelancaran Kegiatan Rutin Kantor	
1.06.1.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100	65.327.300	38.37	24.453.895	Alam Prosen Pelaksanaan Pengisian Tabung Gas. Belanja Souvenir Dan Peralatan Dapur Dilaksanakan Berdasarkan Usulan Kebutuhan Peralatan Untuk Kelancaran Kantor	Dilaksanakan Dengan Tertib Administrasi Dan Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan	
1.06.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan SDM Aparatur	100	20.000.000	38.75	7.750.000	Pada Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dilaksanakan Efisiensi Kegiatan	Dilaksanakan Dengan Memperhatikan Administrasi Kantor Yang Tertib Dan Berdasarkan Arahan Dan Petunjuk	
1.06.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Aparatur	100	368.842.500	54.12	199.599.533	Pada Kegiatan Penyediaan Makanan Dan	Dilaksanakan Berdasarkan Petunjuk Dan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Minuman Dilaksanakan Efesiensi Kegiatan	Arahan Dengan Tertib Administrasi	
1.06.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan Kegiatan Dinas Luar Daerah (SPPD)	100	200.000.000	83.02	149.205.638	Pada Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dikarenakan Pembatasan Untuk Dimasa Pandemi	Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Arahan Dan Petunjuk	
1.06.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah paket pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN	1	195.000.000	1	100.570.000	Merupakan Kegiatan Rutin Penunjang Kegiatan Kantor Dalam Menunjang Kegiatan Lapangan Dengan Mobilitas Kegiatan Diwilayah Kabupaten Meliputi Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Jember	Dilaksanakan Berdasarkan Petunjuk Dan Arahan Serta Melengkapi Administrasi Secara Tertib	
1.06.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Peningkatan Kebersihan Kantor	100	18.000.000	57.34	10.322.066	Merupakan Kegiatan Rutin Kantor Dan Dilaksanakan Berdasarkan Kebutuhan Peralatan Dan Bahan Kebersihan	Melaksanakan Sesuai Arahan Dan Petunjuk Serta Tertib Administrasi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Berdasarkan Jumlah Kebutuhan		
1.06.1.26				Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program	Peningkatan Ketertiban Rumah Pemdokan di Kab Jember	100	4.820.000	39.71	1.909.854	Dalam Pelaksanaan Penyerapan Berdasarkan Pada Surat Masuk Pengajuan Ijin Rumah Pemdokan	Dilaksanakan Sesuai Petunjuk Dan Arahan Serta Tertib Administrasi	
1.06.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Peningkatan Kinerja Aparatur	100	1.289.10.000	86.41	1.143.912.471	Dalam Proses Pelaksanaan Merupakan Kegiatan Rutin Dilaksanakan Untuk Menujangan Kinerja Aparatur Dalam Hal Ini Belum Ditemukan Permasalahan	Dilaksanakan Sesuai Dengan Petunjuk Dan Arahan Serta Ditunjang Dengan Tertib Administrasi	
1.06.15		Dinas Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Taraf Hidup Fakir Miskin dan PMKS Lainnya	90	36.000.000	71.28	34.330.377	Kegiatan Tidak Bisa Maksimal Di Laksanakan Dikarenakan Kendala Teknis Di Lapangan, Data Yg Belum Akurat Dll	Perbaikan Dan Assesment Calon Penerima Bantuan Untuk Tahun Selanjutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.15.5				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Peningkatan Kesejahteraan Hidup bagi Keluarga Miskin	90	6.000.000	83.4	4.999.173	Anggaran Ini Dialihkan Untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19	Dilaksanakan Efisiensi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19	penyaluran pendukung sarana dan prasarana bagi orang miskin harus didasarkan pada ketentuan bantuan hibah/ sosial yang diserahkan pada individu/keluarga dan harus disampaikan nama, alamat dan besaran bantuan sosial didasarkan pada usulan calon penerima yang menurut Perbup No 19 tahun 2016 harus diketahui oleh kepala desa dan camat setempat
1.06.16		Dinas Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan SDM/Ketrampilan bagi PMKS	90	85.000.000	88.24	23.359.009	Kegiatan Tidak Bisa Maksimal Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Kendala Teknis	Perbaikan Untuk Tahun Selanjutnya	
1.06.18		Dinas Sosial	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Peningkatan Kualitas dan taraf Hidup Penyandang Disabilitas	90	9.350.000	91.58	8.000.000	Pada Kegiatan Hdi Dan Pelatihan Ketrampilan Permasalahan Ada Di Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Peningkatan Kegiatan Pada Tahun Selanjutnya	
1.06.18.3				Pendidikan dan Pelatihan bagi	Peningkatan kesejahteraan dan	90	9.350.000	90	8.000.000	Anggaran Yg Belum Terserap	Dialksanakan Realisasi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Penyandang Cacat dan Eks Trauma	ketrampilan bagi penyandang cacat/disabilitas					Dialihkan Untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19	Anggaran Untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19	
1.06.19		Dinas Sosial	Peningkatan Pembinaan LKSA	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Peningkatan Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan	90	183.287.500	92.27	29.772.304	Keakuratan Data Penerima Bantuan Bagi Anak Yatim/piatu	Dilaksanakan Verifikasi Data Penerima Bantuan	
1.06.19.3				Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Peningkatan Kesejahteraan bagi Penghuni Panti Asuhan	90	123.937.500	22.17	27.475.568	Anggaran Yang Belum Terserap Dialihkan Untuk Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19	Dilaksanakan Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19	
1.06.2		Dinas Sosial		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana Prasarana Kantor yang Memadai	100	722.700.000	83.12	533.492.090	-	-	
1.06.2.7				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kinerja Aparatur	100	54.250.000	74.02	38.121.777	Kegiatan Sudah Terselamatkan Di Tawar	Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan	
1.06.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Gedung Kantor yang Memadai	100	155.000.000	99.84	154.755.459	-	-	
1.06.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Mobil Jabatan yang Memadai	100	127.250.000	43.63	55.981.454	Merupakan Kegiatan Rutin Dan Dilakukan Berdasarkan Kebutuhan Pemeliharaan Mobil Jabatan	Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan Operasional Mobil Jabatan	
1.06.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Meningkatnya Kendaraan Operasional	100	386.200.000	73.7	284.633.400	Merupakan Kegiatan Rutin	Pelaksanaan Dengan Tertib	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Dinas/Operasional	yang Memadai					Perkantoran Pelaksanaan Dalam Hal Ini Belum Terdapat Permasalahan	Administrasi Dan Dilakukan Sesuai Dengan Petunjuk Dan Arahan	
1.06.2.42				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana prasarana Gedung Kantor yang Memadai	100	0	0	0	Aggaran Dialihkan Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid 19	Dilaksanakan Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid 19	
1.06.20		Dinas Sosial	Peningkatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Peningkatan Kesejahteraan Hidup dan Ketrampilan bagi PMKS	90	123.268.000	93.08	45.723.637	pelatihan Ketrampilan Yang Kurang Maksimal Dikarenakan Terkendala Anggaran Yang Dibutuhkan	Usulan Penambahan Anggaran	
1.06.20.3				Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial	Peningkatan Ketrampilan dan Taraf Hidup PMKS dengan diberi bantuan dan pelatihan ketrampilan	90	123.268.000	37.25	45.723.637	1. Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Dengan Usulan Masyarakat 2. Anggaran Yang Belum Terserap Di Alihkan Untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid	Dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Pmks Dan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										19		
1.06.21		Dinas Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kepedulian Terhadap Korban Bencana	90	471.794.000	63.55	342.026.692	Pelaksanaan Kegiatan Terkendala Masalah Teknis	Peningkatan Kegiatan Untuk Tahun Selanjutnya	
1.06.21.2				Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan bagi Korban Bencana Alam	90	471.794.000	72.56	342.026.692	Dilaksanakan Berdasarkan Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dan Sosial	Dilaksanakan Menunggu Petunjuk Dan Arahan	
1.06.22		Dinas Sosial	Peningkatan Pelestarian Perjuangan Kepahlawanan Kemerdekaan	Program Pelestarian Perjuangan Kepahlawanan Kemerdekaan	Program Pelestarian Perjuangan Kepahlawanan Kemerdekaan	90	180.758.100	75.43	146.076.936	Terkendala Masalah Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dan Masalah Teknis DII	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pada Tahun Selanjutnya	
1.06.24		Dinas Sosial	Peningkatan Verifikasi Data Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Program Data. Survey. dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kegiatan Verifikasi Data Fakir Miskin Penerima Kartu Jaminan Kesehatan	90	532.500.000	77.02	303.092.846	Kendala Teknis Dan Administrasi	Peningkatan Kegiatan Untuk Tahun Selanjutnya	
1.06.24.1				Pendataan, Survey dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kegiatan Verifikasi data Masyarakat Miskin Penerima Kartu Jaminan Kesehatan	90	532.500.000	55.34	303.092.846	Data 26 Pkms Yang Harus Diolah Dan Dimasukan Didata Terpadu Maka Dan Harus Ada Data Yang Valid Dan Tepat Sasaran	Dilakukan Verifikasi Dan Validasi Data Untuk Mendapatkan Data Penerima Manfaat Yang Valid Agar Tepat Sasaran	Pemerintah Daerah Kab. Jember harus memiliki hasil survey verifikasi dan validasi data kemiskinan yang mampu ditunjukkan kepada publik sebagai data yang valid.
1.06.25		Dinas Sosial	Peningkatan	Program Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat	-	0	954.462.600	54.51	184.442.949	Kendala Teknis Dan Administrasi	Peningkatan Kegiatan Pada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			Penyuluhan dan Kampanye Sosial bagi PMKS								Tahun Selanjutnya	
1.06.25.1				Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dunia Usaha	Peningkatan Peran Masyarakat dalam kepedulian terhadap PMKS	90	712.350.000	23.17	165.019.765	Anggaran Yang Belum Terserap Dilaikan Untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19	Dilaksanakan Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid 19	
1.06.26		Dinas Sosial		Program Penyuluhan dan Kampanye Sosial bagi PMKS	-	0	0	7.37	0	Masalah Pada Teknis Kegiatan	Perbaikan Pada Tahun Selanjutnya	
1.06.5		Dinas Sosial		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur	100	0	0	0	-	-	
1.06.5.3				Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Kepegawaian dan Lainnya untuk peningkatan SDM Aparatur	90	0	0	0	Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Opd Tidak Boleh Mengadakan Bimtek Kepegawaian	Anggaran Tersebut Dialihkan Untuk Kegiatan Pelayanan Sosial Lainnya	
1.06.7		Dinas Sosial		Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Sosial pada PMKS di UPT LIPOSOS	100	1.079.958.000	40.44	1.022.389.447	Pelayanan Sosial Di Upt Liposos Terkendala Minimnya Anggaran	Pengajuan Tambahan Anggaran Untuk Tahun Selanjutnya	
1.06.7.1				Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Sosial pada PMKS di UPT Liposos	100	1.079.958.000	94.67	1.022.389.447	Anggaran Kegiatan Sudah Dilaksanakan Dengan Maksimal Pada Tw I S/d Iii	Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Klien, Pengiriman Klien Ke Daerah Asal Di Laksanakan Di Tw	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											lv	

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.01.1	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	749.424.000	58.77	440.414.405	secara Keseluruhan Kegiatan - Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Program Ini tidak Ada Permasalahan realisasi Sudah Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	penyusunan Anggaran Pada Masing - Masing Kegiatan Tahun Berikutnya Akan Direncanakan Lebih Akurat Lagi	
2.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% Terkirimnya Surat	100	2.850.000	16.36	559.5	Pengiriman Surat Melalui Email Sehingga Tidak Memerlukan Biaya Pengiriman	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
2.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% Terbayarnya tagihan	100	52.800.000	77.71	41.038.895	Kurang Memaksimalkan Personil Dan Anggaran Yang Ada	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas Dan Pemaksimalan Anggaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Tersedianya ATK	100	74.012.000	60.83	45.032.950	Program Kegiatan Tidak Dilaksanakan Secara Optimal Sehingga Atk Tidak Tersalisasi Secara Maksimal	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
2.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	15.960.000	99.96	15.955.000	Nihil	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
2.01.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Tersedianya Komponen Listrik	100	7.450.000	99.99	7.450.000	Nihil	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
2.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	% Tersedianya Bahan Bacaan dan Literatur	100	4.800.000	62.49	3.000.000	Kurang Maksimalisasi Personil Serta Anggaran	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas Dan Maksimalkan Personil Yang Ada	
2.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	% Tercukupinya kebutuhan air minum pegawai	100	191.490.000	12.12	23.186.860	Acara Rapat Rapat Tidak Dilaksanakan Karena Pandemi Covid-19	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
2.01.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	% Tercukupinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	108.400.000	20.56	33.871.500	Rapat Rapat Koordinasi Ke Luar Kota Banyak Dilaksanakan Dengan Zoom Meeting (karena Pandemi Covid19)	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
2.01.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	% Tersedianya Tenaga Pendukung kelancaran operasional Kantor	100	136.800.000	99.99	136.800.000	Nihil	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100	5.600.000	0	0	Karena Masa Pandemi Covid-19 Sehingga Tidak Dilaksanakan	Dilaksanakan Pada Tahun Berikutnya	
2.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	%Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan	100	10.262.000	99.99	10.262.000	Nihil	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
2.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	%Tersedianya Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	100	139.000.000	88.65	123.257.700	Kinerja Kurang Maksimal Terkendala Covid 19	Pemaksimalan Ditahun Berikturnya	
2.01.19		Dinas Tenaga Kerja	Program tidak ada di renstra	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja di Lingkungan Masyarakat Tembakau	160	920.000.000	40	182.077.500	pelaksanaan Kegiatan Dalam Program Ini Bisa Terlaksana Meskipun Belum Sesuai Dengan Perencanaan Dan Target Kinerja. Kegiatan Terhambat Karena Kebijakan Psbb	untuk Selanjutnya, Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/teknis Pada Kegiatan Tersebut Akan Disusun Sesuai Kondisi Dan Kebijakan Terbaru.	
2.01.19.4				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah tenaga terampil masyarakat sektor tembakau	160	920.000.000	40	182.077.500	Pelaksanaan Harus Sesuai Protokol Covid	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Protokol Covid Dan Dan Aturan Psbb	
2.01.2		Dinas Tenaga Kerja		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	100	217.190.000	21.31	46.292.526	secara Keseluruhan Kegiatan - Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Program Ini	penyusunan Anggaran Pada Masing - Masing Kegiatan Tahun Berikutnya Akan Direncanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										tidak Ada Permasalahan realisasi Sudah Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	Lebih Akurat Lagi	
2.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	%Terpeliharanya Mobil Jabatan	100	75.490.000	22.01	16.621.250	Kegiatan Operasional Secara Umum Berkurang Karena Protokol Covid Dan Aturan Psbb	Realisasi Disesuaikan Dengan Pelaksanaan Kegiatan	
2.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	%Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	100	100.200.000	19.75	19.796.276	Kegiatan Operasional Secara Umum Berkurang Karena Protokol Covid Dan Aturan Psbb	Realisasi Disesuaikan Dengan Pelaksanaan Kegiatan	
2.01.2.26				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100	41.500.000	23.8	9.875.000	Kurang Maksimalnya Penyerapan Dikarenakan Adanya Pandemi Covid 19	Pemaksimalan Kinerja Ditahun Berikutnya	
2.01.20		Dinas Tenaga Kerja		Program Pelatihan dan Perluasan Kerja	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pencari Kerja	310	60.000.000	270	31.205.000	pelaksanaan Kegiatan Dalam Program Ini Bisa Terlaksana Semua Meskipun Belum Sesuai Dengan Perencanaan Dan Target Kinerja. Kegiatan Terhambat Karena Kebijakan Psbb	untuk Selanjutnya, Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/teknis Pada Kegiatan Tersebut Akan Disusun Sesuai Kondisi Dan Kebijakan Terbaru	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.01.20.3				Pembinaan Instruktur dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan	%Terlaksananya Pembinaan Instruktur dan Lembaga Pelatihan	30	30.000.000	25	19.705.000	Pelaksanaan	Pelaksanaan Dilakukan Sesuai Protokol Covid19	
2.01.20.4				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang sudah dibina	30	30.000.000	4	11.500.000	Pelaksanaan Harus Sesuai Protokol Covid	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Protokol Covid Dan Dan Aturan Psbb	
2.01.21		Dinas Tenaga Kerja		Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja	2000	134.834.000	606	22.360.000	1. pelaksanaan Kegiatan Dalam Program Ini Sebagian Belum Sesuai Dengan Perencanaan Dan Target Kinerja. Kegiatan Terhambat Karena Kebijakan Psbb	untuk Selanjutnya, Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/teknis Pada Kegiatan Tersebut Akan Disusun Sesuai Kondisi Dan Kebijakan Terbaru	
2.01.21.2				Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	Jumlah penempatan pencari kerja pada bursa kerja	1000	70.400.000	0	0	Karena Adanya Pandemi Covid-19 Sehingga Kegiatan Tidak Memungkinkan Untuk Dilaksanakan	Diharapkan Tahun Depan Dapat Terlaksana	1. Pemerintah kabupaten Jember harus mempunyai program yang signifikan baik secara perencanaan atau anggaran untuk menyelesaikan persoalan penyerapan tenaga kerja serta hubungan industrial yang relatif tidak kondusif melalui program-program keberpihakan pada pekerja maupun buruh. 2. Mengoptimalkan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												kerja dewan pengupahan dengan memberikan perhatian kebijakan maupun program serta anggaran.
2.01.21.4				Pembinaan, Perlindungan, dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia		0	64.434.000	41	22.360.000	Kasus Pmi Meninggal Dan Kecelakaan Kerja	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kasus Pmi	
2.01.21.7				KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)	Dokumen kerjasama antar daerah	1	0	0	0	Tidak Dilaksanakan Karena Anggaran Kegiatan Ksad Dialihkan Untuk Dana Covid-19	Dianggarkan Pada Tahun Berikutnya	
2.01.21.8				Penempatan Calon Transmigran Berdasarkan Kuota KSAD	Jumlah penempatan calon transmigran berdasarkan dokumen KSAD	5	0	0	0	Tidak Dilaksanakan Karena Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Dana Covid-19	Dianggarkan Pada Tahun Berikutnya	
2.01.22		Dinas Tenaga Kerja		Program Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Ketenangan bekerja dan berusaha (Industrial peace)	440	386.210.000	72	180.660.000	1. pelaksanaan Kegiatan Dalam Program Ini Bisa Terlaksana Semua Meskipun Sebagian Kegiatan Belum Sesuai Dengan Perencanaan Dan Target Kinerja. Kegiatan Terhambat Karena Kebijakan Psbb	untuk Selanjutnya, Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/teknis Pada Kegiatan Tersebut Akan Disusun Sesuai Kondisi Dan Kebijakan Terbaru	
2.01.				Pembahasan UMK	Usulan nilai besaran	1	221.450.	1	154.680.	Secara Umum	Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
22.3					Upah Minimum Kabupaten		000		000	Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	Kegiatan Dilakukan Secara Internal Dan Parsial Dengan Protokol Covid	
2.01.22.4				Pemberdayaan Kelembagaan Dewan Pengupahan Kabupaten	Terlaksananya Monev pelaksanaan UMK di Perusahaan	200	62.000.000	12	7.580.000	Secara Umum Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	Pelaksanaan Kegiatan Dilakukan Secara Internal Dan Parsial Dengan Protokol Covid	
2.01.22.5				Penerapan Sistem Deteksi Dini di Perusahaan	Terlaksananya pemetaan perusahaan rawan masalah	200	62.760.000	20	5.365.000	Secara Umum Semua Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	Pelaksanaan Kegiatan Dilakukan Secara Internal Dan Parsial Sesuai Dengan Protokol Covid	
2.01.22.7				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	40	40.000.000	40	13.035.000	Secara Umum Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	Pelaksanaan Kegiatan Dilakukan Secara Internal Dan Parsial Sesuai Dengan Protokol Covid	1. Pemerintah kabupaten Jember harus mempunyai program yang signifikan baik secara perencanaan atau anggaran untuk menyelesaikan persoalan penyerapan tenaga kerja serta hubungan industrial yang relatif tidak kondusif melalui program-program keberpihakan pada pekerja maupun buruh. 2. Mengoptimalkan kerja dewan pengupahan dengan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												memberikan perhatian kebijakan maupun program serta anggaran.
2.02.1	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	2.790.295.500	100	982.664.101	Realisasi Anggaran Tidak Maksimal	Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Serta Penambahan Sdm	
2.02.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran telepon, listrik, internet dan air	100	364.262.000	100	256.364.806	-	-	
2.02.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase tersedianya ATK kebutuhan kantor dan lapangan	100	333.693.500	80	171.411.800	Adanya Efisiensi Sehingga Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Akan Memproyeksikan Kembali Target Kebutuhan Untuk Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Trend Realisasi Untuk Kegiatan Ini Selama 3 Tahun Terakhir	
2.02.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase tersedianya makanan dan minuman ASN	100	164.598.000	70	19.900.000	Adanya Efisiensi Sehingga Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan	Akan Memproyeksikan Kembali Target Kebutuhan Untuk Kegiatan Ini Di Masa Yang Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kebutuhan	Datang Berdasarkan Trend Realisasi Untuk Kegiatan Ini Selama 3 Tahun Terakhir	
2.02.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase terlaksananya koordinas program kegiatan dengan pemerintah provinsi dan pusat	100	399.350.000	100	55.467.295	-	-	
2.02.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase terlaksananya pembayaran gaji, honor dan uang lembur ASN	100	1.528.392.000	90	479.520.200	-	-	
2.02.15		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	2	257.872.500	0	10.847.500			
2.02.15.7				Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan	31	128.022.500	31	10.847.500	Kinerja Sudah Tercapai, Namun Penyerapan Anggaran Kecil Karena Terkendala Teknis Administrasi	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.02.				Pelaksanaan	Pembentukan dan	200	129.850.	60	0	Kegiatan Ini	Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
15.8				Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Pembinaan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		000			Hanya Terlaksana Pada Pembinaan Pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (patbm) Dengan Penyerapan Anggaran Sebagian Menggunakan Anggaran Lpkp Jawa Timur	Dilaksanakan Kembali Kegiatan Ini Di Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Target Kebutuhan Untuk Kegiatan Ini Berdasarkan Trend Realisasi Untuk Kegiatan Ini Selama 3 Tahun Terakhir	
2.02.16		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kegiatan SKPD yg responsif gender	75	246.725.000	75	50.200.000	Realisasi Anggaran Kurang Maksimal Dan Kurangnya Sdm	Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Serta Penambahan Sdm	
2.02.16.1				Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Persentase kegiatan PD yang responsif gender	100	176.950.000	100	0	Penyerapan Anggaran Kegiatan Ini Menggunakan Anggaran Di Bksdm Kabupaten Jember	Akan Dianggarkan Kembali Dengan Memproyeksikan Target Kebutuhan Untuk Kegiatan Ini Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Trend Realisasi Untuk Kegiatan Ini Selama 3 Tahun Terakhir	
2.02.				Fasilitasi Pengembangan	Rasio Kekerasan	0.01	69.775.0	0.01	50.200.0	Masalah	Kegiatan Ini Tetap	1. Pemerintah



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
16.2				Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Dalam Rumah Tangga		00		00	Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Sudah Menurun	Akan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	kabupaten Jember harus lebih serius menangani persoalan perlindungan perempuan diantaranya pada program fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2PT) dengan harapan mampu rasio kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menambah SDM dalam menangani persoalan perlindungan perempuan pada program fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2PT)
2.02.17		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kebijakan Perlindungan perempuan & anak dari berbagai tindak kekerasan	5	46.600.000	1	0			
2.02.17.1				Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah	5	46.600.000	1	0	Terkendala Teknis Administrasi	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.02.18		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah jenis pelatihan	6	63.700.000	1	0			
2.02.18.2				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah pelatihan	6	63.700.000	1	0	Terkendala Teknis Administrasi	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.02.2		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah	100	2.578.751.000	100	180.539.837	Realisasi Anggaran Baik	Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Serta Penambahan Sdm	
2.02.2.3				Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan balai penyuluhan KB	0	0	0	0	Tidak Divalidasi Oleh Bkbn Sehingga	Akan Diupayakan Dilaksanakan Kembali Pada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan Ini Tidak Dapat Dilakukan	Tahun 2022 Dengan Melengkapi Persyaratan- Persyaratan Yang Diperlukan	
2.02.2.4				Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya mobil jabatan/kendaraan dinas operasional	1	437.107.200	0	0	Terkendala Teknis Administrasi	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.02.2.14				Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Pengadaan 432 unit; 31 laptop; 31 LCD, 93 BKB Kit, 150 implant Kit, 50 IUD Kit, 20 Obgynbed, 57 Hp Android	150	1.676.899.800	0	66.762.500	Terkendala Teknis Administrasi	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.02.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100	296.594.000	33	46.000.000	Terkendala Teknis Administrasi	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.02.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan kendaraan mobil jabatan	100	46.700.000	100	22.675.230	-	-	
2.02.				Pemeliharaan	Pemeliharaan	100	121.450.	100	45.102.1	Kinerja Kegiatan	Kegiatan Ini Tetap	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.24				Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional		000		07	Ini Sudah Tercapai, Namun Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Karena Adanya Efisiensi	Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020, Dengan Pagu Anggaran Akan Mengikuti Sesuai Pagu Dari Bkbn Provinsi Jawa Timur	
2.02.8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	107.736.000	100	49.746.000	Realisasi Anggaran Cukup Baik	Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Serta Penambahan Sdm	
2.02.8.4				Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Persentase kapasitas kinerja aparatur	100	77.800.000	100	20.800.000	Kinerja Sudah Tercapai, Namun Penyerapan Anggaran Kecil Karena Terkendala Teknis Administrasi	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.02.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Persentase dokumen perencanaan 2016-2021 (RKA, DPA, Renstra, Renja dll)	100	29.936.000	100	28.946.000	-	-	
2.03.	Pangan	Dinas	Meningkatk	Program Peningkatan	Prosentase	2	138.300.	2	0	Payung Hukum	Mengintensifkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
15		Ketahanan Pangan Dan Peternakan	an Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	meningkatnya ketersediaan produksi pangan (padi)		000			Program Dan Kegiatan Terlambat Terbit, Sehingga Program Dan Kegiatan Tidak Bisa Segera Dilaksanakan.	Koordinasi Dengan Biro Hukum Setda Kabupaten Jember Untuk Menjembatani Terbitnya Payung Hukum Tersebut.	
2.03.15.10				Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan POKTAN/GAPOKTAN tentang distribusi pangan	100	27.400.000	0	0	Adanya Pandemi Covid-19, Menyebabkan Kegiatan Yang Melibatkan Orang Banyak Dibatasi, Sehingga Acara Pelatihan Poktan/gapoktan Belum Bisa Dilaksanakan	Tetap Menyusun Rencana Dan Jadwal Kegiatan Untuk Mempersiapkan Jika Sewaktu-Waktu Kegiatan Bisa Dilaksanakan.	
2.03.15.33				Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah kelompok sasaran KRPL	15	55.250.000	0	0	Belum Bisa Dilaksanakannya Sosialisasi Kegiatan Karena Adanya Pandemi Covid-19	Tetap Menyiapkan Dan Mematangkan Materi Sosialisasi Sebagai Langkah Awal Jika Sewaktu-Waktu Sosialisasi Bisa	
2.03.15.35				Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Jumlah dokumen peta ketahanan pangan	2	55.650.000	0	0	Belum Bisa Melaksanakan Survei Dan Pemetaan Daerah -Daerah Rawan Pangan Di Kabupaten Jember Akibat Adanya Pandemi Covid-19	Tetap Menyiapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Yang Ada Sebagai Langkah Persiapan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan.dan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Kerentanan Pangan Di Kab. Jember	
2.03.16		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Jumlah olahan pangan baru yang tersedia	9	92.400.000	8	41.750.000	-	-	
2.03.16.1				Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah uji sampling bahan pangan	8	92.400.000	4	41.750.000	Pengambilan Sample Pangan, Tidak Bisa Dilaksanakan, Akibat Adanya Pengetatan Kegiatan Sosial Akibat Kembalinya Kab.jember Ke Zona Merah	Tetap Mempersiapkan Rencana Aksi Kegiatan Jika Sewaktu Waktu Kegiatan Bisa Dilaksanakan.	
2.03.16.2				Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	Jumlah peserta lomba cipta menu	60	0	0	0	Kegiatan Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Akibat Adanya Pandemi Covid-19	Penyesuaian Perencanaan Target Dan Anggaran Tahun Berikutnya	
2.04.17	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Upaya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	100	1.082.000.000	100	18.900.000	Pelaksana Program Hanya Pendataan	Program Ini Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021	
2.04.17.1				Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah bidang tanah yang terfasilitasi	18000	1.082.000.000	0	18.900.000	Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid 19, Realisasi Anggaran Diperuntukan	Akan Di Anggrkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Untuk Fgd Dan Koordinasi Dan Konsultasi Tentang Perbub Ptsl.		
2.05.1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	457.372.000	100	385.045.230	pada Beberapa Kegiatan Mengalami Adanya Pergeseran Anggaran, Dan Anggaran Kegiatan Menjadi Nol Dan Tidak Memenuhi Serapan Anggaran Karena Terkendala Proses Administrasi, Selain Itu Penyerapan Anggaran Pada Beberapa Kegiatan Di Sesuaikan Dengan Kebutuhan	memproyeksikan Target Kebutuhan Untuk Beberapa Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Selama Tiga Tahun Terakhir Dan dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.05.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12	0	0	0	Adanya Pergeseran Anggaran, Dan Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menjadi Nol	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.05.				Penyediaan Jasa	Jumlah bulan	12	73.500.0	12	50.529.4	Penyerapan	Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.2				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa telepon dan internet		00	60		Anggaran Di Sesuaikan Dengan Kebutuhan	Memproyeksikan Target Kebutuhan Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Selama Tiga Tahun Terakhir	
2.05.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja	12	12.000.000	12	11.687.500	-	-	
2.05.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	31.200.000	6	12.112.500	Dilaksanakan Kegiatan Cetak Dan Penggandaan Pada Triwulan Iv, Tidak Memnuhi Serapan Anggaran Karena Terkendala Proses Administrasi	Akan Memproyeksikan Target Kebutuhan Untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Cetak Dan Penggandaan Selama Tiga Tahun Terakhir	
2.05.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	12	0	0	0	Adanya Pergeseran Anggaran. Dan	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					pegawai					Anggaran Kegiatan Penyediaan Makan Minum Menjadi Nol	Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.05.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	5	25.000.000	1	1.020.000	Terkendala Pandemi Covid-19, Rapat Koordinasi Dilaksanakan Via Daring	Akan Memproyeksikan Target Kebutuhan Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Selama Tiga Tahun Terakhir	
2.05.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah orang untuk memenuhinya tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	26	292.172.000	24	291.978.000	-	-	
2.05.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	6	10.000.000	4	4.285.000	Dilaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah Pada Triwulan 4	Akan Memproyeksikan Kembali Kebutuhan Untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Ini	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Selama Tiga Tahun Terakhir	
2.05.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	12	2.500.000	9	2.458.500	Dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan Bahan Kebersihan Di Triwulan 4, Penyerapan Anggaran Di Sesuaikan Dengan Kebutuhan	Akan Memproyeksikan Kembali Kebutuhan Untuk Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Bahan Kebersihan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Ini Selama Tiga Tahun Terakhir	
2.05.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah orang untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional rutin kantor	25	11.000.000	0	10.974.270	Realisasi Kinerja Orang Untuk Memenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Operasional Rutin Kantor Tidak Dilaksanakan Karena Terkendala Teknis Administrasi, Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kegiatan Rutin Lainnya (atk)	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Kebutuhan Untuk Kegiatan Penunjang Administrasi Dan Operasional Rutin Kantor/kedinasan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.05.15		Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang dikelola	92	4.897.750.000	88	4.645.168.278	Keterbatasan Prasarana Dan Sarana Serta Personal Tanaga Pengelolaan Persampahan Baik Itu Yang Ada Di Tpa Maupun Pada Kawasan-Kawasan Permukiman Masyarakat	Memaksimalkan Pemanfaatan Sarana Yang Ada Walaupun Pada Akhirnya Berimplikasi Pada Efektivitas Penggunaan Anggaran Karena Dengan Pemanfaatan Sarana Yang Sudah Tua Maka Diperlukan Juga Anggaran Pemeliharaan Yang Relatif Besar. Pada Sisi Lain Guna Mengoptimalkan Manfaat Program Yang Dilaksanakan Juga Diperlukan Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Khususnya Pada Kawasan-Kawasan Permukiman	
2.05.15.2				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kumultatif TPST 3 R dan pengelolaan sampah	12	114.000.000	2	111.588.400	Terkendala Teknis Administrasi	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					berbasis masyarakat						Dengan Memproyeksikan Kembali Kebutuhan Untuk Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut.	
2.05. 15.4				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Presentase sampah tertangani	92	4.783.750.000	90	4.533.579.878	Keterbatasan Prasarana Dan Sarana Serta Personal Tanaga Pengelolaan Persampahan Baik Itu Yang Ada Di Tpa Maupun Pada Kawasan- Kawasan Permukiman Masyarakat, Petunjuk Tim Sakip Anggaran Belanja Bbm Dan Service Kendaraan Operasional (truck Sampah Dan Kendaraan Roda	Memaksimalkan Pemanfaatan Sarana Yang Ada Walaupun Pada Akhirnya Berimplikasi Pada Efektivitas Penggunaan Anggaran Karena Dengan Pemanfaatan Sarana Yang Sudah Tua Maka Diperlukan Juga Anggaran Pemeliharaan Yang Relatif Besar. Pada Sisi Lain Guna Mengoptimalkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Tiga Pengangkut Sampah) Di Laksanakan Pada Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Manfaat Program Yang Dilaksanakan Juga Diperlukan Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Khususnya Pada Kawasan- Kawasan Permukiman, Perlu Perencanaan Awal Yang Lebih Tepat Dan Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.05.15.16				Pengelolaan TPA	Peningkatan kelas/tipe TPA	0	0	0	0	Adanya Pergeseran Anggaran. Dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Tpa Menjadi Nol	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.05.16		Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	% partisipasi perusahaan yang taat membuat dan menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi/ ijin lingkungan	77	59.400.000	52	25.294.044	pada Kegiatan Peningkatan Tpa pergeseran Anggaran. dan Anggaran Menjadi Nol, Dan Pada Beberapa Kegiatan Terkendala Teknis	kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020, dengan Memproyeksikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			daya alam							Administrasi. keterbatasan Prasarana Dan Sarana Serta tenaga Pengelolaan Persampahan baik itu Yang Ada Di Tpa Maupun Pada kawasan- Kawasan Permukiman Masyarakat, Petunjuk Tim Sakip Anggaran Belanja Bbm Dan Layanan Kendaraan Operasional (truk Sampah Dan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah) Di Laksanakan Pada Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Kembali Kebutuhan Untuk Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut. melaksanakan Pengawasan Terhadap Kegiatan / Usaha Yang Memiliki Dampak Terhadap Lingkungan Di Kabupaten Jember, Serta Meningkatkan Koordinasi Dengan Opd Yang Terkait Baik Secara Vertikal Maupun Horizontal memaksimalkan Pemanfaatan Sarana Yang walaupun Pada Akhirnya Berimplikasi pada Efektivitas Penggunaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Anggaran karena Dengan Pemanfaatan Sarana Yang sudah Tua Maka Diperlukan Juga Anggaran pemeliharaan Yang Relatif Besar. pada Sisi lain Guna Mengoptimalkan Manfaat program Yang Dilaksanakan Juga diperlukan Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan khususnya Pada Kawasan- Kawasan permukiman, Perlu Perencanaan Awal Yang Lebih Tepat Dan Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.05.16.3				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air	18	59.400.000	9	25.294.044	Pengambilan Sample Air Di 9 Titik, Sedangkan 9 Titik Lainnya	Diperlukan Perencanaan Pengambilan Sample Pada Titik	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Terkendala Teknis Administrasi	Sungai	
2.05.19		Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Skor Nilai SLHD	86	0	0	0	adanya Pergeseran Anggaran. Dan Anggaran Kegiatan Penyusunan Ikplhd Kabupaten Jember Menjadi Nol	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.05.19.9				Penyusunan IKPLHD Kabupaten Jember	Jumlah buku SLHD	6	0	0	0	Adanya Pergeseran Anggaran. Dan Anggaran Kegiatan Penyusunan Ikplhd Kabupaten Jember Menjadi Nol	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.05.2		Dinas Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart daerah	100	114.772.000	9.7	11.130.971	dilaksanakan Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Sebanyak 17 Unit, Petunjuk Tim Sakip Anggaran Belanja Bbm Dan Layanan	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Menyesuaikan Sesuai Kebutuhan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kendaraan Operasional (truk Sampah Dan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah) Di Laksanakan Pada Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Kendaraan Dinas/operasional.	
2.05. 2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130	114.772.000	17	11.130.971	Dilaksanakan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Sebanyak 17 Unit, Petunjuk Tim Sakip Anggaran Belanja Bbm Dan Service Kendaraan Operasional (truck Sampah Dan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah) Di Laksanakan Pada Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Menyesuaikan Sesuai Kebutuhan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.06.1	Administrasi Kependudukan Dan Capil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	100	5.844.942.500	68.99	3.511.867.401	Karena Kebutuhan Pada Tahun 2019 Sudah Terpenuhi	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Sesuai Kegiatan - Kegiatan	
2.06.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja benda-benda pos	100	128.600.000	32.61	41.939.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Kebutuhan	
2.06.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	384.600.000	61.42	236.596.823	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan, Pemakaian Listrik Tetap Akan Tetapi Biaya Menurun	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentasenya terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	132.700.000	29.94	39.733.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	100	199.500.000	98.4	196.312.500	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	
2.06.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedi	100	115.000.000	77.98	89.681.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 345 unit	100	684.547.500	3.05	20.855.635	Belanja Modal Tidak Dapat Diserap Karena Posisi Anggaran Masih Perkada Dan Bukan Apbd	Penyerapan Anggaran Hanya Dapat Dilaksanakan Yang Sifatnya Wajib Dan Mengikat	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.06.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan yang tersedia	100	11.900.000	88.24	10.500.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk pegawai, untuk rapat dan kegiatan 3 paket	100	271.340.000	70.47	191.205.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	321.535.000	94.18	302.816.643	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi dan Operasional Kantor yang tersedia	100	3.053.991.000	68.32	1.933.697.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	372.250.000	99.95	372.055.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	1. Pemerintah kabupaten Jember harus melakukan program terobosan dan upaya untuk mempermudah dalam pelayanan kependudukan. 2. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam pelayanan kependudukan, karena secara dukungan infrastruktur itu sangat memungkinkan dilakukan. 3. Bupati tidak melakukan mutasi jabatan di Dinas



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												Kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2.06.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah Peralatan dan Alat Kebersihan 1 paket	100	168.979.000	45.26	76.475.800	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.15		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Program Penataan Administrasi Kependudukan		0	338.790.000	22.06	187.949.000	karena Kebutuhan Pada Tahun 2019 Sudah Terpenuhi	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Sesuai Kegiatan - Kegiatan	
2.06.15.12				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 4 kegiatan	100	167.790.000	84.78	142.239.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	1. Pemerintah kabupaten Jember harus melakukan program terobosan dan upaya untuk mempermudah dalam pelayanan kependudukan. 2. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam pelayanan kependudukan, karena secara dukungan infrastruktur itu sangat memungkinkan dilakukan. 3. Bupati tidak melakukan mutasi jabatan di Dinas Kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2.06.15.15				Pengolahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Bulan tersedianya sarana penyimpanan	100	171.000.000	26.73	45.710.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan	Realisasi Menyesuaikan Dengan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					pengolahan database selama tahun					Kebutuhan	Kebutuhan	
2.06.18		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase pemanfaatan database kependudukan individu	100	919.610.500	40.59	774.555.000	1. Adanya Kegiatan Insidentil Yang Mendesak Harus Dilaksanakan Dan Berhubungan Dengan Dispenduk Sebagai Pemangku Tugas (misalnya : Permintaan Pemda Atau Event Besar Yg Melibatkan Beberapa Instansi) 2. Adanya Kegiatan Yang Masih Memerlukan Payung Hukum Yang Lebih Kuat Untuk Merealisasikan Anggaran Kegiatan Dimaksud 3. Adanya Kegiatan/program Yang Menggunakan Anggaran Sharing/bersama Dengan Bidang	1. Perlu Mengalokasikan Kembali Dana/anggaran Tahun Depan Untuk kegiatan Yang Sifatnya Insidentil, Sehingga Tidak memakan Anggaran Yang Sudah Direncanakan Sebelumnya 2. Mengusulkan Adanya Payung Hukum Yg Jelas Sejak Awal Pada Setiap Anggaran Kegiatan Yang Direncanakan 3. Mereduksi/menghilangkan/mengurangi Anggaran Kegiatan Yang Bisa Berkolaborasi Dengan bidang Lain. Sehingga Tidak ada Dana Yg Tersisa.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Lain Sehingga Anggaran Yang Digunakan Bisa Menghemat		
2.06.18.1				Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Jumlah kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan	100	309.100.000	90.64	280.150.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	1. Pemerintah kabupaten Jember harus melakukan program terobosan dan upaya untuk mempermudah dalam pelayanan kependudukan. 2. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam pelayanan kependudukan, karena secara dukungan infrastruktur itu sangat memungkinkan dilakukan. 3. Bupati tidak melakukan mutasi jabatan di Dinas Kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2.06.18.2				Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Kunjungan website dispenduk capil dan jumlah agregat yang tersusun	100	610.510.500	80.99	494.405.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.2		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase tingkat pemenuhankebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah	100	463.046.300	15.9	170.583.547	Untuk Pengadaan Mobil Keliling Gagal Lelang Karena Tidak Ada Penyedia Memasukkan Penawaran	Pengadaan Mobil Keliling Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Di Opd Yang Menangani	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan	Pengadaan	
2.06.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	100	50.000.000	56.2	28.104.597	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	100	413.046.300	34.49	142.478.950	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.06.20		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0	5.710.500.000	28.57	2.522.472.000	Pembelian Blanko Tidak Direalisasikan Dikarenakan Stok Blanko Pada Tahun 2019 Masih Tercukupi	Menunggu Juknis Blanko Terbaru Dari Kemendagri Tentang Perubahan Format Blanko	
2.06.20.1				Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Identitas Penduduk	100	5.635.500.000	100	2.447.586.000	Target Kinerja Yang Di Tentukan Sudah Melebihi Dari Pagu Yaitu 3,22%	Pelayanan Perekaman Di Sekolah-Sekolah, Desa-Desa Dan Kecamatan, Pelayanan Jemput Bola Semua Dokumen Di Desa-Desa Dan Kecamatan, Pelayanan Secara Daring	
2.06.20.2				Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Jumlah Pindah Datang Penduduk Yang Diproses	100	75.000.000	100	74.886.000	Target Kinerja Yang Di Tentukan Sudah Melebihi Dari Pagu Yaitu 761,97%	Meningkatkan Sosialisasi Tentang Pentingnya Kepemilikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Dokumen Adminduk Capil Ke Desa - Desa Dan Kecamatan	
2.06.21		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Pencatatan Sipil		0	497.127.750	10.21	262.905.100	Program Kegiatan Itsbat Nikah Yang Direncanakan Tahun 2019 Baru Tercukupi Kouta Peserta Pasangan Pada Akhir Tahun 2019 Sehingga Tidak Bisa Dilaksanakan Pada Tahun Tersebut	Untuk Kegiatan Itsbat Nikah Diagendakan Kembali Tahun 2020	
2.06.21.1				Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian Yang Tercetak	92	247.627.750	92	31.710.100	Target Kinerja Yang Di Tentukan Sudah Melebihi Dari Pagu Yaitu 0,49%	Pelayanan Perekaman Di Sekolah-Sekolah, Desa-Desa Dan Kecamatan, Pelayanan Jemput Bola Semua Dokumen Di Desa-Desa Dan Kecamatan, Pelayanan Secara Daring	
2.06.21.2				Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang Tercetak	100	249.500.000	92.66	231.195.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan	Realisasi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.07.1	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberday		Program Pelayanan Administrasi	Persentase tingkat pemenuhan	90	1.527.434.000	90	1.152.544.144	-	-	



Kode	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
	Desa	aan Masyarakat Dan Desa		Perkantoran	kebutuhan dasar operasional							
2.07.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan kebutuhan telekomunikasi, air, listrik dan internet	12	80.100.00	12	48.703.250	-	-	
2.07.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ketersediaan kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor	12	43.200.00	12	43.200.00	-	-	
2.07.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	12	104.040.000	12	94.740.000	-	-	
2.07.1.11				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12	18.322.00	12	15.310.800	-	-	
2.07.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan instalasi listrik/penerangan	12	7.074.000	12	6.825.000	-	-	
2.07.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ketersediaan kebutuhan makanan dan minuman untuk aparatur	12	308.025.000	12	206.334.400	-	-	
2.07.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi antar instansi	50	293.800.000	50	127.682.494	-	-	
2.07.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan	12	36.051.00	12	27.178.200	-	-	
2.07.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah aparatur/pengelola keuangan, barang dan administrasi	28	636.822.000	28	582.570.000	-	-	
2.07.17		Dinas Pemberdayaan		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	Persentase swadaya masyarakat terhadap program	2	71.362.00	2	52.547.000	Realisasi Tidak Optimal Karena Kegiatan	Tetap Melaksanakan Kegiatan Jatim	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Masyarakat Dan Desa		Desa	pemberdayaan masyarakat					Pembinaan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tidak Dilaksanakan Di Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid. Tetapi Kegiatan Dari Provinsi Yaitu Jatim Puspa Yang Melekat Di Kegiatan Pembinaan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tetap Dilaksanakan. Pelaksanaan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Lembaga Kemasyarakatan Seperti Pkk Dan Posyandu Tidak Dianggarkan Di Apbd.	Puspa Dari Provinsi Sesuai Dengan Juknis Yang Telah Ditetapkan, Dan Untuk Capaian Program Dianggap Tercapai Karena Kegiatan Pkk Dan Posyandu Tetap Berjalan Dengan Swadaya Masyarakat.	
2.07.17.20				Pembinaan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah terbaik gerakan gotong royong masyarakat	1	71.362.000	0	52.547.000	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Tidak Dilaksanakan, namun Ada Kegiatan Dari Provinsi Jawa Timur Yang Melekat Pada Kegiatan Ini Yaitu Jatim Puspa Telah Dilaksanakan Dari Bulan Agustus	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun 2020 Tidak Dilaksanakan Karena Dampak Pandemi Covid.	1. Pemerintah Kab, Jember harus melakukan pembinaan dan mendorong inovasi pembangunan dan pelayanan desa. 2. Pendanaan pilkades serentak kedepan dikembalikan ke model lama dengan memberikan kepercayaan pada



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dan Pada Tw Iv Sudah Evaluasi Laporan Akhir.		panitia ditingkat desa untuk mengelola sesuai regulasi.
2.07.2		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart daerah	90	160.954.000	90	132.133.665	-	-	
2.07.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	1	27.310.000	1	21.495.630	-	-	
2.07.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	18	103.144.000	18	98.993.035	-	-	
2.07.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah ketersediaan perawatan / service peralatan dan perlengkapan kantor	6	30.500.000	6	11.645.000	-	-	
2.07.20		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan	248	84.575.000	226	44.995.000	Dalam Program Ini Dijalankan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdesa Yang Ditargetkan Untuk 226 Bumdesa Yang Ada Di 226 Desa Di Kab Jember. telah Diadakan Pelatihan Untuk Bumdesa Di Kabupaten Jember Dengan Mengundang 226	karena Pandemi Covid Pelatihan Dilakukan Di Tw Iv Sehingga Sedikitnya Waktu Untuk Evaluasi Dan Monitoring Setelah Pelatihan Di Tahun 2020. Jadi Kegiatan Diadakan Dengan Target Peserta Dan Waktu Yang Disesuaikan Dengan Keadaan Saat Itu.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Bumdesa Dan Dihadiri 177 Bumdesa Di Meotel Jember Yang Dilaksanakan Selama 2 Hari Dan Dilakukan Sesuai Protokol Kesehatan. Sisa 22 Dari Capaian Kinerja Program Adalah Jumlah Kelurahan Di Kab Jember.		
2.07.20.5				Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDESA	Jumlah terbentuknya BUMDesa guna kemandirian desa	177	84.575.000	177	44.995.000	Telah Diadakan Pelatihan Untuk Bumdesa Di Kabupaten Jember Dengan Mengundang 226 Bumdesa Dan Dihadiri 177 Bumdesa Di Meotel Jember Yang Dilaksanakan Selama 2 Hari Dan Dilakukan Sesuai Protokol Kesehatan	Karena Pandemi Covid Pelatihan Dilakukan Di Tw Iv Sehingga Sedikitnya Waktu Untuk Evaluasi Dan Monitoring Setelah Pelatihan Di Tahun 2020	
2.07.21		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Pemberdayaan Perekonomian Pedesaan (P4)	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun	14	339.488.000	14	337.663.000	-	-	
2.07.				Pembangunan Daerah	Jumlah desa yang	211	339.488.	211	337.663.	-	-	1. Pemerintah Kab,



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
21.2				Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)	dilakukan pembangunan		000		000			Jember harus melakukan pembinaan dan mendorong inovasi pembangunan dan pelayanan desa. 2. Pendanaan pilkades serentak kedepan dikembalikan ke model lama dengan memberikan kepercayaan pada panitia ditingkat desa untuk mengelola sesuai regulasi.
2.07.23		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Pendampingan Desa melalui Kerja Sama Perguruan Tinggi	Rasio partisipasi masyarakat desa pada pendampingan dosen	50	4.847.350.000	0	19.750.000	kegiatan Satu Desa Satu Dosen Baru Disosialisasikan Kepada Tim Dosen Dari Unej Pada Tw Iv, Tepatnya Bulan Oktober, Sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Menjadi Tidak Optimal Karena Waktu Pelaksanaan Tersisa Hanya 2 Bulan Maksimal.	pelaksanaan Kegiatan Dan Target Kegiatan Disesuaikan Dengan Waktu Yang Ada Sehingga Jumlah Desa Yang Diharapkan Bisa Dilaksanakan Kegiatan Diturunkan Dari Target Awal Tahun. Sosialisasi Juga Telah Dilakukan Menyesuaikan Protokol Kesehatan.	
2.07.23.1				Pendampingan Satu Desa Satu Dosen (SD2)	Pendampingan berbasis capaian indeks desa membangun (IDM)	50	4.847.350.000	0	19.750.000	Kegiatan Satu Desa Satu Dosen Baru Disosialisasikan	Pelaksanaan Kegiatan Dan Target Kegiatan Disesuaikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kepada Tim Dosen Dari Unej Pada Tw Iv, Tepatnya Bulan Oktober, Sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Menjadi Tidak Optimal. Karena Waktu Pelaksanaan Tersisa Hanya 2 Bulan Maksimal.	Dengan Waktu Yang Ada Sehingga Jumlah Desa Yang Diharapkan Bisa Dilaksanakan Kegiatan Diturunkan Dari Target Awal Tahun. Sosialisasi Juga Telah Dilakukan Menyesuaikan Protokol Kesehatan.	
2.07.5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan SPM	248	78.550.000	226	75.250.000	dalam Program Ini Kegiatan Yang Dilaksanakan Adalah Bimbingan Teknis/workshop/sosialisasi/seminar Implementasi Peraturan Perrundang-Undangan Yang Direncanakan Untuk 226 Desa, 4 Aparatur Per Desanya, Jadi Total 904 Aparatur. Tetapi Tidak Bisa Mencapai Target 904 Aparatur Desa Karena Terkendala Pandemi Covid,	kegiatan Sudah Diadakan Di Tw Iv Untuk 226 Desa Dengan Setiap Desanya Diikuti Oleh 2 Aparatur, Total 452 Aparatur Desa.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Sehingga Jumlah Peserta Dikurangi Dan Diadakan Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan		
2.07.5.3				Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah perangkat desa yang ikut pelatihan pengenalan dan pemahaman tupoksi aparatur pemerintah desa	904	78.550.000	452	75.250.000	Tidak Bisa Mencapai Target 904 Aparatur Desa Karena Terkendala Pandemi Covid, Sehingga Jumlah Peserta Dikurangi Dan Diadakan Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan	Kegiatan Sudah Diadakan Di Tw Iv Untuk 226 Desa Dengan Setiap Desanya Diikuti Oleh 2 Aparatur, Total 452 Aparatur	
2.08.15	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian kontrasepsi	76	4.244.905.000	74.61	9.015.000	Realisasi Anggaran Sangat Rendah	Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan, Menunggu Petunjuk Pelaksanaan Serta Penambahan Sdm	
2.08.15.1				Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya akseptor KB	76.29	83.350.000	74.61	9.015.000	Kinerja Sudah Tercapai Dengan Penyerapan Anggaran Dari Bkkbn Provinsi Jawa Timur	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											2020	
2.08.15.5				Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah pembinaan pada petugas KB dan Kader KB	15030	4.110.755.000	15030	0	Kinerja Sudah Tercapai Dengan Penyerapan Anggaran Dari Bkkbn Provinsi Jawa Timur	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan Bidan. 2. Segera menuntaskan pemetaan yang ideal untuk jumlah tenaga kesehatan puskesmas melalui Dinas Kesehatan,
2.08.15.10				Sosialisasi dan Evaluasi Pelaporan Pengelola Program KB dan Pengendalian Lapangan	% Peningkatan laporan Program KB KS	95	50.800.000	95	0	Penyesuaian Situasi Dan Kondisi Covid 19 Dan Sebagian Kegiatan Menggunakan Anggaran Bkkbn Provinsi Jawa Timur	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dan Sebagian Kegiatan Menggunakan Anggaran Bkkbn Provinsi Jawa Timur	1. Memperbaiki program atau sistem aplikasi yang sering terjadi eror ketika bidan menginputkan data kesehatan ibu. 2. Mensosialisasikan sistem aplikasi dimana Fitur yang disediakan dalam JSC With FAI dapat dipahami oleh bidan, sehingga partisipasi bidan dalam menginputkan data hasil pemeriksaan kesehatan ibu ke dalam sistem informasi JSC with FAI bisa maksimal. 3. Menyempurnakan Aplikasi maps untuk melacak lokasi ibu hamil dengan konsep Panic buttons yang bisa



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												melacak banhyak titik sehingga mampu memberikan informasi persebaran lokasi di seluruh puskesmas. 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya SDM pelaksana.
2.08.18		Dinas Pemberdayaan Perempu an Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	2761	1.687.020.000	2761	0	Realisasi Sangat Rendah	Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan, Menunggu Petunjuk Pelaksanaan Serta Penambahan Sdm	
2.08.18.2				Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	Jumlah PPKBD/Sub PPKBD	2761	1.687.020.000	2761	0	Kinerja Sudah Tercapai Dengan Penyerapan Anggaran Dari Bkbn Provinsi Jawa Timur	Kegiatan Ini Tetap Akan Dilaksanakan Pada Tahun Mendatang Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan Bidan. 2. Segera menuntaskan pemetaan yang ideal untuk jumlah tenaga kesehatan puskesmas melalui Dinas Kesehatan,
2.08.26		Dinas Pemberdayaan Perempu an Perlindung		Program Generasi Berencana	Jumlah PIK R dan Jumlah kelompok BKR	387	48.295.000	121	0			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		an Anak Dan Keluarga Berencana										
2.08.26.1				Fasilitasi Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja/Mahasiswa	Jumlah PIK R/M	167	48.295.000	121	0	Menurunnya Jumlah Kelompok Di Masyarakat Sehingga Terrealisasi 121 Kelompok Dengan Anggaran Dari Bkkbn Provinsi Jawa Timur	Akan Dilaksanakan Kembali Kegiatan Ini Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Target Ketentuan Dari Bkkbn Provinsi Jawa Timur	
2.09.1	Perhubungan	Dinas Perhubungan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	8.630.981.130	100	7.783.720.034	Tidak Ada Masalah Realisasi Sesuai Kebutuhan	Dalam Menyusun Kak Lebih Cermat Lagi	
2.09.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, dan listrik	100	724.000.000	95	627.270.277	-	-	
2.09.1.6				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	795.833.000	90	439.598.770	-	-	
2.09.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya kebersihan kantor dishub, terminal, bandara dan pkb	100	200.000.000	100	199.826.000	-	-	
2.09.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase peralatan kantor yang terawat	100	70.000.000	85	51.955.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk	Akan Memproyeksikan Kembali Target Kebutuhan Beserta Anggaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pelaksanaan Kegiatan		
2.09.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan stiker parkir berlangganan	100	635.000.000	95	622.863.400	-	-	
2.09.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor	100	10.000.000	95	9.406.500	-	-	
2.09.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk kegiatan, rapat, dan tamu	100	54.350.100	90	18.662.500	-	-	
2.09.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan akan rapat dan koordinasi ke luar daerah	100	55.000.000	75	48.518.887	Pelaksanaan Rapat Dan Koordinasi Hanya Dapat Dilaksanakan Untuk Daerah Tertentu	Menyusun Rencana Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
2.09.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Persentase tersedianya kebutuhan akan peralatan dan bahan kebersihan	100	24.700.000	0	0	Kebutuhan Akan Alat Dan Bahan Kebersihan Terpenuhi Dari Satgas Covid-19	Menyusun Usulan Tahun Anggaran Tahun Depan	
2.09.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase terpenuhinya honor bagi tenaga administrasi dan operasional rutin	100	4.082.054.000	95	3.831.355.100	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					kantor							
2.09.1.28				Optimalisasi Pendapatan Retribusi Daerah melalui Sharing Parkir Berlangganan	Persentase terbayarnya bagi hasil kepada pihak terkait	100	1.980.044.030	97	1.934.263.600	-	-	
2.09.16		Dinas Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	98	29.331.000	98	20.441.750	Realisasi Sudah Sesuai Kebutuhan	Terhadap Fasilitas Yang Belum Direhab Akan Diusulkan Di Anggaran Tahun Selanjutnya	
2.09.16.5				Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	100	29.331.000	80	20.441.750	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan	Akan Memproyeksikan Kembali Target Kebutuhan Beserta Anggaran	
2.09.17		Dinas Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah angkutan umum	544	189.961.000	432	84.765.000	Dalam Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Yang Dapat Dilaksanakan Hanya Kegiatan Monitoring,	Untuk Kegiatan Pengumpulan Dan Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan Akan Diusulkan Dan Dianggarkan Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.							Evaluasi Dan Pelaporan	Dengan Target Minimal Tahun Sebelumnya	
2.09.17.11				Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah database pelayanan jasa angkutan	2	25.096.000	0	0	Kegiatan Posko Nataru Ditiadakan Karena Pandemi Covid-19	Melakukan Evaluasi Kegiatan Untuk Rencana Kegiatan Tahun Berikutnya	
2.09.17.17				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru	2	164.865.000	1	84.765.000	Pelaksanaan Posko Angkutan Nataru Tetap Dilaksanakan Dengan Pembatasan Pelayanan	Melakukan Evaluasi Kerja Dan Membuat Rencana Kerja Tahun Berikutnya	
2.09.19		Dinas Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah RPPJ ke dusun	900	790.790.000	610	233.716.985	Tidak Ada Masalah Dan Realisasi Sesuai Kebutuhan	Diusulkan Kembali Pada Tahun Anggaran Berikutnya Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			angkutan.									
2.09.19.2				Pengadaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan	146122	83.470.000	0	0	Terkendala Peraturan Perundang-Undangan Dan Tidak Terpenuhi Persyaratan Administrasi.	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.09.19.3				Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Paket pekerjaan	900	0	0	0	Kegiatan Sumber Dana Dari Dak Yang Batal Dilaksanakan Karena Kebijakan Pusat Terdampak Pandemi Covid-19	Mengusulkan Kembali Tahun Berikutnya	
2.09.19.6				Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu-lintas	Jumlah APILL, pelican cross, warning light, dan running text	6	0	0	0	Kegiatan Ditiadakan Karena Pengurangan Anggaran Atau Pergeseran Kebutuhan Covid-19	Melakukan Pendataan Kebutuhan Dan Pengusulan Di Tahun Berikutnya	
2.09.19.12				Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara dan di upgrade	4	282.380.000	3	205.321.985	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan	Akan Memproyeksikan Kembali Target Kebutuhan Beserta Anggaran	
2.09.19.13				Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	Jumlah penegakan hukum dan pengamanan	90	364.930.000	30	28.395.000	Pelaksanaan Kegiatan Terealisasi Dalam Rangka Mendukung Tim Satgas Covid-19	Melakukan Pendataan Kebutuhan Dan Menyusun Rencana Kerja Untuk Usulan Kegiatan Tahun	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Berikutnya	
2.09.19.15				Kegiatan Fasilitas Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah Penghargaan WTN	900	60.010.000	0	0	Kegiatan Ini Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Belum Ada Arahan Dan Pusat	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
2.09.2		Dinas Perhubungan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standart daerah	100	0	100	0	Tidak Ada Realisasi Anggaran Dialihkan Untuk Refocusing Covid-19	Akan Diusulkan Untuk Anggaran Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	
2.09.2.14				Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah alat kantor,alat rumah tangga, dan komputer	150	0	0	0	Kegiatan Ditiadakan Atau Anggaran Digeser Untuk Kebutuhan Covid-19	Menyusun Kebutuhan Untuk Pengusulan Tahun Mendatang	
2.09.21		Dinas Perhubungan	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.	Program Peningkatan Status Bandara	Jumlah rute penerbangan yang beroperasi	2	186.850.000	1	24.295.675	Realisasi Anggaran Hanya Dapat Dilakukan Pada Pekerjaan Pendukung Penyelesaian Penyusunan Masterplan	Akan Mengusulkan Kembali Di Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.09.21.1				Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandar Udara	Jumlah sarana dan prasarana Bandar Udara yang dibangun	4	186.850.000	1	24.295.675	Tidak Selesainya Penyusunan Master Plan Bandara	Melakukan Evaluasi Kerja Dan Melakukan Pengusulan Anggaran Di Tahun Berikutnya	
2.09.22		Dinas Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.	Program Operasional dan Pemeliharaan Bandar Udara	Persentase kondisi peralatan berfungsi dengan baik	100	817.774.000	90	600.872.200	Tidak Masalah Realisasi Sudah Sesuai Kebutuhan	Dalam Usulan Anggaran Tahun 2021 Akan Lebih Cermat Lagi Dengan Skala Prioritas Percepatan Pengembangan Bandara	
2.09.22.1				Operasional Bandar Udara	Jumlah penumpang yang datang dan berangkat	49680	581.074.000	5927	382.535.200	Terjadi Pembatasan Penerbangan Karena Covid-19	Menyusun Rencana Kerja Dan Pengusulan Anggaran Tahun Berikutnya	
2.09.22.2				Pemeliharaan Bandar Udara	Persentase kondisi peralatan berfungsi dengan baik	100	236.700.000	90	218.337.000	-	-	
2.09.24		Dinas Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan	Program Penyusunan Norma, Standar dan Sosialisasi Tertib Lalu-lintas	Persentase tersusunnya prosedur tertib berlalu lintas	100	75.325.000	100	37.275.000	Untuk Kegiatan Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Tidak Dilaksanakan Karena Masih Masa Pandemi	Pada Tahun 2021 Akan Mengusulkan Kembali Dengan Target Minimal Seperti Tahun	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.							Covid-19	Sebelumnya	
2.09.24.1				Sosialisasi Tertib Lalu-lintas	Jumlah peserta sosialisasi	5000	35.950.000	0	0	Hanya Tersedia Pekerjaan Sosialisasi Yang Tidak Dimungkinkan Dilaksanakan Karena Pandemi Covid-19	Menyusun Kebutuhan Dan Rencana Kerja Serta Mengusulkan Untuk Menjadi Kegiatan Wajib Dan Mengikat Tahun Berikutnya	
2.09.24.4				Kegiatan Operasional Pembinaan Petugas Pintu Perlintasan dan Penyuluhan Masyarakat untuk Keselamatan Operasional Kereta Api	Jumlah Peserta Penyuluhan	40	39.375.000	30	37.275.000	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi Karena Terkendala Peraturan Perundang-Undangan	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
2.09.26		Dinas Perhubungan	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi	Program Operasional dan Pengawasan Terminal Angkutan Umum	Persentase PAD dari retribusi terminal	100	138.087.500	100	125.408.800	Tidak Ada Masalah Dan Realisasi Sudah Sesuai Dengan Rencana Kerja	Mengusulkan Kembali Kegiatan Pada Tahun 2021 Dengan Skala Prioritas Kegiatan Pelayanan Dengan Target Minimal Seperti	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.								Tahun Sebelumnya	
2.09.26.1				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPT Terminal)	Jumlah PAD dari retribusi terminal	8.4E+08	138.087.500	4E+07	125.408.800	Kinerja Dipengaruhi Berkurangnya Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Kendaraan Umum Di Terminal Angkutan Umum	Melakukan Perbaikan Prasarana Terminal Dan Peremajaan Angkutan Umum	
2.09.27		Dinas Perhubungan	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.	Program Operasional dan Pengawasan Parkir Kendaraan	Persentase PAD dari retribusi Parkir	100	2.680.750.000	100	2.602.011.000	Tidak Ada Masalah Realisasi Sudah Sesuai Kebutuhan	Pada Tahun 2021 Akan Disusun Kak Yang Lebih Cermat Lagi Untuk Meningkatkan Pelayanan Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	
2.09.27.1				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-	Jumlah PAD dari retribusi Parkir	1.1E+10	2.680.750.000	1.1E+10	2.602.011.000	Realisasi Mencapai 100,04	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				sumber Pendapatan Daerah (UPT Parkir)						% Karena Pad Dari Retribusi Parkir Berlangganan Mencapai Sebesar Rp. 10.700.111.000,- Sehingga Prosentase Kinerja Melebihi Target Sebesar 0,04%		
2.09.28		Dinas Perhubungan	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektifitas pelayanan angkutan.	Program Operasional dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase PAD dari retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100	534.084.000	100	496.375.810	Tidak Ada Masalah Dan Realisasi Sesuai Rencana Kerja	Dalam Usulan Tahun 2021 Akan Mengusulkan Kebutuhan Anggaran Kembali Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	
2.09.28.1				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)	Jumlah PAD dari retribusi pengujian kendaraan bermotor	1.6E+09	534.084.000	1.4E+09	496.375.810	-	-	
2.09.3		Dinas Perhubungan		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100	17.500.000	100	4.130.000	Tidak Ada Kendala Dan Realisasi Sesuai	Dalam Tahun 2021 Akan Mengusulkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Ketersediaan Anggaran	Kembali Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	
2.09.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase memperingati hari-hari besar nasional dan peringatan harhubnas	100	17.500.000	60	4.130.000	Kegiatan Hari Besar Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Di Masa Pandemi	Melakukan Evaluasi Dan Menyusun Rencana Kebutuhan Tahun Berikutnya	
2.09.6		Dinas Perhubungan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dan laporan realisasi keuangan	100	34.484.000	100	4.802.000	Realisasi Anggaran Sudah Sesuai Kebutuhan Dalam Tahun Anggaran Ini	Pada Tahun Anggaran 2021 Akan Mengusulkan Kembali Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	
2.09.6.2				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran, dan realisasi keuangan SKPD	3	34.484.000	3	4.802.000	-	-	
2.09.8		Dinas Perhubungan		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase tertib laporan dokumen perencanaan	100	64.886.400	100	18.306.400	Realisasi Hanya Dilaksanakan Pada Kegiatan Penyusunan Renstra Dan Dokumen Lainnya	Pada Tahun 2021 Akan Mengusulkan Kembali Dengan Target Minimal Seperti Tahun Sebelumnya	
2.09.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Persentase paket penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen perencanaan lainnya	100	64.886.400	95	18.306.400	-	-	
2.09.8.8				Pengendalian dan Evaluasi Teknis	Presentase Pekerjaan yang dievaluasi dan di	100	0	0	0	Adanya Refocusing	Akan Dianggarkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perhubungan	kendalikan					Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Kegiatan Covid-19	Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
2.10.1	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	1.073.719.000	100	697.741.250	Pada Dasarnya Program Ini Tidak Mengalami Kendala Sebab Pengeluarannya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Rutin Yang Ada Di Dinas Kominfo Kabupaten Jember.	Realisasi Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Rutin	
2.10.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	750	100	750	-	-	
2.10.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	133.800.000	100	114.670.061	-	-	
2.10.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	10.000.000	100	6.750.000	-	-	
2.10.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	40.000.000	100	39.999.600	-	-	
2.10.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar	100	1.500.000	100	0	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					operasional SKPD							
2.10.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	115.655.000	55	34.577.500	Tidak Semua Rencana Kegiatan Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Yang Terlaksana Menyesuaikan Dengan Protokol Kesehatan	
2.10.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	150.000.000	75	122.470.089	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Selama Pandemi Dilaksanakan Secara Daring	Menyesuaikan Dengan Keadaan Dan Undangn	
2.10.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	11.000.000	100	6.805.500	-	-	
2.10.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	611.014.000	100	371.718.500	-	-	
2.10.15		Dinas Komunikasi Dan Informatika	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesional	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tersedianya data center beserta perangkatnya dan jaringan TI antar SKPD	80	740.000.000	80	588.722.000	Pada Program Ini, Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Tidak Dapat Terlaksana	Untuk Tahun Berikutnya, Kegiatan Pada Program Ini Akan Dilaksanakan Secara Maksimal Sesuai Dengan Rencana Anggaran	
2.10.15.2				Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya data center beserta perangkatnya dan jaringan TI antar	80	515.000.000	80	469.326.000	-	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Komputing Dan	1. Memperbaiki program atau sistem aplikasi yang sering terjadi eror ketika bidan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					SKPD						Peningkatan Kapasitas Database Server	meninputkan data kesehatan ibu. 2. Mensosialisasikan sistem aplikasi dimana Fitur yang disediakan dalam JSC With FAI dapat dipahami oleh bidan, sehingga sehingga partisipasi bidan dalam menginputkan data hasil pemeriksaan kesehatan ibu ke dalam sistem informasi JSC with FAI bisa maksimal. 3. Menyempurnakan Aplikasi maps untuk melacak lokasi ibu hamil dengan konsep Panic buttons yang bisa melacak banyak titik sehingga mampu memberikan informasi persebaran lokasi di seluruh puskesmas. 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya SDM pelaksana.
2.10.15.3				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM komunikasi dan informasi yang berkualitas	100	100.000.000	0	3.000.000	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Adanya Pandemi Covid-19	Akan Dilaksanakan Pada Tahun Berikutnya	
2.10.15.8				Perawatan dan Keamanan Sistem Aplikasi dan Software	Jumlah aplikasi yang perlu perawatan	1	50.000.000	1	44.396.000	-	-	
2.10.15.9				Pemeliharaan dan Pengamanan Hardware	Jumlah server yang memerlukan	1	75.000.000	1	72.000.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Sistem Informasi	pemeliharaan dan pengamanan							
2.10.16		Dinas Komunikasi Dan Informatika	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesional	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya masterplan/ blueprint jaringan IT dan SOP kelembagaan	90	241.450.000	0	199.800.000	Program Terlaksana Bekerjasama Dengan Institut Teknologi Surabaya Untuk Mengkaji Infrastruktur Jaringan Yang Ada Pada Pemerintah Kabupaten Jember	Hasil Rekomendasi Kajian Akan Menjadi Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahun Yang Akan Datang	
2.10.16.1				Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Tersedianya masterplan/ blueprint jaringan IT dan SOP kelembagaan	90	215.200.000	90	199.800.000	-	Terlaksana Dengan 1 Kajian Infrastruktur Jaringan	
2.10.16.2				Pemberdayaan Teknologi Komunikasi dan Informatika	Jumlah masyarakat peserta sosialisasi dan pemberdayaan TIK	100	26.250.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Pandemi	Akan Dilaksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Covid19	
2.10.17		Dinas Komunikasi Dan Informatika	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government)	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang dilatih bidang komunikasi dan informasi	200	72.375.000	0	0	Untuk Kegiatan Pelatihan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi Tidak Dapat Terlaksana Karena Pandemi Covid19	Kegiatan Yang Dapat Dilaksanakan Pada Program Ini Adalah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Telekomunikasi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			t), serta profesional									
2.10.17.1				Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang dilatih bidang komunikasi dan informasi	200	15.875.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Pandemi	Akan Dilaksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Covid19	
2.10.17.4				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Telekomunikasi	Persentase pelayanan pos dan telekomunikasi	100	56.500.000	50	0	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Tetapi Tidak Merealisasikan Anggaran Karena Tidak Lengkap Adminstrasinya	Menunggu Kelengkapan Administrasi	
2.10.18		Dinas Komunikasi Dan Informatika	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesional	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah kerjasama dengan media massa	150	5.474.000.000	0	5.101.991.500	Pada Program Ini Ada 2 Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Karena Pandemi Covid19	Kegiatan Yang Dapat Terlaksana Pada Program Ini Yaitu Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Bekerjasama Dengan Berbagai Media Massa Antara Lain Media Cetak, Media Penyiaran Radio, Media Penyiaran Televisi Dan Media Online	
2.10.18.1				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kerjasama dengan media massa	150	5.400.000.000	96	5.101.991.500	Kurang Maksimal Dalam Pembagian Tugas Tenaga Kerja Yang Ada	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Jember Melibatkan Kerjasama Dengan Media Massa Yang Terdiri Dari 5 Media Cetak, 4 Media Online, 5 Media Televisi Dan 1 Radio	
2.10.18.6				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Opini dan Aspirasi (OPSI)	Jumlah Orang	3	24.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Adanya Pandemi	Akan Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Covid19	
2.10.18.12				Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan	100	50.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Akan Menyesuaikan Pada Triwulan Berikutnya	
2.10.19		Dinas Komunikasi Dan Informatika	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesional	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Persentase penyebaran informasi dan komunikasi ke masyarakat	80	147.750.000	50	42.220.000	Kegiatan Penyuluhan Dan Sosialisasi Bagi Masyarakat Tidak Dapat Terlaksana Karena Adanya Pandemi Covid19	Pada Program Ini Kegiatan Yang Dapat Dilaksanakan Yaitu Kegiatan Pengembangan Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi Berupa Pemasangan Banner Dan Baliho Tentang Penanganan Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid19 Yang Di	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Pasang Pada Tempat-Tempat Umum	
2.10.19.1				Penyuluhan dan Sosialisasi bagi Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	175	97.750.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Adanya Pandemi	Kegiatan Akan Dilaksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Covid-19	
2.10.19.4				Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	Jumlah banner publikasi/himbauan/sosialisasi pengembangan komunikasi dan informasi	50	50.000.000	50	42.220.000		Untuk Pencegahan Dan Penyebaran Informasi Mengenai Covid19 Maka Diskominfo Memasang Banner Dan Baliho Pada Tempat-Tempat Strategis Seperti Pada Pondok Pesantren, Pabrik, Perbatasan Wilayah	
2.10.2		Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah	100	140.850.000	100	56.962.800	Pada Dasarnya Kegiatan-Kegiatan Pada Program Rutin Ini Tidak Mempunyai Kendala Sebab Untuk Realisasinya Disesuaikan Dengan Keperluan Operasional Dari	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dinas Kominfo Kab. Jember.		
2.10.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dirawat atau dipelihara	1	10.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Gedung Kantor Masih Belum Memerlukan Perawatan	Dilaksanakan Apabila Ada Kebutuhan	
2.10.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah	100	65.000.000	100	32.847.800	-	-	
2.10.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah	100	60.850.000	100	24.115.000	-	-	
2.10.2.29				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah	100	5.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Mebeleur Masih Belum Memerlukan Perawatan	Akan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.10.21		Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Pengembangan E-Government	Persentase Terselenggaranya pengadaan software/aplikasi sistem informasi pelayanan publik berbasis IT	90	3.465.000.000	80	2.967.008.004	Program Pengembangan E-Government Ini Dapat Berjalan Sesuai Jadwal Yang Telah Ditetapkan. Program Ini Merupakan Program Prioritas	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dari Dinas Kominfo Kab. Jember Dan Direalisasikan Melalui Kegiatan Sewa Jaringan Untuk Server, Pembayaran Bandwith, Pengadaan Aplikasi Pelayanan Umum Di 15 Kelurahan Pada Kecamatan Summersari Dan Kecamatan Patrang Serta Pengadaan Aplikasi Desk Pilkada		
2.10. 21.1				Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan E-Government	Persentase Terselenggaranya pengadaan software/aplikasi sistem informasi pelayanan publik berbasis IT	90	3.465.00 0.000	90	2.967.00 8.004	-	-	1. Pemerintah Daerah harus mewujudkan pengembangan E-Government yang mendukung kinerja pelayanan dan birokrasi. 2. Pemerintah Daerah harus memiliki desain dan master plan yang jelas dalam upaya untuk mendorong E-Government. 3. Program smart city yang dilaksanakan oleh kementerian kominfo di Jember harus



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												dijalankan serius dan terintegratif dalam mendukung terobosan inovasi dan kinerja birokrasi tidak hanya sebatas proyek. 4. Program penyediaan (sewa) server dan aplikasi kepegawaian serta pelayanan umum di 7 kelurahan harus dikoordinasikan sehingga pelaksanaan E-Government dapat berjalan maksimal tidak hanya sebatas pada support sewa internet untuk semua OPD di kabupaten Jember.
2.10.22		Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Pengembangan Pengolahan Data dan Persandian	Tersedianya tenaga operator dan alat-alat pengolahan data/persandian	80	50.000.000	50	0	Pada Tahun 2020 Program Ini Tidak Dapat Terlaksana	Memaksimalkan Penggunaan Alat-Alat Yang Ada	
2.10.22.1				Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Data/Persandian	Persentase Tersedianya alat-alat pengolahan data/persandian	80	50.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Mengoptimalkan Penggunaan Alat-Alat Yang Ada	Akan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.10.23		Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis IT	Persentase Tersedianya akses internet di desa/kelurahan	100	45.450.000	75	0	Program Ini Hanya Mempunyai Satu Kegiatan, Yaitu Pengembangan Desa/kelurahan Online. Kegiatan Ini Tidak Dapat	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Direalisasikan Karena Adanya Pandemi Covid19		
2.10.23.1				Pengembangan Desa/Kelurahan Online	Tersedianya akses internet di desa/kelurahan	100	45.450.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Adanya Pandemi	Akan Menyesuaikan Pada Tahun Berikutnya	1. Pengelolaan sistem informasi desa (Desa Online) harus dioptimalkan dan dijalankan dengan benar, sesuai dengan ketersediaan internet desa serta website desa dan pelayanan online di desa.
2.10.24		Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Pengelolaan, Pengembangan Informasi dan Publikasi	Persentase tersebarnya informasi melalui semua OPD	0	192.100.000	100	100.250.000	Pada Tahun 2020 Program Ini Ada 2 Kegiatan Yang Sudah Berjalan Tetapi Belum Maksimal, Hanya Dapat Melaksanakan Pemberian Honorarium Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi E-Lapor	Akan Lebih Memaksimalkan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Dan Anggaran Pada Tahun Depan	
2.10.24.1				Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Publik (Penguatan PPID)	Persentase publikasi informasi dan terbentuknya PPID pembantu di tiap OPD	70	157.100.000	70	100.250.000	-	Pemberian Honorarium Untuk Petugas Pengelola E-Lapor Pada Semua Opd Se Kabupaten Jember	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember harus melaksanakan program pengembangan informasi dan publikasi sesuai aturan, yaitu UU No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												baik sehingga indikatornya persentase sebaran informasi OPD yang di publikasikan oleh PPID. 2. Mengedapankan keterbukaan informasi transparansi pemerintah terkait anggaran serta kebijakan, partisipasi publik dalam control penyelegaraan pemerintahan berjalan. 3. Melaksanakan tata kelola informasi publik dengan menggunakan komunikasi dua arah dengan peliputan dan pemberitaan informasi yang subyektif dengan menggunakan peran semua media massa yang obyektif dan akuntabel.
2.10.24.2				Publikasi dan Transparansi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	Jumlah Lokasi	35	35.000.000	0	0	Kegiatan Publikasi Dilaksanakan Di Media Sosial Pemkab	Akan Menyesuaikan Kebutuhan	
2.10.25		Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Pengembangan dan Pengelolaan Dokumentasi	Persentase tersedianya kegiatan pemerintah kabupaten Jember yang didokumentasikan	0	590.000.000	100	174.597.500	Pada Program Ini Dapat Terlaksana Dengan Baik	-	
2.10.25.1				Pendokumentasian Program Kegiatan Pembangunan Daerah	Persentase dokumentasi kegiatan Pemkab Jember	100	550.000.000	75	135.222.500	Kegiatan Dilaksanakan Mulai Triwulan 2	Terlaksananya Kegiatan Pendokumentasia	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											n Kegiatan Pada Pemerintah Kabupaten Jember Berupa Pembuatan Video Kegiatan	
2.10.25.2				Peningkatan, Pengembangan Sistem dan Sarana Prasarana Dokumentasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dokumentasi	90	40.000.000	1	39.375.000	-	Terlaksananya Pengadaan Peralatan/sarana Dokumentasi	
2.10.15		Bagian Humas Dan Protokol	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	% tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	90	97.000.000	0	0	Tidak Ada Apbd, Menggunakan Perkada, Belanja Modal Tidak Termasuk Belanja Rutin Dan Wajib	Melakukan Perbaikan/servis Peralatan Kerja Yang Rusak Agar Bisa Digunakan Kembali, Dan Memaksimalkan Penggunaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Telah Dimiliki	
2.10.15.5				Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan studio & komunikasi yang dibutuhkan	4	97.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi (apbd)	Memanfaatkan Lebih Maksimal Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Sudah Dimiliki	
2.10.18		Bagian Humas Dan Protokol	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	% Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang Diinput	90	140.470.000	0	0	Tidak Ada Apbd, Menggunakan Perkada, Kegiatan Sambung Rasa Jurnalistik Tidak Termasuk Belanja Rutin Dan Wajib.	Tetap Membina Hubungan Baik Dengan Insan Jurnalistik Meskipun Kegiatan Sambung Rasa	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Sedangkan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Yang Di Dalamnya Terdapat Belanja Jasa Publikasi, Tidak Dianggarkan Lagi Oleh Bagian Humas Karena Digeser Ke Dinas Informasi Dan Komunikasi	Jurnalistik Tidak Dapat Dilaksanakan	
2.10.18.10				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Sambung Rasa Jurnalistik	Jumlah insan jurnalistik yg mengikuti Sambung Rasa Jurnalistik	125	140.470.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi (apbd)	Tetap Membina Hubungan Baik Dengan Insan Jurnalistik Meskipun Kegiatan Sambung Rasa Jurnalistik Tidak Dapat Dilaksanakan Di Tahun 2020	
2.10.20		Bagian Humas Dan Protokol	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Program Pengembangan Dokumentasi dan Informasi	% Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan	90	2.356.991.000	90	1.283.984.908	Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Jember Tidak Dapat Melaksanakan Kegiatan Dengan Maksimal Karena Tidak Disahkannya	Tetap Melaksanakan Pembuatan Dokumen Dan Media Luar Ruang Kegiatan Bupati Dan Wakil Bupati Yang Disesuaikan Dengan Permintaan /	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Apbd Kabupaten Jember (sehingga Menggunakan Perkada) Serta Adanya Pandemi Covid 19. Hal Ini Menyebabkan Menyusutnya Permintaan Pembuatan Dokumentasi Dan Media Luar Ruang (spanduk, Baliho, X-Banner, Dll).	Kebutuhan.	
2.10. 20.1				Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah	Jumlah desa / kelurahan yg mdpt informasi kegiatan Pemkab	248	2.356.99 1.000	248	1.283.98 4.908	Penyerapan Anggaran Tidak Maksimal Karena Tidak Terpenuhi Persyaratan Administrasi (apbd) Sehingga Permintaan Media Luar Ruang (spanduk, Baliho, Dll) Dari Opd Lain Di Bawah Target	Mengoptimalkan Kinerja Dengan Keadaan Yang Ada. Terpenuhi Target Kegiatan Karena Adanya Penyebaran Informasi Tentang Pilkada Di Seluruh Desa / Kelurahan Di Kabupaten Jember	
2.11. 1	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	0	983.561. 500	58.57	605.929. 665	Masih Kurangnya Koordinasi Dalam Melaksanakan Tugas, Honorarium Non Pns Masih Belum Sesuai Dengan Standar Honorarium Non Pns Yang	Melakukan Koordinasi Yang Maksimal Dalam Melaksanakan Tugas Dan Dalam Penyusunan Penganggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Diberlakukan Hal Ini Karena Kurangnya Anggaran Yang Mendukung Kegiatan Tersebut. Adanya Efisiensi Penganggaran Sehingga Masih Adanya Anggaran Yang Belum Dapat Terealisasi Secara Penuh Atau 100%		
2.11.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kelancaran proses surat menyurat	100	800	52.06	416.5	Penyerapan Anggaran Jasa Surat Menyurat Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan terselesaikan	
2.11.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kelancaran pelaksanaan rutin kantor	100	96.000.000	69.37	66.593.754	Penyerapan Anggaran Pembayaran Belanja Rekening Telisa Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Efisiensi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Efisiensi Anggaran		
2.11.1.6				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase penyediaan operasional kedinasan	100	9.800.000	50.15	5.739.000	Penyerapan Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Untuk Perpanjangan Stnk Roda 4 Dan 2 Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.11.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor	100	42.000.000	41.67	42.000.000	Penyerapan Anggaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.11.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100	82.713.500	58.17	48.117.696	Penyerapan Anggaran Penyediaan Atk Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Serta	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Disesuaikan Dengan Anggaran Kas	Kegiatan Terselesaikan	
2.11.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	2.027.500	96.92	1.965.000			
2.11.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	2.500.000	49.6	1.240.000	Penyerapan Anggaran Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Serta Menyesuaikan Dengan Anggaran Kas	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	
2.11.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan bagi aparatur	100	5.400.000	42.59	2.300.000	Penyerapan Anggaran Pembayaran Koran Berlangganan Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Serta Menyesuaikan Dengan Anggaran	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kas		
2.11.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan makanan dan minuman bagi aparatur	100	163.446.500	10.59	17.311.900	Penyerapan Anggaran Mamin Untuk Pegawai Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan Serta Menyesuaikan Dengan Anggaran Kas	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselamatkan	
2.11.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	121.000.000	80.3	97.165.665	Penyerapan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Ke Luar Daerah Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Sesuai Dengan Undangan Dan Kebutuhan Serta Menyesuaikan Dengan Anggaran	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.11.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Persentase penyediaan kebutuhan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	100	82.000.000	75	61.500.000	Penyerapan Anggaran Belanja Pembayaran Honorarium Non Pns Tidak Memenuhi Target	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan		
2.11.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	0	71.220.000	54.5	38.815.000	Penyerapan Anggaran Belanja Perjalan Dalam Daerah Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	
2.11.1.24				Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan	100	18.150.000	18.53	3.363.875	Penyerapan Anggaran Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor (bahan Cetakan) Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	
2.11.1.26				Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program	Persentase fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan program melalui	100	130.944.000	72.19	94.535.000	Penyerapan Anggaran Belanja Pemeliharaan Website Tidak Memenuhi Target	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					PPKUL					Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Kebutuhan	
2.11.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor berupa honor PNS	100	155.560.000	80.27	124.866.275	Penyerapan Anggaran Belanja Pembayaran Honorarium Pns Pengelola Keuangan Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.11.15		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	0	172.450.000	0	0	Belum Adanya Dokumen Pendukung Administrasi Untuk Melaksanakan Kegiatan	Mengupayakan Dokumen Pendukung Administrasi Dalam Melaksanakan Kegiatan	
2.11.15.8				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengikuti pelatihan (warung kopi berjaringan, pembuatan kue kering, teknik kemasan dan kerajinan lukis kain)	1000	53.500.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselamatkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan		
2.11.15.9				Facilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro produksi yang berstandarisasi	1000	118.950.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselamatkan	
2.11.16		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	0	198.250.000	7.43	27.500.000	belum Adanya Dokumen Pendukung Administrasi Untuk Melaksanakan Kegiatan	mengupayakan Dokumen Pendukung Administrasi Dalam Melaksanakan Kegiatan	
2.11.16.1				Facilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen usaha bagi wirausaha baru	200	89.750.000	33.64	27.500.000	Penyerapan Anggaran Belanja Perpanjangan Aplikasi Online Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Terselesaikan	
2.11.16.3				Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengikuti sarahsehan Dewan Kerajinan Nasional Daerah untuk meningkatkan penghasilan dan berdaya saing	200	21.700.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	
2.11.16.6				Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan sektor makanan, minuman dan handycraf	500	86.800.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember lebih mengoptimalkan program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah serta program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah. 2. Pemerintah Daerah Kab. Jember untuk lebih memberdayakan UMKM dan wirausaha Masyarakat.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.17		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	0	216.050.000	4.38	0	belum Adanya Dokumen Pendukung Administrasi Untuk Melaksanakan Kegiatan	mengupayakan Dokumen Pendukung Administrasi Dalam Melaksanakan Kegiatan	
2.11.17.1				Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah fasilitasi dengan pihak bank dan non bank bagi koperasi dan UKM dalam hal permodalan	200	44.000.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselamatkan	
2.11.17.8				Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Usaha Mikro	500	70.800.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselamatkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan		
2.11.17.12				Pemberdayaan UMKM Terpadu	Jumlah peserta sosialisasi pembiayaan ultra mikro pada KSP	500	101.250.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan terselesaikan	
2.11.18		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	% kualitas koperasi	100	665.188.000	8.92	0	belum Adanya Dokumen Pendukung Administrasi Untuk Melaksanakan Kegiatan	mengupayakan Dokumen Pendukung Administrasi Dalam Melaksanakan Kegiatan	
2.11.18.2				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimtek peningkatan kualitas kelembagaan	3000	0	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	
2.11.18.7				Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi	Jumlah peserta bimtek perkoperasian	0	200.650.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	
2.11.18.10				Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kelembagaan Koperasi	jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengurus dan pengawas koperasi dalam meningkatkan penguatan kelembagaan	200	47.180.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember lebih mengoptimalkan program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah serta program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah. 2. Pemerintah Daerah Kab. Jember untuk lebih memberdayakan UMKM dan wirausaha Masyarakat.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.2		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	0	210.140.000	95.67	75.466.388	Belum Semua Kendaraan Operasional Kantor Terutama Roda 2 Tercover Anggaran Untuk Belanja Pemeliharaan	Melakukan Koordinasi Dalam Perencanaan Penganggaran Agar Bisa Dianggarkan Untuk Kendaraan Operasional Kantor Baik Roda 2 Dan 4	
2.11.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase terpeliharanya gedung / bangunan kantor	100	76.830.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.11.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas kantor	100	100.400.000	66.66	67.107.888	Penyerapan Anggaran Belanja Bbm Dan Service Kendaraan Dinas Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.11.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer kantor	100	27.910.000	29.95	8.358.500	Penyerapan Anggaran Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Kantor. Alat Rumah Tangga. Komputer Untuk Operasional Kantor Tidak	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan		
2.11.2.34				Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer kantor	0	5.000.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
2.11.3		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	0	97.000.000	0	39.960.000			
2.11.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tupoksinya	2	97.000.000	2	39.960.000			
2.11.5		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	0	7.500.000	54.16	0	Masih Belum Adanya Peraturan Yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Untuk Meningkatkan Sdm Aparatur	Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Sebelum Penganggaran Untuk Kegiatan Peningkatan Sdm Aparatur	
2.11.5.3				Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peningkatan SDM aparatur	100	7.500.000	0	0	Penyerapan Anggaran Tidak Memenuhi Target Kinerja Karena Belanja Disesuaikan	Penyerapan Anggaran Untuk Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dengan Kebutuhan Dan Karena Terkendala Dokumen Pendukung Untuk Melaksanakan Kegiatan	Mengupayakan Dokumen Pendukung Untuk Kegiatan Terselesaikan	
2.11.6		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	0	17.900.000	0	14.069.000			
2.11.6.1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2	2.900.000	2	2.588.000			
2.11.6.2				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1	2.600.000	1	2.075.000			
2.11.6.4				Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	2.600.000	1	2.600.000			
2.11.6.5				Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	2	8.300.000	2	6.304.000			
2.11.6.6				Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang dikerjakan tepat waktu	2	1.500.000	2	502			
2.11.8		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	-	0	2.900.000	0	2.150.000			
2.11.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen perencanaan yang	Jumlah dokumen perencanaan yang	4	2.900.000	4	2.150.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Perencanaan Lainnya	dihasilkan							
2.12.1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase realisasi pelayanan administrasi perkantoran dibanding pelayanan administrasi pelayanan yang ada.	100	1.105.881.750	89.18	832.448.204	Tidak Ada Permasalahan Dalam Melaksanakan Kegiatan Dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Ini Merupakan Program Rutin Dan Mengikat, Sehingga Pemaksimalan Dalam Penyerapan Anggaran Perlu Ditingkatkan Agar Terserap Secara Maksimal	Perlu Peningkatan Penyerapan Anggaran	
2.12.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	95	4.325.750	77.74	3.175.000	Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar Tidak Ada Kendala	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, website, air dan listrik yang digunakan	100	7.920.000	42.68	3.380.130	Pengalihan Anggaran Untuk Pembayaran Internet Di Alihkan Pada Dinas Lain, Sehingga Anggaran Biaya Dan Kinerja Kegiatan Penyediaan	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Internet Dan Tv Tidak Terlaksana Secara Maksimal		
2.12.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	95	90.000.000	94.84	90.000.000	-	-	
2.12.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	95	135.000.000	94.98	133.703.250	Tidak Ada Kendala/masalah Dan Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar	Tidak Ada Kendala/masalah Dan Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar	
2.12.1.11				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	95	182.000.000	94.73	176.960.000	Tidak Ada Kendala/masalah Dan Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	95	10.400.000	94.84	10.400.000	Tidak Ada Kendala/masalah Dan Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	95	169.492.000	56.8	95.913.450	Adanya Pengalihan Anggaran Ke Kegiatan Covid, Sehingga Kegiatan Tidak Terlaksana Secara Maksimal	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pengadaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85	180.000.000	42.98	77.253.374	Terkendala Pandemi Covid 19, Sehingga Kegiatan Proses Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak Dapat Terlaksana Secara Maksimal	Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya Dan Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	150	20.000.000	13.18	2.635.000	Terkendala Proses Administrasi Dan Adanya Covid, Sehingga Kegiatan Proses Perjalanan Dinas Dalam Daerah Di Minimalisasi	Pengalihan Anggaran Untuk Di Gunakan Pada Kegiatan Lain Yang Membutuhkan Anggaran Dan Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pemenuhan administrasi dan operasionalisasi rutin kantor/kedinasan	95	306.744.000	77.92	239.028.000	Pengalihan Anggaran Pada Kegiatan Covid	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.15		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase pelaksanaan peningkatan promosi dan kerjasama investasi	100	186.048.250	23.95	0	Pada Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Terdapat Nilai Anggaran Sebesar 222.545.000 Dan Terealisasi Sebesar 54.797.500 Atau 25 %	perlu Ditingkatkan Lagi Pemaksimalan Penggunaan Anggaran Disesuaikan Dengan Dokumen Perencanaan	
2.12.15.2				Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah informasi tentang potensi unggulan daerah di Jember	4	115.100.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Terkendala Persyaratan Administrasi Dan Terdapat	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Beberapa Permasalahan Terkait Petunjuk Teknis		
2.12.15.4				Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga	85	70.948.250	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Terkendala Persyaratan Administrasi Dan Terdapat Beberapa Permasalahan Terkait Petunjuk Teknis	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	Pemerintah Daerah Kab. Jember harus lebih mengoptimalkan program promosi yang baik dan efektif. Sehingga mampu mendorong dan mempertemukan caron investor, sekaligus mengoptimalkan keberadaan Forum CSR bagi investor yang sudah berinvestasi di Jember.
2.12.18		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Program Pelayanan Perijinan Lokasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah	90	97.100.000	4.09	0	Pada Program Pelayanan Izin Lokasi Terdapat Anggaran Sebesar Rp. 57.000.000,- Dan Penyerapan Anggaran Sebesar 0 % Dengan Capaian 0 %, Permasalahan Tidak Di Serapnya Anggaran Pada Program Ini Adalah Belum Adanya Petunjuk Teknis Dan Sesuai Arah	Solusi Atas Kendala tersebut Adalah Tetap Mengkoordinasikan Dengan Instansi Dinas Terkait, Agar Kegiatan Pelayanan Izin Lokasi Tetap Berjalan Mengingat Juga Kegiatan Ini Juga Membutuhkan Koordinasi Dengan Instansi Dinas Terkait Dalam Pertimbangan	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember harus lebih mengoptimalkan pelayanan perizinan di semua bidang. 2. Proses perijinan cukup pada Kepala DPMTSP tanpa memerlukan penetapan bupati sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Tahun 1997 dan 2014 terkait pelayanan terpadu satu pintu dimana kepala daerah, gubernur, bupati, wali



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kebijakan Pagu Pagu Anggaran Pada Kode Rekening Belanja Tertentu Dialihkan Ke Bidang Sekretariat	Penerbitan Izin Lokasi	kota, harus mendelegasikan atau memandatkan kewenangan proses pelayanan perizinan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP. 3. Memfungsikan keberadaan DPMPTSP untuk menjamin sistem perijinan yang cepat dan transparan serta mencegah praktik (pungli) melalui SOP yang jelas dan berbasis online.
2.12.19		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Kaasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	100	480.000.000	94.15	480.000.000	tidak Ada Permasalahan Dalam Melaksanakan Kegiatan Dan Program Pelayanan Adminsitasi Perkantoran, Program Ini Merupakan Program Rutin Dan Mengikat, Sehingga Pemaksimalan Dalam Penyerapan Anggaran Perlu Ditingkatkan Agar Terserap Secara	Perlu Ditingkatkan Penyerapan Anggaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			Kuat dan Bersih							Maksimal		
2.12.19.2				Penyusunan SOP, SPP, IKM, Pelayanan Perijinan	Jumlah jumlah bulan pada kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD	12	480.000.000	12	480.000.000	-	-	
2.12.2		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	157.890.000	96.62	152.585.400	tidak Ada Permasalahan Dalam Melaksanakan Kegiatan Dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Ini Merupakan Program Rutin Dan Mengikat, Sehingga Pemaksimalan Dalam Penyerapan Anggaran Perlu Ditingkatkan Agar Terserap Secara Maksimal	Perlu Ditingkatkan Penyerapan Anggaran Agar Lebih Maksimal	
2.12.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	2	61.140.000	2	59.044.500	Tidak Ada Kendala/masalah Dan Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7	44.750.000	7	41.540.900	Tidak Ada Kendala/masalah Dan Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.2.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	95	52.000.000	95	52.000.000	Tidak Ada Kendala/masalah Dan Kegiatan Dilaksanakan Dengan Lancar	Perlu Ditingkatkan Penggunaan Anggaran Yang Tepat Sasaran	
2.12.7		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	0	137.000.000	0	0			
2.12.7.3				Perencanaan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	137.000.000	0	0	Seiring Dengan Kebijakan Peraturan Pusat Yang Selalu Dinamis Dan Berubah Sehingga Penggunaan Anggaran Tidak Diserap Dan Di Aihkan Pada Kegiatan	Perlu Perancangan Dan Rencana Anggaran Yang Lebih Tepat Dan Yang Lebih Fleksibel Dalam Menyesuaikan Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik Agar Kebijakan Dalam Pembuatan Peraturan Tepat Sasaran Dan Tidak Menimbulkan Kerugian	
2.13.1	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	370	1.448.150.000	89.31	989.118.133	Terdapat Beberapa Asumsi Penganggaran Yang Terlalu Besar	Perlu Perencanaan Anggaran Yang Lebih Baik Dan Efisien	
2.13.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan	12	3.150.000	12	1.275.000	Penyerapan Anggaran Kurang	Mengoptimalkan Kinerja Sesuai	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Maksimal	Dengan Kondisi Yang Ada	
2.13.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan	12	75.000.000	12	31.650.587	Anggaran Air Mengalami Kekurangan	Meminta Bantuan Ke Bagian Umum	
2.13.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan	12	50.000.000	12	29.753.356	Penyerapan Anggaran Kurang Maksimal	Mengoptimalkan Kinerja Sesuai Kondisi Yang Ada	
2.13.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah lembar penyediaan	2500	10.000.000	1800	9.997.650	Berkurangnya Kegiatan Karena Pandemi Covid-19	Mengoptimalkan Kinerja Sesuai Kondisi Yang Ada	
2.13.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor	12	15.000.000	8	7.842.193	Penumpukan Penyerapan Anggaran Di Triwulan Ini	Mengoptimalkan Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Secara Merata Di Setiap Triwulan	
2.13.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket penyediaan	4	35.000.000	4	17.283.091	Serapan Anggaran Kurang Maksimal	Mengoptimalkan Kinerja Pada Tahun Anggaran Berikutnya	
2.13.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah bulan penyediaan	12	135.000.000	12	63.944.272	Penyerapan Anggaran Kurang Maksimal	Mengoptimalkan Kinerja Pada Tahun Anggaran Berikutnya	
2.13.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah bulan pelaksanaan	12	235.000.000	11	78.085.914	Penumpukan Kegiatan Dan Penyerapan Anggaran Di Triwulan Ini	Mengoptimalkan Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Secara Lebih Merata Di Setiap Triwulan	
2.13.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	jumlah bulan penyediaan	12	415.000.000	12	392.312.727	Tidak Ada Masalah Yang Signifikan	-	
2.13.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	jumlah bulan pelaksanaan	12	50.000.000	12	28.060.000	Penumpukan Kegiatan Dan Penyerapan	Mengoptimalkan Kinerja Dan Penyerapan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Anggaran Di Triwulan Ini	Anggaran Yang Lebih Merata Di Setiap Triwulan	
2.13.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	jumlah paket penyediaan	2	35.000.000	2	27.631.165	Penyerapan Anggaran Kurang Maksimal	Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran Sesuai Kinerja Yang Ada	
2.13.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	jumlah bulan pelaksanaan	12	390.000.000	12	301.282.178	Penumpukan Penyerapan Anggaran Di Triwulan Ini	Mengoptimalkan Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Secara Merata Di Setiap Triwulan	
2.13.16		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	meningkatnya jumlah pemuda berprestasi	40	1.060.035.000	27	77.336.000	Pelaksanaan Beberapa Kegiatan Berbenturan Waktu Dan Tempatnya Dengan Kegiatan Pemkab Jember Lainnya	Perlu Perencanaan Alternatif Tempat Dan Waktu Kegiatan Untuk Mengantisipasi Kendala Yang Ada	
2.13.16.1				Pembinaan Organisasi Kepemudaan	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	30	610.135.000	22	34.700.000	Banyak Kegiatan Yang Dibatalkan Sebagai Dampak Pandemi Covid-19	Mengoptimalkan Kinerja Sesuai Kondisi Yang Ada	
2.13.16.5				Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda	jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba	1000	77.500.000	0	0	Jadwal Kegiatan Tertunda Karena Dampak Pandemi Covid-19	Menyesuaikan Jadwal Kegiatan Dengan Kebijakan Penanganan Covid-19	
2.13.16.7				Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	60	28.500.000	55	12.450.000	Kegiatan Sudah Terlaksana Di Triwulan Iii	Mengoptimalkan Kegiatan Dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.20		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	meningkatnya jumlah atlet dan pelatih berprestasi cabang olahraga	45	3.447.000.000	35	654.510.000	Lokasi Beberapa Kegiatan Yang Kurang Memenuhi Syarat Dan Tidak Sesuai Standard Nasional	Perlu Penambahan Anggaran Khusus Untuk Pembuatan/ Perbaikan/ Renovasi Lokasi Kegiatan	
2.13.20.4				Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah	jumlah atlet yang berprestasi	150	2.537.000.000	100	654.510.000	Banyak Jadwal Kegiatan Yang Ditunda/dibatalakan Akibat Dampak Pandemi Covid-19	Mengoptimalkan Kinerja Sesuai Dengan Situasi Yang Ada	1. Pemerintah kabupaten lebih serius dalam melakukan pembinaan olah raga sekaligus memberikan perhatian prestasi olah raga. 2. Pengelolaan aset Olah Raga yaitu stadion Jember Sport Garden. (JSG). harus sesuai permen PU Nomor 24 Tahun 2008 yang dilakukan terhadap komponen Arsitektur, Struktur dan Mekanikal Elektrikal. Agar pengelolaan tersebut berjalan maksimal. 3. Pemerintah daerah harus membentuk payung hukum berupa peraturan daerah terkait pembentukan UPT JSG dalam penanganan pemeliharannya.
2.13.				Pelaksanaan Olah Raga	jumlah cabang	5	910.000.	0	0	Kegiatan	Menyesuaikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
20.18				Rekreasi Masyarakat	olahraga masyarakat yang dipertandingkan		000			Dibatalkan Akibat Pandemi Covid-19	Kegiatan Dengan Kondisi Yang Ada	
2.13.22		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan	Program Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda	meningkatnya jumlah pemuda dan atlet yang berprestasi	450	497.300.000	100	16.200.000	Terdapat Beberapa Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan/ Dibatalkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Perlu Meningkatkan Koordinasi Dan Komunikasi Dengan Pemprov Jatim Agar Perencanaan Kegiatan Lebih Produktif	
2.13.22.1				Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani bagi Karyawan dan Masyarakat	jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani bagi karyawan dan masyarakat	10	64.300.000	1	700	Tidak Ada Kegiatan Akibat Dampak Pandemi Covid-19	Menyesuaikan Kegiatan Dengan Situasi Yang Ada	
2.13.22.2				Pemberian Penghargaan bagi Pemuda dan Insan Olah Raga yang Berdedikasi dan Berprestasi	jumlah pemuda dan insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	50	358.000.000	0	15.500.000	Tidak Ada Kegiatan Di Triwulan Iv Karena Pandemi Covid-19	Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahun Berikutnya	1. Pemerintah kabupaten lebih serius dalam melakukan pembinaan olah raga sekaligus memberikan perhatian prestasi olah raga. 2. Pengelolaan aset Olah Raga yaitu stadion Jember Sport Garden. (JSG). harus sesuai permen PU Nomor 24 Tahun 2008 yang dilakukan terhadap komponen Arsitektur, Struktur dan Mekanikal Elektrikal. Agar pengelolaan tersebut berjalan maksimal. 3. Pemerintah daerah



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												harus membentuk payung hukum berupa peraturan daerah terkait pembentukan UPT JSG dalam penanganan pemeliharannya.
2.13. 22.3				Pelaksanaan Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	jumlah atlet yang mengikuti pelaksanaan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	50	75.000.000	0	0	Semua Kegiatan Ditunda/ Dibatalkan Akibat Pandemi Covid-19	Menyusun Ulang Jadwal Kegiatan Menyesuaikan Perkembangan Covid-19	
2.14. 15	Statistik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesional	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Tersedianya data dan statistik daerah	90	70.000.000	0	0	Kegiatan Ini Untuk Tahun Ini Tidak Bisa Direalisasikan Karena Adanya Pandemi Covid19. Akan Tetapi, Dinas Kominfo Kab. Jember Senantiasa Rutin Melakukan Koordinasi Dengan Bps Kab. Jember Mengenai Data Dan Informasi Statistik Yang Ada Di Kab. Jember.	-	
2.14. 15.1				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Persentase Tersedianya data dan statistik daerah	90	70.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Terlaksana Karena Adanya Pandemi Covid-19	Akan Dilaksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Covid-19 Dan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.16	Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase taman publik dengan kegiatan seni dan budaya yang aktif	25	274.800.000	0	228.301.000	Jember Belum Memiliki Museum	Penjagaan, pemeliharaan Dan Pelestarian Benda Cagar Budaya Yang Tersebar Di Wilayah Kabupaten Jember Dilakukan Oleh 20 Juru Pelihara Cagar Budaya	
2.16.16.5				Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	jumlah benda cagar budaya yang dirawat dan dilindungi	450	274.800.000	330	228.301.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
2.16.17		Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom) melalui peningkatan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelaku seni budaya yang mendapat pembinaan	100	864.000.000	0	114.212.000	Jember Belum Memiliki Taman Budaya Maupun Panggung/gedung Kesenian	Pelestarian Seni Dan Budaya Kabupaten Jember Dilakukan Dengan Menampilkan Kesenian Tradisional Di	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			n kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya								Taman- Taman Publik Dan Penampilan Pada Acara-Acara Pemerintah Kabupaten Jember	
2.16.17.1				Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah sanggar seni budaya yang dibina	30	425.000.000	14	95.250.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	1. Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan pendataan dan program pembinaan pada kelompok dan pekerja seni dan budaya yang tersebar di seluruh 2. Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk menyusun kalender event seni dan budaya unggulan Jember.
2.16.17.5				Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	jumlah even seni budaya di dalam dan luar kabupaten	12	439.000.000	0	18.962.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
2.17.1	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	1.187.876.500	85.63	864.040.599	Terdapat Beberapa Kegiatan Yang Tidak / Kurang Maksimal Dalam Pelaksanaanya Dikarenakan	Memaksimalkan Kegiatan Dengan Tetap Mengikuti Aturan Sesuai Protokol Kesehatan Yaitu 3m	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pandemi Covid 19		
2.17.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan pendukung administrasi surat menyurat yang disediakan	3	13.700.000	3	2.575.000	Serapan Anggaran Kurang Maksimal Dikarenakan Kegiatan Yang Dilaksanakan Memang Kurang Maksimal	Mengoptimalkan Penganggaran Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada	
2.17.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa yang disediakan	3	180.500.000	3	142.973.129	Serapan Anggaran Kurang Maksimal	Mengoptimalkan Perencanaan Anggaran Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada	
2.17.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	60	30.104.500	7	1.679.000	Kebutuhan Atk Pada Tahun 2020 Tidak Begitu Banyak Dibutuhkan Dikarenakan Kegiatan Hanya Sebatas Pelayanan Rutin Akibat Pandemi Covid 19	Penganggaran Menyediakan Kebutuhan Yang Ada	
2.17.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	30	10.000.000	0	0	Kurang Lengkapnya Administrasi	Meningkatkan Koordinasi Terkait Administrasi Yang Tidak Lengkap Kepada Pihak Rekanan	
2.17.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin yang disediakan	16000	93.456.000	7590	30.855.500	Tidak Adanya Kegiatan Rapat Staf Dikarenakan Social Distancing	Mengoptimalkan Kinerja Dan Kebutuhan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Yang Ada	
2.17.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan yang diikuti	50	135.000.000	32	98.695.270	Keterbatasan Kegiatan Rapat Dan Pertemuan Diluar Daerah Dikarenakan Pandemi Covid 19	Mengoptimalkan Kinerja Dan Kebutuhan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	
2.17.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah kegiatan yang diikuti	50	100.000.000	6	10.435.000	Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hanya Sebatas Pengiriman Surat Ke Lembaga Terkait Sedangkan Untuk Perpustakaan Keliling Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Pandemi Covid 19	Mengoptimalkan Kinerja Dan Kebutuhan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	
2.17.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan	30	10.000.000	30	9.114.700	-	-	
2.17.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pegawai	45	615.116.000	36	567.713.000	Terdapat Beberapa Pegawai Yang Pensiun Dan Pindah Tugas	Menyesuaikan Kebutuhan Anggaran Dengan Kinerja Pegawai Yang Ada	
2.17.2		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	20	271.606.000	20	151.056.855	Nihil	Nihil	
2.17.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah gedung yang dipelihara	1	5.000.000	1	1.966.500	-	-	Pemerintah daerah kabupaten Jember



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Kantor								untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).
2.17.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2	74.810.000	2	64.749.001	-	-	
2.17.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	11	151.796.000	11	53.242.208	Penyerapan Anggaran Hanya Terbatas Pada Service Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Sedangkan Bbm Tidak Diserap Secara Maksimal Dikarenakan Kegiatan Perpustakaan Keliling Tidak Dilaksanakan Akibat Dampak Pandemi Covid 19	Perencanaan Anggaran Menyesuaikan Kebutuhan Operasional Yang Ada	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).
2.17.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah alat kantor, alat rumah tangga dan komputer yang dipelihara	100	40.000.000	88	31.099.146	Peralatan Kantor, Rumah Tangga Dan Komputer Dalam Status Siap Digunakan	Menyesuaikan Perencanaan Anggaran Dengan Peralatan Kantor, Rumah Tangga Dan Komputer Dalam Kondisi Rusak Atau Yang Sedang Dalam Perbaikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.9		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Angka Melek Huruf	Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Persentase desa yang memiliki perpustakaan / taman baca	82	22.957.500	33.47	0	Pada Tahun 2020 Seluruh Kegiatan Pada Program Perpustakaan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Keterbatasan Anggaran Dan Adanya Pandemi Covid 19	Melaksanakan Kegiatan Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Yaitu 3m (mencuci Tangan, Memakai Masker Dan Menjaga Jarak)	
2.17.9.7				Penyediaan Koleksi dan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah perpustakaan desa yang diberikan pembinaan dan bantuan pengembangan	45	22.957.500	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Pandemi Covid 19	Dianggarkan Ulang Pada Tahun Anggaran Berikutnya	1. Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mendorong budaya literasi pada masyarakat dengan kolaborasi dan pemberdayaan pada komunitas literasi yang ada di Jember. 2. Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile). 3. Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mendorong pembinaan perpustakaan di fasilitas publik, kantor-kantor pemerintah serta di desa.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.16	Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Persentase PD yang telah mengelola arsip secara baku	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Kearsipan	20	17.560.000	0	0	pada Tahun 2020 Seluruh Kegiatan Pada Program Kearsipan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Adanya Pandemi Covid 19	Melakukan Koordinasi Intensif Sesuai Protokol Kesehatan Yaitu 3m Dengan Opd Terkait	
2.18.16.5				Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah arsip yang dilestarikan	50000	3.000.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi	Menyesuaikan Kegiatan Kearsipan Dengan Perencanaan Kegiatan Yang Lebih Tepat Dan Akurat	
2.18.16.9				Pembinaan, Pengembangan dan Pelayanan Arsip Dinamis	Jumlah kegiatan layanan dan pengelolaan arsip dinamis	13	14.560.000	0	0	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Pandemi Covid	Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran Selanjutnya	



3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.01.1	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	layanan penunjang administrasi perkantoran	100	1.413.542.396	100	977.743.309	tidak Ditemukan Kendala Pogram Dalam Kendala Ini	-	
3.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Ketersediaan surat menyurat	100	5.000.000	48	1.376.000	Tidak Ada Masalah Dalam Kegiatan Ini, Hanya Penyerapan Yang Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyusunan Rencana Yang Sesuai Dengan Ouput	
3.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa komunikasi sumberdaya Air dan listrik selama 1 tahun	100	257.142.396	100	121.691.731	-Tidak Ada Masalah Pada Kegiatan Ini	-	
3.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	-Atk kantor selama 1 tahun	100.00	71.450.000	100	52.452.550	Tidak Ada Masalah Dalam Kegiatan Ini	-	
3.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-Penyedia barang cetakan dan penggandaan	100	13.250.000	66.67	10.250.000	Tidak Tercetaknya Buku Kerja Dikarenakan Masih Ada Persediaan Buku Kerja Tahun Sebelumnya	Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Tahun Berikutnya	
3.01.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	10.000.000	100	9.911.000	Tidak Ada Masalah Dalam Kegiatan Ini	-	
3.01.1.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang	5	20.000.000	5	19.899.800	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					Diadakan							
3.01.1.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan bahan logistik kantor	100	2.225.000	100	1.020.000	Tidak Ada Masalah Dalam Kegiatan Ini	-	
3.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	-Penyediaan makanan dan minuman	100	43.325.000	57	23.810.380	Kurang Maksimalnya Kegiatan Rutin Rapat Dinas Karena Pandemi Covid-19	Melaksanakan Penyusunan Rencana Kegiatan Yang Lebih Optimal Untuk Tahun Berikutnya	
3.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	90.000.000	12	30.438.848	Tidak Ada Masalah Pada Kegiatan Ini	-	
3.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12	39.000.000	12	30.725.000	Tidak Ada Masalah Pada Kegiatan Ini	-	
3.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	--Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan	100	862.150.000	100	676.168.000	Tidak Ada Masalah Pada Kegiatan Ini	-	
3.01.15		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok Binaan	8	84.950.000	0	0			
3.01.15.1				Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Pembinaan Kelompok Ekonomi Pesisir	4	84.950.000	0	0	Pandemi Covid 19 Tdk Dimungkinkan Untuk Melakukan Pembinaan Kelompok	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/keperluan	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan.
3.01.2		Dinas Perikanan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana	67	242.325.000	67	95.911.906	tidak Ditemukan Kendala Pogram	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Aparatur	aparatur					Dalam Kendala Ini		
3.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	1	41.900.000	1	32.937.506	Tidak Ada Masalah Dalam Kegiatan Ini	-	
3.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45	121.900.000	45	44.845.300	Tidak Ada Masalah Dalam Kegiatan Ini	-	
3.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	50	78.525.000	45	18.129.100	Tidak Ada Masalah Dalam Kegiatan Ini	-	
3.01.20		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tambak	1	496.432.720	1	332.177.800	1. kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Budidaya Masih Kurang 2. masih Belum Optimalnya Dukungan Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Program Budidaya Pada Dinas Perikanan	1. promosi Program Perikanan Budidaya Di Masyarakat Terkait Peluang usaha Yang Dapat Dikembangkan Dari Program Pengembangan perikanan Budidaya. 2. restrukturisasi Sdm Yang Menangani Perikanan Budidaya	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember.
3.01.20.1				Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Jenis Ikan Unggul Yang Dikembangkan	2	69.232.720	0	0	Mengikuti Proses Sesuai Penanganan Covid19	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/keperluan	
3.01.20.4				Peningkatan dan Pengembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana BBI yang	8	427.200.000	8	332.177.800	Tidak Ada Masalah Dalam	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Produktivitas BBI	berhasil di Tingkatkan					Kegiatan Ini		
3.01.21		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perairan Umum Daratan (Ton)	170	364.669.248	165	76.810.000	permodalan Yang Belum Kondusif Bagi Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Di Kabupaten Jember	Pemberdayaan Nelayan Melalui Dukungan Kelembagaan Dan Permodalan	
3.01.21.1				Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang didampingi	160	74.300.000	2	3.425.000	Mengikuti Prokes Sesuai Penanganan Covid19	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/kepentingan	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan.
3.01.21.6				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Berhasil Ditingkatkan	14	134.969.248	3	6.485.000	Mengikuti Prokes Sesuai Penanganan Covid19	Penggunaan Anggaran Sesuai Aturan Perkda	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan Nelayan.
3.01.21.7				Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana TPI yang Berhasil Ditingkatkan	6	51.200.000	0	0	Mengikuti Prokes Sesuai Penanganan Covid19	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/kepentingan	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mempermudah ijin dan birokrasi dalam meningkatkan pengelolaan TPI (cold storage).
3.01.21.8				Peningkatan Operasional TPI	Prosentase Nelayan Yang Melakukan Lelang di TPI	25	104.200.000	15	66.900.000	Proses Lelang Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Belum Berjalan Dengan Optimal, Hanya Sebatas Penimbangan Produksi Ikan Yang Mendarat Di Tpi	Pendekatan Secara Personal, Pembinaan Dan Pendampingan Oleh Petugas	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mempermudah ijin dan birokrasi dalam meningkatkan pengelolaan TPI (cold storage).



Kode	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.01.23		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	presentase meningkatkan nilai produksi hasil perikanan	10	200.750.000	10	15.700.000	dalam Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Ini tidak Terdapat permasalahan Berarti.	-	
3.01.23.2				Peningkatan Usaha dan Pemasaran Produksi Perikanan	jumlah temu usaha perikanan	3	42.850.000	1	15.700.000	Adanya Pandemi Covid 19 Tdk Dimungkinkan Untuk Melakukan Temu Usaha	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/kepentingan	
3.01.23.4				Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	5	118.900.000	0	0	Adanya Pandemi Covid 19 Tdk Dimungkinkan Untuk Melakukan Pelatihan	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/kepentingan	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan.
3.01.23.5				Pendataan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Laporan data produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1	39.000.000	0	0	Adanya Pandemi Covid 19 Tdk Dimungkinkan Untuk Melakukan Kegiatan Pendataan	Menganggarkan Di Tahun Berikutnya	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember.
3.01.25		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Perlindungan Nelayan	jumlah nelayan yang di ansuransikan	12100	347.350.000	5578	190.232.112	Kesadaran Masyarakat Untuk Mengasuransikan Diri Masih Rendah	Sosialisasi Pentingnya Asuransi Diri, Mengingat Profesi Nelayan Memiliki Resiko Besar Dalam Pekerjaannya	
3.01.25.1				Asuransi Nelayan	jumlah nelayan yang di ansuransikan	12100	347.350.000	5578	190.232.112	Masih Minimnya Pengetahuan Dan Kesadaran Nelayan Akan Pentingnya Berasuransi,	Melaksanakan Sosialisasi Asuransi Bagi Nelayan Dan Memberikan	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan Nelayan.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Sehingga Perlu Adanya Sosialisasi Dan Stimulus Bantuan Premi Asuransi	Stimulus Secara Bertahap Untuk Seluruh Nelayan Di Kabupaten Jember	
3.01.26		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	prosentase terawasinya dan terkendalinya sumberdaya perikanan	74	381.275.000	60	0	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Memelihara Kelestarian Sumber Daya Ikan Untuk Masa Yang Akan Datang	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas Dan Melakukan Pendampingan Kepada Kelompok-Kelompok Pengawas Perikanan Yang Telah Terbentuk.	
3.01.26.1				Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Perikanan	jumlah pokmaswas yang berhasil dibentuk	19	381.275.000	0	0	Adanya Pandemi Covid 19 Tdk Dimungkinkan Untuk Melakukan Pembinaan	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/keperluan	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember.
3.01.27		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan	jumlah kelompok binaan	474	157.920.532	0	0			
3.01.27.1				Peningkatan Sumberdaya Manusia Perikanan	-jumlah pembinaan SDM perikanan	8	117.920.532	0	0	Mengikuti Proses Sesuai Penanganan Covid19 "	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/keperluan	
3.01.27.3				Pendataan produksi perikanan budidaya	Jumlah laporan data produksi perikanan budidaya	1	40.000.000	0	0	Adanya Pandemi Covid 19 Tdk Dimungkinkan Untuk Melakukan Kegiatan	Kegiatan Pendataan Perikanan Budidaya Akan Di Anggarkan Lagi	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pendataan	Pada Tahun Berikutnya	Jember.
3.01.28		Dinas Perikanan	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	- jumlah pembinaan kelompok nelayan	7	170.000.000	7	20.400.000	tidak Ditemukan Kendala Pogram Dalam Kendala Ini	-	
3.01.28.1				Pembinaan Kelompok Masyarakat Nelayan	- jumlah pembinaan kelompok nelayan	7	130.000.000	0	0	Mengikuti Proses Sesuai Penanganan Covid19 "	Pembinaan Secara Personal Sesuai Kebutuhan/kepentingan "	
3.01.28.2				Pendataan produksi perikanan tangkap	jumlah laporan data produksi perikanan	1	40.000.000	0	20.400.000	Adanya Pandemi Covid 19 Tdk Dimungkinkan Untuk Melakukan Kegiatan Pendataan	Kegiatan Pendataan Akan Dianggarkan Di Tahun Anggaran Berikutnya	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember.
3.02.1	Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tercukupinya kebutuhan ASN selama satu tahun	100	3.679.800.000	8.12	2.616.433.482	Pandemi Covid-19 Berdampak Pada Penurunan Kinerja Dan Tidak Tercapainya Target Indikator Kinerja Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Melarang Aktifitas Diluar Ruang Yang Berdampak Pada Minimnya Penyerapan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berfungsi	Mengikuti Peraturan Pemerintah	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Mencukupi Mobilitas Asn.		
3.02.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	375.000.000	40.81	215.539.729	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	100	140.000.000	23.72	60.076.300	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100	60.000.000	4.93	9.545.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	100	100.000.000	22.9	37.690.250	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	55.000.000	45.38	28.222.500	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100	75.000.000	16.5	25.042.500	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	100	170.000.000	11.93	33.013.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	tercukupinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	346.300.000	6.75	78.827.642	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	tersedianya tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	100	1.884.100.000	65.83	1.791.300.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Covid-19		
3.02.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	tercukupinya rapat - rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah	100	20.000.000	70.12	18.795.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	tercukupinya penunjang administrasi dan operasional rutin kantor / kedinasan	100	454.400.000	48.51	318.381.561	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.15		Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jember	1238977	399.900.000	0	52.065.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19	Mengikuti Aturan Pemerintah	
3.02.15.3				Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	pemilihan gus ning serta pengiriman duta seni kabupaten jember	24	122.000.000	2	50.025.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih inovatif dalam menyusun Calender of Event yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Jember.
3.02.15.4				Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	jumlah organisasi pariwisata yang mengadakan kerjasama	5	69.900.000	0	1.240.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lembaga biro perjalanan, pengelola



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												destinasi serta desa wisata, pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah.
3.02.15.5				Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	jumlah pameran pariwisata yang diikuti	4	208.000.000	0	800	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lembaga biro perjalanan, pengelola destinasi serta desa wisata, pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah.
3.02.16		Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan Jember sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur melalui pengembangan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah obyek wisata dan paket wisata yang layak jual	1	452.050.000	1	49.750.000	Minimnya Dana Untuk Melakukan Redesain Dan Renovasi Sarana Prasarana Pariwisata Milik Pemkab Jember	Redesain Dan Renovasi Dilakukan Secara Bertahap	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			pasarwisata dan destinasi pariwisata									
3.02.16.2				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata	jumlah obyek wisata yang layak jual	1	108.000.000	0	49.750.000	Kegiatan Pembangunan Saran Dan Prasarana Pariwisata Diluar Yang Diperbolehkan Dalam Perkada	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan destinasi yang menjadi aset daerah seperti Watu Ulo, Rembangan, bahkan sekarang muncul pantai Payangan atau Teluk Love.
3.02.16.6				Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah even yang diselenggarakan di objek wisata	1	344.050.000	0	0	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.17		Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan Jember sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur melalui pengemba	Program Pengembangan Kemitraan	persentase jumlah usaha pariwisata yang dibangun jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi keahlian dan jumlah buku kepariwisataan	100	333.200.000	0	79.670.000	kurangnya Kesadaran Pengusaha Pariwisata Dalam Mengirimkan Data Kunjungan Wisatawan Per Bulan	berkoordinasi Dengan Phri (persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia) Cabang Jember Serta Melakukan Kegiatan Pengambilan Data Ke Lapangan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			ngan pasarwisata dan destinasi pariwisata									
3.02.17.1				Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	jumlah buku data base dan informasi pariwisata yang tersedia	500	82.000.000	0	78.080.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.02.17.7				Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	jumlah tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat keahlian	50	0	0	0	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.
3.02.17.8				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan festival kuliner	15	251.200.000	0	1.590.000	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.
3.02.2		Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	205.400.000	4.43	69.041.171			
3.02.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	100	205.400.000	17.72	69.041.171	Anggaran Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19	Mematuhi Aturan Dari Pemerintah Pusat	
3.03.1	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	100	1.860.338.400	100	1.491.712.458	1. Belanja Modal Tahun 2020 Tidak Diperolehkan 2. Efisiensi Covid	Tahun 2021 Akan Di Anggarkan Kembali	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.03.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana Surat Menyurat	1	2.000.000	1	1.998.000	-		
3.03.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Yang Difasilitasi	4	120.000.000	2	94.046.357		Kegiatan Akan Di Maksimalkan Ditahun Berikutnya	
3.03.1.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Yang Difasilitasi	0	0	0	0			
3.03.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Yang Difasilitasi	0	0	0	0			
3.03.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan / perbaikan peralatan kerja	1	20.000.000	1	19.775.000			
3.03.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	1	81.000.000	1	80.872.005	-		
3.03.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang tersedia	1	20.000.000	1	19.926.700	-		
3.03.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1	8.000.000	1	7.887.400	-	-	
3.03.1.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	1	5.000.000	1	4.444.839			
3.03.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	1	128.700.000	1	86.339.800	-		
3.03.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai Yang difasilitasi	1	91.600.000	1	82.262.816			
3.03.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	1	141.600.000	1	132.160.000	-		
3.03.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah tenaga administrasi dan operasional rutin	1	1.186.638.400	1	929.989.541	-		



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					kantor/kedinasan yang difasilitasi							
3.03.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	1	21.800.000	0	0	Belanja Modal Tidak Dilaksanakan Pada Tahun Ini	Kegiatan Ini Akan Di Anggarkan Kembali Di Tahun 2021	
3.03.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan	1	34.000.000	1	32.010.000	-	-	
3.03.15		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Meningkatkan nilai PDRB sub kategori pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase peningkatan kelas kelompok	50	218.647.000	50	0	Perubahan Anggaran Karena Dialihkan Ke Penanganan Corona	Bidang Yang Menangani Harus Memperjuangkan Di Tim Anggaran	
3.03.15.3				Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya Jumlah Petani yang dilatih	0	218.647.000	0	0	Kegiatan Refocusing Ke Penanganan Pandemi Covid 19	Kegiatan Ini Dilaksanakan Secara Berkelanjutan Dan Akan Dilaksanakan Di Tahun 2021.	1. Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan program pemberdayaan pada kelompok tani. 2. Pemerintah daerah kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan.
3.03.18		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura	Meningkatkan nilai PDRB sub kategori	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian	1	417.250.000	63	0	1. Administrasi Tidaklengkap Sehingga Tidak Bisa Dilaksanakan	Tahun 2021 Akan Dianggarkan Kembali	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Dan Perkebunan	pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)							2. Anggaran Bantuan Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 Tidak Diperbolehkan 3. Didahulukan Anggaran Yang Bersifat Urgent		
3.03.18.2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	tersedianya data kebutuhan pupuk bersubsidi, tersedianya produksi pupuk organik dan tersedianya alsintan	3	417.250.000	0	0	Kegiatan Di Alihkan Pada Penanganan Covid-19 Karena Bukan Termasuk Kegiatan Yang Mendesak	Kegiatan Ini Akan Di Anggarkan Di Tahun Berikutnya	Pemerintah daerah kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).
3.03.19		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Meningkatkan nilai PDRB sub kategori pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi perkebunan Tembakau Na Oogst	39429	38.450.000	0	0			
3.03.19.3				Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan (kopi, tebu, kelapa, cabe jamu, kakao, lada) yang berkualitas	36300	38.450.000	0	0	Syarat Administrasi Terlambat Diselesaikan Sehingga Tidak Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Ini Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kesejahteraan petani.
3.03.2		Dinas Tanaman Pangan,		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan	100	387.400.000	70.84	127.623.608	Efisiensi Covid	Tahun Depan Akan Dianggarkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Hortikultura Dan Perkebunan			pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standart daerah						Kembali	
3.03.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung gedung kantor yang dipelihara	2	200.000.000	0	0	Belanja Modal Tidak Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Ini Akan Dilaksanakan Pada Tahun Berikutnya	
3.03.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5	187.400.000	5	127.623.608	Target Kinerja Sudah Tercapai	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Penganggaran Tahun Berikutnys	
3.03.2.42				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	0	0	0	0	Kegiatan Ini Di Alihkan Pada Penanganan Pandemi Covid-19 Sehingga Tidak Dapat Dilaksanakan Ditahun Ini	Kegiatan Ini Akan Dilaksanakan Di Tahun 2021	
3.03.25		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Meningkatkan nilai PDRB sub kategori pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	% Peningkatan produksi tembakau	6	2.307.756.000	96.95	5.150.000	Administrasi Tidaklengkap Sehingga Tidak Bisa Dilaksanakan	Tahun Depan Akan Dianggarkan Kembali	
3.03.25.16				Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan GAP tembakau	Tercukupinya Pupuk Rendah Chlor	0	0	0	0	Kegiatan Ini Dialihkan Pada Penanganan Pandemi Covid-19 Sehingga Tidak Dapat	Kegiatan Ini Akan Dilaksanakan Pada Tahun Berikutnya	Pemerintah daerah kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan tehnologi pertanian



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dilaksanakan Pada Tahun Ini		(alat pertanian, dan pupuk).
3.03.25.17				Penanganan Panen dan Pasca Panen	Persentase Tercukupinya Panen dan Pasca Panen Tembakau	0	403.050.000	0	0	Syarat Administrasi Terlambat Diselesaikan Sehingga Tidak Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Di Tahun Depan	Pemerintah daerah kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan tehnologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).
3.03.25.18				Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau	Tersedianya sarana dan prasarana usaha tani tembakau	0	1.538.656.000	0	0	Syarat Administrasi Terlambat Diselesaikan Sehingga Tidak Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya	Pemerintah daerah kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan tehnologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).
3.03.25.19				Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Pelatihan kemandirian tembakau	1	71.750.000	1	5.150.000	-	-	
3.03.25.20				Penerapan Inovasi Teknis	Terselenggaranya Pelatihan Inovasi Teknologi Tembakau	0	294.300.000	0	0	Syarat Administrasi Terlambat Diselesaikan Sehingga Tidak Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Ini Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya	Pemerintah daerah kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan.
3.03.26		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Meningkatkan nilai PDRB sub kategori pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	Jumlah masyarakat yang mengakses sistem informasi pertanian	200	145.320.000	200	141.720.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			Perkebunan)									
3.03.26.1				Penyusunan Data Statistik Pertanian	Jumlah komoditas yang terjamin validasi datanya	10	145.320.000	10	141.720.000	-	-	
3.03.27		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Meningkatkan nilai PDRB sub kategori pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan utama	1608799	91.050.000	1577255	88.800.000	-	-	
3.03.27.2				Pengembangan Perlindungan Tanaman Pangan	Persentase penurunan kehilangan hasil	3	91.050.000	3	88.800.000	-	-	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan program pemberdayaan pada kelompok tani.
3.03.28		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Meningkatkan nilai PDRB sub kategori pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Program Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura kubis	16000	58.935.000	15600	13.500.000	1. Efisiensi Covid 2. Administrasi Tidak Lengkap Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan	Tahun Depan Akan Dianggarkan Kembali	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kesejahteraan petani.
3.03.28.1				Peningkatan Produksi Buah-buahan	Bantuan bibit buah-buahan yang tumbuh dan berkembang	2850	50.000.000	1700	13.500.000	Adanya Pandemi Covid-19 Sehingga Kegiatan Ini Tidak Dapat	Kegiatan Ini Akan Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	



Kode	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dilaksanakan Secara Maksimal		
3.03.28.2				Peningkatan Produksi Sayuran. Tanaman Obat. dan Tanaman Hias	Jumlah KK yang mengembangkan sayuran di pekarangan	930	0	0	0	Kegiatan Ini Direfokusing Untuk Kegiatan Kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19	Kegiatan Ini Akan Dilaksanakan Tahun Berikutnya	
3.03.28.3				Peningkatan Produksi Perbenihan Holtikultura	Jumlah bibit hortikultura yang disalurkan	40000	8.935.000	0	0	Syarat Administrasi Terlambat Diselesaikan Sehingga Tidak Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Ini Akan Di Maksimalkan Di Tahun 2021	
3.03.1		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi	100	1.542.130.500	100	1.158.821.988	-	-	
3.03.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12	128.700.000	12	72.268.157	-	-	
3.03.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan selama 1 tahun	1	45.000.000	0	11.733.800	Adanya Pandemi Covid-19, Membuat Hampir Semua Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Secara Sepenuhnya. Sehingga Kebutuhan Akan Atk Tidak Sebanyak Tahun Sebelumnya.	Penyesuain Terhadap Kinerja Dan Anggaran Di Tahun Berikutnya	
3.03.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah barang cetakan dan	1	15.000.000	0.2	850	Adanya Pandemi Covid-19 Membuat	Tetap Mendata Kebutuhan	



Kode	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Penggandaan	penggandaan yang disediakan selama 1 tahun					Hampir Semua Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan, Sehingga Kebutuhan Cetakan Dan Penggandaan Tidak Sedikit Tahun Sebelumnya	Cetakan Dan Penggandaan Dari Masing-Masing Bidang	
3.03.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 1 tahun	1	6.000.000	0	2.115.400	Belum Adanya Peralatan Listrik Kantor Yang Rusak Sehingga Anggaran Pemenuhan Peralatan Listrik Belum Bisa Dilaksanakan.	Menginventarisir Peralatan Listrik Yang Perlu Mengalami Penggantian.	
3.03.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan selama 1 tahun	1	128.280.000	0.4	22.538.165	Realisasi Anggaran Makan Minum Terhambat Oleh Adanya Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya	
3.03.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	12	120.000.000	9	96.375.366	Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Terhambat Oleh Adanya Pandemi Covid-19	Rapat-Rapat Keluar Daerah Dilaksanakan Secara Daring	
3.03.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan operasional rutin kantor yang tersedia selama 1 tahun	9	1.099.150.500	9	952.941.100	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.03.2		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak guna	67	156.578.000	65	55.760.613	-	-	
3.03.2.10				Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebelur yang diadakan	1	52.102.000	0	0	Belum Adanya Perda Apbd 2020. Sehingga Kegiatan Belum Bisa Dilaksanakan	-	
3.03.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dan siap pakai	5	10.000.000	0	0	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Tidak Termasuk Dalam Kegiatan Wajib, Rutin Dan Mengikat. Sehingga Anggaran Yang Ada Tidak Bisa Terserap	Tetap Menginventarisir Bagian-Bagian Gedung Kantor Yang Perlu Diperbaiki.	
3.03.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dan siap pakai	1	31.880.000	1	19.385.321	Adanya Pandemi Covid-19, Membatasi Operasional Mobil Jabatan. Anggaran Yang Terserap Hanya Untuk Belanja Bbm Perjalanan Lokal Saja Dan Pengantian Beberapa Suku Cadang Yang Rusak.	-	
3.03.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2	53.796.000	2	32.000.292	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Dinas/Operasional	yang terpelihara dan siap pakai							
3.03.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah alat kantor, alat rumah tangga dan komputer yang terpelihara dan siap pakai	15	8.800.000	14	4.375.000	Kerusakan Peralatan Kantor Tidak Terlalu Berat, Sehingga Tidak Memerlukan Biaya Yang Besar. Sisa Anggaran Masuk Sebagai Efisiensi Anggaran	-	
3.03.21		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Meningkatkan Nilai PDRB Sub Kategori Peternakan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Prosentase angka kematian ternak dari total populasi ternak di Kabupaten Jember	1	426.679.500	1	99.867.000	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dari Luar Opd, Mempengaruhi Terhadap Progres Pembangunan 2 Unit Puskesmas. Pembangunan 2 Unit Puskesmas Hanya Selesai Di Pekerjaan Perencanaan Kontruksi Saja.	Pejabat Pembuat Komitmen, Lebih Baik Dari Internal Opd, Karena Akan Mempermudah Koordinasi Pekerjaan.	
3.03.21.2				Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang diperiksa dan diobati secara gratis (sapi)	3000	127.500.000	50	3.460.000	Adanya Pandemi Covid-19, Tidak Memungkinkan Untuk Untuk Melaksanakan Pelayanan Aktif Pada Masyarakat.	Mensosialisasikan Pelayanan Pasif Di Klinik Dan Puskesmas Pada Masyarakat.	
3.03.21.6				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veterinair	Jumlah pengadaan sarpras RPH/RPU	22	133.285.000	6	27.370.000	Ada Beberapa Sarpras Yang Membutuhkan Perbaikan Dan Penggantian	Merencanakan Anggaran Perbaikan Dan Pengantian Sarpras Pada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dengan Nominal Diatas Anggaran Yang Tersedia. Sehingga Tidak Bisa Dilaksanakan Pada Tahun 2020.	Tahun 2021	
3.03.21.7				Peningkatan Pelayanan Lab. Kesehatan Hewan dan Ikan	Jumlah pelayanan pemeriksaan sampel feses, darah dan kulit	24	90.660.000	20	36.743.000	Adanya Pandemi Covid-19, Membuat Pengambilan Sample Secara Aktif Tidak Bisa Dilaksanakan	Mesosialisasikan Layanan Pasif Ke Masyarakat.	
3.03.21.8				Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Menular	Jumlah kecamatan sasaran pengamatan dan penyidikan penyakit hewan menular	31	75.234.500	31	32.294.000	Adanya Pandemi Covid-19, Membuat Kegiatan Surveillance Penyakit Ternak Dibatasi.	Kegiatan Surveillance Penyakit Ternak Mulai Dilaksanakan Secara Aktif Walaupun Dengan Pengurangan Frekuensi Kegiatan.	
3.03.22		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Meningkatkan Nilai PDRB Sub Kategori Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi sapi potong	268700	243.900.000	263739	141.871.202	-	-	
3.03.22.10				Pengembangan Sapi Perah	Jumlah ternak sapi perah yang dikelola	50	71.000.000	21	68.746.202	Kecukupan Hijauan Pakan Ternak Kurang Pada Musim Kemarau	Melakukan Mapping Areal Lahan Hijauan Yang Perlu Ditanami Rumput Pada Saat Musim Penghujan	
3.03.				Kegiatan Kontes Ternak	Jumlah ternak yang	186	0	0	0	Adanya Pandemi	Penyesuaian	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
22.1 2					mengikuti kontes ternak					Covid-19, Membuat Kegiatan Kontes Ternak Tidak Bisa Dilaksanakan	Anggaran Di Tahun Berikutnya	
3.03. 22.1 4				Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan pada Masyarakat	Jumlah bibit (semen) ternak yang didistribusikan pada masyarakat	130000	101.600.000	130000	70.200.000	Secara Umum Permasalahan Tidak Ada. Anggaran Yang Terserap Hanya Untuk Biaya Honor Petugas Pengadministrasi Program Upsus Siwab.	-	
3.03. 22.1 5				Peningkatan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	Jumlah peserta pelatihan pembuatan ransum pakan	150	34.800.000	0	2.925.000	Adanya Pandemi Covid-19 Membuat Kegiatan Ini Belum Bisa Dilaksanakan	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya	
3.03. 22.1 6				Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat	Jumlah SPR yang terbentuk	43	36.500.000	0	0	Sosialisasi Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat Belum Bisa Dilaksanakan Akibat Pandemi Covid-19	Tetap Menyiapkan Rencana Kegiatan	
3.03. 23		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Meningkatkan Nilai PDRB Sub Kategori Peternakan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Prosentase meningkatnya nilai penjualan hasil peternakan	10	154.000.000	10	0	Anggaran Stimulus Dari Pemerintah Daerah Tidak Bisa Direalisasikan Karena Belum Adanya Payung Hukum Dalam Pelaksanaan Program Dan Kegiatan. Selain Itu, Adanya	Tetap Melaksanakan Pendampingan Daring Kepada Para Pelaku Usaha Peternakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pandemi Covid-19 Juga Menjadi Penyebab Terhambatnya Program Dan Kegiatan Dinas Kp Dan Peternakan		
3.03.23.2				Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hash Produksi Peternakan Komplementer.	Jumlah peserta temu usaha peternakan	350	45.250.000	0	0	Kegiatan Ini Belum Bisa Dilaksanakan Akibat Adanya Pandemi Covid-19	Tetap Menyiapkan Rencana Kegiatan, Sebagai Langkah Antisipasi Jika Sewaktu-Waktu Kegiatan Ini Bisa Dilaksanakan	
3.03.23.7				Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah peserta pelaksanaan Gerakan Minum Susu dan Makan Telur	200	108.750.000	0	0	Kegiatan Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Karena Pandemi Covid-19	Tetap Menyiapkan Rencana Kegiatan, Sebagai Langkah Antisipasi Jika Sewaktu-Waktu Kegiatan Ini Bisa Dilaksanakan	
3.04.16	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Prosentase luas lahan kritis yang terehabilitasi	21	0	0	0			
3.04.16.6				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Luas lahan kritis yang terehabilitasi	50	0	0	0	Adanya Pergeseran	Akan Dianggarkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan						Anggaran, Dan Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menjadi Nol	Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
3.06.1	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase realisasi pelayanan administrasi perkantoran dibanding pelayanan administrasi	80	2.309.893.250	80	1.534.292.677	Tidak Ada Permasalahan Karena Sudah Sesuai, Termasuk Program Yang Rutin Dan Mengikat.	Program Berkelanjutan.	
3.06.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	662	1.800.000	662	427.5	Sudah Terealisasi		
3.06.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon, Website, Air, dan Listrik yang digunakan	4	604.800.000	4	285.640.307	Sudah Terealisasi		
3.06.1.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Telepon, Website, Air, dan Listrik yang digunakan	0	31.500.000	0	0	Tidak Terealisasi Karena Pandemi Covid-19	Dianggarkan Tahun Depan	
3.06.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyedia Alat Tulis Kantor	1	70.000.000	1	43.664.920	Sudah Terealisasi		
3.06.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang cetakan dan Penggandaan	1	198.000.000	1	188.121.820	Sudah Terealisasi		
3.06.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1	2.000.000	1	694.5	-		
3.06.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1	156.662.500	1	12.645.000	Sudah Terealisasi		
3.06.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pengadaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	125.000.000	1	73.068.955	Sudah Terealisasi		



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.06.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah Tenaga pendukung kelancaran operasional Kantor	2	507.170.750	2	485.769.875	Sudah Terealisasi		
3.06.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan bahan kebersihan	1	101.250.000	1	3.088.800	-		
3.06.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pemenuhan administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan	4	511.710.000	4	441.171.000	Sudah Terealisasi		
3.06.15		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan PDRB sektor Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pelanggaran perlinungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang berhasil diselesaikan	20	389.100.000	30	72.502.126			
3.06.15.3				Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai	4	113.900.000	4	20.765.000	Sudah Terealisasi		Pemerintah daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan dan program perlindungan pedagang/pasar tradisional di tengah fenomena gempuran masuknya pasar modern dan berjangkauan.
3.06.15.4				Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Jumlah UTTP yang melakukan Tera/Tera Ulang selama satu tahun	29000	275.200.000	29000	51.737.126	Sudah Terealisasi		
3.06.17		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan PDRB sektor Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Net Ekspor	5.5E+09	80.860.000	5.4E+09	5.080.000	karena Adanya Pandemi Covid-19.	Wewenang Urusan Ekspor Ada Di Provinsi. Sedangkan Dinas Hanya Sebatas Pemantauan Saja.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.06.17.9				Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan di evaluasi	60	80.860.000	60	5.080.000	Sudah Terealisasi		
3.06.17.12				Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah Promosi Perdagangan nasional dan internasional yang diikuti	2	0	0	0	Tidak Terealisasi, Karena Kegiatannya Tidak Bersifat Wajib Dan Mengikat	Dianggarkan Tahun Depan	
3.06.18		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan volume dalam negeri peserta program dibanding total volume perdagangan yang ada	80	958.440.000	80	72.088.734	karena Adanya Pandemi Covid-19.	Menganggarkan Tahun Depan Dengan Harapan Pandemi Covid-19 Segera Berakhir.	
3.06.18.4				Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah warung yang direkrut untuk kerjasama (jumlah pengadaan sistem jaringan)	200	409.290.000	0	0	Tidak Terealisasi, Karena Kegiatannya Tidak Bersifat Wajib Dan Mengikat	Dianggarkan Tahun Depan	
3.06.18.8				Penyelenggaraan Pasar Murah	Jumlah lokasi yang diselenggarakan pasar murah	31	280.350.000	0	0	Tidak Terlaksana Karena Pandemi Covid-19	Dianggarkan Tahun Depan	
3.06.18.13				Operasionalisasi Gudang untuk Sistem Resi Gudang	Jumlah hasil panen yang digudangkan (SRG)	1000	268.800.000	1000	72.088.734	Sudah Terealisasi		
3.06.2		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	1.074.075.008	100	244.617.807	tidak Ada Permasalahan Karena Sudah Sesuai.	Program Berkelanjutan.	
3.06.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1	56.221.700	1	18.718.119	Sudah Terealisasi		



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.06.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41	944.422.200	41	152.468.580	Sudah Terealisasi		
3.06.2.42				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	73.431.108	1	73.431.108	Sudah Terealisasi	Sudah Dilaksanakan	
3.06.21		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pasar tradisional Kabupaten / Kecamatan yang berhasil di rehabilitasi	0	22.978.400.611	22	17.381.403.348	revitalisasi Pasar Sudah Dilakukan Di Semua Pasar Rakyat, Hanya Belum 100%.	Menganggarkan Di Tahun Berikutnya.	
3.06.21.1				Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Pasar	Jumlah pasar tradisional dan pasar hewan yang direhab	5	20.089.900.611	5	14.781.403.348	Sudah Terealisasi	Dianggarkan Tahun Depan	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif mendorong pasar berstandart SNI sebagaimana diatur dalam Ketentuan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN yang didalamnya mengatur Pedoman pasar Rakyat serta PERATURAN KEPALA BADAN



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT.
3.06.21.3				Penataan Pedagang Kaki Lima dan Lesehan di Kawasan Pasar	Jumlah Pasar Tradisional buka lebih dari 18 Jam/Hari	3	2.888.500.000	3	2.600.000.000	Sudah Terealisasi	Sudah Terlaksana	
3.07.16	Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan PDRB sektor industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peserta yang usahanya eksis/berhasil dibandingkan dengan keseluruhan total peserta	0	180.200.000	100	19.650.000	karena Adanya Pandemi Covid-19.	Menganggarkan Tahun Depan, Dengan Harapan Kondisi Lebih Baik.	
3.07.16.2				Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah IKM yang telah dibina	0	180.200.000	0	19.650.000	Hanya Dipergunakan Untuk Kegiatan Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat	Dianggarkan Tahun Depan	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian.
3.07.17		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan PDRB sektor industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang berhasil meningkatkan teknologi Industri	70	184.100.000	70	15.590.000	karena Adanya Pandemi Covid-19.	menganggarkan Tahun Depan, Dengan Harapan Kondisi Lebih Baik.	
3.07.17.5				Penumbuhan Wira Usaha Baru Sektor Industri	Jumlah IKM baru yang berhasil berwira usaha setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan stimulan serta bahan baku	0	184.100.000	0	15.590.000	Hanya Dipergunakan Untuk Kegiatan Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat	Dianggarkan Tahun Depan	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berdasarkan potensi unggulan daerah.
3.07.23		Dinas Perindustri		Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang eksis	0	40.400.000	0	5.324.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		an Dan Perdagangan										
3.07.23.9				Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah melalui Pengujian Tar dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah		0	40.400.000	0	5.324.000	Hanya Dipergunakan Untuk Kegiatan Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat	Dianggarkan Tahun Depan	Pemerintah daerah kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.07.24		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatnya PDRB sektor industri	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase peserta sosialisasi yang usahanya eksis/berhasil	100	99.425.000	0	18.695.000			
3.07.24.4				Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah IKM rokok yang mengikuti sosialisasi cukai	5	99.425.000	0	18.695.000	Hanya Dipergunakan Untuk Kegiatan Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat	Dianggarkan Tahun Depan	1. Pemerintah daerah kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember. 2. Pemerintah daerah kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah daerah



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												kabupaten Jember mengoptimalkan program untuk peningkatan peran dan fungsi Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ).
3.07.25		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	Menurunnya peredaran rokok tanpa cukai/palsu yang ada dipasaran	0	71.925.000	0	36.704.000			
3.07.25.3				Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau	Informasi barang yang bercukai ilegal	0	71.925.000	0	36.704.000	Hanya Dipergunakan Untuk Kegiatan Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat	Dianggarkan Tahun Depan	Pemerintah daerah kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.27	Administrasi Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dalam penyusunan pedoman	100	270.415.000	100	147.365.000	-	-	
4.01.27.1				Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah penyusunan tentang pedoman pengelolaan keuangan	3	119.665.000	3	49.865.000	-	-	1. Pemerintah Kab, Jember harus melakukan pembinaan



Kode	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					desa							dan mendorong inovasi pembangunan dan pelayanan desa. 2. Pendanaan pilkades serentak kedepan dikembalikan ke model lama dengan memberikan kepercayaan pada panitia ditingkat desa untuk mengelola sesuai regulasi.
4.01.27.7				Pemutakhiran Data Desa Mendukung Alokasi Keuangan Desa	Jumlah Penyusunan Perbup ADD, DD, BGH	3	150.750.000	3	97.500.000	-	-	
4.01.28		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah penyelesaian permasalahan desa	20	132.660.000	20	116.540.000	-	-	
4.01.28.1				Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah terpilihnya Kepala Desa serentak	20	132.660.000	20	116.540.000	-	-	1. Pemerintah Kab, Jember harus melakukan pembinaan dan mendorong inovasi pembangunan dan pelayanan desa. 2. Pendanaan pilkades serentak kedepan dikembalikan ke model lama dengan memberikan kepercayaan pada panitia ditingkat desa untuk mengelola sesuai regulasi.
4.01.		Bagian		Program Pelayanan	% tingkat pemenuhan	100	17.410.4	85	12.046.6	Kegiatan	Kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1		Umum		Administrasi Perkantoran	kebutuhan dasar operasional PD		02.000		96.231	Pelayanan Menyesuaikan Kebutuhan Pada Masing Masing Kegiatan Yang Ada Pada Program Tersebut Untuk Dilaksanakan	Pelayanan Perlu Dipertahankan Dan Lebih Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase pemenuhan layanan Surat menyurat	100	248.000.000	92	35.920.115		Pelayanan Persuratan Dipertahankan & Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase biaya jasa komunikasi, air dan listrik	100	2.730.000.000	100	2.365.465.257	-	Pelayanan Pembayaran Rekening Akan Tagihan Telisa Tetap Dipertahankan	
4.01.1.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase biaya jasa peralatan dan perlengkapan	100	2.372.500.000	95	671.257.758	-	Pelayanan Akan Persediaan Jasa Sarana Prasarana Kegiatan Tetap Dipertahankan & Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.5				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Prosentase biaya jasa asuransi	100	77.500.000	0	0	Menunggu Kebijakan Pasti Yang Terlalu Lama Dan Berlarut Larut Pada Akhirnya Tidak Cukup Waktu Pihak Asuransi Untuk Melakukan Proses Kontrak	Perencanaan Kedepannya Akan Dipersiapkan Lebih Awal Dengan Sebaik Baiknya Dan Lebih Matang Lagi	
4.01.				Penyediaan Jasa	Prosentase biaya jasa	100	641.000.	95	487.903.	-	Pelayanan Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.8				Kebersihan Kantor	kebersihan kantor		000		085		Kebutuhan Tenaga Kebersihan Tetap Dipertahankan Dan Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase biaya kebutuhan ATK	100	175.000.000	95	122.764.361	-	Pelayanan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Dipertahankan & Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	800.000.000	90	574.652.734	Menyesuaikan Kebutuhan	Pelayanan Kebutuhan Cetakan Lebih Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase biaya kebutuhan listrik dan penerangan kantor	100	150.000.000	94	89.403.243	-	Pelayanan Kebutuhan Akan Perlistrikan Dipertahankan & Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	130.375.000	50	38.357.000	Menyesuaikan Kebutuhan Kantor & Rumdin	Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor & Rumdin Ditingkatkan Lagi Dengan Perencanaan Yg Lebih Matang	
4.01.1.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga	100	225.000.000	50	50.075.741	Menyesuaikan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	Kebutuhan Sarana Prasarana Rumah Tangga Pimpinan Ditingkatkan Lagi Dengan Perencanaan Yg Lebih Matang	
4.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Prosentase biaya penyediaan media	100	12.000.000	95	3.600.000	-	Pelayanan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Perundang-Undangan	cetak informasi						Bacaan Dipertahankan & Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase biaya kebutuhan logistik	100	660.000.000	95	539.103.923	-	Kebutuhan Akan Bahan Pokok Dipertahankan & Ditingkatkan Lagi	
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase permintaan konsumsi yang terlayani sesuai SOP	100	6.020.000.000	94	4.539.199.234	-	Pelayanan Kebutuhan Makan Minum Dipertahankan & Perlu Ditingkatkan Lagi	Seluruh anggaran bagian Pembangunan dan bagian Umum yangbukan TUPOKSInya harus di kembalikan ke OPD masing masingagar tidak mengulang kesalahan bertubi tubi setiap tahunnya.
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	0	950.000.000	100	949.913.959	-	Pelayanan Kebutuhan Perjalanan Dinas Tetap Dipertahankan	Seluruh anggaran bagian Pembangunan dan bagian Umum yangbukan TUPOKSInya harus di kembalikan ke OPD masing masingagar tidak mengulang kesalahan bertubi tubi setiap tahunnya.
4.01.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Prosentase biaya tenaga pendukung ops kantor	100	902.480.000	100	648.004.000	-	Pelayanan Kebutuhan Pada Tenaga Pendukung Tetap Dipertahankan	
4.01.1.23				Penyediaan Gas dan Tabung PMK	Prosentase biaya kebutuhan gas dan tabung PMK	100	60.000.000	92	19.880.000	-	Penyesuaian Kebutuhan Akan Isi Gas Tabung Dipertahankan Dan Ditingkatkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Lagi	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase biaya kebutuhan penunjang administrasi dan ops rutin kedinasan	0	1.256.547.000	100	911.195.821	-	Pelayanan Akan Pengelolaan Administrasi Dan Keuangan Tetap Dipertahankan	
4.01.12		Bagian Umum	Terpenuhi nya pelayanan terhadap Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf ahli yang optimal	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan kunjungan kerja dengan PD lingkup Pemkab dan Pemerintah Pusat	100	2.480.000.000	87	1.756.710.372	Pelayanan Menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan/kepala Daerah	Kebutuhan Pelayanan Pada Pimpinan Akan Lebih Ditingkatkan Lagi	
4.01.12.1				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Prosentase biaya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja	100	1.505.000.000	95	963.919.957	-	Pelayanan Akan Kunjungan Para Tamu Pada Bupati/wakil Bupati Tetap Dipertahankan Dan Ditingkatkan Lagi	
4.01.12.3				Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase biaya kebutuhan kunjungan kerja / inspeksi KDH/WKDH	100	195.000.000	25	19.992.273	Dikarenakan Adanya Pandemi Covid 19....kunjungan Kerja Bupati/wakil Bupati Dan Pejabat Lainnya Dibatasi	Semoga Pandemi Covid 19 Segera Berakhir Dan Kegiatan Kunjungan Kerja Bupati/wakil Bupati & Pejabat Akan Berjalan Dengan Baik Lagi	
4.01.12.4				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan	Prosentase biaya kebutuhan koordinasi	100	780.000.000	95	772.798.142	-	Pelayanan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Pemerintah Daerah Lainnya	dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya						Koordinasi Pada Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Lainnya Tetap Dipertahankan Dan Ditingkatkan	
4.01.2		Bagian Umum		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	100	5.199.780.000	56	3.025.651.300	Minimnya Pemeliharaan/perawatan & Kebutuhan Barang & Jasa Pada Kegiatan Tertentu Pada Program Tersebut	Pelayanan Pemeliharaan Dan Perawatan Pada Kegiatan Tersebut Wajib Perlu Untuk Ditingkatkan Lagi	
4.01.2.6				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Prosentase biaya pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas	0	350.000.000	35	10.990.564	Menyesuaikan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Baik Bupati/wakil Bupati	Kebutuhan Sarana Prasarana Rumah Tangga Bupati/wakil Bupati Perlu Ditingkatkan Lagi Dengan Perencanaan Yg Lebih Baik Dan Sangat Matang	
4.01.2.20				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Prosentase perawatan rumah jabatan/rumah dinas	100	430.980.000	99	419.031.800	-	Pelayanan Pemeliharaan & Perawatan Akan Rumah Dinas Tetap Dipertahankan	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase perawatan rutin/berkala gedung kantor	100	466.000.000	99	451.584.000	-	Pelayanan Pemeliharaan & Perawatan Akan Gedung Kantor Tetap Dipertahankan	
4.01.				Pemeliharaan	Prosentase perawatan	100	1.460.00	92	610.643.	-	Pelayanan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23				Rutin/Berkala Mobil Jabatan	rutin/berkala mobil jabatan		0.000		318		Pemeliharaan Akan Kendaraan Dinas/mobil Jabatan Tetap Dipertahankan Dan Ditingkatkan Lagi	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase perawatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	1.967.800.000	94	1.155.028.059	-	Pelayanan Pemeliharaan Akan Kendaraan Dinas Operasional Tetap Dipertahankan Dan Ditingkatkan Lagi	
4.01.2.29				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Prosentase perawatan rutin/berkala mebeleur	100	100.000.000	90	45.880.461	-	Pelayanan Pemeliharaan Akan Mebeleur Perlu Dipertahankan Dan Ditingkatkan Lagi	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Prosentase perawatan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer	100	350.000.000	96.37	325.522.740	-	Pelayanan Pemeliharaan & Perawatan Pada Peralatan Kantor Tetap Dipertahankan	
4.01.2.31				Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala taman	100	75.000.000	40	6.970.358	Menunggu Kebijakan Pasti Yang Terlalu Lama Dan Berlarut Larut Pada Akhirnya Tidak Cukup Waktu Pihak Ke 3 Untuk Melakukan	Perencanaan Kedepannya Akan Dipersiapkan Lebih Awal Dengan Sebaik Baiknya Dan Lebih Matang Lagi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Proses Kontrak Dan Sementara Waktu Dikerjakan Oleh Tenaga Seadanya Yg Kurang Paham Akan Pemeliharaan Taman		
4.01.3		Bagian Umum		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% tingkat disiplin aparaturnya	100	390.300.000	91	112.535.558	Tidak Ada	Pelayanan Kegiatan Pada Program Tersebut Akan Dipertahankan Dan Lebih Ditingkatkan Lagi	
4.01.3.2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prosentase biaya kebutuhan pakaian dinas	100	46.800.000	15	6.075.000	Menyesuaikan Kebutuhan Pakaian Dinas Bupati/wakil Bupati	Kebutuhan Pakaian Dinas Bupati/wakil Bupati Akan Ditingkatkan Lagi Dengan Perencanaan Yang Baik Dan Matang	
4.01.3.3				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Prosentase biaya kebutuhan pakaian dinas lapangan	100	143.500.000	15	17.260.786	Menyesuaikan Kebutuhan Pakaian Lapangan/khusus Bupati/wakil Bupati Serta Adanya Pandemi Covid 19 Sehingga Untuk Pakaian Olahraga Dll Tidak Terlaksanakan	Kebutuhan Pakaian Lapangan/khusus Bupati/wakil Bupati Akan Ditingkatkan Lagi Serta Pandemi Covid 19 Segera Berakhir	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Prosentase biaya penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	100	200.000.000	45	89.199.772	Dikarenakan Pandemi Covid 19 Sehingga Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional & Keagamaan Berkurang/terbatas	Semoga Pandemi Covid 19 Segera Berakhir Sehingga Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional/keagamaan Terlaksana Dengan Hikmat Dan Lancar	
4.01.1		Bagian Humas Dan Protokol		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	2.449.639.000	87	1.514.944.875	Tidak Disahkannya APBD Dan Adanya Pandemi Covid 19 Yang Berakibat Pada Tidak Dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Dan Cetak Kalender 2021. Selain Itu Berkurangnya Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Mengiringi Kegiatan Bupati Dan Wakil Bupati.	Memfaatkan Peralatan Kantor Yang Dimiliki	
4.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli	1092	8.010.000	660	2.950.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Maksimal Karena Pembelian Materai Sebagai Digunakan Untuk	Pelaksanaan Kegiatan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Materai Sebagai Pelengkap	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kelengkapan Administrasi Kegiatan Yang Jumlahnya Berkurang	Administrasi	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemakaian telepon dan internet	12	66.210.000	12	47.984.454	-	-	
4.01.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang dapat dilakukan	40	38.850.000	35	17.185.000	Besarnya Serapan Anggaran Berdasarkan Pada Jenis Alat Yang Rusak, Selain Itu Jumlah Perbaikan Berkurang Seiring Dengan Berkurangnya Jumlah Pemakaian Peralatan Karena Berkurangnya Kegiatan.	Menggunakan Peralatan Kantor Dengan Benar Supaya Tidak Cepat Rusak.	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam ATK yang dibeli	40	60.000.000	40	33.258.000	Jumlah Pembelian Atk Berkurang Namun Target Jumlah Macamnya Tercapai (40 Macam Atk)	Pembelian Jumlah Atk Per Macam Barang Dikurangi Disesuaikan Kebutuhan Atk Yg Menyusut	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan & penggandaan yg dibeli	15	218.000.000	14	8.803.000	Penyerapan Anggaran Tidak Maksimal Karena Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi (apbd). Cetak	Mencetak Barang Sesuai Kebutuhan Kegiatan Yg Berkurang.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										8.000 Buah Kalender (91% Dari Total Anggaran Kegiatan) Tidak Dapat Dilaksanakan.		
4.01.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg dibeli	12	28.250.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi (apbd)	Memfaatkan Lebih Maksimal Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Sudah Dimiliki	
4.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah nama media cetak yang dibeli	20	60.000.000	20	59.953.000	-	-	
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yg diadakan	24	241.419.000	20	171.586.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Maksimal Karena Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administrasi (apbd). Penyerapan Anggaran Rendah Karena Ada Mamin Sambung Rasa Jurnalistik Yang Tidak Dilaksanakan.	Tidak Merealisasikan Anggaran Mamin Untuk Kegiatan Sambung Rasa Jurnalistik Karena Tidak Adanya Apbd.	
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rakor luar daerah yang diikuti	70	1.133.150.000	63	649.047.321	Sppd Luar Daerah Mengikuti Jadwal Kegiatan Bupati	Melaksanakan Pelayanan Keprotokolan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dan Wabup. Terserapnya Anggaran Berdasarkan Kota Yang Dituju Dan Berapa Lama Pelaksanaan Kegiatan.	Kegiatan Bupati Dan Wabup Dengan Biaya Seefektif Mungkin.	
4.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	60	30.000.000	53	22.680.000	Sppd Dalam Daerah Mengikuti Jadwal Kegiatan Bupati Dan Wabup. Terserapnya Anggaran Berdasarkan Berapa Kali Kegiatan Dilaksanakan Dan Jumlah Orang Yang Ikut	Melaksanakan Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Bupati Dan Wabup Dengan Biaya Seefektif Mungkin.	
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah macam peralatan & bhn kebersihan yg dibeli	10	21.000.000	10	18.996.100	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pegawai Hms & Prtkl yg mdp honor & lembur	25	544.750.000	22	482.502.000	Jumlah Asn Dan Non Asn Bagian Humas Dan Protokol Adalah 22 Orang Di Bawah Targetnya Sebesar 25 Orang.	Melaksanakan Kegiatan Seefektif Mungkin Meskipun Jumlah Pegawai Di Bawah Target.	
4.01.12		Bagian Humas Dan Protokol	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	% Terlaksananya Kunjungan Kerja Pejabat Negara	100	519.000.000	100	406.500.000	Tidak Disahkannya APBD Kabupaten Jember Dan Adanya Pandemi	Melaksanakan Pelayanan Keprotokolan Sebaik Mungkin Untuk Kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			keprotokola n							Covid 19 Yang Menyebabkan Menyusutnya Kegiatan Yang Dilaksanakan Bupati Dan Wakil Bupati.	Bupati Dan Wakil Bupati Dengan Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan.	
4.01. 12.3				Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan	800	519.000. 000	583	406.500. 000	Kegiatan Pelayanan Protokol Mengikuti Jadwal Kegiatan Bupati Dan Wakil Bupati.	Melaksananakan Pelayanan Protokol Bupati Dan Wakil Bupati Semaksimal Mungkin.	
4.01. 2		Bagian Humas Dan Protokol		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	100	228.700. 000	100	216.414. 093	Tidak Ada Masalah	---	
4.01. 2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 kepala bagian yang dirawat	1	55.500.0 00	1	49.264.6 14	Target Pemeliharaan 1 Mobil Tercapai. Namun Serapan Anggaran Bbm, Servis Dan Suku Cadang Berkurang Karena Jumlah Kegiatan Kantor Berkurang.	Pemakaian Dan Perawatan Mobil Seefektif Mungkin.	
4.01. 2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 & 2 yang dirawat	8	173.200. 000	8	167.149. 479	Target Pemeliharaan 4 Mobil Dan 4 Sepeda Motor Tercapai. Namun Serapan Anggaran Bbm, Servis Dan Suku Cadang	Pemakaian Dan Perawatan Mobil Seefektif Mungkin.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Berkurang Karena Jumlah Kegiatan Kantor Berkurang.		
4.01.3		Bagian Humas Dan Protokol		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% tingkat disiplin aparat	100	318.200.000	83	275.248.000	Tidak Disahkannya Apbd Kabupaten Jember Dan Adanya Pandemi Covid 19 Yang Menyebabkan Menyusutnya Kegiatan Yang Dilaksanakan Bupati Dan Wakil Bupati.	Melaksanakan Kegiatan Dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah terlaksananya peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	12	318.200.000	10	275.248.000	Jumlah Peringatan Dan Upacara Berkurang Karena Adanya Pandemi Covid 19.	Memperhatikan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Peringatan Dan Upacara.	
4.01.1		Bagian Pembangunan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	986.583.394	67.67	427.834.511	- Capaian Anggaran Tidak Bisa Terserap Optimal, Pada Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dikarenakan Tidak Adanya Personil Pokja Ukpbj Tidak Melaksanakan Sppd Luar Daerah Secara Rutin Dan rapat Rapat	Akan Di Agendakan Untuk Sppd Luar Daerah Maupun Dalam Daerah Untuk Melakukan Konsultasi Dan Kordinasi.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah dikarenakan Tidak Cukup Waktu Untuk Melaksanakan Spdd Dalam Daerah Di Akhir Tahun.		
4.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat/ Dokumen	12	1.925.000	9	515	Tidak Dilaksanakan Karena Masih Ada Sisa Belanja	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening	12	48.300.000	12	33.631.099	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Paket Perbaikan Peralatan Kerja	4	48.000.000	4	46.929.000	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	4	150.000.000	4	86.234.390	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	4	120.000.000	4	54.545.600	Tidak Terlaksana Karena Tidak Ada Cetak dan Penggandaan	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	10	0	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Adanya Refokusing Anggaran Untuk Penanganan Pandemi Covid19	Kegiatan Akan Di Maksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pengadaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	12	10.830.000	12	1.250.000	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman karyawan	12	44.993.000	12	6.092.970	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	123.580.144	6	51.035.632	Sudah Terlaksana Akan Tetapi Tidak Maksimal Dikarenakan Pandemi Covid	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan Rapat koordinasinya konsultasi ke dalam daerah	12	38.247.250	6	5.515.000	Sudah Terlaksana Akan Tetapi Tidak Maksimal Dikarenakan Pandemi Covid	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Pengadaan Peralatan & Bahan Kebersihan Kantor	4	20.000.000	1	13.019.820	Sudah Terlaksana Akan Tetapi Tidak Tercapai Dikarenakan Kurangnya Permintaan Dari Sekretariat Daerah	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Pembayaran Honorarium	12	380.708.000	12	129.066.000	Sudah Terlaksan	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.17		Bagian Pembangunan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan Buku Petunjuk Teknis Penunjang Penyusunan APBD	100	3.175.092.000	83.9	760.382.970	program Ini Terdapat Kekurangan 1 (satu) Orang Pptk Sehingga Honor Tidak Dapat Dicairkan Selain Itu Juga Ada Honorarium Non Pns Dan Narasumber Pns Juga Non Pns	Adanya Sdm Sesuai Perencanaan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih							Tidak Ada Personil Yang Ditunjuk Sebagai Yang Di Maksud		
4.01.17.1				Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Buku ASB yang disusun	1	242.887.500	1	92.891.300	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.17.2				Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku SSH yang disusun	2	283.125.000	2	204.483.520	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.17.3				Peningkatan Manajemen Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)	Pembayaran Honorarium ULP	12	1.804.772.000	6	194.675.000	Sudah Terlaksana Akan Tetapi Tidak Ada Pekerjaan Lelang	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.17.4				Penyusunan Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Pedum APBD yang disusun	1	153.087.500	1	93.616.050	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.17.5				Sosialisasi Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan APBD	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Buku Pedum APBD	1	26.400.000	1	0	Tidak Dilaksanakannya Kegiatan Karena Belum Ada Kesiapan Sosialisasi	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.17.6				Pengendalian Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah OPD	72	99.140.000	72	2.417.100	Tidak Dilaksanakan Karena Belum Ada Laporan	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.17.7				Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem	Laporan Realisasi Fisik Keuangan	12	565.680.000	6	172.800.000	Kegiatan Ini Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Karena	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Monitoring TEPPA)						Terkendala Teknis Administrasi		
4.01.2		Bagian Pembangunan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	100	46.040.000	62.16	17.019.914	Capaian Serapan Rendah Pada Program Kegiatan Ini Adalah Pada Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan, pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Dan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Yang Kurang Optimal Dikarenakan Waktu Pelaksanaan Di Akhir- Akhir Tahun 2019.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Dan 4 Akan Dilakukan Secara Rutin Secara Optimal	
4.01.2.5				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan kendaraan Dinas Operasional	0	0	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Adanya Refokusing Anggaran Untuk Penanganan Pandemi Covid19	Kegiatan Akan Di Maksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan	1	7.000.000	1	5.093.750	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.				Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan	8	39.040.0	8	11.926.1	Sudah	Dilaksanakan Di	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.24				Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	yang terpelihara		00		64	Terlaksanal	Tahun Berikutnya	
4.01.2.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Videotron dan CCTV yang dipelihara	2	0	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Adanya Refokusing Anggaran Untuk Penanganan Pandemi Covid19	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.01.3		Bagian Pembangunan		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% tingkat disiplin aparatur	0	261.420.000	45.15	0	penyerapan Anggaran untuk Pengadaan Gagal Tender Dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Mencukupi	Anggaran Pengadaan Akan Di Lakukan Di Tahun Mendatang	
4.01.3.3				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pakaian Olah raga	0	0	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Adanya Refokusing Anggaran Untuk Penanganan Pandemi Covid19	Kegiatan Akan Di Maksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase Paket Pengadaan	0	261.420.000	0	0	Tidak Dilaksanakan Karena Adanya Pandemi Covid	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.5		Bagian Pembangunan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	80.362.500	72.22	4.500.000	Tidak Berjalanannya Belanja Penggandaan, Belanja Dokumentasi, Serta Banyak	Perencanaan Belanja Akan Ditingkatkan Sesuai Dengan Program Itu	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Efisiensi Di Sewa Hotel Dan Kurang Maksimalnya Pemberian Honorarium Pada Narasumber		
4.01.5.3				Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	2	80.362.500	0	4.500.000	Tidak Dilaksanakan Nya Kegiatan Bimtek Dikarenakan Pandemi Covid	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.7		Bagian Pembangunan		Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM Bidang PD	0	569.100.000	97.76	517.917.206	Tidak Terdapat Kendala Apapun Dalam Program Kegiatan Ini. Pelaksanaan Kinerja Dan Anggaran Sudah Optimal. Sisanya Adalah Efisiensi.	-	
4.01.7.7				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pembayaran Honorarium	12	569.100.000	12	517.917.206	Sudah Terlaksana	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	
4.01.1		Bagian Hukum		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	381.914.500	87.85	312.066.059	karena, Ada Satu Yang Belum Terealisasi: 1. Atk 2. Belanja Tenaga Kebersihan (penunjang)	Memperbaiki Perencanaan Untuk Kedepannya	
4.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku Peraturan Perundang-undangan	10	0	0	0	Pergeseran Untuk Dana Covid	Dianggarkan Kembali Pada Apbd 2021	
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Pegawai	12	38.400.000	12	4.075.000			
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12	130.000.000	12	125.631.325			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Daerah								
4.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	16.200.000	6	4.880.000	Pergeseran Program & Kegiatan Terkait Covid - 19 Mengurangi Intensitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dianggarkan Kembali Di Tahun 2021	
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Alat-Alat Kebersihan	12	3.000.000	9	1.507.740	Belum Terserap Dikarenakan Keterbatasan Waktu Setelah Adanya Mutasi Pejabat	Dianggarkan Kembali Di Tahun 2021	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	12	194.314.500	12	175.971.994			
4.01.14		Bagian Hukum	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	Program Bantuan Hukum	Persentase Masyarakat miskin yang memperoleh pendampingan hukum	100	762.012.500	94.3	416.000.000	1. Pembinaan Kadarkum Digeser Menjadi Persiapan Lomba Kadarkum 2. Tidak Semua Anggaran Dalam Pembinaan Kadarkum Direalisasikan	Memperbaiki Perencanaan Untuk Tahun Kedepannya	
4.01.14.1				Penyelesaian Permasalahan Hukum	Jumlah permasalahan hukum terkait hubungan kedinasan yang dapat diselesaikan	100	491.600.000	85.68	416.000.000	Jumlah Permasalahan Hukum Yang Ditangani	Dianggarkan Kembali Di Tahun Anggaran 2021	
4.01.14.2				Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Jumlah Pembinaan Kadarkum	6	0	0	0	Pergeseran Untuk Covid19	Sekarang Digeser Dan Dianggarkan Lagi Pada Tahun 2021	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.14.3				Penyuluhan Hukum	Penyuluhan Hukum	100	0	0	0	Pergeseran Untuk Covid19	Sekarang Digeser Dan Dianggarkan Lagi Pada Tahun 2021	
4.01.14.4				Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin	Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin	50	270.412.500	0	0	Tidak Direalisasikan	Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021	
4.01.15		Bagian Hukum	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penerbitan produk hukum yang terfasilitasi dan terpublikasi	100	777.300.000	80.6	519.250.000	Naskah Akademis Dari 5 Yang Direncanakan Dan Yang Terealisasi 1 Na	Perencanaan Terkait Legislasi Agak Lebih Terencana Dan Lebih Baik	
4.01.15.3				Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Propemperda	1	357.200.000	1	174.700.000			
4.01.15.4				Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Produk Hukum	5	0	0	0	Pergeseran Covid 19	Dilakukan Pergeseran Dan Dianggarkan Di Tahun Berikutnya	1. Pemerintah kabupaten lebih serius dalam melakukan pembinaan olah raga sekaligus memberikan perhatian prestasi olah raga. 2. Pengelolaan aset Olah Raga yaitu stadion Jember Sport Garden. (JSG). harus sesuai permen PU Nomor 24 Tahun 2008 yang dilakukan terhadap komponen Arsitektur, Struktur dan Mekanikal Elektrikal. Agar pengelolaan tersebut



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												berjalan maksimal. 3. Pemerintah daerah harus membentuk payung hukum berupa peraturan daerah terkait pembentukan UPT JSG dalam penanganan pemeliharaannya. 4. Dalam melaksanakan Program pendataan, penataan PKL harus ada arahan teknis penanganan PKL serta terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
4.01.15.5				Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengadaan Buku Lembaran Daerah/Berita Daerah	275	118.900.000	0	79.700.000	Tidak Ada Realisasi	-	
4.01.15.8				Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati	Jumlah Keputusan Bupati	500	133.200.000	500	118.200.000			
4.01.15.11				Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	Jumlah Perbub	70	71.600.000	55	60.250.000			
4.01.15.12				Penyusunan dan Pengumpulan Data Pelaporan Rencana Aksi HAM	Terkumpulnya Data Pelaporan Rencana Aksi HAM	4	96.400.000	4	86.400.000			
4.01.1		Bagian Organisasi		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	427.307.000	100	212.224.000	Tidak Terdapat Permasalahan Dalam Pelaksanaan Dan Pencapaian Target Program. Kebijakan Pemusatan Anggaran Belanja	Dengan Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Daring .	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Atk, Perjalanan Dinas Dan Makanan Minuman Pada Program Kesekretariatan, Dan Penyerapan Anggaran Belanja Program Ini Terkendala Tidak Dapat Dilaksanakannya Penyerapan Anggaran Makanan Dan Minuman Serta Perjalanan Dinas Karena Pembatasan Kegiatan Tatap Muka Secara Langsung Untuk Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19		
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	% pegawai bag. Organisasi yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan barang	100	427.307.000	35	212.224.000	Sesuai Kebijakan Pemusatan Belanja Mamin Kegiatan Dan Belanja Perjalanan Dinas Dilakukan Pada Kegiatan Ini.	Dilakukan Lebih Banyak Koordinasi Secara Daring	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Namun Sehubungan Pembatasan Kegiatan Tatap Muka Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid , Menyebabkan Pembatasan Realisasi Belanja Makan Minum Dan Perjalanan Dinas		
4.01.10		Bagian Organisasi		Program Peningkatan Pengembangan dan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Budaya Kerja	% OPD yang mengirim dan menyusun LKIP sesuai pedoman	100	308.750.000	90	229.850.000	Tidak Terdapat Permasalahan Dalam Pelaksanaan Dan Pencapaian Target Program, namun Kendala Penyerapan Anggaran Adalah Tidak Dapat Dilaksanakannya Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring Atau Pembinaan , Perjalanan Dinas Dengan Tatap Muka Secara Langsung, Karena Penerapan Protokol Kesehatan Dalam	Mengoptimalkan Kegiatan Pendampingan Kepada Pd Terkait Penerapan Sakip Dan Rb Dengan Cara Daring Dan Lebih Banyak Melaksanakan Monitoring Dokumen Pelaksanaan Di Pd	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19		
4.01.10.1				Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan RKT yang tersusun	3	98.300.000	3	93.600.000	Tidak Terdapat Permasalahan Dan Sesuai Perencanaan	-	
4.01.10.2				Pengembangan dan Pengendalian Implementasi SAKIP	Jumlah PD yang dibina Implementasi SAKIPnya	10	155.850.000	10	92.000.000	Target Sesuai Renstra Adalah 10 Pd Dengan Asumsi Mekanisme Evaluasi Sampling. Namun Dalam Perkembangannya Terdapat Perubahan Mekanisme Evaluasi Kepada Seluruh Pd Maka Perlu Dilakukan Perubahan Jumlah Pd Yang Difasilitasi Dalam Rangka Persiapan Evaluasi Sakip	Dilaksanakan Melebihi Target Jumlah . Difasilitasi Keseluruhan Pd Yaitu 65 Pd Sesuai Kebutuhan Evaluasi Dan Percepatan Implementasi Sakip Yang Berkualitas. Pendampingan Dilakukan Dengan Cara Melakukan Monitoring Dan Verifikasi Dokumen Sakip Seluruh Pd	
4.01.10.6				Pengembangan dan Pengendalian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Roadmap RB dan laporan evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	1	54.600.000	1	44.250.000	Tidak Terdapat Permasalahan. Penyusunan Laporan Penerapan Rb Dapat Terlaksana Sesuai Target.	-	
4.01.11		Bagian Organisasi		Program Penataan Kelembagaan	% kesesuaian fungsi dan ukuran PD	100	273.635.000	100	195.450.000	Tidak Terdapat Permasalahan	Mengoptimalkan Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan						Dalam Pelaksanaan Dan Pencapaian Target Program . Kegiatan Penataan Kelembagaan, Monitoring Kematangan Organisasi Dan Analisis Jabatan Terlaksana Sesuai Rencana. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Di Tahun 2020 Selesai Dilaksanakan Untuk Jpt Dan Akan Dituntaskan Di Tahun 2021 Untuk Seluruh Level Jabatan , Seiring Dengan Ditetapkannya Perubahan Struktur Organisasi Yang Baru. namun Kendala Penyerapan Anggaran Adalah Tidak Dapat Dilaksanakannya Kegiatan Koordinasi,	Kegiatan Dengan Koordinasi Dan Pembinaan Secara Daring. Dan Untuk Kegiatan Mendesak Yang Memerlukan Tatap Muka, Dilakukan Bertahap Dengan Pembatasan Jumlah Peserta Dan Penerapan Protokol Kesehatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Sosialisasi, Monitoring Atau Pembinaan , Perjalanan Dinas Dengan Tatap Muka Secara Langsung, Karena Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19		
4.01.11.1				Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah PD yang telah ditata kelembagaannya sesuai peraturan yang berlaku	65	35.000.000	65	27.000.000	Target Awal Adalah Penataan Sampai Dengan Level Pd	Terealisasi Sampai Dengan Kelurahan Sebagai Perangkat Pd Kecamatan Sehingga Secara Keseluruhan Penataan Kepada 23 Unit Kerja Dan 65 Pd	
4.01.11.2				Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah PD yang di monev organisasi, tata kerja, tugas dan fungsinya	65	17.500.000	65	17.000.000	Tidak Terdapat Permasalahan, Terlaksana Sesuai Target	-	
4.01.11.4				Penyusunan Analisis Jabatan , Analisis Beban Kerja , Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial	Jumlah PD yang telah menyusun Anjab, ABK dan Evjab sesuai Pedoman	65	221.135.000	65	151.450.000	Penyusunan Anjab, Abk Dan Evaluasi Jabatan Telah Terlaksana Sesuai Target. Namun Masih Perlu Dilengkapi Dengan Standar	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Untuk Level Jabatan Administrator, Pengawas Dan Pelaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kompetensi Jabatan. Dimana Pada Tahun 2020 Baru Terselenggarakan Di Level Jabatan Pimpinan Tinggi	Berproses Pada Tahun 2021	
4.01.2		Bagian Organisasi		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	100	24.480.000	100	24.255.000	Tidak Terdapat Permasalahan Dalam Pelaksanaan Dan Pencapaian Target Program Dan Anggaran		
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Terpelihara	69	24.480.000	69	24.255.000	Tidak Terdapat Permasalahan, Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Terlaksana Sesuai Target	-	
4.01.7		Bagian Organisasi		Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	% PD yang memiliki inovasi pelayanan publik	20	84.500.000	3	35.000.000	Terdapat Permasalahan Dalam Pelaksanaan Dan Pencapaian Target, Dan Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pelayanan Publik. - Minimnya Inovasi Pelayanan Publik Di	Melaksanakan Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi Opd Yang Menghasilkan Inovasi Untuk Ikutserta Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Baik Tingkat Provinsi Maupun Nasional kegiatan Pembinaan, Koordinasi , Monitoring Dan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Lingkungan Pemkab Jember Yang Disebabkan Masih Kurangnya Pemahaman Dan Komitmen Aparatur Terhadap Urgensi Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pemenuhan Tuntutan Kualitas Pelayanan. - Kendala Penyerapan Anggaran Adalah Tidak Dapat Dilaksanakannya Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring , Pembinaan Dan Perjalanan Dinas Dengan Tatap Muka Secara Langsung, Karena Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19.	Pendampingan Pd Dioptimalkan Dengan Cara Daring Dan Dengan Memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Pd	
4.01. 7.1				Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam rangka gelar inovasi	15	59.000.000	1	18.000.000	Minimnya Inovasi Pelayanan Publik Pd Yang	Kedepan Akan Dilakukan Penyusunan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					pelayanan publik					Dilaporkan Ke Bagian Organisasi Karena Pd Kurang Memahami Definisi Inovasi Serta Kondisi Pandemi Covid-19 Sehingga Pd Dalam Proses Beradaptasi Dengan Kondisi Kerja Baru Di Masa Pandemi Virus Covid-19. Pada Tahun 2020 Hanya 1 Perangkat Daerah Yang Melaporkan Inovasinya Yaitu Pkm Umbulsari Dibawah Pd Dinas Kesehatan	Kebijakan, Peningkatan Sosialisasi Dan Dirumuskan Sistem Penjaringan Inovasi Di Lingkungan Pemkab Jember	
4.01.7.10				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelayanan Administrasi Lainnya	% PNS yang terlayani pembuatan kartu Tanda pengenalan	20	25.500.000	20	17.000.000	Belanja Bahan Pencetakan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dialihkan Dalam Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid - 19.	Anggaran Kegiatan Yang Ada Digunakan Untuk Melaksanakan Pendampingan Pendokumentasian Standar Pelayanan Pd	
4.01.9		Bagian Organisasi		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan	% SKPD yang memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan dan SOP	100	134.000.000	80	75.000.000	Terdapat Permasalahan Dalam Pelaksanaan Dan	Telah Dilaksanakan Penyusunan Regulasi Terkait	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Pelayanan Publik						Pencapaian Target Program. - Masih Kurangnya Pemahaman Dan Komitmen Aparatur Terhadap Kewajiban Pendokumentasian Sop Dan Standar Pelayanan Serta Urgensinya Dalam Pemenuhan Tuntutan Kualitas Pelayanan. Namun Demikian Jumlah Sandar Pelayanan Yang Dilaporkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (sipp) Meningkatkan Cukup Sigifikan, Dan Telah Berproses Menyusun Dokumen Peta Proses Bisnis Kabupaten Yang Akan Menjadi Dasar Evaluasi Sop Pd. - Kendala Penyerapan Anggaran Adalah	Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Yang Proses Pengundangan Dan Sosialisasi Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2021 kegiatan Pembinaan, Koordinasi , Monitoring Dan Pendampingan Pd Dioptimalkan Dengan Cara Daring Dan Dengan Memverifikasi Dokumen Dokumen Pelaksanaan Pd	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Tidak Dapat Dilaksanakannya Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring, Pembinaan Dan Penyaluran Dinas Dengan Tatap Muka Secara Langsung, Karena Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19.		
4.01.9.1				Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah PD yang telah dibina penyusunan dan penerapan SOP nya	40	134.000.000	40	75.000.000	Kondisi Pandemi Covid Tidak Memungkinkan Dilakukan Pendampingan Dan Monev Secara Tatap Muka	Pembinaan Penyusunan Sop Dilakukan Kepada Seluruh Perangkat Daerah Yaitu Melalui Verifikasi Dokumen Peta Proses Bisnis. Pd. Sehingga Belum Seluruh Pd Dapat Menyelesaikan Penyusunan Peta Proses Bisnis Hingga Menghasilkan Dokumen Sop Sesuai Pedoman. Perlu Perumusan Kembali Peta	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Proses Bisnis Kabupaten Yang Dijabarkan Lebih Lanjut Dalam Dokumen Peta Proses Bisnis	
4.01.1		Bagian Perekonomian		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	495.590.000	45	219.091.750	Rapat Koordinasi, Pertemuan Dan Perjalanan Dinas Yang Masih Belum Optimal Terkait Dengan Adanya Pandemi	Koordinasi Dilakukan Dengan Cara Daring	
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai dan peserta rapat	100	32.520.000	14	4.822.500	Kegiatan Banyak Yang Diselenggarakan Secara Daring	Kegiatan Luring Hanya Dilaksanakan Jika Memungkinkan	
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	100	1.000.000	100	1.000.000	Tidak Ada Masalah	Sudah Dilaksanakan	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase tertibnya kegiatan administrasi keuangan dan barang	100	462.070.000	46	213.269.250	Kegiatan Perjalanan Dinas Tidak Dapat Dilaksanakan Sehubungan Dengan Adanya Pandemi	Kegiatan Dilaksanakan Setelah Pandemi	
4.01.16		Bagian Perekonomian		Program Penyusunan Kebijakan. Koordinasi. Pemantauan. Evaluasi. dan Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian	% Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi serta Pembinaan Administrasi Bagian	100	1.125.425.000	10	54.974.500	Rapat Koordinasi, Pertemuan Dan Perjalanan Dinas Yang Masih Belum Optimal Terkait Dengan Adanya Pandemi	Koordinasi Dilakukan Dengan Cara Daring	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					Perekonomian							
4.01.16.1				Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Prosentase Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jember	100	76.750.000	1	500	Perjalanan Dinas Dan Rapat Tidak Dapat Dilaksanakan Sehubungan Dengan Adanya Pandemi	Kegiatan Dilaksanakan Secara Daring	
4.01.16.2				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pameran yang diikuti	15	783.200.000	1	4.300.000	Kegiatan Tidak Dapat Terlaksana Karena Terkendala Persyaratan Administrasi Dan Adanya Pandemi	Kegiatan Akan Dilaksanakan Setelah Persyaratan Administrasi Terpenuhi	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lembaga biro perjalanan, pengelola destinasi serta desa wisata, pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah.
4.01.16.3				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Iklim Usaha kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase penagihan kepada kredit mikro dan kecil	1	7.600.000	1	2.902.000	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Telah Dilaksanakan	
4.01.16.6				Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Prosentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap PAD per tahun	100	102.525.000	1	38.862.500	Perjalanan Dinas Dan Rapat Tidak Dapat Dilaksanakan Sehubungan Dengan Adanya Pandemi	Kegiatan Dilaksanakan Secara Daring	
4.01.16.7				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	% terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	155.350.000	35	8.410.000	Perjalanan Dinas Dan Rapat Tidak Dapat Dilaksanakan	Kegiatan Dilaksanakan Secara Daring	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					pendistribusian pupuk bersubsidi					Sehubungan Dengan Adanya Pandemi		
4.01.2		Bagian Perekonomian		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standart	100	6.000.000	100	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan Kantor Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan	Pemeliharaan Peralatan Kantor Terserap Sesuai Target	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	terpeliharanya komputer dan printer	10	6.000.000	10	6.000.000	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Telah Dilaksanakan	
4.01.31		Bagian Perekonomian		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	% terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	100	120.465.000	50	55.552.500	Rapat Kooordinasi, Pertemuan Dan Perjalanan Dinas Yang Masih Belum Optimal Terkait Adanya Pandemi	Koordinasi Dilakukan Dengan Cara Daring	
4.01.31.1				Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	% terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	100	120.465.000	100	55.552.500	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Telah Dilaksanakan	
4.01.6		Bagian Perekonomian		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% tertib laporan akuntabilitas kinerja dan Keuangan PD	100	1.340.000	100	960	Tidak Ada Permasalahan	Program Terlaksana Sesuai Dengan Target	
4.01.6.1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD	6	1.340.000	6	960	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Telah Dilaksanakan	
4.01.8		Bagian Perekonomian		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur	% tertib laporan dokumen perencanaan	100	1.180.000	100	1.180.000	Tidak Ada Permasalahan	Program Terlaksana Sesuai Target	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Pemerintah								
4.01.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah Laporan Renja SKPD	6	1.180.000	6	1.180.000	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Telah Dilaksanakan	
4.01.1		Bagian Tata Pemerintahan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	693.594.000	100	465.725.611	-	-	
4.01.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Pelaksanaan Perbaikan Peralatan Kerja	100	18.000.000	100	13.200.000	-	-	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	19.000.000	50	650	Kegiatan Cetak Tidak Direalisasikan Karena Kegiatan Yang Dapat Dilaksanakan Adalah Yang Bersifat Rutin Dan Mengikat	Pengalihan Anggaran Untuk Kegiatan Lainnya	
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Mamir untuk karyawan/wati Bagian Tata Pemerintahan	12	150.152.500	12	38.235.000	-	-	
4.01.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	12	274.500.000	12	247.588.611	Pembatasan Kegiatan Luar Daerah Karena Kondisi Pandemi Covid 19	Penganggaran Tahun Berikutnya Dilaksanakan Dengan Memperhatikan Kebutuhan Alokasi Anggaran	
4.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12	15.000.000	12	6.175.000	Pembatasan Kegiatan Perjalanan Dinas Karena Pandemi	Kegiatan Terlaksana Dengan Penggunaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Covid 19	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada Triwulan I Monitoring Dan Evaluasi Kelurahan	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Tersedianya pengelola keuangan dan barang jasa	12	216.941.500	12	159.877.000	-	-	
4.01.12		Bagian Tata Pemerintahan	Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	% Tercukupinya kebutuhan pelayanan kedinasan KDH/KWH	100	263.300.000	50	0	Satu Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Ada Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan (sk Tidak Terbit)	Peningkatan Koordinasi Dengan Bagian Hukum	
4.01.12.1				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Persentase Penerimaan Kunjuran dari Kabupaten Lain yang Terasilitasi	100	77.500.000	100	0	Kegiatan Penerimaan Tetap Dilaksanakan Namun Anggaran Tidak Dapat Direalisasikan Krm Tidak Ada Dasar Hukum Untuk Pelaksanaan Pencairan Kegiatan (sk Belum Turun)	Koordinasi Secara Berkesinambungan	
4.01.12.3				Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kecamatan yang Terinspeksi Mendadak	31	185.800.000	0	0	Tidak Ada Dasar Hukum Untuk Pelaksanaan Kegiatan (sk Belum Turun)	Koordinasi Secara Berkesinambungan Dengan Bagian Hukum	
4.01.12.5				Pelantikan Pj. Bupati	Persentase Pelaksanaan Pelantikan Pj. Bupati	0	0	0	0	Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Prioritas	Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					Jember					Penanganan Covid 19		
4.01.13		Bagian Tata Pemerintahan	Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tersusunnya Permendagri tentang batas wilayah Kab. Jember	100	354.700.000	100	194.110.000	-	-	
4.01.13.1				Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru	Prosentase kesesuaian perda tentang urusan pemerintahan dengan UU yang berlaku	20	135.200.000	0	0	Kegiatan Yang Dapat Dilaksanakan Hanya Yang Bersifat Rutin Dan Mengikat	Peningkatan Koordinasi Dengan Bpka Kab. Jember	
4.01.13.2				Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Persentase Tersusunnya Permendagri tentang batas wilayah Kab. Jember	100	219.500.000	100	194.110.000	-	-	
4.01.18		Bagian Tata Pemerintahan		Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase peran kabupaten jember dalam kegiatan rutin Asosiasi KDH	100	563.986.000	100	282.500.000	Kegiatan Raker Apkasi Korwil Jatim Tahun 2019 Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tingginya Tingkat Kesibukan Di Akhir Tahun Anggaran	Kegiatan Raker Apkasi Korwil Jatim Dilaksanakan Pada Triwulan li	
4.01.18.4				Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan rutin asosiasi KDH yang diikuti	2	563.986.000	0	282.500.000	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Memiliki 2 Indikator Yaitu Indikator Kegiatan Rutin Asosiasi Kdh Yang Diikuti	Penggunaan Indikator % Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dan Indikator % Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Yang Terealisasi, Namun Demikian Wabah Covid - 19 Menyebabkan Kegiatan Rutin Asosiasi Kdh Tidak Terlaksana Sehingga Capaian 0 Kegiatan, Sedangkan Realisasi Anggaran Merupakan Realisasi Dari Indikator % Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Yang Terealisasi Dengan Capaian Kinerja 100%	Kerjasama Yang Terealisasi Pada Sippd Tahun Berikutnya	
4.01.25		Bagian Tata Pemerintahan		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan pembinaan kecamatan dan kelurahan	100	84.400.000	100	65.100.000	-	-	
4.01.25.1				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Kelurahan yang termonitoring	22	84.400.000	22	65.100.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					dan terevaluasi							
4.01.3		Bagian Tata Pemerintahan		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% tingkat disiplin aparatur	100	174.020.000	100	107.700.000	-	-	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan HUT RI di Kab. Jember	1	174.020.000	1	107.700.000	-	-	
4.01.1		Bagian Bina Mental		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD Bag. Bina Mental	100	681.323.500	100	425.747.356	Nihil	Nihil	
4.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman Surat dan Undangan selama satu Tahun	12	8.550.000	12	5.635.000	-	-	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon dan Internet selama Satu Tahun	12	30.600.000	12	25.473.346	-	-	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya jasa pengiriman Surat dan Undangan selama satu Tahun	12	67.203.500	12	53.091.800	-	-	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	12	8.800.000	12	2.546.000	-	-	
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	12	117.500.000	12	19.990.500	-	-	
4.01.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	12	139.750.000	12	59.675.000	-	-	
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	12	37.800.000	12	23.692.400	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Tersedianya pengelola keuangan dan barang	12	271.120.000	12	235.643.310	-	-	
4.01.18		Bagian Bina Mental	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa (JEMBER IMTAK),	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah event yang diikuti/dilaksanakan	3	0	0	0	karena Pandemi Covid-19 Pemprov Meniadakan Penyelenggaraan Mtq Korpri Tk. Prov Jatim	Merubah Anggaran Kegiatan Ini, Untuk Selanjutnya Refocusing Penanganan Covid-19	
4.01.18.1				Fasilitasi Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Jawa Timur	Partisipasi Kabupaten Jember pada MTQ Tingkat Propinsi	1	0	0	0	Karena Pandemi Covid-19 Pemprov Meniadakan Penyelenggaraan Mtq Korpri Tk. Prov Jatim	Merubah Anggaran Kegiatan Ini Untuk Selanjutnya Refocusing Penanganan Covid-19	
4.01.2		Bagian Bina Mental		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	100	19.100.000	57	10.113.500	dari 8 Unit Kendaraan, 4 Unit Masih Dalam Kondisi Baik, dari 25 Unit Peralatan Kantor, 12 Dalam Kondisi Kurang Baik	Melaksanakan Perawatan Untuk 4 Unit Kendaraan Dinas Dengan Kondisi Kurang Baik, Serta melaksanakan Perawatan Untuk 12 Unit Peralatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Kantor Yang Kurang Baik.	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perawatan kendaraan dalam setahun	8	10.800.000	4	5.508.500	Dari 8 Unit Kendaraan, 4 Unit Masih Dalam Kondisi Baik	Melaksanakan Perawatan Untuk 4 Unit Dengan Kondisi Kurang Baik	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, dan komputer layak pakai	20	8.300.000	12	4.605.000	Dari 25 Unit Peralatan Kantor, 12 Dalam Kondisi Kurang Baik	Melaksanakan Perawatan Untuk 12 Unit Peralatan Kantor Yang Kurang Baik	
4.01.20		Bagian Bina Mental	Meningkatnya penguatan kearifan lokal (local wisdom),	Program Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama Masyarakat	Jumlah kegiatan akbar kemasyarakatan berbasis religi	22	2.963.450.200	5	745.868.000	pandemi Covid-19 Tidak Memungkinkan program Ini Terlaksana Sesuai Target Kinerja	pandemi Covid-19 Tidak Memungkinkan Kegiatan Ini Terlaksana Sesuai Target Kinerja Sehingga Hanya Ada 5 Kegiatan Yang Dapat Terlaksana. peringatan Hari Santri Nasional Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Dan Disiarkan Daring, Disamping Itu Hanya Dilaksanakan Penyembelihan Hewan Qurban Pada Hari Raya Idul Adha, Dan 2 Acara Kegiatan Kegiatan Di	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Masyarakat. Penyerapan Belanja Hanya Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat Termasuk Realisasi Untuk Operasional Baznas Dan Dmi Kab. Jember	
4.01.20.1				Penyelenggaraan/Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Besar Islam	Penyelenggaraan acara PHBI	7	625.960.000	2	242.400.000	Pandemi Covid-19 Tidak Memungkinkan Kegiatan Ini Terlaksana Sesuai Target Kinerja	Peringatan Hari Santri Nasional Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Dan Disiarkan Daring, Disamping Itu Hanya Dilaksanakan Penyembelihan Hewan Qurban Pada Hari Raya Idul Adha	
4.01.20.2				Penyelenggaraan/Fasilitasi Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat	14	2.337.490.200	3	503.468.000	Pandemi Covid-19 Tidak Memungkinkan Kegiatan Ini Terlaksana Sesuai Target Kinerja	Penyerapan Belanja Hanya Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat Termasuk Realisasi Untuk Operasional Baznas Dan Dmi Kab. Jember	
4.01.21		Bagian Bina Mental	Meningkatkan kualitas kehidupan	Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji	Persentase Calon jamaah Haji tiba di tanah suci dan	100	1.101.380.000	0	0	Pemerintah Memutuskan Penyelenggaraan	tidak Ada Realisasi Anggaran Untuk	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa (JEMBER IMTAK),		kembali ke tanah air					Ibadah Haji Tahun 2020 Ditiadakan, Sehingga Kegiatan Ini Tidak Terlaksana	Kegiatan Ini, pergeseran Anggaran Tidak Memungkinkan Karena Penyusunan Refocusing Penanganan Covid-19 Telah Selesai Pada Bulan Sebelum Kepatisan Pemerintah Di Publikasikan.	
4.01.21.2				Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Persentase Jamaah calon haji berangkat ke embarkasi	100	1.101.380.000	0	0	Pemerintah Memutuskan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 Ditiadakan, Sehingga Kegiatan Ini Tidak Terlaksana	Tidak Ada Realisasi Anggaran Untuk Kegiatan Ini, Pergeseran Anggaran Tidak Memungkinkan Karena Penyusunan Refocusing Penanganan Covid-19 Telah Selesai Pada Bulan Sebelum Kepetisan Pemerintah Di Publikasikan.	
4.01.1		Kecamatan Pakusari		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honorarium pengelolaan keuangan barang dan jasa,serta peralatan dan	95	149.990.000	0	146.842.450	kurangnya Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program	percepatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					Perlengkapan kantor yang memadai					Kegiatan, Dan Adanya Pergeseran Anggaran Dari Program Kegiatan Yang Lain Yang Berupa Atk	Kegiatan Program Baik Secara Internal maupun Eksternal	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	95	149.990.000	95	146.842.450	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.2		Kecamatan Pakusari		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur Yang Baik	95	46.090.000	90	45.528.500	kurangnya Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program Kegiatan, Dan Adanya Pergeseran Anggaran Dari Program Ke Program Lain	percepatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program Sehingga Pelaksanaan Program Kegiatan Sesuai Deng Dpa Yang Telah Ditetapkan	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan tetap dalam kondisi baik	95	29.370.000	95	28.953.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan tetap dalam kondisi baik	95	16.720.000	95	16.575.500	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.3		Kecamatan Pakusari		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksanannya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Pakusari	95	24.300.000	90	7.200.000	kurangnya Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program	percepatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan, Dan Adanya Pergeseran Anggaran Dari Program Ke Program Lain	Program Sehingga Pelaksanaan Program Kegiatan Sesuai Deng Dpa Yang Telah Ditetapkan	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	95	24.300.000	50	7.200.000	Pelaksanaan Terkendala Pandemi Covid-19 Yang mengharuskan Menjaga Sosial Distancing	Mengikuti Solusi Pengamanan Covid-19 Dengan Ketat Dan Dianggarkan Tahun Berikutnya	
4.01.32		Kecamatan Pakusari	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100	157.420.000	90	157.420.000	kurangnya Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program Kegiatan, Dan Adanya Pergeseran Anggaran Dari Program Ke Program Lain	percepatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program Sehingga Pelaksanaan Program Kegiatan Sesuai Deng Dpa Yang Telah Ditetapkan	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	100	4.750.000	100	4.750.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	95	17.670.000	85	17.670.000	Pelaksanaan Kineja Tidak Sesuai Target. Karena Adanya Covid-19	Pelaksanaan Kinerja Sesuai Dengan Protokol Pengamanan Pandemi Covid 19	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					yang terfasilitasi							
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase pemenuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	95	135.000.000	95	135.000.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.33		Kecamatan Pakusari	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	90	22.200.000	90	21.600.000	kurangnya Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program Kegiatan, Dan Adanya Pergeseran Anggaran Dari Program Ke Program Lain	percepatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Pelaksanaan Program Sehingga Pelaksanaan Program Kegiatan Sesuai Dengan Dpa Yang Telah Ditetapkan	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Pakusari	95	22.200.000	95	21.600.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.1		Kecamatan Sukowono		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100	225.400.000	93.26	179.600.000			
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Operasional Kantor	100	225.400.000	75	179.600.000	Adanya Pandemi Covid 19	Mengikuti Anjuran Pemerintah	
4.01.2		Kecamatan Sukowono		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	100	20.600.000	95	20.600.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang layak pakai	100	12.600.000	100	12.600.000	Kinerja Sesuai Target	--	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang diperbaiki	100	8.000.000	100	8.000.000	Kinerja Sesuai Target	--	
4.01.3		Kecamatan Sukowono		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100	4.000.000	100	3.000.000			
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah peringatan dan upacara hari-hari besar nasional yang diadakan	100	4.000.000	90	3.000.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Semua Karena Adanya Pandemi Covid 19	Mematuhi Anjuran Pemerintah	
4.01.32		Kecamatan Sukowono	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan penyelenggaraan di bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum	100	126.000.000	100	126.000.000			
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	95	6.000.000	95	6.000.000	Kinerja Sesuai Target	--	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase pemenuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum	95	120.000.000	95	120.000.000	Kinerja Sesuai Target	--	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					yang terfasilitasi							
4.01.33		Kecamatan Sukowono	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	24.000.000	100	24.000.000			
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	100	24.000.000	100	24.000.000	Kinerja Sesuai Target	--	
4.01.1		Kecamatan Kalisat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100	209.510.000	85	165.633.913	tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program	pelaksanaan Program Dan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kegiatan yang Telah Ditetapkan Dalam dpa	
4.01.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	95	1.400.000	95	1.400.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pemenuhan administrasi operasional kantor	95	208.110.000	91	164.233.913	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.2		Kecamatan Kalisat		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100	32.475.000	80	27.204.875	tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program	anggaran Dua Kegiatan Yang Tidak Dapat Direalisasikan Dialihkan Kepada Kegiatan Lain	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Yang Lebih Membutuhkan Melalui P-Apbd	
4.01.2.14				Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah Alat kantor, alat rumah tangga, komputer dll	95	2.700.000	56	1.520.000	Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kurang Maksimal Dalam Penyerapannya	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	95	3.500.000	94	3.470.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan, Sudah Terserap	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang layak pakai	95	14.975.000	93.5	14.050.500	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang diperbaiki	95	11.300.000	90	8.164.375	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.32		Kecamatan Kalisat	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	95	130.240.000	90	97.650.000	tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program	pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kegiatan yang Telah Ditetapkan Dalam dpa	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelembagaan	95	14.250.000	91	14.250.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Rakor Ketentraman dan Ketertiban Umum	95	115.990.000	89	83.400.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan, Hanya Penyerapan Kegiatan Peringatan Hut Ri Yang Terkendala Masa Pandemi Covid-19	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.33		Kecamatan Kalisat	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	95	25.725.000	90	25.577.050	tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program	pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kegiatan yang Telah Ditetapkan Dalam dpa	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah Pelayanan Administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	95	25.725.000	90	25.577.050	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.8		Kecamatan Kalisat		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Prosentase jumlah laporan yang tepat waktu	100	2.050.000	90	1.970.000	tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program	pelaksanaan Program Dan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kegiatan yang Telah Ditetapkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Dalam dpa	
4.01.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah Dokumen Renstra, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya	95	2.050.000	92	1.970.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dppa	
4.01.1		Kecamatan Ledokombo		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	95	157.455.000	90	147.743.500	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	100	157.455.000	93.88	147.743.500	Adanya Pandemi Covid 19	Terjadinya Efisiensi Anggaran	
4.01.2		Kecamatan Ledokombo		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	98	33.750.000	90	32.845.900	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan sesuai standart	100	24.250.000	97.01	23.523.300	Sesuai Dengan Dppa	Efisiensi Anggaran	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemenuhan dan pemeliharaan kendaraan operasional sesuai standart	100	9.500.000	98.13	9.322.600	Tidak Tercapainya Target Kinerja	Efisiensi Anggaran	
4.01.32		Kecamatan Ledokombo	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah	90	174.545.000	90	135.520.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			pemerintah an Wilayah Kecamatan		kecamatan							
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	90	36.750.000	100	36.750.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase kegiatan bidang ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	0	137.795.000	71.68	98.770.000	Adanya Pandemi Covid 19 Menjadikan Realisasi Kinerja Rendah	Terjadinya Efisiensi Anggaran	
4.01.33		Kecamatan Ledokombo	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah an wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	90	34.250.000	90	30.606.600	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	0	34.250.000	89.35	30.606.600	Sesuai Dppa	Terjadinya Efisiensi Anggaran	
4.01.1		Kecamatan Sumberjambe		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	100	174.679.000	100	146.603.412	belanja Perjalanan Dinas Tidak Direalisasikan Karena Covid-19, Pagu Anggaran Belanja Listrik Terlalu Tinggi.	perjalanan Dinas Direalisasikan Kegiatan Mendesak Dan Membutuhkan Tatap Muka, Perencanaan Anggaran Belanja Listrik Dihitung Rata-Rata Per Bulan	
4.01.				Penunjang Administrasi	Persentase	100	174.679.	90	146.603.	Belanja	Perjalanan Dinas	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.27				dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Pemenuhan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan		000		412	Perjalanan Dinas Tidak Direalisasikan Karena Covid-19, Pagu Anggaran Belanja Listrik Terlalu Tinggi.	Direalisasikan Kegiatan Mendesak Dan Membutuhkan Tatap Muka, Perencanaan Anggaran Belanja Listrik Dihitung Rata-Rata Per Bulan	
4.01.2		Kecamatan Sumberjambe		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perenstase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100	42.650.000	83	41.588.016	1 (satu) Sepeda Motor Belum Terpelihara Karena Rusak Berat	usulan Untuk Penghapusan Aset	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	1	20.000.000	1	19.912.340	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	3	22.650.000	2	21.675.676	1 (satu) Sepeda Motor Belum Terpelihara Karena Rusak Berat	Usulan Untuk Penghapusan Aset	
4.01.32		Kecamatan Sumberjambe	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan dan Kesos yang Ditindaklanjuti Dalam 1 Tahun	100	150.730.500	70	130.650.000	Beberapa Rakor Tidak Diselenggarakan Karena Covid-19	Rakor Dapat Diselenggarakan Untuk Kebutuhan Mendesak Dan Harus Bertatap Muka Dan Tetap Mematuhi Proses	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan yang	12	16.800.000	12	11.700.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					dilaksanakan dalam 1 Tahun							
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rakor Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos (Musrenbang dan PKK)	34	12.750.000	24	12.750.000	Beberapa Rakor Tidak Diselenggarakan Karena Covid-19	Rakor Dapat Diselenggarakan Untuk Kebutuhan Mendesak Dan Harus Bertatap Muka Dan Tetap Mematuhi Prokes	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah bulan terlaksananya pengamanan ketertiban umum	12	121.180.500	12	106.200.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Sumberjambe	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik	80	31.940.500	78	22.040.500	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	100	31.940.500	98	22.040.500	-	-	
4.01.1		Kecamatan Mayang		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	12	186.540.000	12	124.379.950	Hampir Tidak Ada Masalah Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tetap Dilakukan Beberapa Upaya Agar Capaian Kinerja Dan Anggaran Bisa Optimal	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik dan Telepon	12	36.000.000	12	14.379.950	Tidak Ada Masalah Yang Signifikan Dalam Kegiatan Tersebut	Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Kerja Yang Dibuat	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Terpenuhinya administrasi dan operasional rutin	12	150.540.000	12	110.000.000	Tidak Ditemukan Permasalahan Yang Cukup	Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Kerja	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					kantor/ kedinasan					Signifikan Dalam Kegiatan Tersebut	Yang Dibuat	
4.01.2		Kecamatan Mayang		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	1	37.360.00	1	22.068.500	Kendala Dilapangan Sangat Minim Pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Dilakukan Beberapa Upaya Agar Capaian Kinerja Dan Anggaran Bisa Optimal	
4.01.2.14				Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll yang terpenuhi	1	10.000.00	0	0	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Dll Tidak Bisa Dilaksanakan, Karena Syarat Administrasi Belum Terpenuhi.	Akan Dilakukan Pengajuan Pada Tahun Anggaran 2021	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Layak Pakai/ Terpelihara	1	19.570.00	1	14.416.00	Tidak Ditemukan Permasalahan Yang Cukup Signifikan Pada Kegiatan Tersebut	Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Kerja Yang Di Buat	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang layak pakai / Terpelihara	1	7.790.00	1	7.652.500	Tidak Ditemukan Permasalahan Yang Cukup Signifikan Pada Kegiatan Tersebut	Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Kerja Yang Di Buat	
4.01.3		Kecamatan Mayang		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	1	19.350.00	1	1.000.000	Kendala Sangat Minim Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tetap Dilakukan Beberapa Upaya Agar Capaian Kinerja Dan Anggaran Bisa Optimal	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara	Terlaksananya Upacara HUT RI	1	19.350.00	1	1.000.000	Nihil	Nihil	



Kode	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Hari-hari Besar Nasional								
4.01.32		Kecamatan Mayang	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan yang terfasilitasi	100	124.950.000	100	114.925.000	Ada Beberapa Permasalahan Yang Ditemukan Dalam Program Tersebut	Melakukan Koordinasi Dan Komunikasi Dengan Pelaksana Kegiatan, Agar Capaian Kinerja Dan Anggaran Bisa Optimal	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan yang terfasilitasi	100	16.950.000	50	6.925.000	Karena Adanya Pandemi Covid-19 Maka Kegiatan Pkk (rapat / Pertemuan) Sudah Tidak Dilaksanakan Lagi	Kegiatan Akan Dilaksanakan Lagi Menunggu Petunjuk Dan Arahan Pimpinan	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum yang terfasilitasi	100	108.000.000	100	108.000.000	Tidak Ditemukan Permasalahan Yang Cukup Signifikan Pada Kegiatan Tersebut	Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Kerja Yang Di Buat	
4.01.33		Kecamatan Mayang	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani	1200	31.800.000	1200	9.000.000	Ada Masalah Tehnis Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Mengantisipasi Lebih Awal Permasalahan Tehnis Tersebut, Agar Kegiatan Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Dan Benar	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani	1200	31.800.000	1200	9.000.000	Kegiatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Berjalan Dengan	Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Kerja Yang Di Buat	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Baik Dan Lancar		
4.01.1		Kecamatan Silo		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	99	197.005.000	65.76	167.698.265	Beberapa Kegiatan Kelebihan Anggaran.	Pergeseran Anggaran.	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	99	197.005.000	85.12	167.698.265	Terkendala Pada Kelengkapan Administrasi	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.2		Kecamatan Silo		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	100	37.275.000	58.61	25.826.300	Anggaran Tidak Terserap Secara Maksimal	Pergeseran Anggaran Ke Kegiatan Yang Lain.	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	100	23.175.000	79.52	18.428.300	Terhambat Pada Kelengkapan Administrasi	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	100	14.100.000	52.47	7.398.000	Terhambat Pada Kelengkapan Administrasi	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Dengan Tahun 2020	
4.01.32		Kecamatan Silo	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Meningkatnya ketertiban dan kemandirian masyarakat	100	138.400.000	65.03	112.950.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase Masyarakat yang Dibina dalam Menjaga Lingkungan	100	138.400.000	81.62	112.950.000	Terhambat Pada Kelengkapan Administrasi	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.33		Kecamatan Silo	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase tingkat pelayanan publik	100	27.320.000	33.97	18.670.000	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	100	27.320.000	68.34	18.670.000	Terhambat Pada Kelengkapan Administrasi	Kegiatan Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.1		Kecamatan Mumbulsari		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	0	210.000.000	100	178.564.067	Tidak Ada Permasalahan.	Karena Tidak Ada Permasalahan, Maka Tidak Memerlukan Solusi	
4.01.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan Kantor Terpenuhi	100	15.000.000	89.73	13.459.500	Adanya Peralatan Kantor Yang Perlu Diperbaiki	Perlu Mendatangkan Tekhnisi Seuai Dengan Alat Yang Akan Diperbaiki	
4.01.1.21				Penunjang Tupoksi Kantor	Tersedianya Administrasi dan Operasional Kantor	100	140.000.000	86.6	121.240.000	Terhambat Pada Kelengkapan Administrasi	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun Target 2020	
4.01.1.24				Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kebutuhan Kantor	100	55.000.000	79.78	43.864.567	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Tersebut	Akan Di Anggarakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Pelaksaan Kegiatan	
4.01.2		Kecamatan Mumbulsari		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	0	31.700.000	100	29.119.694	Tidak Ada Permasalahan Yang Ada Selama Pelaksanaan	Karena Tidak Ada Permasalahan Maka Tidak Memerlukan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan Dan Program	Solusi	
4.01.2.20				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Terpeliharanya Bangunan Rumah Jabatan / Rumah Dinas	100	5.000.000	99.82	4.991.000	-	-	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan sarana kerja sesuai standart	100	2.500.000	99.92	2.498.000	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan sesuai standart	100	15.000.000	92.93	13.939.113	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemenuhan dan pemeliharaan kendaraan operasional sesuai standart	100	9.200.000	83.6	7.691.581	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Kebutuhan Untuk Melaksanakan Kegiatan Tersebut	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan	
4.01.3		Kecamatan Mumbulsari		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	0	20.000.000	100	12.845.000	Tidak Ada Permasalahan Selama Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	Karena Tidak Ada Permasalahan Maka Tidak Memerlukan Suatu Solusi	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	100	20.000.000	64.23	12.845.000	Kegiatan Belum Bisa Dilaksanakan Secara Optimal Karna Kendala Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.32		Kecamatan Mumbulsari	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil ,KKoordinasi di bidang Pemerintahan,Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos dan Ketentraman dan Ketertiban	0	138.300.000	100	133.950.000	Tidak Ada Permasalahan Selama Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	Karena Tidak Ada Permasalahan Selama Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Maka Tidak Memerlukan Suatu Solusi	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	100	37.500.000	96.4	33.150.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase kegiatan bidang ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	100	100.800.000	100	100.800.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Tempurejo		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah	100	189.580.000	92	174.852.500	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor kecamatan	100	18.720.000	100	18.720.000	Anggaran Yang Ada Hanya Mencukupi Sampai Bulan Oktober 2020	Koordinasi Kepada Sekretaris Daerah	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah barang cetak dan	1	2.500.000	1	2.480.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Penggandaan	penggandaan yang tersedia							
4.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1	25.000.000	1	10.300.000	Dana Tidak Bisa Terserap Secara Keseluruhan, Dikarenakan Terkenala Petunjuk Administrasi Dan Kondisi Covid 19	Pengembalian Ke Kasda Jember	
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	1	1.500.000	1	1.493.500	-	Kegiatan Sudah Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase penyediaan honor pengelola keuangan, barang dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	100	123.720.000	100	123.720.000	-	Sudah Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1	18.140.000	1	18.139.000	-	Sudah Sesuai Perencanaan	
4.01.2		Kecamatan Tempurejo		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	100	66.020.000	86	56.831.787	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada	
4.01.2.14				Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah peralatan yang layak pakai/ terpelihara	1	7.540.000	0	0	Belum Ada Aturan Terkait Petunjuk Teknis Serta Syarat Administrasi Kegiatan Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Dll	Dana Kembali Ke Kasda Jember	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.2.20				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1	10.000.000	1	9.787.500	-	Sudah Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	100	23.200.000	95	22.976.000	-	Sudah Berjalan Sesuai Perencanaan	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	100	15.280.000	95	14.077.412	-	Sudah Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	3	10.000.000	3	9.990.875	-	-	
4.01.3		Kecamatan Tempurejo		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100	10.000.000	10	1.000.000	Karena Pandemi Covid 19 Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Sepenuhnya	Kembali Ke Kasda Jember	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional	100	10.000.000	10	1.000.000	Terkendala Kondisi Pandemi, Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Secara Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya Ketika Kondisi Memungkinkan	
4.01.32		Kecamatan Tempurejo	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ APBDes sesuai Pedum	100	134.400.000	99	133.400.000	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase Penyerapan Bantuan	100	3.000.000	20	2.000.000	Terkendala Syarat Administrasi	Perlu Adanya Perbaikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Pemerintahan	Keuangan Desa					Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Maksimal	Administrasi Serta Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyerapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos	100	6.000.000	100	6.000.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	persentase Penyerapan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	100	125.400.000	100	125.400.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Rambipuji		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	12	196.880.500	12.6	192.162.700	Target Capaian Kinerja Telah Dicapai 100% Namun Target Capaian Anggaran Hanya Bisa Terserap 95,20 % Karena Ada Kelebihan Pada Penganggaran Pos Rekening Listrik Dan Air Yang Mana Tiap Bulannya Tidak Bisa Diprediksi Dengan Tepat Sehingga Pada Perhitungan Perencanaan Mengambil Posisi Aman Dengan	Lebih Cermat Dan Tepat Untuk Meminimalisir Kelebihan Anggaran Pada Pos- Pos Program/kegiatan Yang Tidak Bisa Diprediksi Dengan Tepat.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Memberi Interval Lebih.		
4.01.1.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dilaksanakannya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	17.500.000	12	17.280.000	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Dengan Baik	Mengarsip Administrasi Kegiatan	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Terbayarnya Honor Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa, serta Kebutuhan Penunjang Administrasi Operasional Rutin Kantor	12	179.380.500	12	174.882.700	-	-	
4.01.2		Kecamatan Rambipuji		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	1	41.054.500	1	40.994.500	Program Peningkatan Parana Dan Prasarana Aparatur Tidak Ada Masalah Semua Berjalan Sesuai Dengan Target Capaian Kinerja Yang Terlaksana 100% Dan Target Capaian Anggaran Terserap 99,89% (Hampir 100%).	Nihil.	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1	4.004.500	1	4.004.500	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Dengan Baik	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Dengan Baik	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kendaraan Dinas Terawat dengan Baik	1	22.650.000	1	22.650.000	Pemeliharaan Mobil Dinas Telah Dilaksanakan/dilakukan Sesuai	Perawatan Dan Pemeliharaan Perlu Dilakukan Secara Rutin Dan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dengan Kondisi Dan Anggaran Yang Ada	Berkala	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terawat dengan Baik	1	6.550.000	1	6.550.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sudah Dilakukan/dilaksanakan Sesuai Dengan Kondisi Dan Anggaran	Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Perlu Dilakukan Secara Rutin Dan Berkala	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12	7.850.000	12	7.790.000	Alat Kantor. Alat Rumah Tangga. Komputer Sudah Diperbaiki Sesuai Dengan Kondisi Dan Anggaran Yang Ada	Melakukan Perawatan/perbaikan Pada Semua Alat Kantor. Alat Rumah Tangga. Komputer Seraca Rutin Dan Berkala	
4.01.32		Kecamatan Rambipuji	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	133.950.000	93	124.750.000	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tidak Ada Masalah Baik Target Capaian Kinerja Maupun Target Capaian Anggaran Masing - Masing Terlaksana 100%,	Nihil.	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rakor Seksi Pemerintah	100	4.400.000	100	4.400.000	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan	Mengarsip Administrasi Kegiatan Untuk	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Perencanaan Awal Meskipun Ada Jadwal Ulang Karena Situasi Dan Kondisi.	Bahan Dan Perbaikan Kegiatan Yang Akan Datang	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah rakor Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100	12.350.000	100	12.350.000	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Dengan Baik	Pengarsipan Administrasi/dokumen Sebagai Bentuk Tertib Administrasi	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Rakor Seksi Ketertiban dan Keamanan	100	117.200.000	100	108.000.000	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Dengan Baik	Pengarsipan Administrasi/dokumen Sebagai Bentuk Tertib Administrasi	
4.01.33		Kecamatan Rambipuji	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	28.115.000	100	26.640.000	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan Capaian Target Kinerja 95% Sedangkan Capaian Target Anggaran 100%, Ini Disebabkan Masyarakat Sudah Banyak Yang Terlayani Dan Memiliki Administrasi Kependudukan Sehingga Pelayanan Umum Berkurang Dari Pada Tahun Sebelumnya.	Mengurangi Target Kinerja Pada Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan.	
4.01.				Koordinasi Pelayanan	Jumlah Jenis	12000	28.115.0	12000	26.640.0	Tidak Ada	Pengarsipan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
33.1				Umum	Dokumen Administrasi Kependudukan yang diproses/dilayani		00		00	Masalah Dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dapat Terlayani Dengan Baik	Administrasi/dokumen Kependudukan Sebagai Bentuk Tertib Administrasi	
4.01.1		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	100	5.320.584.300	90	4.827.136.514	Merupakan Program Rutin Yang Sering Dilaksanakan, Akan Tetapi Pada Tahun 2019 Ada Kegiatan Yang Melebihi Dari Target Dikarenakan Adanya Penambahan Anggaran.	perlu Adanya Penyesuaian Anggaran Dan Perencanaan Di Tahun Yang Akan Datang	
4.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan surat menyurat yang cepat dan tepat	12	36.800.000	12	31.560.830	-	-	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12	307.800.000	12	228.704.336	Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya layanan kebersihan kantor	1	285.600.000	1	103.488.510	Pelayanan Akan Kebutuhan Tenaga Kebersihan Tetap Dipertahankan Dan Dilaksanakan Oleh Tenaga Yang Ada	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK bagi kebutuhan DPRD	1	90.000.000	1	89.287.935	Menyesuaikan Kebutuhan	Penyesuaian Perencanaan Di	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan	Masa Mendatang	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan dokumen kebutuhan kantor	1	55.229.000	1	46.065.300	Menyesuaikan Kebutuhan Kegiatan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang memadai	1	47.728.300	1	34.690.150	Menyesuaikan Kebutuhan Kegiatan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan	150	22.160.000	0	0	Kegiatan Surat Kabar Dan Buku Perpustakaan Tidak Berjalan Dikarenakan Terdapat Kebutuhan Administrasi Yang Belum Tercukupi	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik rumah tangga untuk rumah dinas DPRD	4	0	0	0	Menyesuaikan Kebutuhan & Adanya Pandemi Covid Sehingga Membatasi Kegiatan Sesuai Dengan Instruksi Pemerintah	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi Pol. PP, Kegiatan DPRD, Fraksi, Tamu, Acara Keagamaan	7460	35.200.000	552	21.227.750	Menyesuaikan Kebutuhan Tamu	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja/rapat koordinasi/konsultasi DPRD ke luar daerah	96	4.000.539.000	96	3.974.698.203	Menyesuaikan Dengan Jadwal Kegiatan Dewan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin	Tersedianya honorarium untuk	316	439.528.000	295	297.413.500	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Kantor/Kedinasan	Pejabat Pengadaan, Pengelola Keuangan dan Barang, Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor							
4.01.2		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana	94	936.067.500	92	686.804.590	Untuk Tahun 2019 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dilaksanakan Akan Tetapi Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Maksimal Dikarenakan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	perlu Adanya Penyesuaian Anggaran Dan Perencanaan Di Tahun Yang Akan Datang	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPRD	1	180.816.000	1	62.287.000	Menyesuaikan Dengan Kebutuhan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	8	394.930.000	8	342.762.740	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	22	199.996.500	22	137.631.800	-	-	
4.01.2.29				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya meubeleur	649	5.000.000	0	0	Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Anggaran	Peryesuaian Perencanaan Dimasa Mendatang	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Terpeliharanya alat kantor, alat rumah tangga, komputer	169	150.325.000	138	144.123.050	Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Pemeliharaan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Rutin/berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer		
4.01.2.31				Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terpeliharanya taman gedung kantor DPRD dan rumah dinas Pimpinan DPRD yang dipelihara	1	5.000.000	0	0	Untuk Saat Ini Dilaksanakan Oleh Tenaga Seadanya	Perencanaan Kedepannya Akan Dipersiapkan	
4.01.26		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Fasilitasi kegiatan DPRD	363	2.105.632.500	218	653.476.000	Penyesuaian Jadwal Dan Kegiatan Rapat-Rapat Yang Melibatkan Stakeholder Terkadang Tidak Bisa Terlaksana Sesuai Dengan Agenda	perlu Adanya Koordinasi Dan Komunikasi Yang Efektif	
4.01.26.1				Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terfasilitasinya rapat - rapat Alat Kelengkapan DPRD	350	498.907.500	288	346.537.500	Menyesuaikan Dengan Jadwal Kegiatan & Rapat Dewan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.26.2				Rapat-Rapat Paripurna	Terfasilitasinya Rapat - rapat paripurna DPRD	40	711.725.000	16	287.398.500	Menyesuaikan Dengan Jadwal Kegiatan & Rapat Dewan	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.26.3				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Terfasilitasinya kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	96	37.500.000	11	19.540.000	Adanya Pandemi Covid 19 Sehingga Tindaklanjut Laporan Masyarakat/sidak Dilaksanakan Secara Selektif & Terbatas	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.				Penyediaan Jasa	Terfasilitasinya	50	140.000.	0	0	Adanya Pandemi	Penyesuaian	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
26.4				Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan	General Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga		000			Covid Sehingga Membatasi Kegiatan Sesuai Dengan Instruksi Pemerintah	Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.26.6				Reses	Terfasilitasinya pelaksanaan Reses DPRD	3	717.500.000	0	0	Menyesuaikan Kebutuhan & Adanya Pandemi Covid Sehingga Membatasi Kegiatan Sesuai Dengan Instruksi Pemerintah	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.29		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Bersih (Clean Government), Serta Profesionalitas Dalam Rangka Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Untuk Menunjang	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Produk DPRD	% Pelayanan Informasi DPRD yang berkualitas	100	152.475.000	100	0	Untuk Produk Dprd Masih Membutuhkan Bahan Dan Pembahasan Antara Stakeholders Yang Ada	perlu Adanya Penyesuaian Anggaran Dan Perencanaan Di Tahun Yang Akan Datang	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			Peningkatan Kapasitas/ Kinerja DPRD									
4.01.29.1				Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Produk DPRD	Tersedianya Buku Produk DPRD	4	152.475.000	0	0	Kegiatan Penyusunan Dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Produk Dprd Tidak Terlaksana Dikarenakan Terdapat Kebutuhan Administrasi Yang Tidak Terpenuhi	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	
4.01.3		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% tingkat disiplin aparatur	100	500.000.000	100	0	Tidak Ada Kendala Dikarenakan Untuk Penyediaan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dprd Merupakan Amanah Perundang-Undangan	penyesuaian Anggaran Dan Perencanaan Di Tahun Yang Akan Datang	
4.01.3.2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi DPRD	240	500.000.000	0	0	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tidak Terlaksana Dikarenakan Terdapat Kebutuhan Administrasi Yang	Penyesuaian Perencanaan Di Masa Mendatang	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Belum Terpenuhi		
4.01.1		Kecamatan Jenggawah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksananya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	100	207.923.000	90	175.501.826	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor	100	207.923.000	95	175.501.826	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dpa	
4.01.2		Kecamatan Jenggawah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	30.317.000	90	28.704.652	-	-	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana	100	3.680.000	95	3.680.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dpa	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100	18.529.000	95	18.215.652	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dpa	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	8.108.000	90	6.809.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dpa	
4.01.32		Kecamatan Jenggawah	Meningkatkan koordinasi	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan	Prosentase terselenggaranya koordinasi	100	124.510.000	95	108.200.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			pemerintah an dan penyeleng garaan pemerintah an Wilayah Kecamatan .	Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	pemerintahan, koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan koordinasi ketertiban dan keamanan umum							
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan	100	1.200.000	90	1.200.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Telah Dilaksanakan Pada Triwulan Pertama	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	6.800.000	93	6.400.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dpa	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Prosentase terselenggaranya koordinasi ketertiban dan keamanan umum	100	116.510.000	70	100.600.000	Kegiatan Phbn Tidak Dilaksanakan Karena Terkendala Dengan Adanya Pandemi Covid-19	Kegiatan Ini Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Target Minimal Sama Dengan Anggaran Tahun Ini	
4.01.33		Kecamatan Jenggawah	Meningkatk an kualitas Penyeleng garaan Pemerintah an wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan umum yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	34.700.000	95	24.250.000	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Prosentase jumlah pelayanan administrasi	100	34.700.000	95	24.250.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					kependudukan dan pelayanan umum yang diproses					Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dpa	
4.01.8		Kecamatan Jenggawah		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Prosentase tingkat kinerja lembaga dan aparatur pemerintah	100	2.550.000	95	1.150.000	-	-	
4.01.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Prosentase jumlah laporan kyang tepat waktu	100	2.550.000	90	1.150.000	Tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dpa	
4.01.1		Kecamatan Panti		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase hasil Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	254.894.000	57.96	187.023.560	sarana Dan Prasaran Operasional Opd Yang Belum Memadai Dan Perlu Adanya Standarisasi Sarana Dan Prasarana Opd Sesuai Dengan Beban Kerja Dan Kondisi Kerja	menyatukan Pelayanan Dalam Satu Organisasi Pelayanan Melalui Unit Pelayanan Terpadu (upt) Pelayanan Masyarakat Dan mengoptimalkan Sarana Dan Prasarana Yang Ada Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima, Serta Mengajukan Pengadaan Sarana Yang Sudah Tidak Layak Pakai	
4.01.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase hasil penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	80	5.340.000	76.55	5.090.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.				Penyediaan Makanan	Persentase hasil	0	27.975.0	31.56	3.600.00	-		



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.17				dan Minuman	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		00		0			
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Presentase hasil rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	80	1.600.000	0	0	Tidak Terlaksananya Karena Penyebaran Covid 19	Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tidak Direncanakan Di Ta. 2021	
4.01.1.21				Penunjang Tupoksi Kantor	Persentase hasil penunjang tupoksi kantor	80	122.484.000	80	115.284.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.1.24				Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan kantor	80	97.495.000	78.59	63.049.560	Tidak Maksimalnya Kinerja Karena Jasa Listrik Anggarannya Terlalu Over	Merencanakan Kegiatan Tahun Depan Dengan Acuan Pengeluaran Tahun Ini	
4.01.2		Kecamatan Panti		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	80	35.296.000	78.27	29.739.607	sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Kantor Masih Kurang Dari Kebutuhan pemeliharaan Rumah Dinas, Gedung Kantor Anggaran Terbatas Sedangkan Tingkat Kerusakannya Berat	mengajukan Permohonan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana, Rehabilitasi Rumah Dinas, Gedung Kantor Kepada Pemerintah Kabupaten Jember	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	80	19.520.000	72.64	17.685.808	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Persentase pemeliharaan rutin/	80	15.776.000	78.68	12.053.799	Kinerja Sesuai Target	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Dinas/Operasional	berkala kendaraan dinas / operasional							
4.01.3		Kecamatan Panti		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Program peningkatan disiplin aparatur	80	12.750.000	73.15	0	Tidak Maksimalnya Program Dan Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi Covid 19	Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun Yang Akan Datang Dalam Pelaksanaannya Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan Mengajukan Anggaran Menggunakan Scala Prioritas Program Dan Kegiatan	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	12.750.000	0	0	Pelaksanaan Upacara Dan Kegiatan Hut. Kemerdekaan Ri. Tidak Dilaksanakan Karena Merebaknya Virus Corona 19	Upacara Dan Kegiatan Hut. Kemerdekaan Ri. Akan Dilakukan Ditahun Depan Dengan Acuan Anggaran Tahun Ini	
4.01.32		Kecamatan Panti	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Partisipasi Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan Layanan Publik	80	74.400.000	57.65	73.775.600	penyerapan Anggaran Besar Karena Digunakan Untuk Pembuatan Banner Sejumlah 13 Benner Dalam Setahun	solusi Yang Dilakukan Pada Pelaksanaan Program Tersebut Adalah Menampung Semua Usulan Untuk Diteruskan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			an Wilayah Kecamatan								Ke Tingkat Kabupaten Berdasarkan Skala Prioritas Dan Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Terkait Usulan Dimaksud.	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Rapat Rutin PKK	100	2.400.000	30.58	1.775.600	Pelaksanaan Tidak Sesuai Dengan Target	Kegiatan Dilaksanakan Mengikuti Protokol Kesehatan Dengan Ketat	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase Kegiatan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	100	72.000.000	97	72.000.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.33		Kecamatan Panti	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Presentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai denga SP dan SOP	100	22.660.000	100	20.335.000			
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Presentase Masyarakat tertib administrasi kependudukan	100	22.660.000	84.6	20.335.000	Kegiatan Perjalanan Dinas Tidak Terlaksana Sesuai Target Kerena Covid 19	Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Mengikuti Protokol Kesehatan Secara Ketat	
4.01.1		Kecamatan Sukorambi		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan dasar operasional SKPD	100	198.650.000	78.24	187.841.336	Kegiatan Belum Bisa Dimaksimalkan Dikarenakan	Akan Lebih Di Tingkatkan Lagi Di Tahun Depan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Masa Pandemi.		
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan dasar operasional SKPD	100	198.650.000	91.56	187.841.336	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Di Tingkatkan Lagi Di Tahun Depan	
4.01.2		Kecamatan Sukorambi		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100	29.300.000	99.01	28.618.192	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Di Tingkatkan Lagi Di Tahun Depan	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan gedung kantor sesuai standar	100	7.000.000	99.97	6.998.000	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Pada Tahun Berikutnya	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan sesuai standar	100	15.000.000	97.47	14.620.192	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Pada Tahun Berikutnya	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan mobil operasional sesuai standar	100	7.300.000	95.89	7.000.000	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Pada Tahun Berikutnya	
4.01.3		Kecamatan Sukorambi		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparaturnya	100	29.950.000	92.16	79.5	Kegiatan Belum Bisa Dilaksanakan Dikarenakan Masa Pandemi.	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.				Penyelenggaraan	Persentase tingkat	100	29.950.0	0.27	79.5	Kegiatan Belum	Kegiatan Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.5				Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	disiplin aparatur		00			Bisa Dilaksanakan Dikarenakan Masa Pandemi.	Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya Dan Dilaksanakan Secara Maksimal Dengan Target Minimal Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.32		Kecamatan Sukorambi	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat dan sosial	100	142.100.000	99.32	141.905.000	Tidak Ada Permasalahan	Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Pada Tahun Berikutnya	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rakor dalam 1 tahun	100	14.000.000	100	14.000.000	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Pada Tahun Berikutnya	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100	8.100.000	97.59	7.905.000	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Pada Tahun Berikutnya	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah satuan keamanan yang ada di masyarakat	100	120.000.000	100	120.000.000	Tidak Ada Masalah	Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Pada Tahun Berikutnya	
4.01.1		Kecamatan Ajung		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan administrasi	80	232.885.000	80	175.693.324	Kurangnya Koordinasi Antara Atasan Dengan Bawahan, Dan	Diadakan Rapat Koordinasi Secara Rutin, Dan Pembinaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					perkantoran					Perlunya Peningkatan Kerjasama Antar Personal. Kurangnya Tenaga Dan Sdm Di Kantor Yang Menguasai It	Atasan Kepada Bawahan. Membuat Usulan Kepada Kepala Bkpsdm Agar Asn Di Kecamatan Ajung Untuk Mengikuti Diklat Komputer	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	jumlah pemenuhan dasar operasional Kantor	100	232.885.000	75.44	175.693.324	Adanya Pembatasan Jam Kerja Pegawai Dengan Sistem Sif Sehingga Mengurangi Kebutuhan Operasional Kantor	Menambah Jam Kerja Dengan Memaksimalkan Bekerja Di Rumah	
4.01.2		Kecamatan Ajung		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80	50.000.000	80	48.892.000	Kurangnya Sarana Peralatan Kantor Berupa Laptop Dan Printer Karena Kondisinya Yang Rusak Sehingga Mengganggu Proses Kegiatan Administrasi Di Kantor. Kurangnya Sarana Transportasi Kantor Untuk Memperlancar Kegiatan Administrasi	Mengusulkan Pengadaan Laptop Dan Printer Sesuai Kebutuhan. Pengadaan Sepeda Motor Dinas Untuk Karyawan	
4.01.				Pemeliharaan	Jumlah mobil jabatan	1	30.000.0	1	29.892.0	Kondisi Mobil	Mobil Secara	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23				Rutin/Berkala Mobil Jabatan	yang layak pakai		00		00	Dalam Keadaan Layak Dan Memerlukan Biaya Perawatan Sedang Karena Jarang Dinas Keluar Kota	Rutin Diserviskan Ke Bengkel Resmi Sehingga Kondisinya Tetap Bagus Dan Dalam Kondisi Layak Pakai	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang layak pakai	3	20.000.000	3	19.000.000	Kendaraan Operasional Perlu Perawatan / Servis Sedang Untuk Menjaga Kondisi Kendaraan Tetap Layak Pakai	Dilakukan Perawatan/ Servis Sedang Sehingga Kondisi Kendaraan Normal Dan Tidak Mengganggu Kinerja Operasional	
4.01.3		Kecamatan Ajung		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan dan Masyarakat	100	8.000.000	60	4.950.000			
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Upacara HUT RI	1	8.000.000	1	4.950.000	Kegiatan Upacara Dilakukan Secara Intern Dalam Lingkup Kantor Dengan Peserta Unsur Muspika, Plkb, Puskesmas Dan Karyawan Kantor Karena Kondisi Pandemi, Sehingga Penyerapan Anggaran Kurang Optimal	Kegiatan Dan Serapan Anggaran Lebih Dioptimalkan Lagi	
4.01.32		Kecamatan Ajung	Meningkatkan	Program Koordinasi Pemerintahan,	Prosentase rekomendasi hasil	80	99.875.000	80	80.656.250	Kurangnya Tenaga	Membuat Usulan Kepada Kepala	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	kordinasi seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti					Pengadministrasi Seksi Pemerintahan Sehingga Pekerjaan Berjalan Kurang Maksimal	Bkpsdm Agar Ada Penambahan Tenaga Pengadinitrsi Di Kecamatan Ajung	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah koordinasi dengan desa yang di monev, peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkada Pilkades, pengisian perangkat, capaian kinerja anggaran (DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi)	12	12.000.000	9	5.600.000	Rakor Diadakan Secara Virtual Dan Tatap Muka Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Akibat Dampak Pemdemik Covid 19	Melakukan Rakor Secara Langsung Dengan Kades Dan Instansi Terkait Lainnya, Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan. Untuk Antisipasi Pencegahan Penularan Covid 19. Mengoptimalkan Kinerja Dan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada.	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah koordinasi	13	15.875.000	13	14.325.000	Kegiatan Pmks Lebih Banyak Menyerap Anggaran Sehingga Pengeluaran Anggaran Triwulan Iv Yang Lebih Besar	Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kesejahteraan Sosial Lebih Ditingkatkan Sehingga Penyerapan Anggaran Lebih Besar	
4.01.				Koordinasi	Jumlah koordinasi	12	72.000.0	12	60.731.2	Kegiatan Patroli	Kegiatan Lebih	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
32.3				Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum			00		50	Rutin Dikurangi Karena Situasi Pandemi Covid 19 Dan Dilakukan Operasi Razia Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan	Ditekankan Pada Operasi Razia Pada Pelanggaran Protokol Kesehatan	
4.01.33		Kecamatan Ajung	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai peraturan / SOP	80	9.240.000	80	9.240.000	Kurangnya Tenaga Pns Di Seksi Pelayanan Umum Karena Selama Ini Penanganan Kegiatan Dibantu Tenaga Non Pns Dari Banpol Yang Tidak Sesuai Dengan Tupoksi	Membuat Usulan Kepada Kepala Bksdm Penambahan Tenaga Pengadministrasi Dari Pns Di Seksi Pelayanan Umum Sehingga Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Tupoksi	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah Dodumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)	1500	9.240.000	1500	9.240.000	Kegiatan Dengan Pembatasan Jam Kerja Dan Harus Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan	Kegiatan Tetap Dilakukan Secara Maksimal Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan	
4.01.1		Kecamatan Tanggul		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan kebutuhan penunjang operasional PD	95	178.869.000	88.96	168.019.578	- Pada Tahun Anggaran 2019 Dilaksanakan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Tanggul Sehingga Biaya Listrik Tidak Digunakan Seluruhnya	- Tidak Ada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama satu tahun	12	30.000.000	12	27.251.578	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	95	148.869.000	89.83	140.768.000	Selama Pandemi Covid 19 Kegiatan Dilaksanakan Secara Virtual	-	
4.01.2		Kecamatan Tanggul		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase dan prasarana aparatur yang layak fungsi	95	22.581.000	90	21.081.000	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara	95	11.471.000	82.58	9.971.000	Anggaran Untuk Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Mencukupi Sedangkan Anggaran Untuk Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Hanya Berlaku Untuk Tahun Anggaran Berjalan	Dilaksanakan Pemutihan Pada Anggaran Tahun Berikutnya	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional kantor yang dipelihara	95	7.110.000	95	7.110.000	-	-	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah alat kantor, alat rumah tangga, komputer yang dipelihara	95	4.000.000	95	4.000.000	-	-	
4.01.3		Kecamatan Tanggul		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kegiatan pembinaan / evaluasi kinerja pegawai	95	19.750.000	90	2.500.000	Pada Tahun 2020 Terjadi Pandemi Covid-19 Sehingga Tidak Ada Pengibaran Bendera Dalam	Kegiatan Akan Dilaksanakan Apabila Situasi Pandemi Sudah Berakhir	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Rangka Hut Ri Ke-75, Kegiatan Dilakukan Secara Virtual.		
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase penyediaan kebutuhan kegiatan pada Peringatan Hari besar Nasional	95	19.750.000	12.03	2.500.000	Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Ri Dilaksanakan Secara Virtual Sehingga Tidak Diperlukan Paskibra Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.01.32		Kecamatan Tanggul	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial, Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	95	157.200.000	90	154.100.000	-	-	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	95	4.000.000	23.75	1.000.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Karena Adanya Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Di Maksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	95	5.600.000	95	5.600.000	Kegiatan Tidak Berjalan Optimal Karena Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Di Optimalkan Di Tahun Anggaran Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					dalam satu tahun							
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Ketentraman dan ketertiban umum	95	147.600.000	94.94	147.500.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Tanggul	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Presentase hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada pelayanan publik	95	21.600.000	90	21.600.000	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Presentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan publik	90	21.600.000	90	21.600.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Semboro		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100	168.420.000	94.33	132.009.901	kegiatan Senam Setiap Hari Jum'at Tidak Dilaksanakan Karena Pandemi Covid-19	anggaran Digeser Untuk Kegiatan Lain Pada Papbd 2020 Dan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran 2021	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat pemenuhan jasa telepon, listrik dan internet	100	38.400.000	100	14.637.901	Dalam Penganggaran Listrik Menggunakan Acuan Listrik 10.600 Kwh, Sedangkan Penggunaan Pada Tahun 2020 Masih Menggunakan Listrik 4.400 Kwh.	Dianggarkan Kembali Untuk Tahun Berikutnya, Dan Menggunakan Listrik 10.600 Kwh. Untuk Listrik 4.400 Kwh Dicaput.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Presentase tingkat pemenuhan ATK untuk pelayanan	100	14.968.000	100	14.950.000	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan Honorarium dan belanja barang dan jasa	100	115.052.000	84.84	102.422.000	Pada Masa Pandemi Covid-19 Kegiatan Senam Setiap Hari Jumlah Ditiadakan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dikurangi.	Pengiriman Data Adminkur Melalui Online Dan Offline, Dan Anggaran Dari Kegiatan Tersebut Yang Tidak Terserap Akan Digeser Dan Digunakan Untuk Anggaran Lain Pada Saat Papbd	
4.01.2		Kecamatan Semboro		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100	32.460.000	100	31.210.000	pengadministrasian Struk Pengisian Bbm Yang Kurang Tertib, Sehingga Ada Beberapa Struk Yang Hilang Atau Lupa Tidak Meminta Struk Pada Saat Pembelian.	pengajuan Disesuaikan Dengan Struk Bbm Yang Ada.	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah mobil jabatan yang mendapatkan perawatan	1	25.380.000	1	24.380.000	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan perawatan	1	7.080.000	1	6.830.000	-	-	
4.01.32		Kecamatan Semboro	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100	166.120.000	90.52	146.195.000	adanya Keterlambatan Administrasi Setelah Kegiatan Terlaksana	sebelum Melaksanakan Kegiatan Dipersiapkan Segala	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Kecamatan						Sehingga Terjadi Keterlambatan Dalam Pencairan Anggaran. pandemi Covid-19 Mengakibatkan Beberapa Kegiatan Diatarnya Rapat Koordinasi Dan Peringatan Hari Besar Nasional Tidak Dilaksanakan.	Administrasi Yang Diperlukan, Sehingga Setelah Selesai Kegiatan Segala Administrasi Sudah Selesai Secara Keseluruhan. anggaran Digeser Dan Dipergunakan Untuk Kegiatan Lain Pada Papbd 2020 Dan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran 2021	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	terlaksananya rakor tingkat kecamatan dan sosialisasi	100	10.800.000	83.33	9.000.000	Pada Triwulan Iv Masih Dalam Masa Pandemi Covid-19 Sehingga Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ditiadakan.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Dikurangi Dan Hanya Menghadirkan Tidak Lebih Dari 50 Orang, Dan Wajib Melaksanakan Protokol Kesehatan	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	terlaksananya musrendang dan pelatihan kader PKK	100	16.300.000	87.64	10.475.000	Pada Masa Pandemi Covid-19, Kegiatan Yang Terlaksana Hanya Kegiatan	Hanya Melaksanakan Kegiatan Pertemuan Rutin Pkk Yang Hanya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Pertemuan Rutin Pkk, Kegiatan Sosialisasi Tidak Dilaksanakan	Menghadirkan Wakil Kader Pkk Setiap Desa Sehingga Tidak Melebihi Batas Maksimal Jumlah Orang Dalam Satu Kegiatan, Untuk Anggaran Yang Tidak Terserap Akan Digeser Dan Dipergunakan Untuk Kegiatan Lainnya Pada Saat Papbd	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	terbayarnya honor uang lembur Banpol PP dan penyelenggaraan upacara hari besar nasional	100	139.020.000	98	126.720.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Semboro	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	33.000.000	100	32.600.000	pandemi Covid-19 Mengakibatkan Pelayanan Adminduk Di Tingkat Kabupaten Tidak Optimal Dan Mengakibatkan Tidak Diserapnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Secara Penuh.	dilakukan Pergeseran Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Dipergunakan Untuk Kegiatan Lainnya Pada Saat Penyusunan Papbd 2020.	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	persentase terwujudnya pelayanan umum di kecamatan	100	33.000.000	100	32.600.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1		Kecamatan Sumberbaru		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	98	170.290.000	83	134.222.756	Adanya Efisien Pembayaran Listrik Telpun Sehingga Mempengaruhi Besarnya Penyerapan Anggaran	Dalam Merencanakan / Mengitung Kinerja / Anggaran Lebih Teliti Lagi Sehingga Target Dapat Dicapai Dengan Maksimal	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase pemenuhan dasar operasional kantor	100	170.290.000	90	134.222.756	-	-	
4.01.2		Kecamatan Sumberbaru		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi	98	42.975.000	95	42.589.500	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Layak Pakai	1	21.500.000	1	21.480.000	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Layak Pakai	2	11.975.000	2	11.609.500	-	-	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Persentase Jumlah Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan Komputer yang dipelihara	100	9.500.000	100	9.500.000	-	-	
4.01.32		Kecamatan Sumberbaru	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100	169.275.000	97	126.775.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rakor Tingkat Kecamatan	12	15.300.000	6	3.900.000	Karena Masih Pandemi Corona Pelaksanaan Rakor Kurang Maksimal	Untuk Kegiatan - Kegiatan Yang Mendesak Dikoordinasikan Dengan Menggunakan Komunikasi Hp	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rakor Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos (Musrenbang dan PKK)	15	35.325.000	14	26.875.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah bulan terlaksananya pengamanan ketertiban umum	12	118.650.000	12	96.000.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Sumberbaru	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	98	17.460.000	92	17.460.000	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan umum yang di proses	98	17.460.000	90	17.460.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Bangsalsari		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentasi Terlaksananya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	100	213.380.000	66.26	196.970.340	kegiatan Sesuai Target	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100	213.380.000	96.59	196.970.340	Kegiatan Sesuai Target	-	
4.01.2		Kecamatan Bangsalsari		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Tugas	100	20.300.000	66.82	16.859.831	minimnya Kerusakan Mobil Jabatan	penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					dan Pelayanan							
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor yang terlaksana	100	5.000.000	98	4.825.000	Kinerja Sesuai Target Kinerja	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan yang terlaksana	100	11.500.000	74.52	8.570.000	Minimnya Kerusakan Mobil Jabatan	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	100	3.800.000	91.18	3.464.831	Kegiatan Sedah Dilaksanakan Sesuai Target	-	
4.01.3		Kecamatan Bangsalsari		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Kinerja dan standart Pelayanan Minimal aparaturn Kecamatan	100	18.120.000	25.66	0	kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Dikarenakan Wabah Covid 19	penyesuaian Anggaran Peringatan Dan Upacara Hari Hari Besar Nasional Di Tahun Berkiutnya	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Prosentase Terselenggaranya Peringatan dan Upacara Hari Hari Besar Nasional	100	18.120.000	0	0	Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Dikarenakan Wabah Covid 19	Penyesuaian Anggaran Peringatan Dan Upacara Hari Hari Besar Nasional Di Tahun Berkiutnya	
4.01.32		Kecamatan Bangsalsari	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bangsalsari	100	102.000.000	67.65	102.000.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Prosentasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100	3.000.000	100	3.000.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Prosentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	100	99.000.000	100	99.000.000	Kinerja Sesuai Target	-	
4.01.33		Kecamatan Bangsalsari	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pemeliharaan kondisi sarana E-KTP dan administrasi kependudukan lainnya demi tercapainya tertib administrasi kependudukan	100	46.200.000	67.97	43.100.000	Kegiatan Pelayanan Umum / Sarana E-Ktp Dan Administrasi Kependudukan Lainnya Demi Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan Tidak Berjalan Maksimal Dikarenakan Covid 19	penyesuaian Anggaran Pelayanan Umum Di Tahun Berikutnya	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Prosentase Pemeliharaan kondisi sarana E-KTP dan administrasi kependudukan lainnya demi tercapainya tertib administrasi kependudukan	100	46.200.000	84.18	43.100.000	Kegiatan Pelayanan Umum / Sarana E-Ktp Dan Administrasi Kependudukan Lainnya Demi Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan Tidak Berjalan Maksimal Dikarenakan Covid 19	Penyesuaian Anggaran Pelayanan Umum Di Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1		Kecamatan Kencong		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0	114.905.000	35.37	104.390.565			
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Penyediaan honorarium dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	100	114.905.000	90.85	104.390.565	-	-	
4.01.2		Kecamatan Kencong		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	39.515.000	39.57	27.250.900			
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan camat	100	22.900.000	85.23	19.518.000	Tidak Bisa Maksimal Dikarenakan Situasi Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya.	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	100	16.615.000	46.54	7.732.900	Pelaksanaan Kegiatan Tidak Bisa Maksimal Dikarenakan Situasi Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya.	
4.01.3		Kecamatan Kencong		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0	13.050.000	0	5.650.000			
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional	100	13.050.000	43.3	5.650.000	Pelaksanaan Kegiatan Tidak Maksimal Dikarenakan Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya.	
4.01.32		Kecamatan Kencong	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik	100	192.630.000	100	154.825.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			araan pemerintah an Wilayah Kecamatan									
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi	100	9.600.000	100	9.150.000	-	-	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Musrenbang dan pelatihan kader PKK	100	37.930.000	56.36	24.475.000	Pelaksanaan Kegiatan Tidak Bisa Maksimal Dikarenakan Situasi Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya.	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Tersedianya satuan keamanan dimasing masing desa dan dusun	100	145.100.000	69.4	121.200.000	Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Maksimal Dikarenakan Situasi Pandemi Covid-19	Penyesuaian Anggaran Di Tahun Berikutnya.	
4.01.33		Kecamatan Kencong	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah an wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan E-KTP	0	39.900.000	0	38.850.000			
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Tersedianya Sarana E-KTP ditingkat kecamatan	100	39.900.000	97.37	38.850.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Gumukmas		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	98	172.004.000	75	152.474.900			
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin	Jumlah bulan pembayaran	12	172.004.000	12	152.474.900	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Kantor/Kedinasan	honorarium pengelola keuangan, barang & jasa serta kebutuhan administrasi & operasional rutin kantor							
4.01.2		Kecamatan Gumukmas		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	98	39.713.000	75	27.617.000	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah bulan perawatan mobil dinas	12	23.517.000	12	18.932.000	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan operasional kecamatan	12	16.196.000	12	8.685.000	-	-	
4.01.3		Kecamatan Gumukmas		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin	0	4.850.000	0	0	Tidak Melaksanakan Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dikarenakan Dalam Pandemi Covid-19		
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	-	0	4.850.000	0	0	-	-	
4.01.32		Kecamatan Gumukmas	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di	0	164.913.000	100	157.513.000	- Target 70 Orang Peserta, Sedangkan Pelaksanaan 106 Orang Peserta Ada Kelebihan 36 Orang	- Karena Banyak Permasalahan Diwilayah Maka Perlu Dikoordinasikan Dengan Berbagai Pihak	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			pemerintah an Wilayah Kecamatan		wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti					- terkendala Dengan Kegiatan Penyampaian Bantuan Covid-19	- tidak Bisa Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Maksimal	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah peserta rapat dengan muspika, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat	70	8.400.000	70	5.600.000	Target 70 Orang Peserta, Sedangkan Pelaksanaan 106 Orang Peserta Ada Kelebihan 36 Orang	Karena Banyak Permasalahan Diwilayah Maka Perlu Dikoordinasikan Dengan Berbagai Pihak	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat-rapat penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	10	20.763.000	9	17.913.000	Terkendala Dengan Kegiatan Penyampaian Bantuan Covid-19	Tidak Bisa Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Maksimal	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Linmas yang dibina	56	135.750.000	56	134.000.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Gumukmas	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan an wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	-	0	18.520.000	97	8.745.000	Pelayanan Menurun Karena Dampak Pandemi Covid - 19	Semoga Di Tahun 2021 Pandemi Covid-19 Segera Berakhir	
4.01.				Koordinasi Pelayanan	Jumlah pelayanan	8500	18.520.0	8245	8.745.00	Pelayanan	Semoga Di Tahun	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
33.1				Umum	masyarakat yang dilayani		00		0	Menurun Karena Dampak Pandemi Covid - 19	2021 Pandemi Covid-19 Segera Berakhir	
4.01.1		Kecamatan Umbulsari		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memenuhi Kebutuhan sarana pendukung oprasional Kantor	100	151.554.800	95.31	115.894.985	-	-	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jenis dan jumlah pemenuhan kebutuhan air, listrik kantor	100	19.200.000	100	17.306.402	Nihil	Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memenuhi Kebutuhan Sarana Pendukung Operasional Kantor	100	23.502.800	100	23.392.583	Nihil	Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase jenis dan jumlah pemenuhan dasar penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	100	108.852.000	100	75.196.000	Adanya Dampak Covid Menyebabkan Anggaran Rapat-Rapat Tidak Bisa Menyerap Dengan Maksimal	Akan Di Tingkatkan Penyerapan Di Tahun Depan	
4.01.2		Kecamatan Umbulsari		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien	100	31.235.200	99.54	30.365.566	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan sesuai standar	100	26.235.200	100	25.640.566	Nihil	Berjalan Sesuai Keadaan Yang Direncanakan	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer	100	5.000.000	100	4.725.000	Nihil	Berjalan Sesuai Rencana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.32		Kecamatan Umbulsari	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Memenuhi penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan	98	187.210.000	98	171.660.000	-	-	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase ketersediaan jumlah dokumen serta kelembagaan pengarusutamaan gender anak yang dapat difasilitasi	100	16.810.000	100	16.810.000	Nihil	Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase jumlah Satlinmas terbentuknya dan terlatih dengan baik	100	170.400.000	100	154.850.000	Nihil	Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.33		Kecamatan Umbulsari	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Terwujudnya pelayanan umum	98	30.000.000	98	30.000.000	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase jumlah surat rekomendasi, pengesahan, legalisasi dokumen kependudukan yang berhasil terlayani	100	30.000.000	100	30.000.000	Nihil	Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana	
4.01.1		Kecamatan Puger		Program Pelayanan Administrasi	Prosentase pemenuhan sarana	90	167.135.000	83.91	146.541.416	dana Listrik Ada Yg Belum	-Tahun Berikutnya Akan Dikurangi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Perkantoran	prasarana aparatur yang profesional					Terserab Karna Terlalu Besar Pagunya Sehingga Tidak Bisa Terserab Semua...	Pagunya	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90	42.000.000	90	26.751.916	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan	90	125.135.000	90	119.789.500	-	-	
4.01.2		Kecamatan Puger		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90	26.900.000	82.56	23.202.000	Tidak Ada Masalah	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	90	13.900.000	90	12.802.000	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90	13.000.000	67.69	10.400.000			
4.01.32		Kecamatan Puger	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan an Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	90	190.965.000	81.38	147.070.000	ada Kegiatan Yg Tidak Bisa Dilaksanakan Karna Pandemi Convid 19 /corona ..karna Dalam Kegiatan Itu Sifatnya Mengumpulkan Orang ..yaitu	- Semoga Corona Cepat Minggat	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Rakor Dan Upacara 17 San		
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	90	6.800.000	0	0	Kegiatan Rapat Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Pandemi Korona	Rakor Akan Dilaksanakan Tahun Berikutnya	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	90	32.390.000	90	24.070.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	90	151.775.000	90	123.000.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Puger	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang tertib sesuai dengan SP dan SOP	95	15.000.000	82.94	13.240.000	Tidak Ada Masalah	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	95	15.000.000	95	13.240.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Jombang		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	138.970.000	30	123.725.844	kinerja Dan Penyerapan Sesuai Dengan Target Yang Ditentukan Meskipun Situasi Pandemi Covid 19 tetap Mengedepankan	capaian Kinerja Dan Penyerapan Yang Baik Ini Akan Menjadi Motivasi Dan Semangat Untuk Mempertahankan Sekaligus Berupaya Untuk	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Semangat Melayani Dengan Penerapan Protokol kesehatan Covid 19 Di Era New Normal	Meningkatkan Capaian Kinerja Dan Penyerapan Anggarannya Di Tahun Berikutnya.	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Terpenuhinya administrasi dan operasional rutin kantor kedinasan	100	138.970.000	94	123.725.844	-	-	
4.01.2		Kecamatan Jombang		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	100	35.300.000	40	27.654.399	program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Tidak Bisa Berjalan Secara Maksimal Karena Situasi Pandemi Covid-19 Sehingga Dari Pagu Anggaran rp. 35.300.000,00 Hanya Terealisasi Rp. 27.654.399,00 Atau 78,34 %•	capaian Kinerja Dan Penyerapan Yang Belum Maksimal Karena Situasi Pandemi Covid-19 Akan Menjadi Perhatian Untuk Perbaikan Dan Peningkatan Capaian Kinerja Ditahun Berikutnya Dengan Penerapan Protokol Kesehatan	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya mobil jabatan yang representatif	100	28.950.000	93	23.534.399	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya mobil operasional yang representatif	100	6.350.000	75	4.120.000	Beberapa Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Dengan Maksimal Karena Situasi Pandemi Covid 19	akan Dilaksanakan Kembali Secara Optimal Pada Tahun Berikutnya Akan Dilaksanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.32		Kecamatan Jombang	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi di bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	197.980.000	25	161.448.000	1. Ketersediaan Sumberdaya Manusia (sdm) Yang Terbatas Sehingga Kegiatan Tidak Berjalan Secara Optimal 2. Beberapa Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Yang Bersifat Tatap Muka, Kerumunan Massa Sehingga Anggaran Tidak Bisa Diserap Karena Pandemi Covid '19 Dan Kegiatan Lain Yang Terlaksana Dilakukan Secara Virtual Dan Pertemuan Secara Terbatas Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19	capaian Kinerja Dan Penyerapan Yang Cukup Baik Ini Akan Menjadi Motivasi Dan Semangat Untuk Lebih Ditingkatkan ditahun Berikutnya Baik Capaian Kinerja Maupun Penyerapan Anggarannya Dengan Mengoptimalkan Kinerja Sumberdaya Manusia Yang Ada Serta tetap Menyesuaikan Situasi Pandemi Covid 19 Di Era New Normal	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Rakor tingkat kecamatan dan pembinaan perangkat desa	100	3.918.000	63	1.306.000	Ketersediaan Sumberdaya Manusia (sdm) Sehingga	Mengoptimalkan Kinerja Sumberdaya Manusia Yang	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan Tidak Berjalan Secara Optimal	Ada	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100	16.142.000	100	16.142.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Terealisasinya Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa	100	177.920.000	88	144.000.000	Beberapa Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Yang Bersifat Tatap Muka, Kerumunan Massa Sehingga Anggaran Tidak Bisa Diserap Karena Pandemi Covid 19 Dan Kegiatan Lain Yang Terlaksana Dilakukan Secara Virtual Dan Pertemuan Secara Terbatas Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19	Akan Dilaksanakan Kembali Secara Optimal Pada Tahun Berikutnya	
4.01.33		Kecamatan Jombang	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang tertibkan sesuai dengan SP dan SOP	100	27.750.000	35	27.370.000	para Petugas Pelayanan Umum Lebih Berhati-Hati Dalam	akan Lebih Ditingkatkan Baik Kinerja Maupun Penyerapan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			Pemerintah an wilayah Kecamatan							Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Karena Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19	Anggarannya Di Tahun Berikutnya Dan Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19.	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Tersedianya sarana pelayanan e-KTP dan administrasi kependudukan lainnya di Tingkat Kecamatan 1 Tahun	100	27.750.000	99	27.370.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Balung		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	200.320.000	83	166.439.335	Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Ini Sudah Berjalan Akan Tetapi Kurang Maksimal Karena Kurangnya Persyaratan Administrasi Untuk Pelaksanaan Kegiatan.	perencanaan Program/kegiatan Tahun Berikutnya Disesuaikan Dengan Kebutuhan, Baik Kinerja Maupun Anggarannya.	
4.01.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Pembayaran honor tenaga kebersihan dan fulltimer PKK	12	10.800.000	12	10.800.000	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor	100	189.520.000	82	155.639.335	Kurangnya Persyaratan Administrasi Untuk Pelaksanaan Kegiatan	Mencukupi Kekurangan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan	
4.01.		Kecamatan		Program Peningkatan	Presentase Sarana	100	31.300.0	96	30.761.5	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2		Balung		Sarana dan Prasarana Aparatur	dan prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi		00		23			
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang layak pakai/terpelihara	100	20.800.00	99	20.699.452	Kegiatan Terlaksana Sesuai Target	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang di perbaiki	100	10.500.00	95	10.062.071	Kegiatan Telah Terlaksana Sesuai Kebutuhan	-	
4.01.32		Kecamatan Balung	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	116.735.000	96	92.018.000	Program Dan Kegiatan Ini Sudah Berjalan Akan Tetapi Ada Beberapa Kegiatan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Adanya pandemi covid-19.	perencanaan Program/kegiatan Tahun Berikutnya Akan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Baik Kinerja Atau Anggarannya.	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rakor Seksi Pemerintahan	100	4.900.000	99	4.900.000	Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai Target	-	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100	24.425.000	86	20.748.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Karena Adanya Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Diusulkan Dan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Rakor seksi Ketertiban dan keamanan	100	87.410.000	76	66.370.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Karena Adanya Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Diusulkan Dan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
4.01.33		Kecamatan Balung	Meningkatkan kualitas	Program Penyelenggaraan	Persentase pelayanan yang diterbitkan	100	51.645.000	93	48.150.485	Program Dan Kegiatan	Perencanaan Program/kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Pelayanan Umum Kecamatan	sesuai dengan SP dan SOP					Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Ini Sudah Berjalan Akan Tetapi Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Karena Terkendala Adanya Pandemi Covid 19.	Tahun Berikutnya Disesuaikan Dengan Tingkat Kebutuhan Baik Kinerja Maupun Anggarannya	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses	100	51.645.000	93	48.150.485	-	-	
4.01.1		Kecamatan Wuluhan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran	100	161.175.000	100	159.570.186	Keterbatasan Sarana Prasarana Sehingga Kurang Bisa Memberikan Kepuasan Yang Maksimal Untuk Masyarakat.	1. Memanfaatkan Sarana Yang Ada Semaksimal Mungkin Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik. 2. Mengupayakan Penambahan Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pemenuhan dasar kebutuhan kantor	100	161.175.000	100	159.570.186	Kegiatan Telah Dilaksanakan, Namun Anggaran Untuk Jasa Listrik Tidak Dapat Terpenuhi	Menyampaikan Permintaan Bantuan Dibayarkan Tagihan Jasa Listrik Kepada Ketua Tim Anggaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Kabupaten Jember,	
4.01.2		Kecamatan Wuluhan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100	43.130.00	100	42.709.900	Usia Kendaraan Yang Sudah Mulai Tua Sehingga Memerlukan Perawatan Ekstra	Perawatan Rutin Harus Sesuai Standard	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Kerja yang nyaman dan bersih	100	7.000.000	100	6.890.000	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase Tingkat pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Mobil Jabatan sesuai standart	100	23.705.000	100	23.450.900	Tidak Ada Masalah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ini	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Tingkat Pemenuhan dan pemeliharaan Kendaraan Operasional sesuai standart	100	12.425.000	100	12.369.000	Tidak Ada Masalah Dalam Pelaksanaan Kegiatan	-	
4.01.3		Kecamatan Wuluhan		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur	100	27.100.000	98	2.300.000	Keterbatasan Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Khusus	Membatasi Jumlah Petugas Yang Mengenakan Pakaian Khusus	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase tingkat disiplin Aparatur dalam berseragam	100	27.100.000	10	2.300.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Terdapat Pembatasan Kerumunan	Kegiatan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.32		Kecamatan Wuluhan	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ (APBDes sesuai dengan Pedum)	100	136.800.000	100	115.350.000	Koordinasi Secara Formal Sudah Bisa Berjalan Sesuai Target, Namun Diperlukan Koordinasi Lanjutan Tingkat Teknis.	Dilaksanakan Upaya-Upaya Koordinasi Teknis Untuk Lebih Meningkatkan Target Kinerja	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	% Rekomendasi hasil koordinasi dibidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	5.725.000	100	1.475.000	-	-	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	% Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan kessos yang ditindaklanjuti	100	29.675.000	40	14.875.000	Rencana Kegiatan Tidak Berjalan, Dikarenakan Terdapat Pembatasan Kerumunan	Kegiatan Dimaksimalkan Ketika Keadaan Normal	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	% Rekomendasi hasil koordinasi dibidang ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	101.400.000	100	99.000.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Wuluhan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	% tingkat pemenuhan dokumen administrasi kependudukan yang dilayani kecamatan	100	31.795.000	100	31.795.000	1. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Sehingga Kurang Bisa Memberikan Kepuasan Yang Optimal Kepada Masyarakat. 2. Keterbatasan Kewenangan Sehingga Kurang	1. Memanfaatkan Sarana Dan Prasarana Yang Ada Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat. 2. Selalu Berkoordinasi Dengan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Bisa Memberikan Kepastian Dalam Memberikan Pelayanan.	Stakeholder Lain Untuk Lebih Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	% tingkat capaian dan tertib masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan	100	31.795.000	100	31.795.000	Tidak Ada Masalah Dalam Pelaksanaan Kegiatan	-	
4.01.1		Kecamatan Ambulu		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran	100	155.345.000	100	127.478.500	penyerapan Anggaran Kurang Maksimal Terkendala Adanya Pandemi Covid-19.	program Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.01.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	9.000.000	100	9.000.000	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase Tersedianya Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100	146.345.000	100	118.478.500	-	-	
4.01.2		Kecamatan Ambulu		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas dan pelayanan	100	49.600.000	100	43.559.100	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100	35.600.000	100	34.293.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	14.000.000	100	9.266.100	-	-	
4.01.3		Kecamatan Ambulu		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2018	100	33.045.000	0	0	Program Tidak Terlaksanakan Di Karenaan Terkendala Pandemi Covid-19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
4.01.3.5				Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Prosentase Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2019	100	33.045.000	0	0	Kegiatan Tidak Bisa Direalisasikan Terkendala Pandemi Covid-19	Akan Dianggarkan Kembali Di Tahun Selanjutnya, Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.32		Kecamatan Ambulu	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase koordinasi dan monev tingkat kecamatan	100	135.850.000	93.75	117.250.000	pencapaian Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Tidak Maksimal Karena Terkendala Adanya Pandemi Covid-19 Sehingga Ada Beberapa Program/kegiatan Yang Tidak Bisa Dilaksanakan Dengan Baik.	akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan dengan	100	10.000.000	85	8.250.000	1 (satu) Kegiatan Rakor Tidak Terealisasi Di Karenaan Pandemi Covid-19	Akan Dianggarkan Kembali Di Tahun Selanjutnya Dengan Target Minimal Sama	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					baik						Dengan Tahun 2020	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Presentase terlaksananya Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan dengan Baik	100	19.700.000	90	16.450.000	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Presentase Tersedianya Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	100	106.150.000	100	92.550.000	-	-	
4.01.33		Kecamatan Ambulu	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Presentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	26.160.000	100	26.160.000	-	-	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Presentase Terwujudnya Pelayanan Umum di Kecamatan	100	26.160.000	100	26.160.000	-	-	
4.01.1		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	905.336.500	77.65	530.831.237	Sudah Sesuai Dengan Tupoksi Tapi Masih Perlu Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni Dan Sarana Prasarana Yang Memadai	Penambahan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100.000.000	100	64.640.762	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan Kebersihan Kantor	100	18.600.000	100	17.698.395	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Kantor Lancar	100	48.000.000	100	17.901.338	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Kantor lancar	100	39.800.000	100	18.487.500	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik	100	5.705.000	100	2.074.000	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/majalah dan iklan	100	7.200.000	100	4.300.000	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman karyawan	100	149.957.500	100	44.489.170	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pejalanan Dinas ke Luar Daerah	100	155.310.000	80	53.180.106	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Tenaga Honorer/sukuhan	100	109.800.000	100	85.798.587	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dalam Daerah dengan Lancar	100	52.000.000	80	49.970.000	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Penyediaan Peralatan dan bahan operasional kebersihan kantor	100	15.000.000	100	7.094.589	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Terpenuhinya honor administrasi pengelola keuangan	100	203.964.000	100	165.196.790	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.2		Badan Kesatuan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100	273.516.000	66.48	74.650.006	Sudah Sesuai Dengan Tupoksi	Penambahan Sumber Daya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Bangsa Dan Politik		Aparatur	Aparatur					Tapi Masih Perlu Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni Dan Sarana Prasarana Yang Memadai	Manusia Dan Sarana Prasarana	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor.	100	1.200.000	0	0	Belum Membayar Tagihan Un Tuk Pembayaran Sewa Lahan Parkir Di Atas Aliran Sungai Karena Surat Ijin Untuk Tahun Yang Sebelumnya Masih Dalam Proses Di Dinas Dumptsp	Menunggu Proses Ijin Selesai	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pengadaan kendaraan dinas jabatan	100	47.013.300	100	15.387.751	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Servis, suku cadang, BBM dan pelumas	100	187.350.000	100	42.155.939	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	100	37.952.700	44	17.106.316	Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan		
4.01.1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	721.434.100	80.34	579.631.681			
4.01.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pelayanan surat menyurat	100	3.450.000	100	3.450.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya listrik	100	92.400.00	74.81	65.542.594	Adanya Anggaran Internet Yang Tidak Terpakai Karena Sudah Di Tangani Oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi	Mengoptimalkan Perencanaan Anggaran Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada	
4.01.1.6				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilegalisasi STNK dan pembayaran pajak KB	22	27.750.00	8	8.048.600	Tidak Dilaksanakannya Perpanjangan Surat-Surat Kendaraan Karena Terkendalanya Proses Administrasi	Akan Dilaksanakan Pada Tahun Berikutnya	
4.01.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembayaran pengadaan ATK	100	30.000.00	99.77	29.931.000	-	-	
4.01.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	100	25.000.00	97.91	24.476.350	Adanya Refokusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Akibat Dari Dampak Pandemi Covid 19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan sarana kelistrikan	100	7.000.000	99.9	6.993.250	Adanya Refokusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Akibat Dari Dampak Pandemi Covid 19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.				Penyediaan Makanan	jumlah pengadaan	100	144.220.	94.58	136.406.	Adanya	Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.17				dan Minuman	makan dan minuman sehat karyawan		000		550	Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Akibat Dari Dampak Pandemi Covid 19	Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	100	150.000.000	76.5	114.747.059	Adanya Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Akibat Dari Dampak Pandemi Covid 19 Sehingga Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Sebagian Banyak Batalan	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	100	33.534.100	43.26	13.090.000	Sppd Dalam Daerah Pada Kegiatan Ini Hanya Sebagai Cadangan Dari Kegiatan Bidang-Bidang Sehingga Capaian Kinerja Tidak Maksimal Karena Sppd Dalam Daerah Bidang-Bidang Sebagian Sudah Terpenuhi	Mengoptimalkan Kinerja Dan Kebutuhan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	
4.01.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	100	5.000.000	99.92	4.996.118	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pengelola organisasi keuangan dan pengadaan barang dan jasa	100	203.080.000	84.67	171.950.160	Tidak Terealisasinya Anggaran Honor Tim Pengadaan Barang Karena Tidak Ada Pengadaan Yang Melalui Proses Lelang	Mengoptimalkan Kinerja Dan Kebutuhan Anggaran Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada	
4.01.2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai	8	485.262.400	83.94	407.321.681			
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	29	312.900.000	27	292.968.667	-	-	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2	10.000.000	1	9.446.250	Realisasi Gedung Kantor Yang Dipelihara Tidak Keseluruhan. Pagu Anggaran Kegiatan Di Refokusing Akibat Dari Dampak Pandemi Covid 19	Akan Dianggarkan Kembali Pada Anggaran Berikutnya Minimal Dengan Target Yang Sama Dengan Tahun 2020	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1	102.362.400	1	68.800.587	Adanya Efisiensi Sehingga Penyerapan Anggaran Menyesuaikan Dengan Anggaran	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Pagu Anggaran Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Kegiatan Ini Di	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Tahun Depan	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1	60.000.000	1	36.106.177	Adanya Efisiensi Sehingga Penyerapan Anggaran Menyesuaikan Dengan Anggaran	Akan Di Anggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Pagu Anggaran Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Kegiatan Ini Di Tahun Depan	
4.01.1		Kecamatan Kaliwates		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional perangkat daerah	100	843.557.500	100	738.415.294	Pada Dasarnya Program Dan Kegiatan Ini Sudah Berjalan , Tetapi Banyak Kegiatan Yang Tidak Bisa Dilaksanakan Dan Serapan Anggaran Tidak Maksimal Karena Terkendala Pandemi Covid 19 Untuk Kecamatan Dan 7 Kelurahan Se Kecamatan Kaliwates	Semua Program Dan Kegiatan Menyesuaikan Urgensi Kebutuhan Yang Menjadi Skala Prioritas	
4.01.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Peralatan Kerja	100	25.200.000	92	25.200.000	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	100	818.357.500	95	708.215.294	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.2		Kecamatan Kaliwates		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	100	66.140.000	100	57.078.500	Pada Dasarnya Program Ini Sudah Berjalan Secara Maksimal, Realisasi Belanja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Kantor Kecamatan Kaliwates Dan 7 Kelurahan Se Kecamatan Kaliwates	semua Program Dan Kegiatan Menyesuaikan Urgensi Kebutuhan Yang Menjadi Skala Prioritas	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	100	26.200.000	98	24.820.000	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	100	39.940.000	93	32.258.500	-	-	
4.01.32		Kecamatan Kaliwates	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100	6.560.268.500	100	1.991.793.200	Pada Program Ini Ada 4 Kegiatan Yang Dilaksanakan, Semuanya Berjalan Lancar Hanya Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Pandemi Covid 19	Untuk Program Dan Kegiatan Tahun Yang Akan Datang Diusahakan Pelaksanaannya Disesuaikan Dengan Skala Prioritas.	
4.01.				Koordinasi	Jumlah peserta rapat	3864	1.791.36	3690	1.777.21	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
32.1				Penyelenggaraan Pemerintahan	dengan muspika, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat dan Jumlah ketua RT dan RW yang dibina		0.000		5.000			
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah pelaksanaan musrenbang, kegiatan PKK dan peserta peringatan hari besar Islam dan senam bersama	1068	163.492.500	1040	131.678.200	-	-	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah linmas yang dibina dan pelaksanaan trantibum	246	91.550.000	235	82.900.000	-	-	
4.01.32.4				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana masyarakat di Kelurahan	0	4.513.866.000	0	0	Kegiatan Yang Sifatnya Melibatkan Kerumunan / Mobilisasi Masyarakat Tidak Diperbolehkan Dengan Adanya Pandemi Covid 19	Kegiatan Akan Dilaksanakan Tahun Berikutnya Menyesuaikan Situasi Dan Kondisi	
4.01.33		Kecamatan Kaliwates	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	43.900.000	100	42.690.000	pada Dasarnya Program Dan Kegiatan Ini Sudah Berjalan Untuk Pelayanan Umum Kepada Masyarakat , Tetapi Banyak Kegiatan Yang Tidak Bisa Dilaksanakan Secara Maksimal Karena	semua Program Dan Kegiatan Menyesuaikan Urgensi Kebutuhan Yang Menjadi Skala Prioritas	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Terkendala Pandemi Covid 19 Untuk Kecamatan Dan 7 Kelurahan Se Kecamatan Kaliwates		
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan masyarakat yang dilayani	13200	43.900.000	12800	42.690.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Patrang		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	98	1.065.065.000	90	937.800.291	Target Kinerja Telah Dilaksanakan Sesuai Perencanaan, Akan Tetapi Penyerapan Belum Maksimal Dikarenakan Ada Beberapa Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Honor Untuk Penerimaannya Ada Yang Meninggal Dan Pindah Dan Juga Untuk Penyerapan Anggaran Internet Sudah Dicover Pihak Diskominfo	Untuk Tahun Depan Akan Lebih Disesuaikan Dengan Perencanaan.	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	jumlah pemenuhan dasar operasional kantor	100	1.065.065.000	88.05	937.800.291	Secara Keseluruhan Tidak Ada Masalah Dalam Penyerapan Untuk Triwulan Iv Untuk Beberapa Sub	Untuk Perencanaan Anggaran Di Tahun Depan Akan Lebih Menyesuaikan Dengan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan Tidak Terserap Sepenuhnya Dikarenakan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Ada Di Tahun Ini	Kebutuhan	
4.01.2		Kecamatan Patrang		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana prasarana dengan kondisi layak fungsi	98	77.050.000	84.69	64.618.500	Untuk Penyerapan Pemeliharaan Anggaran Mobil Jabatan, Mobil Operasional Maupun Pemeliharaan Alat Kantor Dan Komputer Belum Maksimal Dikarenakan Disesuaikan Dengan Pemakaian Dan Tingkat Kerusakan.	Tahun Depan Akan Lebih Disesuaikan Dengan Kebutuhan.	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	prosentase pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang terealisasi	100	21.500.000	80.23	17.248.000	Secara Keseluruhan Tidak Ada Masalah Dalam Penyerapan Untuk Triwulan Iii Dikarenakan Disesuaikan Dengan Kondisi Kebutuhan Kendaraan	Untuk Perencanaan Anggaran Tahun Depan Akan Lebih Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	prosentase pemeliharaan	100	25.550.000	80.37	20.534.500	Untuk Penyerapan Anggaran Dan	Untuk Perencanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Dinas/Operasional	rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional yang terealisasi					Kinerja Pada Triwulan I/ Disesuaikan Dengan Kondisi Kendaraan Dan Tingkat Kerusakan Kendaraan	Anggaran Tahun Depan Akan Lebih Disesuaikan	
4.01.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer yang terealisasi	100	30.000.000	89.46	26.836.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Riil Di Lapangan. Sehingga Anggaran Kas Yang Telah Ditetapkan Akan Disesuaikan Sesuai Dengan Tingkat Kerusakan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Perencanaan Anggaran Tahun Depan Akan Lebih Disesuaikan Dengan Kebutuhan	
4.01.32		Kecamatan Patrang	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	95	6.932.964.000	23.47	1.594.104.250	Target Kinerja Telah Dilaksanakan Sesuai Perencanaan Akan Tetapi Untuk Penyerapan Anggaran Masih Belum Maksimal Dikarenakan Utk Honor Rtrw,	Untuk Tahun Depan Akan Lebih Disesuaikan Dengan Kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Honor Banpol Pp Ada Beberapa Yang Meninggal Dan Untuk Kegiatan Lainnya Hanya Masalah Efisiensi		
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi pemerintahan	62	1.427.500.000	4	1.358.152.250	Untuk Penyerapan Anggaran Dan Kinerja Pada Triwulan Iv Belum Sesuai Dengan Target Perencanaan Karena Terkendala Pandemi Covid-19	Untuk Kedepan Akan Disesuaikan Target Penyerapan Sesuai Dengan Perencanaan Yang Telah Ditetapkan	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rapat Koordinasi dan Pembinaan seksi PMKS	127	191.610.000	8	103.140.000	Penyerapan Anggaran Dan Kinerja Pada Triwulan Iv Belum Maksimal Dilaksanakan Karena Adanya Pandemi Covid-19	Untuk Penyerapan Anggaran Tahun Ini Belum Maksimal Dikarenakan Adanya Pandemi Covid 19, Yang Berimbas Akan Pembatasan Kegiatan Berkumpulnya Massa, Dan Pengurangan Jumlah Peserta Rapat Dan Kegiatan	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi ketertiban umum	18	155.150.000	3	132.812.000	Untuk Penyerapan Anggaran Kegiatan Di Triwulan Iv Belum	Untuk Penrencanaan Anggaran Kegiatan Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Maksimal Dikarenakan Kegiatan Terkendala Adanya Pandemi Covid 19	Lebih Disesuaikan Dengan Kondisi Di Lapangan	
4.01.32.4				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi ketertiban umum	0	5.158.704.000	0	0	Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan Iy Tidak Terlaksana	Tidak Adanya Juklak Dan Juknis	
4.01.33		Kecamatan Patrang	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	65.400.000	55.59	44.900.000	Target Kinerja Tercapai Sesuai Dengan Perencanaan Sedangkan Untuk Penyerapan Tidak Diserap Karena Belum Tercukupinya Proses Administrasi.	Tahun Depan Untuk Proses Administrasi Yang Kurang Akan Lebih Direncanakan Dengan Baik Agar Bisa Dilakukan Proses Penyerapan Anggaran	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	12000	65.400.000	12000	44.900.000	Untuk Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan Iy Belum Maksimal Dikarenakan Adanya Pandemi Covid 19	Perencanaan Anggaran Akan Lebih Disesuaikan	
4.01.6		Kecamatan Patrang		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	prosentase jumlah laporan yang tepat waktu	100	10.000.000	100	10.000.000	Target Kinerja Dan Penyerapan Keuangan Telah Dilaksanakan Sesuai Perencanaan.	--	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.6.5				Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Jumlah buku RKA dan RAPBD SKPD yang terealisasi	2	5.000.000	1	5.000.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Telah Direncanakan		
4.01.6.6				Penyusunan DPA SKPD	Jumlah buku DPA-SKPD yang terealisasi	2	5.000.000	1	5.000.000	Penyerapan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Telah Direncanakan		
4.01.8		Kecamatan Patrang		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	prosentase jumlah laporan yang tepat waktu	100	8.225.000	100	8.225.000	Target Kinerja Dan Penyerapan Keuangan Telah Dilaksanakan Sesuai Perencanaan.	--	
4.01.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah dokumen Renstra, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya yang terealisasi	2	8.225.000	2	8.225.000			
4.01.1		Kecamatan Sumbersari		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	534.435.000	100	507.552.164	Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sudah Berjalan Sesuai Kebutuhan Saan Ini Namun Masih Perlu Adanya Kebutuhan Yang Sebelumnya Belum Dianggarkan Dan Perlu Untuk Di Laksanakan.	Untuk Lebih Terpenuhinya Penunjang Kebutuhan Dasar Kantor Maka Perlu Adanya Penambahan Anggaran.	
4.01.				Penunjang Administrasi	Persentase	100	534.435.	95	507.552.	Capaian Kinerja	Kurang	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.27				dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	pemenuhan dasar operasional kantor		000		164	Sudah Berjalan Sesuai Dengan Target Sedangkan Untuk Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Target	Tercapainya Realisasi Menjadi Efisiensi Anggaran	
4.01.2		Kecamatan Sumbersari		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	100	108.700.000	100	89.446.438	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sudah Berjalan Sesuai Kebutuhan Dan Tidak Ada Kendala Dalam Pelaksanaannya.	Tidak Ada Masalah /nihil	
4.01.2.22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dirawat	8	21.000.000	8	21.000.000	Capaian Kinerja Sudah Sesuai Dengan Target Begitu Juga Dengan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai Target.	Nihil	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Layak Pakai	1	24.000.000	1	22.137.000	Capaian Kinerja Sudah Sesuai Dengan Target Sedangkan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai Target Namun Masih Efisiensi Anggaran	Tidak Ada Masalah/nihil	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Layak Pakai	9	60.300.000	9	42.909.438	Capaian Kinerja Sudah Sesuai Dengan Target Realisasi	Tidak Ada Masalah/nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Anggaran Belm Sepenuhnya Terserap Karena Adanya Efisiensi Anggaran		
4.01.2.35				Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor lainnya yang Dirawat	8	3.400.000	8	3.400.000	Capaian Kinerja Sudah Sesuai Dengan Target Begitu Juga Dengan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai Target	Tidak Ada Masalah/nihil	
4.01.32		Kecamatan Sumbersari	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase Rekomendasi Hasil ,KKoordinasi di bidang Pemerintahan,Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	98	6.598.031.000	90	2.065.820.000	Untuk Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kecamatan Yang Terdiri Dari 4 Kegiatan Yang 3 Kegiatan Sudah Berjalan Sesuai Dengan Kebutuhan/target .namun Untuk 1 Kegiatan Yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan Tidak Terserap Atau Tidak Sesuai	Kegiatan Yang Belum Mencapai Target Kedepan Diharapkan Untuk Lebih Dipersiapkan Baik Secara Tehnis Maupun Realisasinya.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dengan Target Karena Masih Kendala Dengan Belum Adanya Pentunjuk Tehnis Tentang Pelaksanaan Kegiatan Tersebut.		
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rakor Seksi Pemerintahan (Rutin dan Jumlah RT/RW yang dibina)	16	1.858.285.000	16	1.842.430.000	Capaian Kinerja Sudah Sesuai Dengan Target Begitu Juga Dengan Realisasi Anggaran Sdh Sesuai Target	Tidak Ada Masalah/nihil	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rakor Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos (Musrenbang dan PKK)	46	141.300.000	44	139.590.000	Capaian Kinerja Sdh Sesuai Dengan Target Begitu Juga Dengan Realisasi Anggaran Namun Masih Ada Efisiensi Anggaran	Tidak Ada Masalah /nihil	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah bulan terlaksananya pengamanan ketertiban umum	12	84.580.000	12	83.800.000	Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggran Sudah Sesuai Dengan Target	Tidal Ada Masalah/nihil	
4.01.32.4				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah MCK komunal yang di bangun untuk masyarakat	700	4.513.866.000	0	0	Capai Kenerja Tidak Sesuai Dengan Target Begitu Juga Dengan Realisasi Anggaran Karena Perencanaan	Perencanaan Tehnis Belum Ada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Tehnixx Belum Ada.		
4.01.33		Kecamatan Sumbersari	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang tertibkan sesuai dengan SP dan SOP	98	272.700.000	80	272.321.041	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Ditargetkan .	Tidak Ada Masalah.	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan umum yang di proses	100	272.700.000	100	272.321.041	Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai Dengan Target	Tidak Ada Maslah /nihil	
4.01.1		Kecamatan Arjasa		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100	229.310.000	96.24	177.394.348	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	% pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor-	100	229.310.000	90	177.394.348	Adanya Covid 19	Mentaati Prokes, Mencegah Kerumunan	
4.01.2		Kecamatan Arjasa		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100	41.090.000	80.92	37.175.500	-	-	
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	-% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan sesuai standart	100	27.240.000	90	25.480.000	-	-	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-% tingkat pemenuhan dan pemeliharaan kendaraan operasional sesuai standart	100	13.850.000	90	11.695.500	-	=	
4.01.32		Kecamatan Arjasa	Meningkatkan koordinasi pemerintah	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan	Persentase Rekomendasi Hasil ,KKoordinasi di bidang Pemerintahan,Pember	100	129.600.000	99.99	124.800.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			an dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Pemerintahan Wilayah Kecamatan	dayaan Masyarakat dan Kesos dan Ketentraman dan Ketertiban							
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	100	14.400.000	80	9.600.000	Adanya Covid 19	Membatasi Kegiatan Pkk	
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase kegiatan bidang ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	100	115.200.000	100	115.200.000	-	-	
4.01.1		Kecamatan Jelbuk		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	0	162.115.000	0	141.929.000	tidak Ada Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program	pelaksanaan Program Sesuai dengan Rencana Program dalam dpa	
4.01.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor	95	16.200.000	91.33	15.576.000	-	-	
4.01.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Terpenuhinya Kebutuhan Rutin dan Administrasi Perkantoran	95	145.915.000	76.42	126.353.000	Dengan Adanya Tenaga Pendopo Ekspres Maka Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Bisa Direalisasikan Maksimal	Mengoptimalkan Kinerja Dan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	
4.01.2		Kecamatan Jelbuk		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	95	45.940.000	0	33.458.470	tidak Ada Masalah Dalam Pelaksanaan Program	pelaksanaan Program Sesuai dengan Rencana Program dalam dpa	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase Kondisi Mobil Jabatan yang terpelihara	95	35.600.000	66.64	25.081.470	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran Belanja Bbm Mobil Jabatan Camat	Perlunya Perhitungan Anggaran Belanja Yang Lebih Tepat	
4.01.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Terpelihara Kendaraan Dinas Operasional	95	10.340.000	76.95	8.377.000	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran	Perlunya Ketepatan Dalam Perencanaan Anggaran	
4.01.32		Kecamatan Jelbuk	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum	95	184.345.000	0	134.147.000	Tidak Ada Masalah Dalam Pelaksanaan Program	Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Rencana Program Dalam Dpa	
4.01.32.1				Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	95	12.570.000	84.12	11.204.000	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran Belanja Makan Minum Karena Pandemi Covid Yang Membatasi Kerumunan Orang	Mengoptimalkan Kinerja Dan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	
4.01.32.2				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	95	37.875.000	80.38	33.252.000	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran Belanja Makan Minum Rapat Karena Pandemi Covid	Mengoptimalkan Kinerja Dan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Yang Membatasi Kegiatan2 Banyak Orang		
4.01.32.3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Persentase penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	95	133.900.000	63.37	89.691.000	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran Belanja Dokumentasi Dekorasi, Belanja Makan Minum Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional Karena Pandemi Covid	Mengoptimalkan Kinerja Dan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	
4.01.33		Kecamatan Jelbuk	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	95	7.600.000	0	6.950.000	Tidak Ada Masalah Dalam Pelaksanaan Program	Pelaksanaan Program Sudah Sesuai Dengan Rencana Program Dalam Dpa	
4.01.33.1				Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	95	7.600.000	86.44	6.950.000	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan Karena Tidak Ada Yang Rusak	Mengoptimalkan Kinerja Dan Anggaran Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada	
4.02.15	Pengawasan	Bagian Pembangunan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi OPD	3	35.300.000	2	0	kendala Yang Terdapat Pada Pelaksanaan Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan Secara Optimal.	pelaksanaan Kegiatan Kedepan Akan Dilaksanakan Secara Optimal	
4.02.15.3				Pengendalian Manajemen Pelaksanan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi OPD	3	35.300.000	0	0	Tidak Dilaksanakan	Dilaksanakan Di Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Kebijakan KDH						Kegiatan Rapat Opd Dikarenakan Pandemi Covid		
4.02.1		Inspektorat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tercapainya kebutuhan administrasi dan operasional kantor	100	545.307.000	100	517.659.031	-	-	
4.02.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat/dokumen	12	18.600.000	12	17.702.820	-	-	
4.02.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening	12	4.800.000	12	3.160.661	-	-	
4.02.1.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran tenaga kebersihan	12	12.000.000	12	12.000.000	-	-	
4.02.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket pengadaan	1	90.000.000	1	88.842.500	-	-	
4.02.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	1	30.233.000	1	29.875.000	-	-	
4.02.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pengadaan buku bacaan dan peraturan	12	9.400.000	12	9.362.250	-	-	
4.02.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman	12	169.164.000	12	169.007.800	-	-	
4.02.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	3	23.100.000	3	19.993.000	-	-	
4.02.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Pembayaran Honor	12	188.010.000	12	167.715.000	-	-	
4.02.10		Inspektorat	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang mengikuti diklat	92	82.550.000	0	0	capaian Target Realisasi Tidak Terpenuhi Karena Adanya Pergeseran Anggaran Untuk Dialihkan Pada	mengajukan Tambahan Pagu Anggaran Untuk Tahun 2020 Sebagaimana Yang Telah Di Amankan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			(APIP)							Kegiatan Lain Yan Lebih Mendesak	Permendagri No 33 Tahun 2019 Dalam Lampiran Bagian V Angka 54 & Surat Edaran Mendagri No 903/732/sj Tahun 2019	
4.02.10.1				Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	46	82.550.000	0	0	Adanya Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Untuk Menangani Pandemi Covid-19	Akan Dianggarkan Kembali Di Tahun Berikutnya, Mengingat Pentingnya Meningkatkan Kompetensi Apip Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran	
4.02.13		Inspektorat	Mengurangi dan mencegah penyimpanan, mengamankan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten serta meningkatkan ketaatan satuan kerja	Program Optimalisasi Kebijakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah unit kerja yang diusulkan	3	311.550.000	100	9.522.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			terhadap peraturan perundang an yang berlaku									
4.02.13.1				Pengendalian Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah unit kerja yang diusulkan	3	93.850.000	3	3.200.000	Opini Bpk-Ri Disclaimer Sehingga Tidak Memungkinkan Untuk Melaksanakan Zi	Menunggu Sampai Opini Bpk-Ri Terhadap Pemkab Jember Minimal Wdp	
4.02.15		Inspektorat		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang di audit	60	1.206.090.000	57	840.989.584	capaian Target Realisasi Tidak Terpenuhi Karena Adanya Pergeseran Anggaran Untuk Dialihkan Pada Kegiatan Lain Yang Lebih Mendesak	mengajukan Tambahan Pagu Anggaran Untuk Tahun 2020 Sebagaimana Yang Telah Di Amankan Permendagri No 33 Tahun 2019 Dalam Lampiran Bagian V Angka 54 & Surat Edaran Mendagri No 903/732/sj Tahun 2019	
4.02.15.1				Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	32	127.800.000	5	20.950.000	Kurangnya Sdm Apip Sedangkan Sdm Yang Ada Sebagian Besar Mereviu Rab Covid-19 Yang Diajukan Opd	Penambahan Sdm Agar Sesuai Dengan Beban Pelaksanaan Tugas Pengawasan	
4.02.15.2				Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Riksus	150	499.600.000	100	450.101.975	Kurangnya Sdm Apip Sedangkan Sdm Yang Ada Sebagian Besar	Penambahan Sdm Agar Sesuai Dengan Beban Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Merevisi Rab Covid-19 Yang Diajukan Opd	Tugas Pengawasan	
4.02.15.6				Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah monitoring evaluasi yang dilaksanakan	120	47.225.000	120	33.882.500	-	-	
4.02.15.7				Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Koordinasi pengawasan yang dilakukan	12	191.800.000	12	145.556.109	-	-	
4.02.15.11				Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR)	7	269.775.000	7	180.900.000	Anggaran Dan Jenis Reviu Telah Sesuai, Namun Jenis Reviu Yang Sama Dilaksanakan Beberapa Kali Dalam Setahun Sehingga Terlihat Melebihi Target	Akan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Pada Tahun Berikutnya Berdasarkan Tren	
4.02.2		Inspektorat		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	128.552.000	100	106.668.704	-	-	
4.02.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan	1	19.892.000	1	16.202.383	-	-	
4.02.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	17	63.610.000	17	46.504.321	-	-	
4.02.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Perawatan peralatan kantor	12	45.050.000	12	43.962.000	-	-	
4.02.6		Inspektorat		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan yang dihasilkan dan dievaluasi	200	246.951.000	69	210.150.000	kelebihan 1 Lhe	kegiatan Tersebut Melebihi Target Dengan Capaian 69	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.6.12				Evaluasi Penyusunan LAKIP SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	68	246.951.000	94	210.150.000	Anggaran Hanya Mencukupi Untuk 47 Opd	Akan Dianggarkan Kembali Di Tahun Berikutnya Dengan Anggaran 68 Opd	
4.03.21	Perencanaan	Bagian Tata Pemerintahan	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai evaluasi LPPD (Peringkat Nasional)	10	414.400.000	0	287.000.000	Capaian Kinerja Tidak Dapat Diukur Karena Dokumen Peningkatan Secara Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Lppd Kab. Jember Tahun 2019 Belum Terbit/dipublish.	Peningkatan Koordinasi Dengan Biro Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Prop Jatim.	
4.03.21.11				Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LPPD Kabupaten Jember sesuai dengan Pedoman Kemendagri RI	100	414.400.000	100	287.000.000	-	-	
4.03.1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan dasar operasional Bappeda	100	3.540.299.000	100	1.631.501.821	-	-	
4.03.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran untuk kebutuhan listrik, air, internet dan telekomunikasi	12	82.800.000	6	47.922.249			
4.03.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan cetakan	100	600.000.000	0	139.167.300			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					dan penggandaan dokumen							
4.03.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1	10.000.000	0	0			
4.03.1.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12.000.000	6	7.728.000			
4.03.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	12	300.000.000	6	122.561.700			
4.03.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah paket pemenuhan perjalanan dinas ASN	1	300.000.000	0	178.009.210			
4.03.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah pembayaran honor tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	12	803.420.000	6	650.000.000			
4.03.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah paket penyediaan peralatan bahan kebersihan	1	6.000.000	0	6.000.000			
4.03.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang serta pengelola barang dan jasa	12	1.426.079.000	6	480.113.362			
4.03.15		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Perencanaan yang Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan daerah	100	661.645.000	100	303.300.000	Data/informasi Masih Belum Standar Tapi Seluruhnya Telah Digunakan Untuk Kebutuhan Perencanaan	Tahun 2019 Telah Dimulai Pembagian Data Standar Yang Mengidentifikasi Penggiat-Penggiat Data Di Masing-Masing Opd	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
			dengan Sistem yang Berkembang, Terbuka dan Demokratis								Bekerjasama Dengan Bps	
4.03.15.1				Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase PD yang telah memiliki data SIPD lengkap dan update	100	47.860.000	20	0			
4.03.15.2				Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase rencana FGD yang telah dilaksanakan	100	317.500.000	20	242.800.000			
4.03.15.5				Penyusunan Profile Daerah	Jumlah buku profil daerah yang disusun	150	45.260.000	0	0			
4.03.15.13				Penyusunan RKPDP/Perubahan RKPDP	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan RKPDP/Perubahan RKPDP terhadap pedoman	100	24.650.000	50	21.000.000			
4.03.15.14				Penyusunan RPJMD	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Jember terhadap pedoman	100	31.400.000	10	8.000.000			
4.03.15.15				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SDG's	Jumlah buku monitoring, evaluasi dan pelaporan program SDG's	0	44.900.000	0	0			
4.03.15.16				Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD/Perubahan APBD	Jumlah dokumen KUA, PPAS, KUPA dan PPAS-P yang	4	150.075.000	2	31.500.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					disusun sesuai pedoman							
4.03.2		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	358.311.000	100	202.025.720	-	-	
4.03.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mobil jabatan	100	38.200.000	50	28.660.020			
4.03.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	256.711.000	50	145.485.700			
4.03.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah paket pemeliharaan rutin alat kantor, alat rumah tangga dan komputer	1	63.400.000	0	27.880.000			
4.03.21		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Perencanaan yang Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik dengan Sistem yang Berkembang, Terbuka dan Demokratis	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir	35	245.900.000	33	174.258.650	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.03.21.9				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD	32	245.900.000	32	174.258.650			
4.03.22		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Perencanaan yang Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik dengan Sistem yang Berkembang, Terbuka dan Demokratis	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase SKPD mitra Bidang Ekonomi yang mencapai target sasaran tahunannya	0	255.720.000	75	54.700.000	-	-	
4.03.22.2.1				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	25.540.000	60	0	Kegiatan Rapat Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Di Karenakan Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.03.22.2.2				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Industri	Jumlah PD bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka	2	59.200.000	0	0	Karena Adanya Pandemi Covid-19 Sehingga Kegiatan Kurang Optimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					pencapaian target pembangunan							
4.03.22.23				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	24.630.000	50	0	Kegiatan Rapat Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Di Karenakan Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.03.22.24				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah PD bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	4	59.200.000	0	19.950.000	Karena Adanya Pandemi Covid-19 Sehingga Kegiatan Kurang Optimal	Kegiatan Akan Di Maksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.03.22.25				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian dan Pangan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang pertanian dan pangan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	27.950.000	50	16.300.000	Kegiatan Rapat Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Di Karenakan Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.03.22.26				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian dan Pangan	Jumlah PD bidang pertanian dan pangan yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	3	59.200.000	0	18.450.000	Karena Adanya Pandemi Covid-19 Sehingga Kegiatan Kurang Optimal	Kegiatan Akan Di Maksimalkan Di Tahun Berikutnya	
4.03.23		Badan Perencanaan Pembangu	Mewujudkan Perencanaan yang	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase SKPD mitra Bidang Sosial Budaya yang mencapai target	75	553.645.500	75	0	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		nan Daerah	Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik dengan Sistem yang Berkembang, Terbuka dan Demokratis		sasaran tahunannya							
4.03.23.19				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pemerintahan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	77.945.500	100	0	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Masih Menggunakan Program Sdgs Di Dalamnya Dimana Program Ini Sudah Tertera Dan Ditindak Lanjuti Pada Bidang Litbang, Evabangda Dan Prog. Sdg\\S Sehingga Untuk Proses Realisasi Kinerja Maupun Anggarannya Menunggu Papbd 2020 Mengganti Dengan Program Pug.	Mengawal Terus Program Pug Berkoordinasi Dengan Dinas P3akb Hingga Akhirnya Program Ini Bisa terselesaikan	
4.03.				Monitoring, Evaluasi dan	Jumlah PD mitra	14	100.400.	14	0	Proses Movev	Laporan Movev	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
23.2 0				Pelaporan Bidang Pemerintahan	bidang pemerintahan yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan		000			Belum Bisa Dilakukan Ke Lapangan Dikarenakan Kondisi Pandemi Covid 19 Sehingga Proses Dilakukan Secara Daring Dan Melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (sippd)	Sudah Terselamatkan Dengan Menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (sippd)	
4.03. 23.2 1				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kependudukan	Jumlah PD mitra bidang kependudukan yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	4	100.100.000	4	0	Proses Monev Belum Bisa Dilakukan Ke Lapangan Dikarenakan Kondisi Pandemi Covid 19 Sehingga Proses Dilakukan Secara Daring Dan Melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (sippd)	Laporan Monev Sudah Terselamatkan Dengan Menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (sippd)	
4.03. 23.2 2				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang kependudukan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	60.400.000	60	0	Pandemi Covid 19 Yang Menyebabkan Tidak Bisa Rapat Dan Desksecara Langsung Dan Tatap Muka Serta Proses Rekapitulasi Data Yang Belum	Proses Penyusunan Laporan Tkpk Berjalan 60% Sebagai Penunjang Bahan Masukan Rpjmd Dengan Masih Menggunakan Data Yang Ada.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Lengkap Oleh Opd Terkait Kemiskinan.		
4.03.23.24				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan SDM	Jumlah PD mitra bidang pembangunan sumber daya manusia yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	5	99.800.000	5	0	Proses Monev Belum Bisa Dilakukan Ke Lapangan Dikarenakan Kondisi Pandemi Covid 19 Sehingga Proses Dilakukan Secara Daring Dan Melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (sippd)	Laporan Monev Sudah Terselamatkan Dengan Menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (sippd)	
4.03.23.25				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang pembangunan Sumber Daya Manusia yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	115.000.000	100	0	Pandemi Covid 19 Yang Menyebabkan Tidak Bisa Rapat Dan Desksecara Langsung Dan Tatap Muka Serta Proses Rekapitulasi Data Yang Belum Lengkap Oleh Opd Terkait Penanganan Stunting.	Realisasi Kinerja Sudah Tercapai Sesuai Dengan Runtutan Proses Aksi Konvergensi Stunting Dan Upload Hasil Kinerja Selalu Tepat Waktu Pada Websitemonitoring Dan Evaluasi Kemendagri. Hasil Koordinasi Ini Secara Keseluruhan Dilakukan Secara Daring.	
4.03.24		Badan Perencanaan	Mewujudkan Perencanaan	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase SKPD mitra Bidang Prasarana Wilayah	0	394.825.000	75	111.576.600	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Pembangunan Daerah	an yang Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik dengan Sistem yang Berkembang, Terbuka dan Demokratis		dan SDA yang mencapai target sasaran tahunannya							
4.03.24.11				Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang mendapatkan pemberdayaan GHIPPA	9	134.775.000	3	14.026.600			
4.03.24.16				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Persentase kebijakan pemerintah atas bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	32.750.000	79	25.950.000	Kegiatan Rapat Dilaksanakan Secara Daring Dikarenakan Pandemi Covid 19	Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Tahun Berikutnya	
4.03.24.17				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Jumlah PD bidang pengembangan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	2	33.950.000	0	0	Karena Adanya Pandemi Covid 19 Sehingga Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan, Disamping Itu Opd Melaksanakan Monev Sendiri Dan Dilaporkan Kepada Bappeda	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.03.				Koordinasi Perencanaan	Persentase kebijakan	100	33.800.0	77	25.950.0	Kegiatan Rapat	Kegiatan Akan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
24.1 8				Pembangunan Bidang Transportasi	pemerintah atas bidang transportasi yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan		00		00	Dilaksanakan Secara Daring Dikarenakan Pandemi Covid 19	Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.03. 24.1 9				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Transportasi	Jumlah PD bidang transportasi yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	3	33.950.00	0	0	Karena Adanya Pandemi Covid 19, Sehingga Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan, Disamping Itu Monev Dilaksanakan Sendiri Oleh Opd Dan Dilaporkan Pada Bappeda	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.03. 24.2 0				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih	Persentase kebijakan pemerintah atas bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	67.400.00	84	45.650.00	Kegiatan Rapat Dilaksanakan Secara Daring Dikarenakan Pandemi Covid 19	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.03. 24.2 1				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih	Jumlah PD bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	2	58.200.00	0	0	Karena Adanya Pandemi Covid 19 Sehingga Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan, Disamping Itu Opd Melaksanakan Monev Sendiri Dan Dilaporkan Kepada Bappeda	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.03.		Badan		Program Pelaporan dan	% PD yang mencapai	0	6.770.31	60	130.830.	Beberapa	Penentuan Target	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
28		Perencanaan Pembangunan Daerah		Evaluasi	target sasaran tahunannya		5.000		000	Indikator Masih Belum Karena Kendala-Kendala Teknis Seperti Sdm, Anggaran Dan Skala Prioritas	Capaian Indikator Akan Disesuaikan Dengan Kemampuan Opd Dengan Mempertimbangkan Sdm, Anggaran Dan Skala Prioritas	
4.03.28.1				Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pemerintah Daerah dan/atau atasan yang difasilitasi	100	37.120.000	50	22.250.000			
4.03.28.2				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase PD yang telah melakukan pelaporan pengendalian dan evaluasi sesuai pedoman	100	6.675.985.000	10	71.580.000			
4.03.28.3				Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Persentase PD yang telah menyusun dan mengumpulkan LKPJ PD	100	57.210.000	100	37.000.000			
4.03.8		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Jember	100	40.000.000	100	9.575.000	-	-	
4.03.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun a	2	40.000.000	0	9.575.000			
4.03.8.10				Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan perencanaan	5	0	0	0			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					pembangunan							
4.04.1	Keuangan	Badan Pengelolaa n Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya administrasi kantor	12	2.812.065.600	12	2.271.544.235	Tidak Ada Msalah Dalam Pelaksanaan Progam, Progam Berjalan Dengan Baik	-	
4.04.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam memenuhi Kebutuhan Internet, Telpon dan Faksimili serta Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai sebagai sarana pendukung operasional kantor	12	194.712.000	12	184.392.902			
4.04.1.9				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	132	120.088.000	100	119.638.656	Tidak Ada Masalah	Semua Peralatan Alat Kerja Kantor Sudah Berfungsi Dengan Baik	
4.04.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan dlam memenuhi Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai	12	1.500.000	12	1.500.000			
4.04.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bulan dalam mengikuti Rapat Rapat Koordinasi dan Kebutuhan Konsultasi Ke Luar Daerah terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	12	183.000.000	12	179.948.349			
4.04.1.19				Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Kelancaran	12	12.974.000	12	12.974.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					Operasional Kantor							
4.04.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah bulan dalam memenuhi Peralatan dan Bahan Kebersihan	12	45.000.000	12	43.950.675			
4.04.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah bulan dalam Penatusahaan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah yang akuntabel serta operasional kantor yang memadai	12	1.686.204.379	12	1.301.935.203			
4.04.1.29				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan di dalam memenuhi administrasi keuangan dan barang kantor	12	568.587.221	12	427.204.450			
4.04.14		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD	Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan aset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tercapainya pengembangan pengelolaan keuangan daerah	110	1.418.010.000	95	641.444.250	pelaksanaan Progam Sudah Dilakukan Walaupun Ada Beberapa Kegiatan Yang Terkendala Administrasi Dan Tidak Bisa Dilaksanakan Sepenuhnya	Kegiatan Yang Belum Terlaksana Sepenuhnya Adakn Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.14.1				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019	110	291.960.000	110	106.200.000			
4.04.14.2				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	110	299.325.000	110	89.280.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.04.14.3				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran	110	192.800.000	0	0	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.14.4				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	110	203.275.000	110	105.300.000			
4.04.14.9				Pendampingan Penyusunan Perubahan APBD	Jumlah RKA dan DPA OPD Perubahan APBD Tahun 2018 se OPD Kabupaten Jember	75	15.625.000	75	0			
4.04.14.10				Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah RKA dan DPA SKPD Rancangan APBD Tahun 2019 se SKPD Kabupaten Jember	75	15.625.000	0	0	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.14.11				Pelayanan Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	Jumlah OPD didalam Tertib Administrasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran berupa Laporan SPD bagi SKPD se Kabupaten Jember	75	235.000.000	75	207.602.250	-	-	
4.04.14.12				Pengendalian Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah OPD	100	94.000.000	87.47	70.862.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Dapat Berjalan Maksimal		
4.04.14.13				Pelaksanaan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA/RKAP OPD dan DPA/DPPA OPD yang diverifikasi	75	70.400.000	75	62.200.000			
4.04.15		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD	Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan aset daerah	Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah		100	1.041.113.000	97	962.427.500	tidak Ada Masalah Dalam Pelaksanaan Program, Program Dapat Berjalan Dengan Baik	-	
4.04.15.1				Pembinaan Perbendaharaan dan Gaji	Jumlah Rapat Koordinasi, Bimtek dan Sosialisasi	100	296.100.000	95,02	273.600.000			
4.04.15.2				Pelayanan Administrasi Perbendaharaan dan Gaji	Jumlah Bulan dalam melayani perbendaharaan dan gaji kepada SKPD se-Kabupaten Jember	100	84.513.000	87,76	74.435.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.15.3				Manajemen Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Lap LKT, Lap LRT, Lap DAK, Lap PFK, Lap Rekon Deposito, Lap Posisi Kas	100	255.700.000	95	233.597.500			
4.04.15.5				Peningkatan Kualitas Penatausahaan Utang dan Piutang Daerah	Jumlah Dokumen Hutang Piutang Daerah	100	131.800.000	85,65	112.895.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.15.7				Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan dalam melayani administrasi	100	273.000.000	100	267.900.000			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				PPKD	PPKD							
4.04.16		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD	Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan aset daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah		100	928.058.000	95	626.561.750	pelaksanaan Program Berjalan Dengan Baik	-	
4.04.16.1				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	130	182.074.000	130	71.277.500			
4.04.16.2				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember	Jumlah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	130	198.850.000	130	125.790.000			
4.04.16.3				Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah OPD Tahun Anggaran 2017 dan Data Penyusunan LKD TA. 2018	75	208.900.000	75	161.325.000			
4.04.16.4				Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Persentase Realisasi APBD dengan Aplikasi SIMDA	100	304.650.000	100	250.900.000			
4.04.16.6				Pelayanan Administrasi Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah Data Laporan dan Realisasi Anggaran OPD Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Prognosis	75	33.584.000	75	17.269.250			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.04.17		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD	Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan aset daerah	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah		100	2.476.627.400	89	1.321.948.131	pelaksanaan Program Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku walaupun Ada Beberapa Kegiatan Yang Terkendala Administrasi Dan Tidak Bisa Dilaksanakan Sepenuhnya	Kegiatan Yang Tidak Berjalan Sepenuhnya Akan Dimaksimalkan Pada Tahun Berikutnya	
4.04.17.2				Penyusunan Laporan Neraca aset Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang lebih valid dan akurat	1	115.500.000	1	72.550.000			
4.04.17.3				Penyusunan Laporan Persediaan Barang Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang Daerah	1	113.675.000	1	76.000.000			
4.04.17.4				Identifikasi Aset	Jumlah Sertifikat Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Jember dan Data kondisi gedung milik Pemkab. Jember	10	244.100.000	7	122.281.406	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.17.5				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sosialisasi pengelolaan BMD	2	57.238.000	1	4.000.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.17.6				Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan	5	142.000.000	3	50.600.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
					barang/aset milik daerah					Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal		
4.04.17.7				Penertiban Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Jember	Jumlah Buku tentang Penggunaan aset tanah dan bangunan milik Pemkab Jember sesuai peruntukannya	110	1.064.674.400	110	701.966.725			
4.04.17.8				Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Barang Milik Daerah	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen BMD yang di pelihara	1	260.850.000	1	170.800.000			
4.04.17.9				Pemanfaatan Aset	Jumlah Perjanjian pemanfaatan aset daerah dan Besaran PAD dari Pemanfaatan aset daerah	47	185.900.000	15	31.900.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.17.10				Inventarisasi Tanah Yang Di Kuasai Pemerintah Kabupaten Jember	Jumlah Data Tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jember yang terpetakan sesuai kondisi dan status	1000	56.900.000	10	1.250.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.17.11				Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Persentase penyelesaian kasus TPTGR	100	61.350.000	0	0	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.17.12				Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan	Jumlah Dokumen Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan	4	28.340.000	0	0	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal		
4.04.17.13				Peningkatan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	100	101.400.000	89	90.600.000	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.17.14				Verifikasi Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah Hasil Sensus	Jumlah Laporan verifikasi, penilaian dan penghapusan hasil sensus barang milik daerah Kabupaten Jember	1	44.700.000	0	0	Terkendala Persyaratan Administrasi Sehingga Kegiatan Tidak Dapat Berjalan Maksimal	Kegiatan Akan Dimaksimalkan Ditahun Berikutnya	
4.04.2		Badan Pengelolaa n Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan dinas sebagai sarana mobilitas jabatan yang baik dan terawat	1	316.860.000	1	214.597.015	tidak Ada Msalah Dalam Pelaksanaan Progam, Progam Berjalan Dengan Baik	-	
4.04.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas sebagai sarana mobilitas jabatan yang baik dan terawat	1	38.300.000	1	26.292.315			
4.04.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional sebavai sarana mobilitas aparatur yang baik dan terawat	44	278.560.000	44	188.304.700			
4.04.1		Badan Pendapata n Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan administrasi perkantoran	100	2.448.962.000	100	1.896.057.985	Tidak Ada Permasalahan.	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.04.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan materai	100	2.175.000	100	1.788.000	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase pelaksanaan pembayaran rekening listrik, telepon, air bersih dan instalasi internet	100	777.960.000	100	565.726.995	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor yang dibutuhkan dinas	100	300.000.000	100	271.837.640	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	100	366.480.000	100	240.918.750	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan alat-alat Listrik yang dibutuhkan kantor	100	20.000.000	100	7.185.650	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	100	0	100	0	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan	100	33.610.000	100	5.351.500	Tidak Terdapat Permasalahan	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.04.1.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang akan dilaksanakan	100	43.701.000	60	26.324.250	Kegiatan Dilaksanakan Kurang Maksimal Terkait Adanya Pandemi Covid-19	Kegiatan Yang Belum Dilaksanakan Akan Dikaji Ulang Dan Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran Berikutnya	
4.04.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan yang dibutuhkan	100	15.000.000	100	14.935.850	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Prosentase pemenuhan sarana/prasarana penunjang administrasi dan operasional rutin kantor yang dibutuhkan	100	890.036.000	100	761.989.350	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.10		Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik	Program Penagihan dan Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase piutang pajak yang terbayar	100	2.008.285.000	100	1.744.717.162	Tidak Ada Permasalahan.	-	
4.04.10.3				Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah piutang PBB dan BPHTB yang terbayar	4.4E+09	1.850.255.000	4.4E+09	1.650.702.162	Melebihi Target Yang Ditetapkan Sejumlah Rp. 21.197.133.862,00 Karena Makin Sadarnya Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya	Akan Dilakukan Evaluasi Terhadap Target / Rencana Kinerja Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Membayar Pajak		
4.04. 10.4				Penagihan dan Pelaporan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air tanah	Jumlah piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah yang terbayar	3.4E+1 0	50.600.0 00	1.7E+1 0	24.370.0 00	Adanya Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Pajak Air Tanah	Meningkatkan Pelaksanaan Pendataan Obyek Pajak Baru Sehingga Dapat Membantu Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Pajak Air Tanah	
4.04. 10.5				Penyelesaian Permohonan Keberatan, Pengurangan dan Permasalahan Pajak Daerah	Jumlah permasalahan pajak daerah yang ditindaklanjuti	7213	69.660.0 00	3908	69.045.0 00	Jumlah Tidak Sesuai Dengan Target, Akan Tetapi Dapat Dijelaskan Bahwa Kinerja Bidang Yang Membidangi Penyelesaian Permasalahan Sangat Baik Karena Berkat Kinerja Yang Baik Dalam Menyelesaikan Permasalahan, Jumlah Permasalahan Pajak Daerah Berkurang	Akan Dilakukan Evaluasi Terhadap Target / Rencana Kinerja Pada Tahun Berikutnya	
4.04. 10.6				Penagihan dan Pelaporan Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dan Pajak Penerangan Jalan	Jumlah piutang Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PPJ	8.5E+1 0	37.770.0 00	7.6E+1 0	600	Adanya Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak	Meningkatkan Pelaksanaan Pendataan Obyek Pajak Baru Sehingga Dapat Meningkatkan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				serta Retribusi Daerah						Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Dan Pajak Penerangan Jalan Serta Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Dan Pajak Penerangan Jalan Serta Retribusi Daerah	
4.04.11		Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik	Program Pendataan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase data obyek pajak dan retribusi daerah	100	627.240.000	100	545.125.000	Terdapat Permasalahan Pada Pelaksanaan pendataan Potensi Dan Pemutakhiran Data Pajak Reklame, Retribusi Serta Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Dan Pajak Penerangan Jalan Yang Realisasinya Tidak Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditentukan. Hal Ini Disebabkan Kondisi Pandemi Covid 99 mempengaruhi Jumlah Potensi	Akan Terus Dilakukan Pendataan Terhadap Potensi Obyek Pajak Secara Optimal Dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Obyek Pajak Dan Pelaksanaan Kegiatan Pendataan		
4.04.11.3				Penyuluhan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak	797698	136.400.000	797698	54.825.000	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.11.4				Pendataan Potensi dan Pemutakhiran Data PBB serta Mutasi Obyek/Subyek Transaksi BPHTB	Jumlah Subyek atau obyek PBB hasil pendataan dan pendaftaran potensi	779	342.520.000	779	342.205.000	Melebihi Target Yang Telah Ditetapkan Sejumlah 5.577 Obyek Pajak Karena Jumlah Subyek Atau Obyek Pbb Bertambah Sesuai Dengan Pelaksanaan Pendataan	Akan Dilakukan Evaluasi Terhadap Target / Rencana Kinerja Pada Tahun Berikutnya	
4.04.11.5				Pendapatan Potensi dan Pemutakhiran Data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah	Jumlah subyek atau obyek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak hasil tanah pendataan dan pendaftaran potensi	630	70.080.000	630	70.075.000	Jumlah Subyek Atau Obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Pajak Hasil Tanah Pendataan Dan Pendaftaran Potensi Melebihi Target Yang Ditetapkan Sejumlah 1 Obyek Pajak Karena Bertambahnya Jumlah Subyek Atau Obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Pajak Air Tanah	Akan Dilakukan Evaluasi Terhadap Target / Rencana Kinerja Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.04.11.6				Pendapatan Potensi dan Pemutakhiran Data Pajak Reklame, Retribusi serta Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dan Pajak Penerangan Jalan	Jumlah Subyek atau obyek pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak penerangan jalan serta retribusi hasil pendataan dan pendaftaran potensi	6187	78.240.000	1427	78.020.000	Adanya Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Jumlah Potensi Obyek Pajak Dan Pelaksanaan Kegiatan Pendataan	Akan Terus Dilakukan Pendataan Terhadap Potensi Obyek Pajak Dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan	
4.04.12		Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penetapan dan penerbitan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah	100	166.445.000	100	124.791.000	Tidak Ada Permasalahan.	-	
4.04.12.3				Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah SPPT, SKPD, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDHPBB dan BPHTB yang diterbitkan	1047000	82.350.000	1047000	69.966.000	Jumlah Sppt, Skpd, Skpdkt, Skpdlb Dan Skpdhpbb Dan Bphtb Yang Diterbitkan Kurang Dari Target Yang Ditetapkan Sejumlah 254.822 Lembar Karena Proses Penerbitan Terkonsentrasi Pada Triwulan I	Akan Dilakukan Evaluasi Ulang Terhadap Rencana Realisasi Kinerja Di Tahun Berikutnya	
4.04.12.4				Penetapan Pajak Air Tanah dan Verifikasi Pajak Hotel, Restoran serta Hiburan	Jumlah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB pajak air tanah, hotel, restoran dan hiburan yang diterbitkan	9500	35.840.000	8488	20.000.000	Adanya Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Skpd, Skpdkt, Skpdktb Dan Skpdlb Pajak Air Tanah, Hotel,	Melaksanakan Pendataan Obyek Pajak Baru Dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Sehingga Skpd, Skpdktb, Skpdktb	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Restoran Dan Hiburan Yang Diterbitkan	Dan Skpdlb Pajak Air Tanah, Hotel, Restoran Dan Hiburan Dapat Diterbitkan Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditentukan	
4.04.12.5				Penetapan Pajak Reklame, Retribusi dan Verifikasi Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dan Pajak Penerangan Jalan	Jumlah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKRD yang diterbitkan	6000	30.220.000	5557	27.305.000	Adanya Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Skpd, Skpdkb, Skpdkbt Dan Skpdlb Pajak Reklame, Retribusi Dan Verifikasi Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Dan Pajak Penerangan Jalan Yang Diterbitkan	Melaksanakan Pendataan Obyek Pajak Baru Dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Sehingga Skpd, Skpdkb, Skpdkbt Dan Skpdlb Pajak Reklame, Retribusi Dan Verifikasi Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Dan Pajak Penerangan Jalan Dapat Diterbitkan Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditentukan	
4.04.12.6				Legalisasi Obyek Pajak Reklame dan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah	Jumlah obyek pajak reklame dan benda berharga yang disahkan	7500	18.035.000	7500	7.520.000	Realisasi Melebihi Target Sebanyak 1.975 Lembar Karena Jumlah Obyek Pajak Reklame Dan Benda Berharga Yang Masuk Dan	Akan Dilakukan Evaluasi Terhadap Target / Rencana Kinerja Pada Tahun Berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Membutuhkan Legalisasi Melebihi Target Yang Ditetapkan		
4.04.13		Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan retribusi daerah	100	420	100	420			
4.04.13.6				Monitoring evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait	12	420	12	420	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.2		Badan Pendapatan Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100	555.468.500	100	338.170.675	Tidak Ada Permasalahan.	-	
4.04.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala pada mobil jabatan	100	58.982.000	100	36.009.200	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	100	370.166.500	100	234.997.850	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.2.26				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan	100	126.320.000	100	67.163.625	Tidak Terdapat Permasalahan	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
				Kantor	perlengkapan kantor							
4.04.8		Badan Pendapatan Daerah		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase dokumen perencanaan penunjang kegiatan operasional	100	1.580.000	100	1.580.000	Serapan Anggaran 0 Rupiah Dikarenakan Efisiensi Dan Penghematan	Anggaran Kegiatan Tahun Berikutnya Akan Disusun Dengan Lebih Baik Dan Cermat.	
4.04.8.6				Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional yang disusun	13	1.580.000	13	1.580.000	Tidak Terdapat Permasalahan	-	
4.04.9		Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PAD	100	466.320.000	100	382.453.000	Tidak Ada Permasalahan. Secara Keseluruhan Capaian Realisasi Melebihi Target Yang Ditentukan. akan Tetapi Terdapat Beberapa Pajak Daerah Yang Tidak Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Target Yang Ditentukan, Hal Ini Dikarenakan Karena Adanya Kondisi Pandemi Covid 19 Mempengaruhi Realisasi Pemungutan Pajak.	Meningkatkan Pelaksanaan Pendataan Obyek Pajak Baru Sehingga Dapat Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.04.9.1				Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah	22	95.520.000	14	94.100.000	Belum Dapat Melaksanakan Secara Optimal Dikarenakan Adanya Pandemi Covid 19	Pada Tahun Berikutnya Akan Dilaksanakan Cara Alternatif Untuk Kegiatan Sosialisasi, Antara Lain Adalah Dengan Cara Teleconference Dengan Perangkat Desa	
4.04.9.3				Penyediaan, dan Pemeliharaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan sarana pemungutan pajak daerah	10	360.620.000	9	288.353.000	Tidak Ada Permasalahan	-	
4.04.9.4				Penyediaan, dan Pemeliharaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pemungutan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penggunaan benda berharga OPD terkait	14	10.180.000	14	0	Tidak Ada Permasalahan	-	
4.05.1	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD	100	3.610.026.500	100	2.642.223.290	-	-	
4.05.1.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	300	17.500.000	225	2.272.500	Beberapa Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kurang Optimal ,	Perlu Ditetapkan Sop Untuk Setiap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Karena Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan		
4.05.1.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telisa dan Internet	12	520.000.000	12	443.388.650	-	-	
4.05.1.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan ATK	4	192.440.000	3	163.020.900	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
4.05.1.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	4	150.000.000	4	145.369.800	-	-	
4.05.1.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Listrik	4	25.000.000	2	4.780.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
4.05.1.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	117.500.000	0	0	Karena Adanya Kebijakan Agar Menunda Terlebih Dahulu Untuk Kegiatan Pengadaan Belanja Modal.	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020.	
4.05.1.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	4	49.000.000	0	0	Karena Adanya Kebijakan Agar Menunda Terlebih Dahulu Untuk Kegiatan Pengadaan Belanja Modal.	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Pelaksanaan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Kegiatan Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020.	
4.05.1.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minum pegawai	12	198.105.000	12	111.681.000		-	
4.05.1.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12	875.221.500	12	465.639.490		-	
4.05.1.20				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	30.000.000	12	19.885.000		-	
4.05.1.22				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan	12	20.000.000	12	12.647.950		-	
4.05.1.24				Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	12	23.000.000	9	2.838.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan KJasa Pelayanan Kantor Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
4.05.1.27				Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Tersedianya Penunjang Pelaksana Administrasi dan Operasional Kantor	12	1.392.260.000	12	1.270.700.000		-	
4.05.10		Badan Kepegawai	Meningkatkan	Program Pengembangan Data	Prosentase ketersediaan data	90	264.000.000	90	136.300.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		an Dan Pengembangan SDM	Pelayanan Kepegawaian	dan Sistem Informasi ASN	pegawai yang valid dan u date							
4.05.10.1				Pengelolaan Database dan Penguatan Sistem Informasi Manajemen ASN	Prosentase Ketersediaan data pegawai yang valid dan up date	100	264.000.000	80	136.300.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Database Dan Penguatan Sistem Informasi Manajemen Asn	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Pengelolaan Database Dan Penguatan Sistem Informasi Manajemen Asn Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
4.05.11		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian	Program Penataan ASN	Prosentase ASN yang bekerja sesuai dengan kompetensi dan formasi	90	379.620.000	90	53.450.000	Capaian 37,44 % Karena Kegiatan Penyelenggaraan Sumpah Asn Tidak Telaksana Karena Casn Belum Seluruhnya Selesai Diksar.	menunggu Selesai Diksar Cpn.	
4.05.11.1				Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Sidang Baperjakat dan Pelantikan	5	316.750.000	4	34.450.000	Penempatan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi Belum Maksimal Karena	1. Melakukan Assesment Seleksi Terbuka Untuk Jpt 2. Melakukan Uji	1. Pemerintah daerah kabupaten Jember segera mengisi kekosongan jabatan yang ada sesuai



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Semua Menjadi Keputusan Ppk	Kompetensi Untuk Eselon 3 Sampai Dengan Pejabat Fungsional	dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi beban kerja akibat pejabat yang rangkap tinggrrangkap karena pejabat yang rangkap Plt. 2. Pemerintah daerah kabupaten Jember mengurangi mutasi yang tidak perlu dan melaksanakan mutasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4.05.11.3				Penyelenggaraan Sumpah ASN	Terlaksananya penyumpahan ASN	1000	62.870.000	731	19.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Sesuai Dengan Jumlah Asn Yang Akan Disumpah	Kegiatan Akan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Sumpah Asn Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
4.05.12		Badan Kepegawain Dan	Meningkatkan Pelayanan	Program Pembinaan ASN	Prosentase Tingkat Kedisiplinan ASN Pemkab Jember	100	139.000.000	100	25.500.000	Capaian 7,01 % Karena pelaksanaan	berkoordinasi Terkait Percepatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
		Pengembangan SDM	Kepegawaian							Evaluasi Kinerja Pegawai (skp) Asn Menunggu Terbitnya Regulasi.	Penerbitan Regulasi Skp.	
4.05.12.1				Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Sosialisasi peraturan Perundang - undangan	100	112.000.000	9	9.750.000	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Karena Terkendala Adanya Pandemi Covid-19	Kegiatan Akan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan Bimtek/sosialisasi Peraturan Kepegawaian, Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020	
4.05.12.4				Evaluasi Penilaian Kerja (SKP) ASN	target kinerja ASN	100	27.000.000	59	15.750.000	Tidak Melakukan Pencetakan Buku Pedoman Penyusunan Skp Karena Bahan Sedang Diolah Dan Disusun	Kegiatan Akan Dilaksanakan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Evaluasi Penilaian Kerja (skp) Asn, Minimal Dengan Target Sama Dengan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Tahun 2020	
4.05.13		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian	Program Perencanaan, Pengadaan, dan Pengembangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai kompetensi dengan formasi	90	3.294.415.000	87	171.200.000	Capaian 10,49 % Karena tidak Terlaksananya Seleksi Cpns	dianggarkan Pada T.a. Berikutnya.	
4.05.13.2				Penyusunan Kebutuhan Pegawai	Terlaksananya data kebutuhan pegawai	95	220.000.000	95	97.400.000	-	-	
4.05.13.3				Seleksi Penerimaan Calon ASN	Prosentase calon ASN	95	2.974.415.000	0	0	Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Tidak Adanya Kuota Formasi Untuk Kabupaten Jember	Mengusulkan Formasi Asn Di Tahun 2021	1. Pemerintah Daerah Kab. Jember harus lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru terutama Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai bagian unsur tenaga pendidik seperti gaji yang diterima GTT/P'IT sangat kecil dan sering telat, bahkan ditambah persoalan kebijakan pemutasian yang semrawut serta masih banyak GTT yang tidak menerima surat keputusan (SK). 2. Melakukan pengadaan Formasi CPNS yang merupakan alternatif pintu harapan GTT untuk memperbaiki kesejahteraannya. Peluang bagi sebagian para guru (GTT) untuk jadi CPNS. 3. Membuat alternatif kebijakan untuk



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
												memperhatikan mereka yang tertutup peluangnya sebagai CPNS karena batasan umur. 4. Pemerintah Daerah Kab. Jember untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan Bidan. 5. Segera menuntaskan pemetaan yang ideal untuk jumlah tenaga kesehatan puskesmas melalui Dinas Kesehatan,
4.05.13.7				Pemrosesan Penerbitan Surat Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Keterangan Memiliki Ijazah Pegawai Fungsional dan Pelaksana	Jumlah Surat Tugas Ijin Belajar dan Keterangan memiliki Ijazah Pegawai Fungsional	200	100.000.000	108	73.800.000	Proses Penerbitan Ijin Belajar Yang Lama Dikarenakan Harus Ditandatangani Langsung Oleh Bupati	Perlu Sk Pendelegasian Penandatanganan Surat Ijin/tugas Belajar Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	
4.05.14		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian	Program Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	Prosentase ASN yang memperoleh Reward sesuai kinerjanya	100	872.580.000	100	317.680.000	Capaian 30,23 % Karena Kegiatan Koordinasi Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Tidak Terlaksana.	dianggarkan Pada T.a. Berikutnya.	
4.05.14.4				Pemberian Kenaikan Pangkat	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang Diproses	2000	872.580.000	1250	317.680.000	Kenaikan Pangkat Yang Dapat Diproses Yang Memenuhi Syarat	1. Melakukan Bimbingan Teknis 2. Melakukan Sosialisasi Secara	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
										Saja	Berkala	
4.05.15		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian	Program Pemberian Penghargaan Kepada ASN	Prosentase ASN yang motivasi kinerjanya meningkat	1146	115.000.000	953	111.250.000	-	-	
4.05.15.1				Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun	Prosentase ASN yang motivasi kinerjanya meningkat	1146	115.000.000	1079	111.250.000	-	-	
4.05.2		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana	3	213.350.000	3	111.563.650	Capaian 9,48 % Karena Tidak Ditemukan Kerusakan Sedang/berat Pada Gedung Kantor Yang Memerlukan Rehabilitasi.	dianggarkan Pada T.a. Berikutnya.	
4.05.2.23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya pemeliharaan Mobil Jabatan	12	55.900.000	12	26.900.000		-	
4.05.2.24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12	83.450.000	12	54.443.650		-	
4.05.2.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Tersedianya pemeliharaan AC,Komputer ,Alat Rumah Tangga Lainnya	12	74.000.000	12	30.220.000	Penyerapan Anggaran Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Akan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Berikutnya Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Berdasarkan Tren Realisasi Kebutuhan Untuk Kegiatan Tersebut Selama Tiga Tahun Terakhir	
4.05.5		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah bimbingan teknis/seminar/sosialisasi/studi banding/sidang penetapan angka kredit/dll yang diadakan	7	145.922.500	1	59.807.000			
4.05.5.3				Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	1000	145.922.500	75	59.807.000	Adanya Pandemi Covid - 19	Diperlukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait	
4.06.15	Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian	Program Pengembangan dan Asesment bagi ASN	Prosentase ASN yang memperoleh tunjangan kinerja	100	600.362.500	0	0	Capaian 30,66 % Karena Kegiatan Rakor Pengembangan Sdm Tidak Terlaksana	Dianggarkan Pada T.a. Berikutnya	
4.06.15.2				Penyelenggaraan Asesment bagi ASN	Terlaksananya Evaluasi dampak diklat	75	482.750.000	0	0	Adanya Pandemi Covid - 19	Direncanakan Kembali Pada Tahun 2021 Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Minimal Dengan Target Sama	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Dengan Tahun 2020	
4.06.15.7				Rakor Pengembangan SDM	Terlaksananya Kebijakan Pengembangan SDM	62	117.612.500	0	0	Adanya Pandemi Covid - 19	Direncanakan Kembali Pada Tahun 2021 Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020.	
4.06.16		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian	Program Peningkatan Kompetensi ASN	Prosentase Calon ASN dan ASN yang meningkat kompetensinya	39	4.874.750.000	35.32	3.411.769.500	Capaian 37,51 % Karena Kegiatan Diklat Teknis Bagi Asn Tidak Terlaksana	Dianggarkan Pada T.a. Berikutnya	
4.06.16.2				Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi ASN	Peserta telah mengikuti Diklat Fungsional	330	1.193.662.500	72	302.424.500	Adanya Pandemi Covid - 19	Direncanakan Kembali Pada Tahun 2021 Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020.	
4.06.16.3				Pendidikan dan Pelatihan Tehnis bagi ASN	Peserta telah mengikuti Diklat Tehnis	175	504.112.500	10	22.650.000	Adanya Pandemi Covid - 19	Direncanakan Kembali Pada Tahun 2021 Dengan Memproyeksikan Kembali Target	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
											Dan Kebutuhan Anggaran, Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020.	
4.06.16.5				Pelatihan Manajerial bagi ASN	Jumlah Peserta Diklatpim II	5	90.000.000	0	0	Penyertaan Diklatpim II Belum Mendapat Panggilan Dari Badan Diklat Propinsi	Direncanakan Kembali Pada Tahun 2021 Dengan Memproyeksikan Kembali Target Dan Kebutuhan Anggaran, Minimal Dengan Target Sama Dengan Tahun 2020.	
4.06.16.6				Pelatihan Dasar bagi Calon ASN	Jumlah CASN yang akan mengikuti Pelatihan Dasar	458	3.086.975.000	433	3.086.695.000	-	-	
4.07.15	Penelitian Dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Perencanaan yang Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik dengan Sistem yang Berkembang, Terbuka dan Demokratis	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Kajian yang ditindaklanjuti	90	581.600.000	85	0	Beberapa Kajian Tidak Langsung Ditindaklanjuti Pada Tahun Berikutnya Tapi Ditindaklanjuti Pada Tahun-Tahun Yang Akan Datang	Monitoring Dan Evaluasi Perlu Dilakukan Terhadap Kajian-Kajian Yang Belum Ditindaklanjuti / Baru Kepada Opd Yang Terkait	
4.07.				Penelitian Dan	Persentase Rencana	100	581.600.	0	0			



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
15.1				Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah	Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan		000					

KABUPATEN JEMBER



3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS (Peraturan/Keputusan Bupati)	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 62 / 1.12 / 2020 tentang Tim Penyusunan Keputusan Bupati di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.	Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan Kepala Daerah
2.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 75 / 1.12 / 2020 tentang Tim Penyusunan Peraturan Bupati di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.	Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan Kepala Daerah
3.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 72 / 1.12 / 2020 tentang Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah	Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.	Penyusunan Propemperda Kabupaten Jember Tahun 2021
4.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 71 / 1.12 / 2020 tentang Tim Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Mensosialisasikan produk hukum daerah Kabupaten Jember
5.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 76 / 1.12 / 2020 tentang Tim Verifikasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Kelompok Rentan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.	Verifikasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan di Kabupaten Jember.
6.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 77 / 1.12 / 2020 tentang Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat dan perangkat daerah.



7.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 77 / 1.12 / 2020 tentang Tim Rencana Aksi HAM Kabupaten Jember Periode Tahun 2020	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018	Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Jember Tahun 2020

KABUPATEN JEMBER



3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

A. Urusan Pendidikan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Manajemen Pendidikan Pada aspek manajemen pendidikan variabel penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pendidikan adalah ketercapaian angka partisipasi sekolah. Berdasarkan data LKPJ capaian angka partisipasi sekolah untuk pendidikan dasar menurun dari 92% menjadi 86 % ditahun 2019, Sedangkan pendidikan menengah menurun dari 102 % menjadi 99 % ditahun 2019. Capaian ini jauh dari angka yang dipatok pada RPJMD maupun RKPD yaitu untuk pendidikan dasar 115 % sedangkan pendidikan menengah 104,92 %. Sementara nilai serapan anggaran program yang direalisasikan juga belum maksimal yaitu berkisar pada angka 90%. Berdasarkan angka tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Jember yang berkesempatan mengenyam pendidikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika diukur dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS)Jember adalah 13,22 atau naik sekitar 0,01. Angka ini menjadi timpang dan berjarak jauh jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang nilainya 6,18 atau naik 0,11 dari tahun 2018. Angka	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jenjang SD/MI. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jenjang SMP/Mts. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat. Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	Pada tahun 2019 Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) turun karena terkendala teknis pada Sumber Data Pendidikan di Backbone Dapodik yang belum terupdate sampai dengan batas waktu penyampaian LKPJ sehingga terjadi data timpang antara Sumber data di Backbone Dapodik dengan Data yang sebenarnya.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	ini menggambarkan bahwa anak-anak berumur 7 (tujuh) tahun pada tahun 2019 dapat menikmati sekolah dengan waktu lama 13,22 tahun kedepan sampai jenjang pendidikan DI atau naik 0,01 tahun lebih lama dari mereka yang memiliki usia yang sama pada tahun sebelumnya. Angka ini timpang jika dibandingkan dengan angka RLS yang menggambarkan bahwa penduduk yang usia 25 (duapuluh lima) tahun ke atas di Kabupaten Jember dengan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan selama 6, 18 tahun pada 2019 atau setingkat kelas IV SD atau 0, 11 tahun lebih lama daripada mereka pada usia yang sama pada tahun 2018. Angka ini masih jauh dibawah RLS Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang mencapai angka 7,59. Jika mengamati ketimpangan angka tersebut pemerintah kabupaten Jember GAGAL dalam memahami esensi pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang melibatkan seluruh penduduk di semua kelompok umur baik pada kelompok umur dewasa maupun tua (25 tahun keatas) yang dulunya belum mendapat tingkat pendidikan yang baik sehingga pemerataan akses pendidikan menjadi penting untuk di perhatikan. Fakta dan data ini menggambarkan pembangunan manusia yang dijalankan masih berorientasi pada pendidikan formal dan tidak mampu mengatasi		



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	pendidikan untuk kelompok penduduk dewasa ataupun tua yang dulunya putus sekolah dengan pendekatan pendidikan informal. Dalam peningkatan kualitas SDM kebijakan pemberian skema beasiswa pada jenjang anak SMA yang masuk di Perguruan Tinggi ini baik namun kesannya timpang dan berpotensi terjadi disorientasi dalam kebijakan pengembangan SDM, karena program ini juga tidak diimbangi dengan program lainnya yang mestinya menjadi daya ungkit untuk mengatasi persoalan pendidikan rata-rata masyarakat Jember usia 25 tahun keatas yang masih rendah (Lulus SD). Oleh karena itu peningkatan program dalam pengembangan kreativitas melalui Pendidikan Non Formal (PNF) juga harus mendapatkan perhatian kedepan. Tentunya ini perlu ada kolaborasi yang semakin rekat dengan lembaga lembaga diluar pendidikan formal negeri namun juga melibatkan lembaga swasta , keagamaan, pondok pesantren maupun komunitas belajar masyarakat (KBM).		
2	Fasilitas Pendidikan Pada aspek penyediaan fasilitas/ sarana pendidikan, pemerintah kabupaten Jember pada tahun 2019 melakukan perbaikan sekolah pada enam lembaga TK/PAUD, 191 lembaga SD, dan 27 lembaga SMP, serta menganggarkan perbaikan ruang	Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	Terima kasih atas sarannya, terkait dengan kesalahan teknis dalam pekerjaan rehabilitasi ruang kelas sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kedepannya



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	kelas sebanyak 510 ruang. Namun pembangunan tersebut menyisakan beberapa persoalan yaitu Insiden SD Negeri Keting 02, Kecamatan Jombang yang ambruk sebelum diserahkan. Serta ada bangunan yang kondisinya sudah banjir dan keramiknya copot, padahal belum diserahkan yaitu di SDN Curahakir 03 Kecamatan Tempurejo. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sampai ambruk sebelum bantuan rehab turun, seperti SDN Selodakon 03, Kecamatan Tanggul, dan SD Negeri Curahaklong 05, Kecamatan Bangsalsari. Persoalan ini terjadi karena perubahan kebijakan bahwa pembangunan dan renovasi sekolah dilakukan oleh Dinas pendidikan berdasarkan data dapodik yang harus diupdate oleh sekolah dan penentuan lokasi pembangunan dilakukan oleh Dinas. Keterlambatan sekolah dalam merespon untuk melakukan updating Dapodik serta tidak meratanya kemampuan SDM dan manajemen sekolah dalam melakukan updating data tersebut menjadikan banyak sekolah terutama dipinggiran yang kondisi mengesankan dan tidak layak namun tidak masuk dalam prioritas pembangunan atau perbaikan. Disisi lain muncul fakta bahwa pembangunan yang dilaksanakan Dinas lemah dalam pengawasan		dalam proses pemilihan penyedia (sebelum berkontrak) kami akan lebih selektif dan menyesuaikan aturan-aturan yang ada. Ditahun 2020 Dinas Pendidikan telah mengajukan daftar lembaga yang akan direhabilitasi menggunakan dana APBD ke Dinas PU Cipta Karya dikarenakan pengalokasian anggaran/kegiatan ada Dinas PU Cipta Karya, dan untuk DAK TA 2021 dalam Penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PU Cipta Karya dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR dan Data calon penerima bersumber dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Didalam pengawasan pekerjaan konstruksi Dinas Pendidikan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	pembangunan sehingga banyak kejadian bangunan yang runtuh rusak sebelum diserahterimakan. Belum lagi ada beberapa pembangunan yang GAGAL dijalankan karena pekerjaan waktunya tidak mencukupi. Implikasinya serapan untuk program Rehabilitasi sekolah hanya kurang lebih 50 % (Rp 7.030.962.839) dari nilai yang dianggarkan Rp 15.580.082.000. Oleh karena itu kedepan perlu dipertimbangkan kembali kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dan pemerataan dan tentunya harus benar benar melibatkan kepentingan sekolah, kalau perlu dan tidak menyalahi aturan pembangunan diserahkan kembali pada sekolah dengan pertimbangan bahwa dinas pendidikan bisa lebih maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan bukan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sekaligus mengawasi pembangunan.		dibantu oleh Konsultan Pengawasan dalam pelaksanaannya, maka kami akan lebih selektif dalam proses pemilihan penyedia dan menyesuaikan aturan-aturan yang ada. Terkait serapan kegiatan rehabilitasi karena keterbatasan waktu dalam proses pelaksanaannya, agar tidak terulang maka ditahun ini kami akan perhitungkan kembali waktu pelaksanaan rehabilitasi agar terlaksana semua. Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi yang dilakukan oleh sekolah (swakelola), di Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan aturan untuk semua kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan kegiatan Swakelola ditiadakan dan menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
3	Pendidik dan tenaga Kependidikan Sementara pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan data LKPJ, pemerintah kabupaten Jember sudah memenuhi target rasio guru dan murid. Namun pemenuhan target tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan nasib guru terutama Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai bagian unsur tenaga pendidik. Pemerintah Kabupaten Jember GAGAL dalam memperhatikan permasalahan sumberdaya pendukung kesuksesan pendidikan yang didalamnya adalah ada unsur GTT/PIT. Kegagalan ini ditunjukkan dengan fakta bahwa gaji yang diterima GTT/PIT sangat kecil dan sering telat, bahkan ditambah persoalan kebijakan pemutasian yang semrawut serta masih banyak GTT yang tidak menerima surat keputusan (SK). Hasil penyelidikan DPRD Jember di dapatkan informasi dari keterangan Ketua PGRI Jember bahwa ada 900 SD yang ada di Kabupaten Jember rata-rata kekurangan hingga lima orang guru PNS di tiap sekolah. Namun kebutuhan ini tidak bisa tertutupi karena perubahan kebijakan bahwa penambahan guru mulanya dengan penerbitan SP dari kepala sekolah	Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jenjang SD/MI. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jenjang SMP/Mts. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat. Tahun 2020 BKPSDM sudah mengusulkan formasi ASN PPPK sebanyak 3822 orang PPPK yang formasinya akan diisi oleh Guru - guru GTT yang saat ini mengajar di sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Jember Program Perencanaan, Pengadaan dan Pengembangan Aparatur kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN	Terkait dengan penataan GTT/PTT dan besaran honor ditahun 2019/2020 pelaksanaannya dilakukan oleh BKPSDM, maka ditahun 2021 Dinas Pendidikan akan menata ulang GTT/PTT dengan menyesuaikan Bezetting/Kebutuhan Guru yang ada di Sekolah, dan untuk keterlambatan/besaran Honor GTT/PTT akan kami tinjau kembali untuk kesejahteraan GTT/PTT Tujuannya untuk mengakomodir para guru GTT yang mengajar di sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Jember agar bisa diangkat ASN PPPK dengan gaji dan tunjangan setara dengan PNS



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	beru bah dilakukan oleh bupati. Dampak perubahan ini menimbulkan banyak kerugian terutama pada kesejahteraan GTT yaitu kecilnya honor yang mereka dapatkan akibata pengaturan standarisasi honor GTT• P'IT yaitu; 1) kategori A untuk yang telah mengajar 1 sampai 7 tahun diberi honor Rp 350 ribu per bulan; 2) kategori B yang mengajar 7 - 14 tahun, Rp 750 ribu, dan 3) kategori C untuk yang lebih dari 20 tahun mendapatkan honor Rp 1,4 juta per bulan. Kebijakan ini tentunya jauh dari ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Jember tahun 2020. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya tidak adanya Formasi CPNS 2019 yang merupakan alternatif pintu harapan GTT untuk memperbaiki kesejahteraannya. Peluang bagi sebagian para guru (GTT) untuk jadi CPNS semakin kecil, karena CPNS mensyaratkan batas tidak boleh lewat dari 35 tahun mereka tidak bisa menjadi CPNS. Oleh karena itu kedepan pemerintah harus serius dalam meperhatikan persoalan GTT/P'IT terutama dalam kesejahteraan serta perlu alternatif kebijakan pemerintah untuk memperhatikan mereka yang tertutup peluangnya sebagai CPNS karena batasan umur.		

**B. Urusan Kesehatan**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Pada laporan LKPJ tahun 2019 data AKI dan AKB Kabupaten Jember mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Angka kematian Ibu Riil pada tahun 2017 sebanyak 63 orang lalu mengalami penurunan ada tahun 2018 menjadi 53 orang dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi sebanyak 47 orang. Angka kematian bayi Riil pada tahun 2017 sebanyak 225 bayi lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 378 bayi sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebanyak 329 bayi. Meskipun terjadi penurunan, namun angka tersebut masih terbilang besar, dan menjadi tugas yang harus dijalankan secara maksimal terutama pada peran tenaga kesehatan yaitu bidan dan perawat. Saat ini berdasarkan data BPS tahun 2019 jumlah bidan ada 1349 dengan rincian 645 bidan (Rumah sakit serta 50 Puskesmas), 389 adalah bidan desa, serta bidan yang tersebar di 76 pondok bersalin, dan 50 BKIA. Sementara itu berdasarkan data yang sama	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Jaminan Persalinan Program Perencanaan, Pengadaan dan Pengembangan Aparatur kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN Terkait pertanyaan dan pernyataan saudara dapat kami sampaikan hal berikut : Program Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 2020 tetap mengupayakan untuk mempertahankan angka kematian ibu dan bayi dan tidak mengalami kenaikan dan mendorong untuk menurunkan jumlah kasus kematian melalui : Pengkajian/Pembahasan kasus kematian ibu melalui AMP Internal Kegiatan AMP Medis tingkat Kabupaten Validasi data KIA dan KB Pertemuan Evaluasi Program KIA Pertemuan Evaluasi Program KB Penyeliaan Fasilitatif (SUFAS) Kegiatan Review Pembentukan Forum Penakib Di kabupaten	Menurunkan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2020. Untuk Kematian Bayi 2020 berhasil turun dari 329 menjadi 324 kasus tetapi pada kasus kematian ibu justru mengalami kenaikan kasus dari 47 menjadi 61 kasus Membuka peluang untuk perekrutan CPNS (berkoordinasi dengan BKDPSDM) Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di unit –unit layanan kesehatan di Kabupaten Jember Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak, melalui kegiatan: Sosialisasi stunting pada masyarakat Peningkatan Pelayanan KB



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	pada tahun 2019 seluruh puskesmas di kabupaten Jember melayani 216.071 (kunjungan ibu hamil, ibu menyusui, pemeriksaan bayi dan anak). Jika dilihat data tersebut menurut keterangan yang didapatkan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jember beban KerjaBidan yang berada di Puskesmas dan Pustu dalam mencapai target penurunan AKI dan AKBsangat berat sehingga kadang mengganggu kinerja pokok bidan. Tuntutan beban dan kerja ini tidak diimbangi dengan kesejahteraan Bidan terutama yang berstatus Honorer dan sangat membutuhkan. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh DPD PPNIJember bahwa sampai saat ini tenaga kesehatan perawat masih banyak berstatus honorer (kurang lebih 400). Status para perawat ini tingkat kesejahteraannya masih dibawah UMR dan tidak berbanding lurus dengan beban kerja. Satu satunya peluang mereka untuk memperbaiki kesejahteraan dengan mengikuti seleksi CPNS menjadi tertutup dengan tidak adanya Formasi CPNSTahun 2019. Berdasarkan gambaran tersebut pemerintah telah berhasil menurunkan AKI dan AKB pada tahun 2019	Pembinaan oleh Dokter Spesialis/OJT (SpOG, Sp.A, Sp JP, Sp PD) ke Puskesmas Penyediaan Sarana Pencatatan dan Pelaporan Kesejahteraan tenaga kesehatan untuk non-pns telah dikeluarkan surat penugasan oleh Ka. OPD sebagai salah satu syarat agar yang bersangkutan bisa mendapatkan jasa pelayanan atas pelayanan yang diberikan (Honor mengacu pada kinerja pelayanan yang bersangkutan) Tahun 2020 BKPSDM telah mengusulkan 728 formasi CPNS khusus tenaga kesehatan untuk direalisasikan rekrutmennya di tahun 2021 Program Keluarga Berencana Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) (Sumber: Dana DAK KB/ BOKB)	



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	namun pemerintah GAGAL dalam memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan Bidan. Sampai saat ini pemerintah juga masih BELUM MAMPU menntaskan pemetaan yang ideal untuk jumlah tenaga kesehatan puskesmas melalui Dinas Kesehatan, serta perhitungan besaran alokasi honor melalui BKPSDM sebagaimana yang direkomendasikan pada LKPJ tahun lalu.		
2	Program Pelayanan kesehatan Pada bidang pelayanan kesehatan salah satu gebrakan yang diunggulkan Pemkab Jember adalah program Jember Smart City (JSC) melalui aplikasi FAI (Fokus Anak dan Ibu) yang menorehkan penghargaan nasional. Program JSC with FAI ini telah dilaksanakan sejak Oktober 2018. Berdasarkan penyelidikan DPRD Jember faktanya PROGRAM INI GAGAL dan sama sekali tidak berjalan. Fakta yang didapat dari keterangan bidan serta hasil riset Analisis Kendala Penggunaan Sistem Informasi JSC with FAI di Kabupaten Jember berdasarkan Theory of Constraint (TOC) oleh Maya Weka Santi dan Atma Deharja yang dilakukan antara bulan Mei	Program Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Program Keluarga Berencana Sosialisasi dan Evaluasi Pelaporan Pengelola Program KB tingkat Kecamatan Grand Design program JSC FAI sudah terbentuk sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk penurunan AKI dan AKB serta secara bertahap dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan. Ditengah perjalanan, program ini manajemennya disatukan dengan program Jember Smart City dalam satu koridor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di bawah oleh Diskominfo dan selanjutnya JSC-FAI mengikuti sistem yang diberlakukan oleh Jember	Perbaikan system JSC-FAI sehingga secara optimal dapat dipakai sebagai media dalam menekan AKI dan AKB Optimalisasi JSC-FAI dengan melakukan upaya sosialisasi dan pengembangan sistem manajemen Pembangunan jaringan dan system data berbasis IT untuk mendukung administrasi dan pelayanan serta website yang dapat diakses masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan, khususnya Pelayanan KB, melalui kegiatan: Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	sampai Desember 2019 menyatakan bahwa program yang dilakukan dengan pemberian 248 buah handphone Android kepada bidan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, serta rekrutmen tenaga untuk mengelola server sistem JSC with FAI sebanyak 6 orang yang bekerja secara shift di pusat sistem dan harus stand by 24 jam, ini praktis mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan adalah program atau sistem aplikasi sering terjadi eror ketika bidan menginputkan data kesehatan ibu. Akhimya menyulitkan bidan untuk mengulangi menginputkan kembali data kesehatan ibu yang belum tersubmit. Dampaknya data kesehatan ibu belum tersimpan dengan lengkap dan informasi yang dibutuhkan end user belum dapat diakomodir oleh system secara baik. Faktor lainnya adalah Fitur yang disediakan dalam JSC With FAI tidak begitu dipahami oleh bidan, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya partisipasi bidan menginputkan data hasil pemeriksaan kesehatan ibu ke dalam sistem informasi JSC with FAI. Sementara aplikasi maps yang disediakan untuk melacak lokasi ibu hamil dengan konsep	Smart City Dalam pelaksanaan program JSC FAI ini dibutuhkan komitmen antara lain oleh penentu kebijakan dan pelaksana program di lapangan baik di Puskesmas(FKTP) maupun di RS (FKTL). Berbagai upaya yang dilakukan: Sosialisasi kepada stakeholder Sosialisasi kepada tenaga kesehatan mulai dari dokter spesialis, dokter umum dan bidan Buku manual pelaksanaan JSC with FAI Pembentukan group WAG Komitmen ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Diskominfo bertugas menyediakan ruang pada server Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Keluarga Miskin Peningkatan pelayanan KB



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Panic buttons kebanyakan terlacak berkumpul pada satu titik yaitu di Puskesmas, hal ini menggambarkan sistem tidak mampu memberikan informasi persebaran lokasi tempat tinggal ibu hamil risiko tinggi di wilayah kerja suatu Puskesmas. Berdasarkan penjelasan tersebut program ini yang diunggulkan sebagai presatasi faktanya GAGAL di implementasikan karena program tidak memperhatikan dukungan kapasitas sumber daya SDM pelaksana.		
3	Program Pembiayaan Kesehatan Program pembiayaan kesehatan pemerintah Jember pada tahun 2019 telah merealisasikan anggaran kurang lebih Rp 147.698.104.385 melalui jaminan kesehatan non kapitasi, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, serta jaminan kesehatan nasional kapitasi. Untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin yang dibiayai oleh SPM yang tidak tercover dalam BPJS pada tahun 2019 jumlahnya 13.389. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan DPRD Jember jaminan pembiayaan kesehatan ditetapkan rumah sakit sebagai rujukan pelayanan di Jember yaitu RSD Dr Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat.	Program Pembiayaan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Terima Kasih atas saran dan masukan dari DPRD, terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin anggaran tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan N0 3 DPPA/Penggunaan/OPD/2020 Tahun 2020 yaitu program Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan SPM Kegiatan : pelayanan kesehatan masyarakat miskin Jumlah anggaran : 33.782.739.021 Realisasi anggaran :	Diharapkan kerjasama dengan pihak ke 3 sejak Tahun 2021 dapat dilakukan sesuai prosedur.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Kemudian pada tahun 2017 Bupati membuat MOU Kerjasama dengan RSBS sebagai penyelenggara kesehatan tingkat lanjutan, Mou ini kemudian pada tahun 2018 ditandaklanjuti dengan Bupati menerbitkan Surat Keputusan Tim Rujukan Sosial (TRS) yang juga memberikan previledge kepada RSBS sebagai satu-satunya RS swasta yang ada di Jember yang memiliki Tim TRS, karena seharusnya Tim TRS yang dibiayai oleh APBD Jember hanya berada di Rumah Sakit Daerah (RSD) saja, adapun Tim TRS memiliki tupoksi paling utama adalah: melaksanakan sosialisasi dan pelayanan administrasi Surat Pernyataan Miskin (SPM) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember yang belum maupun sudah memiliki jaminan kesehatan. Akibat dari SK Bupati No 188.45139211.1212018 tentang TRS maka setiap hari di RSBS dibuka loket pelayanan TRS, dimana ada ASN yang bertugas dt RSBS, dari dinas: 1) Dinas Kesehatan bertugas meneliti keabsahan surat rujukan dari Puskesmas dan tugas administrasi mengarsip SPM; 2) Dinas Sosial meneliti keabsahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan menerbitkan SPM;	33.266.788,869 Terkait pelaksanaan kerjasama dengan RSBS didasari SK Bupati Dan MoU antara Pemkab dengan RSBS Untuk sementara pelayanan dihentikan sambil menunggu petunjuk Bupati lebih lanjut	



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan dan meneliti keabsahan administrasi kependudukan, menerbitkan surat kelahiran dan membantu urusan kependudukan lainnya. Hasil dari kebijakan Bupati tersebut adalah traffic pasien yang berobat di RSBS mengalami lonjakan yang luar pada tahun 2019. Data pelayanan yang berimbas dengan jumlah klaim pelayanan SPM dari APBD Dinas Kesehatan. Tahun 2017 masih Rp. 0 karena belum ada MoU, tahun 2018 mencapai Rp. 3, 1 Milyar dan tahun 2019 mencapai 6,01 Milyar dimana sudah melebihi klaim dari RSD Kalisat yang hanya mencapai Rp. 5,3 Milyar Begitu juga pelayanan pasien yang memiliki jaminan kesehatan dari BPJS sumber kami di internal BPJS Kesehatan Jember, dalam tahun 2018 rata-rata per bulan mencapai Rp. 3-4 Milyar sedangkan tahun 2019 rata-rata per bulan mencapai Rp. 4-5 Milyar. Data dan angka detail tidak dapat kami dapatkan karena memerlukan permintaan melalui surat resmi ke BPJS Kesehatan. Berdasarkan temuan hasil penyelidikan angket tersebut mengindikasikan terjadinya		



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007 tentang tata cara kerjasama daerah. Didalam aturan tersebut dijelaskan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga yang menggulirkan sumber dana APBD harus melalui persetujuan DPRD.		

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pelaksanaan program pembangunan jalan berdasarkan data BPS berdampak peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada aspek pengerjaannya banyak yang melewati tahun anggaran 2019. Hal ini berimplikasi adanya perpanjangan pekerjaan dan denda pada pihak ketiga (perusahaan) yang menjalankan kegiatan. Keterlambatan ini disebabkan oleh pekerjaan dilapangan yang molor dan ini tentunya berkaitan dengan perencanaannya tidak matang dan tidak tersedianya cukup waktu. Sementara dalam perbaikan jembatan terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dengan target pekerjaan sebagaimana dalam RKPD maupun RPJMD. Dalam	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Peningkatan Jembatan - Perencanaan jembatan pariwisata hanya terealisasi 1 dari perencanaan sebelumnya . Sehingga tindak lanjut yang dilakukan merencanakan kembali pada tahun 2020 perencanaan jembatan pariwisata yang belum dibangun.	- Merealisasikan 22 janji Bupati dalam mengembangkan pariwisata dan identitas Jember sebagai Bumi Sholawat.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	RKPD dan RPJMD perbaikan Jembatan yang harusnya di peruntukkan bagi pembangunan 5 jembatan yang dibangun dengan nilai anggaran Rp. 6. 776.800.870. Namun dalam realisasi pembangunan terse but hanya dijalankan untuk pembangunan 1 jembatan (Semanggi) yang nilainya kurang lebih 4,4 Milyar di tambah sekitar 200 san juta untuk tambahan pekerjaan dalam klausul addendum, nilai ini tentunya berdampak pada pada rencana realisasi 4 jembatan lainnya tidak bisa dijalankan sehingga berdampak pada pengembalian.		
2	Program Pembangunan saluran darainase/ gorong-gorong Pembanguan saluran drainase/ gorong-gorong juga mengalami hal yang sama yaitu pengerjaan melewati tahun anggaran 2019. Keterlambatan ini disebabkan banyak pekerjaan dilapangan yang molor dan ini tentunya berkaitan dengan perencanaannya tidak matang. Bahkan terdapat pekerjaan yang dianggarkan senilai Rp. 1.181.351.731 yang hanya mampu direalisasikan Rp. 409.550.000 sehingga realisasi kinerjanya kurang dan pekerjaan ini harus dimulai dari awal tahun (tidak bisa dikerjakan), dan rata rata pekerjaan tidak dijalan dengan maksimal karena kendala administrasi atau belum ada petunjuk pelaksanaan.	Program Pembangunan saluran darainase/ gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tindak lanjut untuk pekerjaan yang molor agar lebih melaksanakan dan mematuhi perencanaan di awal anggaran. Pekerjaan normalisasi drainase dilakukan dengan memanfaatkan tenaga URC sehingga upah tidak dikeluarkan.	Tujuan perencanaan lebih awal agar tidak sampai terjadi keterlambatan saat pelaksanaan. Memanfaatkan tenaga URC yang ada agar pekerjaan dapat segera dapat dilaksanakan.
3	Program Pembangunan RTH	Program Pemanfaatan	Tujuannya untuk



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Program pemeliharaan RTH pada tahun 2019 direncanakan 7 (tujuh) RTH dan mestinya pada akhir tahun 2019 semua pekerjaan mampu diselesaikan. Berdasarkan penyelidikan DPRD hanya beberapa RTH yang dapat diselesaikan yaitu RTH Mangli, RTH Arjasa, RTH Summersari dan RTH Gajah Mada. Permasalahan yang muncul adalah beberapa pekerjaan melewati tahun anggaran 2019 yang disebabkan pekerjaan dilapangan yang molor dan ini tentunya berkaitan dengan perencanaannya tidak matang, juga terdapat pemborosan anggaran yaitu pada pengerjaan salah satu temuan penyelidikan Dewan adalah pada RTH (Gajah Mada) yang pada tahun anggaran 2018 sudah dianggarkan senilai 800 juta kemudian ditahun 2019 dianggarkan Rp. 2,7 milyar. Sementara terkait perencanaan Desain Pembangunan RTH ini juga tidak memperhatikan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan sebagaimana Peraturan Menteri PU No 05/PRT/M/2008 dengan ketentuan Pembangunan RTH Kecamatan harus memperhatikan luas area tanaman yang ditanami minimal 80%- 90% dari luas taman, sisanya berupa pelataran tanpa bangunan. Selain itu juga mengatur ketentuan jenis tanaman yang ditanam minimal 50 pohon pelindung, dan jenis pohon	Ruang Pembangunan RTH di Kecamatan Se-Kabupaten Jember Kekurangan Tanaman dan Pohon Pelindung akan kami tambah dengan melakukan penganggaran di Tahun 2021	meningkatkan keindahan Ruang Terbuka Hijau di Kab. Jember Meningkatkan ruang terbuka hijau di Kabupaten Jember



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	kecil sedang serta tanaman aktif minimal 100 pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis tanaman pasif. Pembangunan RTH ini juga memanfaatkan aset dari Kantor Pemuda dan Olah raga yaitu lapangan Olah Raga. Pembangunan RTH yang dilakukan di tempat sarana olah raga ini bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAANNASIONAL BAB XI PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA Pasal 67 ayat 7 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang meniadakan dan/ atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan perumahan rakyat dan permukiman yang perlu mendapatkan sorotan penilaian adalah pada implementasi program Rumah tidak layak Huni (RTLH). Sebagai catatan sebagaimana yang disampaikan dalam LKPJ program ini merupakan program bidang infrastruktur dengan realisasi 2556 unit	Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Kawasan Tertentu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1. Pada Tahun 2019 Anggran RTLH masuk anggaran Bantuan	Tujuannya untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Jember Pembangunan Fisik RTLH yang belum



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	total nilai APBD untuk program ini adalah Rp 47.705.000.000 sebagaimana Perda APBD perubahan tahun 2019 serta Perbup No 69 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2019. Hal berbeda dengan apa yang disampaikan dalam dokumen LKPJ tahun 2019, bahwa program ini dianggarkan dalam dinas perumahan rakyat, permukiman dan cipta karya sebesar Rp 11.400.013.000 dan anggaran ini hanya mampu direalisasikan Rp. 5.610.449.706. Jika mengacu pada nilai APBD 2019 serta nilai program dalam LKPJ maka menggambarkan program ini TIDAK TUNTAS atau TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK, karena program ini bisa dikatakan sebagai penyumbang SILPA besar dalam APBD 2019. Selain itu program ini juga menyisakan beberapa permasalahan salah satunya jika mengacu pada SK Bupati yang diterbitkan maka program ini adalah program bantuan sosial maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan no 13 tahun 2018 pasal 23 A, pemberian bantuan sosial yang diserahkan pada individu/keluarga harus disampaikan nama, alamat dan besaran bantuan sosial yang diberikan dalam perbup penjabaran APBD 2019. Penentuan penerima bantuan ini tentunya didasarkan pada usulan calon penerima yang menurut Perbup No 19 tahun 2016 harus diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Bahkan berdasarkan temuan pansus	Sosial (Bansos) yang ada di BPKA sebesar Rp. 52,485.000.000 Untuk RTLH sebanyak 2.726 Unit 2. Berdasarkan data pengajuan masyarakat untuk RTLH sebanyak 4.582 Rumah. 3. Dalam Pelaksanaan Kegiatan RTLH didampingi oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) dan Koordinator Fasilitator. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh TFL dan Koordinator TFL adalah melakukan verifikasi lapangan dari pengajuan masyarakat untuk RTLH sebanyak 4.582 Rumah dan terverifikasi untuk Kegiatan RTLH P-Apbd 2019 sebanyak 2.267 Unit Rumah. 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bersama dengan TFL dan Koordinator TFL melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap 2.261 Rumah dari 2.267 Rumah sesuai SK Bupati 2019 tentang Penerima	terselesaikan dan akan dilaksanakan kembali tahun 2021



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	dilapangan bahwa proses pengusulan ini dikordinir oleh OKNUM PERORANGAN di lapangan yang notabene adalah relawan bupati berbasis sopir ambulan desa yang tidak memiliki legalitas dan penugasan dengan mengesampingkan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta Pemerintahan Desa. Hal ini hampir terjadi disemua lokasi penerima bantuan sosial RTLH yang pendanaannya dari APBD2019. Bahkan muncul kejadian pengusulan yang dilakukan pemerintahan desa Lembangan 50 orang yang diakomodir hanya 2 penerima. Program ini patut diduga sebagai bentuk konsensi politik kekuasaan dan berpeluang terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dilakukan oleh oknum-oknum perorangan yang mantan Tim Sukses Bupati. Bahkan program ini sudah masuk ke penyelidikan KPK yang melibatkan sdr. Faisal bekas kordinator relawan Bupati. Hasil penelusuran dilapangan terdapat temuan yang menguatkan indikasi tersebut bahwa pelaksanaan program mi dilapangan tidak disertakan Juklak, Juknis serta pedoman pelaksanaan yang jelas. Oleh karena DPRD Jember perlu mendorong bahwa program ini untuk ditindak lanjuti dengan PEMERIKSAAN serta tindak lanjut OLEH APARAT PENEGAK HUKUM.	Bantuan Sosial Kegiatan RTLH P-Apbd 2019	

**E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Program penataan pedagang kaki lima (PKL) Program pendataan, penataan PKL yang harusnya penting untuk dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga penataan tata kota dan jalan agar lebih tertata indah dan baik. Namun program penataan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada arahan teknis penanganan PKL serta terdapat persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi. Hal yang sama juga terjadi di beberapa program lainnya yaitu program pemberantasan penyakit masyarakat, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, Program pemahaman peraturan perundang-undangan (PERDA) Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kriminal, serta program wawasan kebangsaan. Tidak terlaksananya program ini berdampak pada serapan anggaran serta ketercapaian kinerja program yang rendah dalam urusan ini.	Program penataan PKL (refocusing Covid 19) SK panitia sebagai dasar pelaksanaan kegiatan harus segera diselesaikan di awal tahun anggaran, Koordinasi bersama OPD terkait (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Cipta Karya, Disperindag, Diskop, Dishub dan Kepolisian) perlu segera dilaksanakan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terbaik dalam penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) diseluruh Kab. Jember. Dalam hal penataan PKL, sesuai RPJMD 2016-2021 OPD pelaksana adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Cipta Karya. SatpolPP adalah salah satu team task force yang ada, meskipun dalam kenyataannya, sehari-hari Polpp telah	Selama tahun 2019, banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan karena keterlambatan turunnya SK panitia sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran yang ada. Sehingga tidak cukup administrasi dan waktu untuk melakukan koordinasi dan realisasi kegiatan yang telah direncanakan Sosialisasi tentang Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember kepada masyarakat dengan melibatkan OPD teknis dan unsur masyarakat (PKL)



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		melakukan penindakan bagi PKL yang secara nyata melakukan pelanggaran, misalnya meninggalkan rombongan/ gerobak jualan didekat lampu merah. Selebihnya Polpp menunggu kebijakan daerah menyikapi adanya keberadaan PKL dan penanganannya. Terkait penanganan penyakit masyarakat perlu koordinasi yang lebih intensif bersama jajaran terkait (Toga, Tomas, unsure kewilayahan, Dinas pariwisata dll), agar kegiatan yang telah direncanakan benar-benar efektif dan efisien serta tepat sasaran Dalam penanganan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, perlu koordinasi yang lebih intensif bersama BPBD dan BASARNAS yg telah memiliki data potensi bencana di Kab. Jember Program Penataan	



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	
2	Program Peningkatan dan pemajuan HAM Hal berbeda dalam Implementasi Program Peningkatan dan Pemajuan HAM, program ini dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan FESTIVALHAM yang digunakan sebagai branding bupati untuk menunjukkan keberhasilan dalam penanganan HAM melalui proses tawaran kolaborasi program dengan salah satu NGO Nasional. Program ini sebenarnya tidak masuk bagian program yang direncanakan dalam pencapaian target melalui RKPD maupun RPJMD. Sehingga program ini tidak muncul dalam dokumen Renstra maupun Renja yang sudah disusun sebagai acuan pelaksanaan program, dampaknya dengan terlaksananya program ini memaksa OPD (Bakesbangpol) untuk melakukan penyesuaian pada Renja maupun Renstranya.	Kegiatan Festival HAM merupakan wujud dari Program Pemajuan HAM, yang merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan HAM di Kabupaten Jember Program Pelaksanaan Rencana Nasional Hak Asasi Manusia /RANHAM Peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM

F. Urusan Sosial

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Program data , survey, dan informasi kesejahteraan sosial	Kegiatan Pendataan. Survey dan Informasi	Tujuan : Verifikasi data bertujuan sebagai



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Pada program ini mampu direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1.050.651.200 dari target anggaran Rp 1.364.148.500, dalam catatan permasalahan di LKPJ disampaikan bahwa program ini terdapat kendala teknis dan administrasi. Jika dilihat dari fakta yang berjalan bahwa kabupaten Jember masih carut marut berkenaan dengan data kemiskinan data penerima bantuan baik oleh pemerintah pusat (BPNT,PKH,maupun BST)serta bantuan dari BLTDana Desa. Fakta ini menunjukkan bahwa program ini GAGAL DILAKSANAKAN karena sampai hari ini pemerintah kabupaten tidak memiliki hasil survey verifikasi dan validasi data kemiskinan yang mampu ditunjukkan kepada publik sebagai data yang valid. Pertanyaanya kemudian realisasi anggaran tersebut digunakan dan pertanggungjawabkan untuk apa? Serta bentuk output dari kegiatannya seperti apa?	Kesejahteraan Sosial Realisasi Anggaran tersebut digunakan untuk : Pengadaan formulir kriteria kemiskinan sesuai Kemensos RI, Honor dan Uang Saku petugas verifikasi lapangan (KPM yang masuk dalam DTKS), Uang Saku petugas input hasil verval Output Kegiatan : Verval kepada 301.000 KPM DTKS di Kab Jember, dengan hasil : Formulir Kembali sejumlah 150.000 KK Data DTKS yang berhasil diperbaharui dalam SIKS-NG sebesar 51.000 KK Data tidak valid/perlu perbaikan Adminduk sebesar 120.000 KK Data KPM masuk DTKS tapi belum menerima bansos sebesar 82.000 KK	dasar penentuan sasaran penerimaan bantuan sosial. Efektifitas dan ketepatan sasaran penanganan fakir miskin sangat tergantung kepada basis data yang diperbarui setiap waktu sesuai dengan kondisi masyarakat Masalah : Inventaris permasalahan angka kemiskinan, berawal dari data awal yang digunakan oleh Kemensos yang bersumber dari data BPS, dimana dari data ini tidak terupdate dengan maksimal oleh Pemerintah Daerah Permasalahan Pemerintah Daerah tidak maksimal update DTKS karena : Operator desa/pihak desa terkesan verval data asal-asalan Operator desa/pihak desa tidak berani update data



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			Operator desa/pihak desa tidak mampu menggunakan aplikasi SIK-NG karena terkendala SDM Sarana prasarana (computer) di Desa tidak mendukung aplikasi SIKS-NG Kepala Desa tidak mau untuk meng - up date DTKS (tidak ada kebijakan untuk update maupun dukungan lain) Penyelesaian Masalah : Sosialisasi kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa terkait pentingnya Update DTKS Dilaksanakan Bimtek untuk Operator DTKS beserta petugas pencacah lapangan
2	Program peningkatan taraf hidup Fakir Miskin dan PMKS Pada program ini mampu direalisasikan anggaran sebesar Rp 11.207.100.950 dimana salah satu realisasi anggaran terbesar adalah untuk pengadaan sarana dan	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin Realisasi Anggaran tersebut digunakan untuk	Tujuan : Memberikan perlindungan pelayanan sosial dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Masalah : Data



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Sementara itu dalam keterangan LKPJ disampaikan bahwa kegiatan ini tidak dapat dijalankan secara maksimal dan terkendala teknis di lapangan. Jika program ini mampu dijalankan dengan pengadaan barang untuk pendukung sarana dan prasarana bagi orang miskin, maka penyalurannya harus didasarkan pada ketentuan bantuan hibah/ sosial yang diserahkan pada individu/keluarga dan harus disampaikan nama, alamat dan besaran bantuan sosial didasarkan pada usulan calon penerima yang menurut Perbup No 19 tahun 2016 harus diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Tentunya ketentuan ini juga harus didukung data yang valid penenma hibah/bantuan sosial. Ketidak jelasan pelaksanaan program tersebut akan berindikasi terjadinya pelanggaran pidana dan berpotensi korupsi, oleh karena itu DPRD Jember perlu mempertanyakan kejelasan 1) realisasi anggaran tersebut digunakan pengadaan sarana dan prasarana apa? 2) Jika sudah dibelanjakan barang apakah sudah disalurkan? 3) bagaimana mekanisme penyalurannya?	belanja bahan pokok/beras bagi keluarga miskin di Kabupaten Jember, pada 7.852 KPM di Kabupaten Jember, sesuai dengan kriteria kemiskinan dari Kemensos RI : penghasilannya kurang dari Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan keadaan tempat tinggal/rumah berdinding bambu/gedek/seng/tembok bahan bakar untuk memasak kayu/arang dan minyak tanah/LPG 3 Kg rata-rata frekwensi makanan dalam sehari masing-masing anggota keluarga 2 (dua) kali atau kurang kepemilikan tabungan/barang mudah dijual senilai maksimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah), dan merupakan masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Jember.	penerima bantuan yang kurang valid Penyelesaian Masalah : Dilaksanakan verifikasi data bagi KPM Rastrada 2019

**G. Urusan Ketenagakerjaan**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan sorotan penilaian adalah pada rata-rata realisasi program dan kegiatannya yang masih rendah. Pada penyelenggaraan urusan ini pemerintah kabupaten Jember GAGAL karena tidak ada program yang signifikan baik secara perencanaan atau anggaran untuk menyelesaikan persoalan penyerapan tenaga kerja , serta hubungan industrial yang relatif tidak kondusif melalui program-program keberpihakan pada pekerja maupun buruh. Penyelenggaraan urusan ini juga menggambarkan pemerintah gagal dalam mengoptimalkan kerja dewan pengupahan yang keberadaan tidak berjalan dengan baik karena tidak ada perhatian kebijakan maupun program serta anggaran. Oleh karena itu jika pada tahun 2019 tingkat pengangguran kabupaten Jember sebesar 3,8 % atau sebanyak 48.278 orang berkurang 3.901 dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 52.179 orang atau sebesar 4,09%, maka dapat dipastikan adalah kontribusi pergerakan dari sektor swasta BUKAN prestasi kinerja program dari pemerintah.	Program Penempatan Tenaga Kerja Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja Program Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten	Meningkatnya penempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, Indikator keberhasilannya adalah prosentase pencari kerja yang ditempatkan. Mempertemukan Informasi Pasar Kerja (Lowongan 689 dengan Pencari Kerja 763 Orang) Penempatan yang diterima oleh perusahaan sesuai kualifikasi adalah 154 Orang terdiri dari 142 perempuan dan 12 Penyandang Disabilitas Meningkatnya ketenangan bekerja dan berusaha pada masyarakat industri (pengusaha dan pekerja), Indikator keberhasilannya adalah prosentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (tujuan idealnya adalah Nihil Kasus) Berdasarkan jumlah kasus terselesaikan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			pada tahun 2018 yaitu 40 kasus. Untuk tahun 2019 kasus yang masuk turun menjadi 28 Kasus dan bisa diselesaikan semuanya

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan pemberdayaan perempuan dan anak yang perlu mendapatkan sorotan penilaian adalah pada upaya untuk menekan rasio kekerasan dalam rumah tangga serta tingkat capaian kabupaten layak anak. Berdasarkan data yang dirilis oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia bahwa terdapat pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3-5 kali per hari di kabupaten Jember pada tahun 2019. Jika dilihat dari data tersebut pemerintah Jember GAGAL dalam upaya untuk penanganan secara serius persoalan perlindungan Perempuan, hal ini dipertegas dengan tidak berjalannya secara maksimal program fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2PT) dengan harapan mampu rasio kekerasan dalam rumah tangga. Program ini menyerap anggaran Rp. 56.522.600 namun program ini kegiatannya tidak berjalan maksimal karena kurangnya SDM serta menunggu petunjuk pelaksanaan.	Upaya menekan rasio KDRT dan tingkat capaian KLA sudah ditindaklanjuti pada Tahun 2020 pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Anak serta pada: Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Menekan rasio KDRT tahun 2020 (195 kasus tertangani 100%, dengan rincian 44 kasus pada perempuan dan 151 kasus pada anak) dan tingkat capaian KLA (2019: Pratama, 2020: taraf penilaian)

**I. Urusan Kependudukan dan Capil**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan kependudukan dan capil yang perlu mendapatkan sorotan penilaian pada pemanfaatan data base dan membangun inovasi pelayanan. Ini penting karena fakta dilapangan bahwa pelayanan di dispenduk capil masih terjadi antrean panjang setiap harinya, bahkan masyarakat harus berangkat subuh dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan antrean awal. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah GAGAL dalam membuat terobosan program dan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Jika dilihat dalam pelaksanaan program tidak ada program terobosan dan upaya dari pemerintah kabupaten Jember untuk mempermudah dalam pelayanan kependudukan. Terobosan mestinya dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran kecamatan dalam pelayanan kependudukan, karena secara dukungan infrastruktur itu sangat memungkinkan dilakukan. Tinggal pembenahan kapasitas SDM pelayanan serta MOU dukungan dirjen Adminduk untuk pemanfaatan data, dan ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten tetangga. Dalam catatan permasalahan LKPJ disampaikan bahwa aktivitas kegiatan dispenduk capil justru banyak menempel pada aktivitas /kegiatan bidang lain bukan terobosan atau inovasi yang dirancang	1). Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 2). Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 3). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1.Pelayanan Admindukcapil saat ini kita lakukan melalui digitalisasi: a.Aplikasi LAHBAKO : Pengajuan layanan harian adminduk dari Kecamatan ke dispenduk b.Aplikasi PLENO : Pengaduan Permasalahan ke Dispenduk 1.Pelayanan Adminduk Melalui WA online: Pengaduan Permasalahan Data 0811-3118-1182 KK dan SURAT PINDAH 0811-3118-1184 KTP dan KIA 0811-3223-0374 AKTA KELAHIRAN 0811-3118-1180 2.Aplikasi SIP (Sistem Informasi Penduduk) : Layanan Adminduk Harian dari masyarakat ke dispenduk 3. WA Pengaduan Masyarakat terkait Data Admindukcapil 4.Sosialisasi Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) melalui Youtube dengan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	sendiri dari anggaran kegiatannya dikarenakan alasan payung hukum yang tidak kuat' Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pada SDM pengelola dilakukan proses mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. proses mutasi tersebut dilakukan pada sdr Sartini dari jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ke jabatan baru pada salah satu Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Atas mutasi tersebut Bupati Jember telah ditegur oleh Menteri Dalam Negeri RI yang ditandatangani oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI melalui surat Nomor : 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019 perihal: Peringatan Atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan Kabupaten Jember. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindak lanjuti surat tersebut dengan memerintahkan Bupati Jember untuk melakukan langkah-langkah yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat ini wajib membatalkan dan mengembalikan pejabat yang dimutasi sebagaimana angka 1 ke dalam jabatan semula sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas		kecamatan dan masyarakat bertanya melalui komentar di youtube 5.Sosialisasi melalui Media Elektronik di TV dan Radio tentang Admindukcapil Pendistribusian dokumen admindukcapil melalui Pendopo Ekspres untuk sampai kepada masyarakat. 1).Bahwa berdasarkan Permendagri RI No.76 th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kab/Kota. 2).Sudah bersurat kepada Bupati Jember dengan tembusan Kepala BKSDM Kab.Jember Nomor:800/46/35.09.320/2021 perihal Laporan SK Pengangkatan dalam Jabatan eselon III dan IV yang belum mendapatkan SK Menteri Dalam Negeri.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	selaku Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala seksi/Kepala Sub Bagian. Namun fakta sampai sekarang teguran dari Mendagri serta surat Gubernur Jawa Timur tidak dijalankan dan ini melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015, yaitu mengajukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Potensi pelanggaran ini jika dibiarkan akan berdampak sebagai dasar rujukan untuk dilakukan pelanggaran berikutnya, sedangkan pada Dispenduk capil adalah urusan vital jika sering terjadi mutasi jabatan akan berdampak buruk pada pelayanan.		

J. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu mendapatkan sorotan penilaian peran dari pemerintah kabupaten dalam pengawalan program dana desa untuk bisa bersinergi dengan program kabupaten. Selain itu juga pada upaya untuk mendorong inovasi dan terobosan desa dalam upaya untuk peningkatan perekonomian desa serta pelayanan yang ada di desa. Jika melihat pada laporan LKPJ praktis tidak ada program yang dijalankan dalam mendorong pencapaian dua hal tersebut. Pada tahun 2019 praktis kegiatan urusan pemberdayaan	Bidang I : Pemberdayaan Masyarakat Pada tahun 2019 Program dan Kegiatan di Bidang I Pemberdayaan Masyarakat adalah : Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Kegiatan Pembinaan Bhakti Gotong Royong	Bidang I : Pemberdayaan Masyarakat Realisasi anggaran kegiatan pada tahun 2019 ini telah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan juknis yang tersaji. Program / Kegiatan yang menyangkut Pemberdayaan Masyarakat telah diajukan tetapi tidak mendapatkan alokasi APBD Kabupaten Jember di tahun



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	masyarakat hanya untuk menjalankan urusan rutin dan penunjang operasional dan GAGAL dalam metrakukan pembinaan dan mendorong inovasi pembangunan dan pelayanan desa. Sementara persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan Pilkades secara serentak. Kebijakan bupati dalam pendanaan pilkades serentak menimbulkan persoalan dimana ketidakjelasan anggaran serta beban dari panitia pilkades. Fakta dilapangan karena ketidakjelasan dan sentralisasi anggaran oleh pemkab menjadikan biaya politik untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa sangat besar dan bervariasi serta menimbulkan polemik. Untuk itu DPRD Jember memandang perlu bahwa pendanaan pilkades serentak kedepan dikembalikan ke model lama dengan memberikan kepercayaan pada panitia ditingkat desa untuk mengelola yang tidak bertentangan dengan Regulasi.	Kegiatan ini telah dilaksanakan berupa Pencanaan Kegiatan BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo dalam bentuk pameran dengan menampilkan beberapa hasil produk unggulan BUMDesa dan UMKM Desa, dan TMMD 2019 di Kabupaten Jember. Selain itu terdapat program dari Provinsi Jawa Timur, Jalin Matra yang melekat di dalam kegiatan tersebut dan telah dilaksanakan. Diharapkan pada tahun 2021 Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran lebih, agar dapat melakukan pembinaan dan mendorong inovasi dengan lebih baik lagi, pada kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dalam keg.	2019 dan 2020 dengan rincian kegiatan : Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dalam keg. Posyandu Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kegiatan Pembinaan Bhakti Gotong Royong Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan TMMD (pada tahun 2019 melekat di Kegiatan Pembinaan Bhakti Gotong Royong) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, KPM, RT/RW) Kegiatan Diseminasi Profil Desa dan Kelurahan (DPDK) Hanya Program dari



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Posyandu Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kegiatan Pembinaan Bhakti Gotong Royong Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan TMMD (pada tahun 2019 melekat di Kegiatan Pembinaan Bhakti Gotong Royong) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, KPM, RT/RW) Kegiatan Diseminasi Profil Desa dan Kelurahan (DPDK)	Provinsi Jawa Timur yaitu Jalin Matra pada 2019 dan Jatim Puspa pada 2020 yang tetap dapat berjalan karena mendapatkan BKK berupa BOP dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
		Bidang II : Pengelolaan Keuangan Desa - Program dan kegiatan di Bidang II Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2019 adalah : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan	Bidang II : Pengelolaan Keuangan Desa - Dana Desa tetap dikawal agar dapat sinergi dengan program kabupaten melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Keuangan Desa Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Pengembangan BUMDesa - Dana Desa merupakan program pemerintah pusat yang Prioritas Penggunaannya diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	dalam Kegiatan dan Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan target Terlaksananya transfer Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BGH-P) dan Bagi Hasil Retribusi (BGH-R) ke Rekening Kas Desa dan terlaksananya penyusunan dan pelaporan Realisasi APBDes Tepat Waktu yang didalam pelaksanaannya bersinergi dengan program kabupaten. - Untuk mendorong inovasi pembangunan dan pelayanan desa



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Dalam upaya agar dapat bersinergi dengan program kabupaten, telah ditindaklanjuti upaya pengawalannya melalui Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan setiap tahun. - Untuk upaya peningkatan perekonomian desa serta pelayanan yang ada di desa, sebagaimana didalam LKPJ tidak ada program yang dijalankan dalam mendorong pencapaian dua hal tersebut. Namun demikian kami melalui OPD terkait telah berupaya dengan	maka kami agendakan Program Peningkatan Kerjasama Desa dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada serta Program Administrasi Pemerintahan Desa dalam kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		melaksanakan Kegiatan Pengembangan BUMDesa di Tahun 2019 kemarin untuk memberikan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes di 226 Desa serta melakukan fasilitasi Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Unit Usaha Lembaga Keuangan Mikro dibawah BUMDes Bersama Tingkat Kabupaten yang mana dua jenis lembaga tersebut juga ikut andil dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa. - Selanjutnya untuk upaya pembinaan dan mendorong inovasi pembangunan dan pelayanan desa, Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait bersama Pendamping Desa yang didukung Anggaran dari	



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan contoh referensi inovasi pembangunan dan pelayanan desa melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa di 6 (enam) zona wilayah, dimana semua desa telah kami kawal untuk memilih dan menetapkan praktek-praktek baik inovasi pembangunan dan pelayanan desa, untuk dimasukkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran berikutnya.	
		Bidang IV : Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa - Program dan kegiatan di Bidang II Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2019 adalah : Program Pemberdayaan Perekonomian Pedesaan, Kegiatan	Bidang IV : Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Tahun 2019, anggaran Kegiatan Pembangunan Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) telah direalisasikan sesuai kebutuhan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pembangunan Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kegiatan ini melaksanakan pendampingan program pengembangan simpan pinjam ex-PNPM mandiri Pedesaan di 211 desa. Program / kegiatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan desa yang selama 5 tahun tidak tercover pada tahun 2019 dan 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka pada tahun 2021 dan seterusnya diharapkan dapat dilaksanakan. Program / kegiatan yang dimaksud antara lain : Kegiatan Penguatan Manajemen Kelompok Pengelola Irigasi	dan terserap optimal, penyelenggaraan juga telah sesuai dengan juknis yang tersedia. Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat desa perlu mensinergikan program pemberdayaan oleh Dinas di Kabupaten dengan program yang bersumber dari DD dan ADD oleh pemerintahan desa. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah kabupaten (melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) segera mendorong dan memfasilitasi program/kegiatan yang bersumber dari DD dan ADD dengan mengedepankan program / kegiatan yang berbasis pemberdayaan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		(HIPPA) Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa (RPD) Kegiatan Penguatan Manajemen Kelompok Pengelola Air Bersih (HIPPAAM)	dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Berbagi peran antara Pemerintah Kabupaten (melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dengan pemerintahan desa dalam percepatan penumbuhan perekonomian masrakat dan desa
		Bidang II : Pengelolaan Keuangan Desa - Program dan kegiatan di Bidang II Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2019 yang terkait dengan Pilkades adalah : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Penyusunan Pedoman	Bidang II : Pengelolaan Keuangan Desa - Dalam upaya mengawal penyelenggaraan Pilkades Serentak tahun 2021 agar dalam regulasi didaerah dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan diagendakan pada Program Administrasi Pemerintahan Desa dalam kegiatan Penyelenggaraan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pengelolaan Keuangan Desa - Sebagaimana ketentuan penjelasan pasal 34 ayat (6) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk: pengadaan surat suara; kotak suara; kelengkapan peralatan lainnya; honorarium panitia; dan biaya pelantikan - Selanjutnya terkait dengan upaya memberikan kepercayaan kepada panitia ditingkat desa, dapat dilakukan dengan mempedomani ketentuan pasal 5 ayat (3) pada Peraturan	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, dimana beberapa Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada panitia tingkat desa yaitu: menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia	



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		pemilihan; Dengan demikian untuk selain kegiatan 3 (tiga) hal tersebut yang dibiayai oleh APBD, akan dikonsultasikan kembali yang nantinya diatur dengan Peraturan Bupati. - Untuk kebutuhan lain selain 5 hal yang dibiayai oleh APBD tersebut, tidak dapat dialokasikan dari Rekening Pendapatan Desa (Hibah) yang tertuang dalam APBDes, kecuali dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa, berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.	



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		- Pelaksanaan Pilkades Serentak dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 yang didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa dapat bersumber dari Dana Desa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 345/PRI.00/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021 perihal Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak guna mendukung Desa Aman COVID-19. - Berdasarkan hal tersebut, maka untuk biaya pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa pada pelaksanaan pilkades serentak ke depan, akan menjadi perhatian khusus kami	



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		agar tidak ada lagi hal tersebut dengan memformulasikan Peraturan Bupati seoptimal mungkin.	
		Bidang III : Pemerintahan Desa - Program dan kegiatan di Bidang III Pemerintahan Desa pada tahun 2019 adalah : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya. - Kegiatan tersebut sebagai dasar kegiatan pelaksanaan Pilkades pada tahun 2019 yang telah dilaksanakan di 161 desa. - DPMD dalam pelaksanaan proses penyusunan draft peraturan Pilkades serentak berdasarkan	Bidang III : Pemerintahan Desa - Mengevaluasi Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa serentak antara Perbup 41/2019, Perbup 61/2019 dengan perbup 71/2019, dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan yang baru. - Mengingat dengan terbitnya Permendagri 72 tahun 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan yang lama dengan peraturan yang baru. - Kondisi saat ini sedang dilakukan proses penyusunan draft Peraturan Bupati yang tentang



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pelaksanaan Pilkades serentak melekat di BPKAD dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan penyesuaian peraturan yang baru. - Sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur pelaksanaan Pilkades serentak di masa pandemi Covid 19. - Sehubungan dengan 3 poin diatas maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati yang lama (Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019)	Pemilihan kepala Desa serentak dimasa pandemi Covid 19.

**K. Urusan Perhubungan**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan perhubungan yang perlu yang perlu mendapatkan sorotan penilaian adalah berkenaan program peningkatan status Bandara. Jika mengacu pada target RPJMD bahwa janji bupati adalah menjadikan Bandara noto Hadinegoro sebagai Subembarkasi Haji Paling Lama Tahun 2020. Sejauh ini upaya yang sudah berjalan adalah Angkasa Pura II (AP II/Persero) bersama dengan PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) dan Pemerintah Kabupaten Jember menandatangani nota kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding/MoU</i>) terkait pemanfaatan Aset Milik PTPN XII dan/atau Barang Milik Daerah Kabupaten Jember untuk pembangunan, Pengembangan dan/atau Pengusahaan Bandara Notohadinegoro di Jember, Jawa Timur. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR, dan Direktur Utama PTPN XII Berlino Mahendra Santosa yang disaksikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dan Direktur Holding PTPN M. Cholidi. Namun pasca MOU itu ditandatangani kinerja capaian pengelolaan bandara semakin menurun hal itu dibuktikan dengan fakta yaitu Keputusan pemberhentian operasional salah satu maskapai penerbangan	Mengurus perpanjangan Izin Operasional (Sertifikat Bandar Udara) ke Dirjen Perhubungan Udara	Sertifikat Bandar Udara (SBU) Bandar Udara Notohadinegoro telah terbit pada 10 April 2020



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	(Citilink) di Jember. Berhentinya operasi anak usaha Garuda di Bandara Notohadinegoro itu tidak semata karena sepi penumpang namun ada hal prinsip yakni izin operasional dari bandara itu (Notohadinegoro), sudah tidak berlaku sejak Maret 2018, dan ternyata sampai dibulan November 2019 praktis keberadaan pengelolaan bandara samapai November 2019 tidak mengantongi ijin operasional. Kendala untuk perpanjangan ijin operasional adalah karena ketersediaan anggaran yang baru direncanakan dialokasikan pada APBD 2020 untuk mengurus perpanjangan izin operasional ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. Dengan berhentinya Citilink menerbangi Bandara Notohadinegoro, maka maskapai penerbangan yang datang dan berangkat dari Jember kini tersisa hanya Wings Air. Maskapai ini, juga sejak Januari 2019 lalu, mengurangi frekuensi penerbangannya. Dari semula setiap hari menjadi hanya empat hari dalam seminggu. Yakni setiap hari senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Berdasarkan fakta tersebut dan disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Jember melalui urusan perhubungan GAGAL dalam upaya pengelolaan bandara apalagi dalam mendorong menuju sub bandara embarkasi.		

**L. Urusan Komunikasi dan Informasi**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah GAGAL dalam mewujudkan pengembangan <i>E-Government</i> yang mendukung kinerja pelayanan dan birokrasi hal ini diindikasikan dengan pemerintah daerah tidak memiliki desain dan master plan yang jelas dalam upaya untuk mendorong <i>E-Government</i> . Selama ini program <i>smart city</i> yang dilaksanakan oleh kementerian kominfo di Jember sebatas proyek yang tidak dijalankan serius dan terintegratif dalam mendukung terobosan inovasi dan kinerja birokrasi. Jika dilihat dalam laporan capaian LKPJ program <i>E-Government</i> hanya terhenti pada program penyediaan (sewa) server dan juga aplikasi kepegawaian serta pelayanan umum di 7 kelurahan. Koordinasi pelaksanaan <i>E-Government</i> tidak berjalan maksimal dan hanya sebatas pada <i>support</i> sewa internet untuk semua OPD di kabupaten Jember.	Menyiapkan system informasi/aplikasi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah Program Pengembangan E-Government Keg Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan E-government	Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Jember memperoleh nilai indeks 2,23 Untuk kedepannya akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut (hasil Evaluasi SPBE terlampir)
2	Sementara dalam pengelolaan sistem informasi desa pemerintah GAGAL untuk menjalankan dengan benar, berdasarkan indikator capaian kinerja mestinya output program ini adalah <i>Desa Online</i> dengan	Meminta data website desa se Kabupaten pada Dispemades Melaksanakan pemasangan aplikasi pelayanan masyarakat pada Kecamatan Rambipuji Program pengembangan dan peningkatan system informasi	Pada tahun 2019, 1 desa yang mengusulkan pembuatan domain website yaitu Desa Paseban Tahun 2021 sampai



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	ketersediaan internet desa serta <i>website</i> desa dan pelayanan <i>online</i> di desa. Faktanya program ini justru direalisasikan untuk absen (<i>finger print</i>) OPD se kabupaten Jember termasuk 22 kelurahan.	desa/kelurahan berbasis IT Keg Pengembangan desa/ kelurahan online	dengan Akhir bulan Februari, 1 desa yang mengusulkan pembuatan domain website yaitu Desa Kencong (daftar web desa-desa terlampir)
3	Sedangkan pada program pengembangan Informasi dan publikasi yang salah satu indikatornya adalah persentase sebaran informasi OPD yang di publikasikan oleh PPID. Iahirnya UU No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik di Kabupaten Jember. Hasil pemeringkatan Komisi Informasi Jawa Timur Kabupaten Jember pada tahun 2018 menempati urutan 27. Rendahnya keterbukaan informasi berdampak pada rendahnya transparansi pemerintah terkait anggaran serta kebijakan, dan ini akan mematikan partisipasi publik dalam control penyelegaraan pemerintahan. Selama ini dalam tata kelola informasi publik Pemkab cenderung menggunakan komunikasi searah dengan peliputan dan pemberitaan informasi yang subyektif dari pemerintah dengan menggunakan peran media massa yang ditentukan namun	Keterbukaan Informasi Publik sudah dijalankan dengan menggunakan media website Pemerintah Kabupaten Jember yaitu : 1. https://www.jemberkab.go.id ; 2. http://statistik.jemberkab.go.id ; 3. https://diskominfo.jemberkab.go.id 4.Fanpage fb : Pemkab Jember; 5.Fanpage fb : Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Jember 6.Instagram : pemkabjember 7.Youtube : Pemkab Jember 8.Facebook : Wadul Jember Namun untuk yang website khusus PPID yang belum dipublikasikan Peran wartawan / media massa dibutuhkan karena keterbatasan SDM pengelola di intern Pemkab Jember sehingga perlu peran ekstern rekanan untuk peliputan dan publikasinya Program pengelolaan, pengembangan informasi dan publikasi Keg pengelolaan dan pengembangan informasi public (penguatan PPID)	Dengan menggunakan rekan wartawan, jurnalis / media massa maka publikasi Pemkab Jember lebih dapat menyebar dan cepat tersampaikan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	bukan relasi dengan asosiasi profesi wartawan atau jurnalis hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran yang besar kurang lebih Rp. 8.348.266.230. Pola Informast ini memungkinkan berdampak pada terjadinya disInformasi dan mlsinformasi pada pubttk dan Justru menciptakan program yang memberilran celah untuk menjadikan para profesi jurnalisme publik menjadi tidak independen (obyektif) dalam pemberitaan.		

M. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang perlu mendapatkan sorotan penilaian pada program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah serta program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah. Jika melihat dari laporan LKPJ hampir semua kegiatan terkait program GAGAL dijalankan dengan permasalahan daya dukung admistrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan angka	Dalam tahun 2020 DinasKoperasi dan Usaha Mikro tidak melaksanakan kegiatan karena tidak adanya policy/kebija kan Bupati (SK Bupati) tentang pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kegiatan provinsi dan kementrian UKM selama tahun 2020 di Kabupaten Jember diantaranya Diklat: Pengusaha retail di Jember (BLK) Kerajinan bambu (BLK)	Dibutuhkan policy bupati (SK Kegiatan) sebagai dasar legalisasi formal untuk melaksanakan program kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Membina dan mendukung perkembanganserta kemajuan perkoperasian dan usaha mikro di kabupaten Jember) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kelembagaan Koperasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Melalui



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	pertumbuhan ekonomi jember yang dinyatakan sebagai prestasi peningkatan yaitu naik 0,08 di tahun 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa sektor diantaranya sektor industri pengolahan (<i>manufacturing</i>) yang salah satu komponen pendukungnya adalah UMKM dan geliat wirausaha masyarakat. Faktanya program/kegiatan terkait pemberdayaan UMKM dan wirausaha Masyarakat GAGAL dijalankan di Kabupaten Jember. Kesimpulannya bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sektor <i>manufacturing</i> adalah proses autopilot dan bukan bagian prestasi kerja pemerintah untuk menjalankan programnya, namun banyak digerakkan oleh sektor swasta.	Penjahit dan border (BLK) Webinar	Koperasi Wanita

N. Urusan Penanaman Modal

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pada pelaksanaan perijinan meskipun di Kabupaten Jember dibentuk lembaga bernama Dinas Penanaan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) namun rupanya tidak berjalan dengan efektif. Kondisi ini kemudian menjadikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur pada tanggal 13	Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun 2019 ini di lakukan melalui program dan kegiatan tahun anggaran 2020 sebagai berikut : Program : Pelayanan	Pada poin pertama terkait ijin lembaga dan oprasional sekolah, rekomendasi dari OPD teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan masih belum meyetujui perihal permohonan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Februari 2020 turun ke Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat soal dugaan maladministrasi di Jember. Kehadiran ombudsman ini untuk menindaklanjuti empat laporan masyarakat yaitu satu terkait perijinan DPMPTSP dan yang tiga lainnya adalah menindaklanjuti temuan tahun 2019 yaitu satu laporan terkait izin lembaga dan operasional sekolah, laporan terkait keluhan soal lambatnya pelayanan perizinan di Jember di bidang pendidikan, operasional sekolah dan lembaga, reklame, dan izin mendirikan bangunan dimana sesuai peraturan bupati, proses perizinan masih memerlukan penetapan bupati. Hasil temuan Ombudsman mengklarifikasi kebenaran pengaduan bahwa perijinan di Jember masih membutuhkan penetapan Bupati. Praktek ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Tahun 1997 dan 2014 terkait pelayanan terpadu satu pintu dimana kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus mendelegasikan atau memandatkan kewenangan proses pelayanan perizinan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP. Pemberian mandat dari kepala daerah kepada kepala dinas ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efisien, cepat, dan transparan. Faktanya di Jember ketentuan ini belum berjalan pada fungsi perijinan di DPMPTSP meskipun sudah ada bentuk OPD	Perizinan Lokasi Kegiatan : Pelayanan Ijin Lokasi	ijin lembaga dan ijin oprasional, untuk ijin reklame dan ijin mendirikan bangunan, sesuai Peraturan Bupati proses perijinan masih memerlukan penetapan Bupati. Solusi untuk percepatan perijinan dan kepastian hukum dinas PM PTSP membuat usulan draft keputusan Bupati Jember tentang Pemberian Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan ijin dan non-perijinan dari Bupati Jember kepada Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Jember Tahun 2019 ke Bagian Hukum belum ada tindak lanjut. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan layanan perizinan Layanan Perizinan Berbasis Online sudah sebagai kita lakukan melalui Aplikasi Pusat dengan layanan izin 1 jam selesai dengan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	(Organisasi Perangkat Daerah) DPMPTSP. Berdasarkan kondisi tersebut Dewan menilai bahwa pemerintah GAGAL dalam membangun birokrasi perijinan investasi yang sehat dan ramah karena proses perijinan masih dikendalikan secara kuat oleh Bupati , serta bupati GAGAL memfungsikan keberadaan DPMPTSP untuk menjamin sistem perijinan yang cepat dan transparan serta mencegah praktik (pungli) melalui SOP yang jelas dan berbasis <i>online</i> .		catatan tidak ada kendala Administrasi pada Pajak Pribadi atau Perusahaan. Pengajuan Penambahan Anggaran Untuk layanan Perizinan Berbasis IT. Untuk memudahkan akses Layanan Perizinan
2	Meskipun investasi yang masuk di Jember sangat tinggi namun jika dilihat dari laporan LKPJ naiknya investasi ini tidak disebabkan karena dorongan program promosi yang baik dan efektif. Model promosi potensi daerah sifatnya masih konservatif dan realisasi program hanya 25 o/o dari anggaran yang disediakan. Promosi dan kerjasama investasi ini juga tidak di dukung program yang mampu mendorong dan mempertemukan caron investor, sekaligus mengoptimalkan keberadaan Forum CSR bagi investor yang sudah berinvestasi di Jember.	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Pada poin kedua, Kegiatan yang dilaksanakan TA 2020 bertujuan untuk meningkatkan Investasi PMDN/PMA, Program Promosi belum dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya pejabat yang membidangi di Bidang Penanaman Modal secara definitif. Hal ini sangat berpengaruh dalam kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah.

**O. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian kinerja pengelolaan urusan kepemudaan dan olah raga yang perlu mendapatkan sorotan penilaian terkait dengan merosotnya peringkat Jember dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun ini terjun bebas di urutan ke-24 dari sebelumnya ke-15. pada Porprov ini, kontingen Jember mendapat total 18 medali. perinciannya tujuh emas, dua perak, dan sembilan perunggu. Turunnya prestasi itu rupanya juga diikuti dengan tiadanya bonus yang memadai dari pemerintah kabupaten Jember untuk para atlet peraih medali serta minimnya pembinaan untuk hampir semua cabang olah raga. untungnya mereka para atlet telah mendapat kucuran bonus anggaran yang disiapkan KONI Jatim, meskipun besarnya tak signifikan dibanding dengan perjuangan yang dilakukan. Mereka para atlet peraih medali emas hanya menerima Rp 2 juta. Sedangkan peraih perak Rp 1,5 juta dan atlet yang berhasil menyabet medali perunggu cuma memperoleh Rp 750 ribu. Turunnya prestasi olah raga dan tiadanya bonus/reward menggambarkan GAGALnya pemerintah kabupaten dalam melakukan pembinaan olah raga di tahun 2019 sekaligus juga gagal dalam memberikan perhatian prestasi olah raga. Selain permasalahan prestasi olah raga persoalan yang perlu dapat perhatian adalah pengelolaan aset Olah Raga yaitu stadion Jember Sport	Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun 2019 ini dilakukan melalui program dan kegiatan pada TA 2020 sebagai berikut: Program : Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Kegiatan : Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Program : Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda Kegiatan : Pemberian Penghargaan bagi Pemuda dan Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Pengelolaan aset JSG sampai saat ini berada di Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dan belum dilimpahkan ke Dinas kepemudaan dan Olahraga Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	Pada poin pertama, kegiatan yang dilakukan pada TA 2020 bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet Kabupaten Jember dalam Porprov Tahun 2021 melalui kegiatan seleksi dan pemusatan latihan (<i>training center</i>) yang lebih terarah, terpadu, dan intensif serta mengadakan ujicoba/ try-out dengan kab/kota lain. Pada poin kedua, kegiatan yang dilakukan pada TA 2020 bertujuan untuk menambah/ memperbesar penghargaan bagi atlet berprestasi yang sudah mengharumkan nama Jember di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Ada peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang KSOTK Tata



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Garden. (JSG). sejak tahun 2017 pengelolaan JSG ini ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Jember. Pemeliharaan dan pengelolaan JSG ini harus sesuai permen PU Nomor 24 Tahun 2008 yang dilakukan terhadap komponen Arsitektur, Struktur dan Mekanikal Elektrikal. Agar pengelolaan tersebut berjalan maksimal pemerintah daerah belum membentuk payung hukum berupa peraturan daerah terkait pembentukan UPT JSG dalam penanganan pemeliharaannya.	Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Kerja Unit Pelaksana Pengelolaan Jember Sport Garden (JSG) Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Perda Nomor 5 tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha.

P. Urusan Kebudayaan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan pendataan dan program pembinaan pada kelompok dan pekerja seni dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jember.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Hasil : pendataan dan inventarisasi kelompok seni budaya	Pendataan Penyaluran BTT COVID 19 TAHUN 2020 utk segmen pekerja seni budaya dijadikan momentum utk pemuktahiran dan validasi data base seniman yg ada di kabupaten jember
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk merealisasikan janji pembangunan fasilitas berupa gedung atau arena pertunjukan seni dan budaya.	Belum terealisasi	Merupakan kewenangan bupati, dan akan diusulkan kembali
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk menyusun kalender event seni dan budaya unggulan Jember.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19

**Q. Urusan Perpustakaan**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mendorong budaya literasi pada masyarakat dengan kolaborasi dan pemberdayaan pada komunitas literasi yang ada di Jember.	Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kegiatan: Penyediaan Koleksi dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Pesantren	Nihil Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan lomba bercerita dan mendongeng dengan tujuan mendorong budaya literasi sejak dini tidak dapat dilakukan
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan gedung kantor
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kegiatan ini bertujuan untuk operasional kendaraan perpustakaan keliling agar layak dan dapat digunakan sebagai sarana perpustakaan mobile Namun pada tahun ini tidak dapat beroperasi dikarenakan Pandemi Covid 19
		Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kegiatan Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kegiatan ini bertujuan untuk penambahan koleksi perpustakaan baik buku konvensional maupun digital / ebook Namun pada tahun ini kegiatan tersebut tidak

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			dianggarkan karena keterbatasan anggaran
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mendorong pembinaan perpustakaan di fasilitas publik, kantor-kantor pemerintah serta di desa.	Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Desa	Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan perpustakaan yang ada di Desa berupa bantuan buku dan pembinaan perpustakaan. Namun pada tahun ini kegiatan tersebut tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran

R. Urusan Perikanan dan Kelautan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember.	Mengembangkan basis data potensi sumber daya kelautan dan perikanan (Program : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan, Kegiatan : Pendataan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; Program : pengembangan sumberdaya manusia perikanan, Kegiatan : Pendataan produksi perikanan budidaya; Program : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Kegiatan : Pendataan Produksi Perikanan Tangkap). Mengelola kawasan perairan umum melalui pengembangan perikanan berbasis budidaya dalam rangka pengkayaan stok dan peningkatan produktivitas (Program : Pemberdayaan Masyarakat dalam	Terwujudnya ketersediaan teknologi data dan informasi kelautan dan perikanan yang dapat diakses semua pihak, Tersusunnya rencana pengelolaan kawasan perairan umum melalui pengembangan budidaya perikanan dalam rangka mendukung pengkayaan stok dan peningkatan produktivitas, Meningkatnya



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, Kegiatan : Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya perikanan). Mengembangkan Balai Benih Ikan guna mendukung sistem perbenihan daerah (Program : Pengembangan Budidaya Perikanan, Kegiatan : Pengembangan bibit ikan unggul, Peningkatan dan pengembangan produktifitas BBI Sinkronisasi program kegiatan pusat dengan daerah dalam pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Jember melalui Program DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (Program : Pengembangan Budidaya Perikanan, Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya)	pengadaan benih berkualitas dan produksi perikanan budidaya, Mewujudkan penerapan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara tepat, bersinergis dan harmonis antara pusat dan daerah
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan.	Memberdayakan masyarakat nelayan melalui korporasi dan implementasi teknologi tepat guna Program : Pengembangan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan : Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir). Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perikanan Program : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan,	Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan menurunnya jumlah masyarakat miskin di daerah pesisir, Berkembangnya usaha perikanan tangkap skala kecil di 6 wilayah pesisir Kabupaten Jember Meningkatnya jumlah tangkapan hasil perikanan dengan mutu yang lebih baik dan berkembangnya



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Kegiatan : peningkatan mutu hasil perikanan	industri pengolahan hasil perikanan.
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan Nelayan.	meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, lifejacket dan mesin) Program : Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap Bantuan Premi Asuransi nelayan Program : Perlindungan Nelayan, Kegiatan : Asuransi Nelayan	mengurangi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan memberikan perlindungan dan keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut, memberikan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang.
4	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk mempermudah ijin dan birokrasi dalam meningkatkan pengelolaan TPI (<i>cold storage</i>).	Meningkatkan pelayanan dan pengendalian serta fasilitasi perijinan usaha perikanan tangkap pada Kapal Perikanan dan Integrated Cold Storage (IMB, SIUP, dll) Program : Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana TPI Peningkatan Operasional TPI	Mewujudkan perijinan yang cepat dan murah, Berkurangnya kegiatan penangkapan illegal dan tercatatnya armada penangkapan yang beroperasi, Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan adanya ijin usaha perikanan.

**S. Urusan Pariwisata**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.		
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan destinasi yang menjadi aset daerah seperti Watu Ulo, Rembangan, bahkan sekarang muncul pantai Payangan atau Teluk Love.		
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih inovatif dalam menyusun <i>Calender of Event</i> yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Jember.		
4	Pemerintah daerah kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lembaga biro perjalanan, pengelola destinasi serta desa wisata, pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah.	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Tujuan: memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jember untuk dijadikan salah satu paket wisata overland Jawa Timur melalui event pameran Masalah yang diselesaikan: Belum dapat terealisasi dikarenakan adanya Pandemi Covid 19

**T. Urusan Pertanian**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kesejahteraan petani.	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan Bibit Unggul / Pertanian/ Perkebunan Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura Peningkatan Produksi Buah-buahan Peningkatan Produksi Sayuran, Tanaman Obat dan Tanaman Hias Peningkatan Produksi Perbenihan Hortikultura	Memberikan bantuan berupa bibit kopi Memberikan bantuan berupa bibit /benih Hortikultura
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan program pemberdayaan pada kelompok tani.	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan Pengembangan Perlindungan Tanaman Program peningkatan kesejahteraan petani Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Pembuatan Pestisida nabati Melaksanakan kemitraan dengan industri tembakau
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan	Program peningkatan penerapan teknologi	Bantuan Alsintan dan Pupuk



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	prasarana produksi dan teknologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).	pertanian/ perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan kualitas bahan baku Dukungan Sarana dan Prasarana Penanganan Panen dan Pasca Panen Penerapan Pembudidayaan sesuai Good Agricultural Practises (GAP) Tembakau	
4	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri.	Nihil	Nihil
5	Pemerintah daerah kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan.	Program peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Program peningkatan kualitas bahan baku Penerapan Inovasi Teknis	Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Sekolah lapang Penerapan Pupuk sesuai rekomendasi

**U. Urusan Perdagangan**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif mendorong pasar berstandart SNI sebagaimana diatur dalam Ketentuan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN yang didalamnya mengatur Pedoman pasar Rakyat serta PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT.	Pada tahun 2018 telah dilakukan revitalisasi 12 pasar dengan total anggaran Rp. 69 milyar. Dan pada tahun 2019, telah dilakukan revitalisasi terhadap 20 pasar dengan total anggaran sebesar Rp. 134 milyar. Dinas Perindustri an dan perdagangan kabupaten Jember telah menganggarkan rencana tersebut pada tahun 2020 dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar yang difokuskan pembayaran utang pembangunan pasar tahun 2018 dan 2019	Revitalisasi pasar sudah dilaksanakan dengan mengacu atau dengan pendekatan pada SNI Pasar Rakyat yaitu SNI 8152:2015 dan Permendag nomor 37 tahun 2017.
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember membuat kebijakan dan program perlindungan pedagang / pasar tradisional ditengah fenomena gempuran masuknya pasar modern dan berjaringan.	Pelaksanaan sosialisasi dan penerapan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan. Untuk kegiatan secara spesifik tidak ada, akan tetapi kegiatan yang berkaitan	Kebijakan dan program perlindungan pedagang pasar rakyat yang ada (Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Daerah) masih belum cukup kuat untuk melindungi pedagang pasar rakyat. Perlu kiranya



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		dengan hal tersebut adalah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp 113.900.000,00 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	didorong untuk pembentukan Undang-undang Perlindungan Pasar Rakyat.

V. Urusan Industri

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian.	Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Jember telah menganggarkan rencana tersebut dalam Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 180.200.000,- Program Pengembangan industry kecil dan menengah	Kegiatan tersebut diharapkan dapat membina 31 peserta, akan tetapi tidak terlaksana di karenakan adanya Pandemi Covid 19
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasiskan potensi unggulan daerah.	Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Jember telah menganggarkan rencana tersebut dalam kegiatan Penumbuhan	Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 65 WUB, akan tetapi tidak terlaksana di karenakan adanya



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Wira Usaha Baru Sektor Industri pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 184.100.00,00 Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri	Pandemi Covid 19
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember.	Mempertemukan petani tembakau dengan pengusaha tembakau sehingga petani tembakau mengetahui ancar-ancur kualitas dan kuantitas tembakau yang dibutuhkan oleh pengusaha tembakau. Program Sosialisasi ketentuan dibidang cukai , kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan	Ada kesepakatan antara petani tembakau dan pengusaha tembakau tentang ancar-ancur kualitas dan kuantitas tembakau
4	Pemerintah daerah kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Jember telah menganggarkan rencana tersebut dalam kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Dan Atau Pemangku Kepentingan.	Dilaksanakan dengan sosialisasi pembagian brosur di Pasar dan Kecamatan seluruh Kabupaten Jember. Untuk sosialisasi tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid 19



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Dengan anggaran sebesar Rp.99.425.000,00 Program Sosialisasi ketentuan dibidang cukai	
		Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dengan anggaran Rp 71.925.000,00 Program pemberantasan barang kena cukai ilegal	Monitoring cukai rokok ilegal
		Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Dengan Kadar Tar Dan Nikotin Rendah Melalui Pengujian Tar Dan Nikotin Bagi Industri Kecil Dan Menengah dengan anggaran Rp 40.400.000,00 Program pembinaan industri	Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin kepada IKM Rokok
5	Pemerintah daerah kabupaten Jember mengoptimalkan program untuk peningkatan peran dan fungsi Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ).	Pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2003 perlu untuk dioptimalkan atau perlu dilakukan amandemen agar bisa mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan antara petani tembakau dan pengusaha tembakau Program Sosialisasi ketentuan dibidang cukai kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-	Kebutuhan dan kepentingan antara petani tembakau dan pengusaha tembakau bisa berjalan beriringan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Undangan Di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Dan Atau Pemangku Kepentingan	

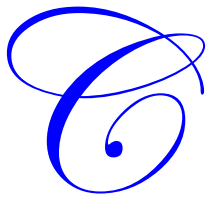
W. Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Pemerintah daerah kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.		
2	Pemerintah daerah kabupaten Jember mengubah kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis dimana semua kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui SK Bupati karena berdampak serapan anggaran yang rendah serta banyak program yang tidak bisa dieksekusi untuk dijalankan.		
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember segera mengisi kekosongan jabatan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi beban kerja akibat pejabat yang rangkap tinggr rangkap karena pejabat yang rangkap Plt.	Program Penataan ASN kegiatan Pemindahan Tugas ASN Melakukan Asesment untuk eselon II/JPT dapat di lakukan uji Komopetensi untuk eselon III , IV, JFT dan JFU berdasarkan SOTK	Agar sesuai dengan Kompetensi Jabatannya



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		yang berlaku dan menjadi kewenangan PPK	
4	Pemerintah daerah kabupaten Jember mengurangi mutasi yang tidak perlu dan melaksanakan mutasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.	Program Penataan ASN kegiatan Pemindahan Tugas ASN Menindaklanjuti mutasi secara selektif berdasarkan kebutuhan Formasi yang ada yaitu Jabatan Struktural, Jab. Pelaksana dan Jab. Fungsional	Agar sesuai dengan beban kerja dan kompetensinya
5	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.		
6	Pemerintah daerah kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih profesional.		
7	Seluruh anggaran bagian Pembangunan dan bagian Umum yang bukan TUPOKSnya harus di kembalikan ke OPD masing masing agar tidak mengulang kesalahan bertubi tubi setiap tahunnya.		
8	Pemerintah daerah kabupaten Jember meningkatkan <i>clean government</i> sebagaimana dijanjikan dalam RPJMD dengan kuantitas OPD yang sudah menjalankan Zona Integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani.		

4

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan merupakan kinerja atas Tugas Pembantuan Daerah dan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (11) bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekosentrasi sehingga pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum serta ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sedangkan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar



negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan, Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian dan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2020 :

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya dalam rangka mendukung kebijakan nasional, provinsi ataupun kebijakan pemerintah kabupaten dengan pendekatan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran-anggaran dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan kepada daerah untuk penyelenggaraan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau disebut juga dengan tugas pembantuan, urusan bersama dan kantor pusat diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan dana tugas pembantuan memiliki pengertian sebagai berikut : (1) Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat yang alokasinya berdasarkan rencana kerja



dan anggaran kementerian/lembaga pusat; (2) Digunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada kepala daerah dan/atau desa; (3) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD; (4) Dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; (5) OPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dilaporkan ke kementerian/lembaga yang menugaskan; (6) Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah; (7) Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik; (8) Tidak memerlukan dana pendamping; (9) Penerimaan dan saldo kas disetorkan ke kas umum negara.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*. Sedangkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”*.

Landasan hukum kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan) Tahun 2020 di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Menteri Keuangan 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Menteri Keuangan 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan 248 Tahun 2010.

Berikut dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 ini meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tugas tertentu.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Jember pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.074.202.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2020 Kabupaten Jember

No.	Instansi	Alokasi
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.002.840.000
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71.362.000
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	N/A
	Jumlah	1.074.202.000

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Jember Tahun 2020

4.1.1.1 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Secara keseluruhan ada 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan total anggaran Rp. 1.002.840.000,-. Dari total anggaran yang bisa diserap sebesar Rp.666.710.000,- atau 66,48%. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut :



A. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1. Dasar Hukum

DIPA No. 018.08.4.059185/2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian melalui kegiatan :

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Embung Pertanian sebesar Rp. 120.000.000,-

- a. Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Pembangunan Embung Mendukung TP 1 unit dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dari pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,-.

- a. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.960.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :



- Honorarium Staf Pembantu Keuangan dan Pelaporan [1 org x 12 bln]
 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
 - Honorarium Bendahara Pengeluaran
 - Honor Staf Penyusun Pelaporan Online [1 org x 12 bln]
- b. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.740.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja ATK Penyusunan Laporan dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.440.000,-
 - Penyusunan dan Penggandaan Laporan Tahunan Satker dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Pengiriman, Perbanyakan dan Penjilidan dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Perlengkapan Rapat dari pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000,-
- c. Belanja Honor Output Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.3.700.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Moderator dari pagu anggaran sebesar Rp. 700.000,-
 - Honor Panitia dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
- d. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Narasumber dari pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000,-
- e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.36.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Sinkronisasi, Koordinasi, Monitoring Teknis, Administrasi Kegiatan Teknis Ditjen PSP dari pagu anggaran sebesar Rp.26.250.000,-



- Perjalanan dalam rangka Konsultasi Ke Pusat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
- Perjalanan dalam rangka Konsultasi Ke Provinsi dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.750.000,-
- f. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja Makan dan Snack [30 org x 1 kali] sebesar Rp.1.500.000,-
 - Bantuan Transport sebesar Rp. 4.500.000,-
- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Perjalanan dalam rangka Percepatan, teknis, administrasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,-
- 3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida dari pagu anggaran sebesar Rp.458.550.000,-
Penyusunan dan penginputan e-RDKK mendukung kartu tani :
 - a. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja ATK dan Penggandaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja Perbanyak Pedoman dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Belanja Honor dari pagu anggaran sebesar Rp. 266.950.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Entry dan Updating RDKK [4 org x 2 frek x 31 kec] dari pagu anggaran sebesar Rp. 86.800.000,-
 - Honor Tim Pembina Tingkat Kabupaten [3 org x 11 bln] dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.250.000,-



- Honor Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan [2 org x 11 bln x 31 kec] dari pagu anggaran sebesar Rp. 170.500.000,-
- Honor Admin Kabupaten [2 org x 2 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.000,-
- c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.2.400.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Narasumber [4 orang x 2 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.400.000,-
- d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.35.100.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi [1 org x 31 kec x 1 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp.9.300.000,-
 - Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi [2 org x 31 kec x 1 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp.18.600.000,-
 - Monitoring, penyusunan dan penginputan e-RDCK [2 org x 12 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,-
- e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dari pagu anggaran sebesar Rp. 67.600.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Konsumsi panitia dan narasumber [25 org x 2 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Konsumsi peserta kabupaten [3 org x 31 kec x 2 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.300.000,-
 - Perjalanan tim kecamatan [3 org x 31 kec x 2 frekuensi] dari pagu anggaran sebesar Rp. 55.800.000,-

Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida



- a. Belanja Bahan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Penjilidan dan Penggandaan Laporan KP3 sebesar Rp.6.000.000,-
 - b. Belanja Jasa Lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Pengiriman Laporan KP3 sebesar Rp. 4.500.000,-
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa pagu anggaran sebesar Rp.59.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Konsultasi ke Provinsi [3 org x 1 frekuensi] sebesar Rp.3.000.000,-
 - Pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida sebesar Rp.56.000.000,-
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Penyusunan Laporan KP3 sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian dari pagu anggaran sebesar Rp.195.590.000,-.
- a. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 69.800.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Konsumsi koordinasi pelaksanaan FPPS dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Konsumsi temu usaha pembiayaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 67.200.000,-
 - Belanja ATK dan bahan komputer dari pagu anggaran sebesar Rp. 300.000,-
 - Dokumentasi dan pelaporan dari pagu anggaran sebesar Rp.300.000,-



- b. Belanja Honorarium Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.27.790.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja Honor Ketua dari pagu anggaran sebesar Rp.2.800.000,-
 - Belanja Honor Sekretaris dari pagu anggaran sebesar Rp.2.100.000,-
 - Belanja Honor Anggota dari pagu anggaran sebesar Rp.1.890.000,-
 - Belanja Honor Pelaporan kegiatan FPPS dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-
- c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.21.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Narasumber FPPS dalam rangka temu usaha pembiayaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-
- d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.77.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Perjalanan petugas kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Perjalanan FPPS dalam rangka koordinasi dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.6.000.000,-
 - Perjalanan FPPS dalam rangka Temu usaha pembiayaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Perjalanan petugas kabupaten dalam rangka Temu usaha pembiayaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Perjalanan petugas kabupaten/kota dalam rangka monitoring dan evaluasi [2 org x 7 bln] dari pagu anggaran sebesar Rp.7.000.000,-



- Perjalanan FPPS dalam rangka monitoring dan evaluasi dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran berasal dari APBN TP 2020 sebesar Rp. 874.140.000,-

6. Realisasi

Dana anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 874.140.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 551.010.000,- dalam capaian persentase sebesar 63,03% dengan rincian:

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Embung Pertanian sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 120.000.000,- atau dengan capaian 100%.

- a. Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 120.000.000,- atau dengan capaian 100% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:

- Pembangunan Embung Mendukung TP 1 unit.

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dari pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.235.000,- atau dengan capaian 59,24%.

- a. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.960.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Honorarium Staf Pembantu Keuangan dan Pelaporan [1 org x 12 bln].
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.
- Honorarium Bendahara Pengeluaran.
- Honor Staf Penyusun Pelaporan Online [1 org x 12 bln].



- b. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.740.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja ATK Penyusunan Laporan.
 - Penyusunan dan Penggandaan Laporan Tahunan Satker.
 - Pengiriman, Perbanyak dan Penjilidan.
 - Perlengkapan Rapat.
- c. Belanja Honor Output Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.3.700.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Moderator.
 - Honor Panitia.
- d. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Narasumber.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.36.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Sinkronisasi, Koordinasi, Monitoring Teknis, Administrasi Kegiatan Teknis Ditjen PSP.
 - Perjalanan dalam rangka Konsultasi Ke Pusat.
 - Perjalanan dalam rangka Konsultasi Ke Provinsi.
- f. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-, yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja Makan dan Snack [30 org x 1 kali].
 - Bantuan Transport.
- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Perjalanan dalam rangka Percepatan, teknis, administrasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan.



3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida dari pagu anggaran sebesar Rp.458.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 333.375.000,- atau dengan capaian 72,70%.

Penyusunan dan penginputan e-RDKK mendukung kartu tani :

- a. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja ATK dan Penggandaan.
 - Belanja Perbanyak Pedoman.
- b. Belanja Honor dari pagu anggaran sebesar Rp. 266.950.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Entry dan Updating RDKK [4 org x 2 frek x 31 kec].
 - Honor Tim Pembina Tingkat Kabupaten [3 org x 11 bln].
 - Honor Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan [2 org x 11 bln x 31 kec].
 - Honor Admin Kabupaten [2 org x 2 frekuensi].
- c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.2.400.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Narasumber [4 orang x 2 frekuensi].
- d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.35.100.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi [1 org x 31 kec x 1 frekuensi].
 - Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi [2 org x 31 kec x 1 frekuensi].
 - Monitoring, penyusunan dan penginputan e-RDKK [2 org x 12 frekuensi].
- e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dari pagu anggaran sebesar Rp. 67.600.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :



- Konsumsi panitia dan narasumber [25 org x 2 frekuensi].
- Konsumsi peserta kabupaten [3 org x 31 kec x 2 frekuensi].
- Perjalanan tim kecamatan [3 org x 31 kec x 2 frekuensi].

Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida

a. Belanja Bahan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-, yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Penjilidan dan Penggandaan Laporan KP3.

b. Belanja Jasa Lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Pengiriman Laporan KP3.

c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa pagu anggaran sebesar Rp.59.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Konsultasi ke Provinsi [3 org x 1 frekuensi].
- Pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida.

d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan KP3.

4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian dari pagu anggaran sebesar Rp.195.590.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.400.000,- atau dengan capaian 19,63%.

a. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 69.800.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Konsumsi koordinasi pelaksanaan FPPS.
- Konsumsi temu usaha pembiayaan.
- Belanja ATK dan bahan komputer.
- Dokumentasi dan pelaporan.



- b. Belanja Honorarium Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.27.790.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja Honor Ketua.
 - Belanja Honor Sekretaris.
 - Belanja Honor Anggota.
 - Belanja Honor Pelaporan kegiatan FPPS.
- c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.21.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Honor Narasumber FPPS dalam rangka temu usaha pembiayaan.
- d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.77.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Perjalanan petugas kabupaten/kota dalam rangka koordinasi.
 - Perjalanan FPPS dalam rangka koordinasi.
 - Perjalanan FPPS dalam rangka Temu usaha pembiayaan.
 - Perjalanan petugas kabupaten dalam rangka Temu usaha pembiayaan.
 - Perjalanan petugas kabupaten/kota dalam rangka monitoring dan evaluasi [2 org x 7 bln].
 - Perjalanan FPPS dalam rangka monitoring dan evaluasi.

B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

1. Dasar Hukum

DIPA No. 018.03.5.059178/2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebesar Rp. 17.750.000,-.
 - a. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.700.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja ATK dan Bahan Komputer dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Konsumsi Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi [50 org x 1 kali] dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja Penggandaan, Pelaporan dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.700.000,-
 - b. Belanja Honorarium dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Panitia [6 org x 1 kali] dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.800.000,-
 - c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Narasumber Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi [4 org x 1 kali] dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.250.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Perjalanan dalam rangka Identifikasi, Koordinasi, Bimbingan Teknis
 - Transport Pertemuan Koordinasi



2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp. 96.250.000,-.
 - a. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dari pagu anggaran sebesar Rp. 52.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan] dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-
 - Honorarium Pejabat Pengadaan [1 org x 12 bulan] dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.800.000,-
 - Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan [1 org x 12 bulan] dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Honorarium Staf Satker/Pembantu PPK [2 org x 12 kali] dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.400.000,-
 - Honorarium Penginput Data UPSUS, PDPS, SP [1 orang x 12 bulan] dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
 - b. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja ATK dan Bahan Komputer dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Foto Copy dan Penggandaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja Konsumsi Rapat dari pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000,-
 - c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.7.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honorarium Narasumber [2 orang x 6 kali] dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,-
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.18.450.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :



- Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000,-
- Perjalanan dalam rapat, Monev, UPSUS dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.850.000,-
- e. Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja Scanner dari pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

3. Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan (Base Line) sebesar Rp. 14.700.000,-.

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Pengiriman Rekapitulasi Data Ke Pusat dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000,-
- b. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Penggandaan Rekapitulasi Data dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,-
- c. Belanja Honor Output Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.6.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Petugas Pengumpulan dan Pengiriman Data PIP dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
- d. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dari pagu anggaran sebesar Rp. 800.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :



- Belanja ATK dan Bahan Komputer dari pagu anggaran sebesar Rp. 800.000,-
- e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.7.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Pengambilan Data ke Lokasi dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,-

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran berasal dari APBN TP 2020 sebesar Rp. 128.700.000,-

6. Realisasi

Dana anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 128.700.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 115.700.000,- dalam capaian persentase sebesar 89,89% dengan rincian:

1. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebesar Rp. 17.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.050.000,- atau dengan capaian 84,78%.
 - a. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.700.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja ATK dan Bahan Komputer.
 - Konsumsi Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi [50 org x 1 kali].
 - Belanja Penggandaan, Pelaporan.
 - b. Belanja Honorarium dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Panitia [6 org x 1 kali].
 - c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Narasumber Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi [4 org x 1 kali].



d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.7.250.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Perjalanan dalam rangka Identifikasi, Koordinasi, Bimbingan Teknis.
- Transport Pertemuan Koordinasi.

2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp.96.250.000,- terealisasi sebesar Rp.86.450.000,- atau dengan capaian 89,82%.

a. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dari pagu anggaran sebesar Rp. 52.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan].
- Honorarium Pejabat Pengadaan [1 org x 12 bulan].
- Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan [1 org x 12 bulan].
- Honorarium Staf Satker/Pembantu PPK [2 org x 12 kali].
- Honorarium Penginput Data UPSUS, PDPS, SP [1 orang x 12 bulan].

b. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Belanja ATK dan Bahan Komputer.
- Foto Copy dan Penggandaan.
- Belanja Konsumsi Rapat.

c. Belanja Jasa Profesi dari pagu anggaran sebesar Rp.7.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Honorarium Narasumber [2 orang x 6 kali].



d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.18.450.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi.
- Perjalanan dalam rapat, Monev, UPSUS.

e. Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Belanja Scanner.

3. Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan (Base Line) sebesar Rp. 14.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.200.000,- atau dengan capaian 96,59%.

a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Pengiriman Rekapitulasi Data Ke Pusat.

b. Belanja Bahan dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Penggandaan Rekapitulasi Data.

c. Belanja Honor Output Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.6.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Honor Petugas Pengumpulan dan Pengiriman Data PIP.

d. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dari pagu anggaran sebesar Rp. 800.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Belanja ATK dan Bahan Komputer.



- e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari pagu anggaran sebesar Rp.7.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :

- Pengambilan Data ke Lokasi.

4.1.1.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara keseluruhan ada 1 (satu) program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total anggaran Rp. 70.000.000,- dan ditambah dari APBD Kabupaten Rp. 1.362.000,- dengan total Rp. 71.362.000. Dari total anggaran tersebut yang bisa diserap sebesar Rp.52.547.000,- untuk kegiatan Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) atau seluruhnya terserap sebesar Rp. 52.547.000 atau 75,07%. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Kegiatan Jatim Puspa)

1. Dasar Hukum

- a. Jatim Puspa : Surat Pemprov Jatim Sekretariat Daerah Tanggal 13 Desember 2019, Nomor : 400/15521/112.3/2019, Perihal Penyalpaian Pagu Indikatif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Prov. Jatim Tahun 2020.
- b. Perbup Jember Nomor 25 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbup Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya



Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tertuang sebagai berikut:

1. Kegiatan Jatim Puspa sebesar Rp 71.362.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 41.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 41.000.000,-
 - b. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos sebesar Rp.750.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja Materai sebesar Rp. 750.000,-
 - c. Belanja Dokumentasi dan Dekorasi sebesar Rp. 500.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja Cetak Spanduk sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 2.532.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja Cetak pedum Kegiatan sebesar Rp. 1.875.000,-
 - Belanja Penggandaan sebesar Rp. 657.000,-
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.23.380.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 23.380.000,-
 - f. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Jatim Puspa sebesar Rp. 3.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Narasumber Soskab dan Evaluasi Kab PNS sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Honor Narasumber Soskab dan Evaluasi Kab Non PNS sebesar Rp. 1.200.000,-



5. Sumber dan Jumlah Anggaran

1. Anggaran berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA. 2020 sebesar Rp. 70.000.000,-
2. Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Jember TA. 2020 sebesar Rp. 1.362.000,-

6. Realisasi

Dana Anggaran Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa sebesar Rp. 71.362,000,-, dapat terealisasi sebesar Rp. 52.547.000,- atau dalam capaian persentase sebesar 75,07% dengan rincian:

1. Jatim Puspa dari pagu anggaran sebesar Rp 71.362,000,- terealisasi sebesar Rp. 52.547.000,- atau dengan capaian 75,07% yang terdiri :
 - a. Honor Panitia Pelaksana kegiatan output kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp. 41.000.000 terealisasi sebesar Rp.32.000.000,- atau dengan capaian 78,05% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.41.000.000,- terealisasi sebesar Rp.32.000.000,-
 - b. Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya dari pagu anggaran sebesar Rp.750.000,- terealisasi sebesar Rp.750.000,- atau dengan capaian 100% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja Materai dari pagu anggaran sebesar Rp. 750.000,- terealisasi sebesar Rp.750.000,-.
 - c. Belanja Dokumentasi dan Dekorasi dari pagu anggaran sebesar Rp.500.000,- terealisasi sebesar Rp.500.000,- atau dengan capaian 100% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
 - Belanja Cetak spanduk dari pagu anggaran sebesar Rp.500.000,- terealisasi sebesar Rp.500.000,-



- d. Belanja Cetak dan Penggandaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.532.000,- terealisasi sebesar Rp.657.000,- atau dengan capaian 25,95% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja Cetak pedum Kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.625.000,- terealisasi sebesar Rp.0,-
 - Belanja Penggandaan dari pagu anggaran sebesar Rp.657.000,- terealisasi sebesar Rp.657.000,-
- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp. 23.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.440.000,- atau dengan capaian 66,04% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Pemantauan dan Evaluasi dari pagu anggaran sebesar Rp. 23.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.440.000,-
- f. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Jatim Puspa pagu anggaran sebesar Rp. 3.200.000,-, terealisasi sebesar Rp. 3.200.000,- atau dengan capaian 100% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut :
- Belanja Honor Narasumber Soskab dan Evaluasi Kab PNS sebesar Rp. 2.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Honor Narasumber Soskab dan Evaluasi Kab Non PNS sebesar Rp.1.200.000,- terealisasi sebesar Rp.1.200.000,-



4.1.1.3 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Secara keseluruhan ada 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020

1. Dasar Hukum

DIPA Tahun 2020 No. 018.06.2.238823/2020 tanggal 19 Juni 2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pertanian

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

BBPTUHPT (Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak) Baturaden untuk lokasi kegiatan di Kabupaten Jember bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 melalui kegiatan :

1. Terdistribusikannya ternak Ruminansia Sapi 15 ekor per kelompok dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelompok Cobra Jaya Abadi Kecamatan Kalisat
- b. Kelompok Barokah Kecamatan Ledokombo

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran berasal dari APBN TP 2020

6. Realisasi

Dana anggaran Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 dengan rincian terdistribusikannya ternak Ruminansia Sapi 15 ekor per kelompok untuk 2 kelompok :

1. Kelompok Cobra Jaya Abadi Kecamatan Kalisat



2. Kelompok Barokah Kecamatan Ledokombo

B. Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020

1. Dasar Hukum

DIPA Tahun 2020 No. 018.06.2.239455/2020 tanggal 19 Juni 2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pertanian

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

BPTU-HPT (Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak) Pelaihari untuk lokasi kegiatan di Kabupaten Jember bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 melalui kegiatan :

1. Terdistribusikannya ternak Ruminansia Domba 25 ekor per kelompok dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelompok Permata III Kecamatan Pakusari.
- b. Kelompok Sumber Makmur II Kecamatan Balung.
- c. Kelompok Gumukmas Surya Jaya Kecamatan Gumukmas.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran berasal dari APBN TP 2020.

6. Realisasi

Dana anggaran Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 dengan rincian terdistribusikannya ternak Ruminansia Domba 25 ekor per kelompok untuk 3 kelompok :

1. Kelompok Permata III Kecamatan Pakusari.
2. Kelompok Sumber Makmur II Kecamatan Balung.
3. Kelompok Gumukmas Surya Jaya Kecamatan Gumukmas.



C. Program Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/584/KPTS/013/2020 tentang Penerima Hibah Barang

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemerintah Propinsi Jawa Timur

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur untuk lokasi kegiatan di Kabupaten Jember bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan :

1. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Taman Baru desa Glagahwero Kecamatan Kalisat berupa Instalasi Aquaponik 1 paket, benih/bibit tanaman sayuran/buah, bibit lele ukuran 10-11 cm dan sarana prasarana pertanian dalam rangka kegiatan PEKA PARI untuk Pondok Pesantren di Jawa Timur.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran berasal dari APBN TP 2020.

6. Realisasi

Dana anggaran Program Ketahanan Pangan Masyarakat dengan rincian hibah barang/jasa yang diserahkan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Taman Baru desa Glagahwero Kecamatan Kalisat berupa Instalasi Aquaponik 1 paket, benih/bibit tanaman sayuran/buah, bibit lele ukuran 10-11 cm dan sarana prasarana pertanian dalam rangka kegiatan PEKA PARI untuk Pondok Pesantren di Jawa Timur.



4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Jember tidak memberikan dana bantuan untuk Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Hambatan/Permasalahan Tugas pembantuan Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pelaksanaan kedepan dan berikut Hambatan/Permasalahan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya.

4.2.1 Hambatan/Permasalahan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya

Tugas pembantuan yang telah diterima Kabupaten Jember diantaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Dari pelaksanaan tersebut terangkum permasalahan dan solusi yang dihadapi serta evaluasi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten Jember. Berikut hambatan/permasalahan dan solusi OPD, diantaranya :

4.2.1.1 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Tugas Pembantuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdapat 2 Program diantaranya :

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Dari Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 4 Kegiatan, diantaranya : (1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Embung Pertanian; (2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian; (3) Fasilitas Pupuk dan Pestisida (a. Penyusunan dan penginputan e-RDKK mendukung kartu tani; b. Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida); dan (4) Fasilitas Pembiayaan Pertanian.

Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi adalah kegiatan yang telah direncanakan tidak terserap dikarenakan pada kegiatan Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida sudah ada kegiatan KP3 di APBD 2 dan takut tumpang tindih kegiatannya.

B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Dari Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan terdiri dari 3 Kegiatan, diantaranya : (1) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; (2) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; dan (3) Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan (Base Line).

Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi adalah Beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak terserap dikarenakan Pandemi Covid 19.

4.2.1.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pembantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya terdapat 1 Program diantaranya :

A. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Kegiatan Jatim Puspa)

Dari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Kegiatan Jatim Puspa) terdiri dari 1 Kegiatan, diantaranya : (1) Kegiatan Jatim Puspa.

Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi adalah :

Permasalahan Jatim Puspa :

- Desa Dawuhan Mangli, Kec. Sukowono



Pajak atas belanja barang kebutuhan KPM belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

- Desa Sukorejo, Kec. Sukowono
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban belanja BKK belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- Desa Baletbaru, Kec. Sukowono
Belanja barang kebutuhan KPM yang seharusnya tersalurkan kepada 79 KPM, sampai dengan akhir tahun masih terdapat 4 KPM yang belum menerima barang bantuan BKK.

Solusi :

Telah dilakukan evaluasi dan pelaporan terkait kinerja kegiatan tersebut diatas, untuk masing-masing Desa sasaran Program yang belum menyelesaikan penyusunan LPJ dan mencukupi atas kekurangan penyerahan barang bantuan telah dilakukan pengarahannya dan pendampingan penyusunan LPJ untuk segera diselesaikan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya.

4.2.1.3 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdapat 3 Program diantaranya :

A. Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 (DIPA Tahun 2020 No. 018.06.2.238823/2020 tanggal 19 Juni 2020)

Dari Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 terdiri dari 2 Kegiatan, diantaranya : (1) Terdistribusikannya Ternak Ruminansia Sapi 15 ekor untuk Kelompok Cobra Jaya Abadi Kecamatan Kalisat; dan (2) Terdistribusikannya Ternak Ruminansia Sapi 15 ekor untuk Kelompok Barokah Kecamatan Ledokombo.

Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi adalah :

Permasalahan :



Pelaksanaan distribusi bantuan ternak berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Diperlukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok agar tujuan bantuan dapat tercapai secara maksimal.

Solusi :

Pendampingan dan pengawalan program akan terus dilaksanakan oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

B. Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 (DIPA Tahun 2020 No. 018.06.2.239455/2020 tanggal 19 Juni 2020)

Dari Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 terdiri dari 3 Kegiatan, diantaranya : (1) Terdistribusikannya Ternak Ruminansia Domba 25 ekor untuk Kelompok Gumukmas Surya Jaya Kecamatan Gumukmas; (2) Terdistribusikannya Ternak Ruminansia Domba 25 ekor untuk Kelompok Sumber Makmur II Kecamatan Balung; dan (3) Terdistribusikannya Ternak Ruminansia Domba 25 ekor untuk Kelompok Gumukmas Surya Jaya Kecamatan Gumukmas.

Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi adalah :

Permasalahan :

Pelaksanaan distribusi bantuan ternak berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Diperlukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok agar tujuan bantuan dapat tercapai secara maksimal.

Solusi :

Pendampingan dan pengawalan program akan terus dilaksanakan oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

C. Program Ketahanan Pangan Masyarakat

Dari Program Ketahanan Pangan Masyarakat diantaranya hibah barang/jasa yang diserahkan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Taman Baru desa Glagahwero Kecamatan Kalisat berupa Instalasi Aquaponik 1 paket, benih/bibit tanaman sayuran/buah, bibit lele ukuran 10-11 cm dan Sarana Prasarana Pertanian dalam rangka Kegiatan PEKA PARI untuk Pondok Pesantren di Jawa Timur.



Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi adalah :

Permasalahan :

Untuk optimalisasi pemanfaatan bantuan yang telah diberikan diperlukan pendampingan dan pengawalan oleh petugas lapang dalam hal ini adalah PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang berinduk di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Untuk itu masih diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar dua Dinas untuk kelancaran kegiatan pendampingan dan pengawalan program ini.

Solusi :

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengawalan program/kegiatan Ketahanan Pangan di lapangan.

4.3 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Sebagai pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan tugas umum pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanaan tugas tersebut menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menerapkan asas-asas hukum yang dapat menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut



dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang dituangkan dalam bentuk pelaporan yang meliputi tugas sebagai berikut :

1. Kerjasama Antar Daerah
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
4. Pembinaan Batas Wilayah
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
6. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2020 hanya menyelenggarakan 6 (enam) Tugas Umum Pemerintahan karena Pemerintah Kabupaten Jember tidak memiliki kawasan khusus yang dikelola dan tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan daerah lainnya.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam berbagai bidang pembangunan daerah menghasilkan aliran dana pembangunan, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hasil dari dana tersebut dapat mendukung pencapaian sasaran program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Jember.

Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan



masyarakat. Guna menciptakan situasi ketenteraman, keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Pelaksanaan kerja sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah.

Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut :

4.3.1 Kerja Sama Antar Daerah

Dalam tahap implementasi, kerja sama antar daerah didasarkan atas asas saling menguntungkan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama Daerah Kabupaten Jember maka pada Tahun 2020 dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Jember melalui Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/207/1.12/2019 tanggal 17 April 2020 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020. Tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
2. Menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
3. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerja sama;
4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama daerah;
5. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;



6. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kesepakatan bersama yang sudah ada; dan
9. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

Pada Tahun 2020, melalui TKKSD Kabupaten Jember telah difasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah sebagai berikut :

1. Kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tentang Pengharmonisasian Rancangan Perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Melalui Pendekatan Omnibuslaw Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Daerah.
2. Kerja sama dengan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya tentang Pelaksanaan Verifikasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020.
3. Kerja sama dengan Dirjen Pajak, Dirjen Perimbangan Keuangan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Jember.
4. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
5. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan BPJS Kesehatan Cabang Jember tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Kabupaten Jember.
6. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Probolinggo tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara.



7. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara.
8. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo tentang Penilaian Angka Kredit Guru.
9. Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jember tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
10. Kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Kerja Sama Pelaksanaan Sidang Perkara Itsbat Nikah dan Penerbitan Akta Nikah di Kabupaten Jember
11. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember tentang Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Layanan Lingkup Tugas BPJS Kesehatan.
12. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember tentang Penyerahan Data dan Informasi terkait Aksi Tanggap Pandemi Covid – 19 Dalam Layanan Lingkup Tugas BPJS Kesehatan.
13. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember tentang Kepesertaan Jamkesmas bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
14. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember tentang Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Jember.
15. Kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tentang Kerja Sama Bidang Pertanahan Melalui Pola Trijuang di Kabupaten Jember.
16. Kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Bhakti Husada tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Jember dengan Identitas Surat Pernyataan Miskin (SPM).

4.3.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pemerintah daerah terkadang dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya terpenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan seperti keterbatasan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, serta anggaran yang dimiliki maka dilakukan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dalam upaya meningkatkan efisiensi, pendapatan asli daerah dan pengelolaan potensi daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang Tahun 2020 kebijakan dan kegiatan-kegiatan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kerja sama dengan Universitas Jember tentang Pendampingan Desa/Kelurahan melalui Kerja Sama Perguruan Tinggi Satu Desa/Keluurahan Satu Dosen.
3. Kerja sama dengan Universitas Islam Jember tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jember tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat.



6. Kerja sama dengan Universitas Telkom tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Kerja sama dengan Akademi Akuntansi PGRI Jember tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Kerja sama dengan IKIP PGRI Jember tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Kerja sama dengan Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor tentang Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Jember.
12. Kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
13. Kerja sama dengan Institut Senin Yogyakarta tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.



14. Kerja sama dengan Universitas Yudharta Pasuruan tentang tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
15. Kerja sama dengan Akademi Kelautan Banyuwangi tentang tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
16. Kerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta tentang Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
17. Kerja sama dengan PT. BNI (Persero) Tbk dan Kantor Pemasaran PSO Pupuk Kalimantan Timur tentang Kerja Sama Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Melalui Penyediaan Pupuk Urea Non Subsidi di Tingkat Petani di Kabupaten Jember.
18. Kerja Sama dengan PT. BNI (Persero) Tbk tentang Kerja Sama Penyaluran Bantuan Modal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Bagi Pedagang Lesehan, Pedagang Los, Wlijo, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Jember.
19. Kerja sama dengan PT. Telkom tentang Pemanfaatan Bersama Sumber Daya Perusahaan untuk Implementasi Jember Market City.

4.3.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan, serta penciptaan situasi ketentraman, keamanan dan ketertiban yang dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi vertikal, diantaranya adalah :

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Survey dan Pemetaan serta Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, berkoordinasi dengan TOPDAM V Brawijaya guna menginventarisir nama-nama pulau dan unsur rupa bumi serta menginventarisir batas kecamatan dan Desa di Kabupaten Jember.

4.3.4 Pembinaan Batas Wilayah

Kabupaten Jember berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara serta Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi daerah serta untuk menegaskan wilayah administratif Kabupaten sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka Kabupaten Jember pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan pembinaan batas wilayah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
Meliputi 1 (satu) segmen batas yaitu segmen batas dengan Kabupaten Probolinggo dengan hasil bahwa segmen batas dengan Kabupaten Probolinggo telah rampung dan menunggu tahap pengundangan Permendagri tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Probolinggo oleh Kementrian Dalam Negeri.
2. Fasilitasi penegasan batas wilayah Kecamatan
Dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kalisat dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan di 10 (sepuluh) desa yakni Desa Plalangan, Desa Ajung, Desa Gumuksari, Desa Kalisat, Desa Patempuran, Desa Sebanen, Desa Sukoreno, Desa Sumberjeruk, Desa Sumber Kalong dan Desa Sumber Ketempah.
 - b. Diwujudkan dalam bentuk peta batas standar nasional yang tersebar di 10 (sepuluh) desa di wilayah Kecamatan Kalisat.

Penegasan batas wilayah kecamatan ini dilaksanakan oleh tim teknis Kabupaten Jember bekerjasama dengan Topografi Daerah Militer V/Brawijaya yang diwujudkan dalam kegiatan pemasangan tugu batas serta penerbitan Peta Batas Kecamatan.

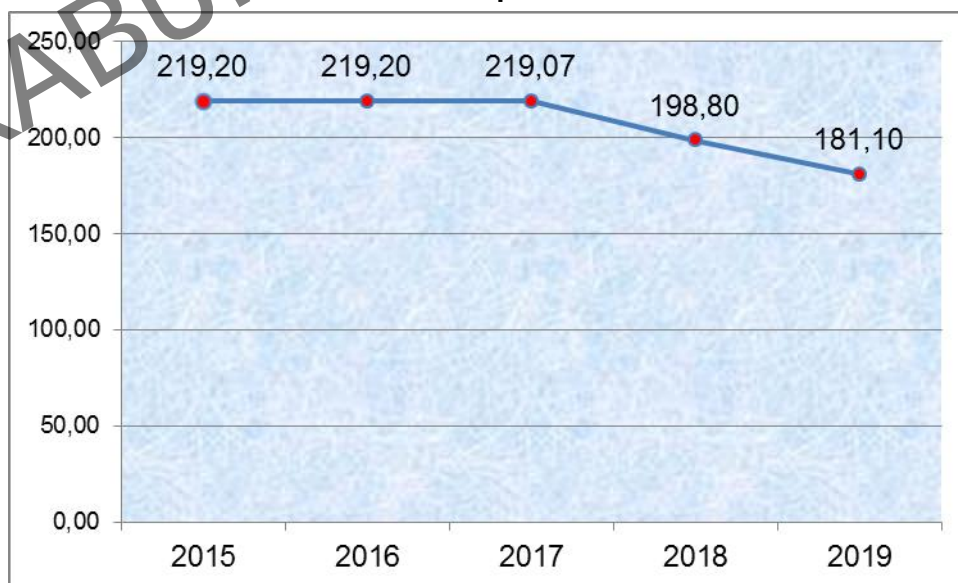
Adapun proses yang dilaksanakan untuk pemasangan dan penerbitan peta batas dimaksud antara lain orientasi lapangan, pemeriksaan lapang bersama penduduk lokal, pengukuran dengan GPS, pengolahan data ukur serta penyajian dalam peta.

4.3.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan dengan potensi bencana (hazard potency) yang sangat tinggi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur bahwa pada Tahun 2019 Jember menempati posisi ke-2 sebagai kabupaten/kota yang memiliki resiko bencana tinggi, dengan nilai indeks sebesar 181,10. Meskipun terdapat trend penurunan Indeks Risiko Bencana, namun Jember masih menjadi wilayah yang sangat rawan. Hal ini dikarenakan potensi bencana yang ada diantaranya gempa bumi, tsunami, likuifaksi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya, yang berimplikasi terhadap perlunya pengamanan warga Jember dari dampak yang diakibatkan oleh bencana.

Gambar 4.1

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada sisi utara dan timur, kondisi topografi wilayah Jember sebagian besar didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, dengan tingkat kelerengan mulai sedang hingga tinggi. Pada wilayah ini berpotensi terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang saat curah hujan sangat tinggi. Wilayah tersebut adalah lereng Argopuro yang meliputi Kecamatan Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari, Panti, Sukorambi, Patrang, Arjasa hingga Jelbuk; Jember bagian Timur yakni di lereng barat Gunung Raung wilayah kecamatan Sumberjambe, Ledokombo, dan Silo; dan Gugusan Mandigu yang berada di Kecamatan Tempurejo dan Mumbulsari.

Pada bagian selatan Kabupaten Jember berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, dan berada pada pinggir tumbukan lempengan besar, yaitu lempeng Eurasia dan Hindia-Australia. Tumbukan lempeng ini berpotensi besar menimbulkan gempa tektonik yang diikuti dengan bencana tsunami. Wilayah ini mencakup Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu dan Tempurejo. Pada wilayah ini juga terdapat kawasan likuifaksi yang membentang antara Puger dan Kencong.

Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat 2 gunung aktif, yaitu Gunung Raung dan Gunung Lamongan, yang keduanya masih aktif dan berpotensi menyebabkan bencana erupsi gunung berapi. Wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Raung diantaranya Kecamatan Sumberjambe, Ledokombo, Sukowono, Mayang, Kalisat dan Silo. Sedangkan wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Lamongan adalah Kecamatan Sumberbaru. Pada wilayah-wilayah ini juga sering terjadi tanah longsor dan banjir bandang.

Sedangkan di wilayah tengah atau Perkotaan Jember merupakan kawasan yang rawan bencana angin puting beliung dan banjir genangan. Hal ini mengingat Perkotaan Jember merupakan wilayah cekungan yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan.

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Mengacu kepada pengertian bencana, maka ada 2 jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Jember, yaitu Bencana Alam dan Bencana Non Alam.

Bencana alam yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 121 kejadian yang tersebar di 31 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Banjir sebanyak 17 kali
- b. Tanah longsor 16 kali
- c. Angin Puting Beliung sebanyak 57 kali
- d. Kebakaran sebanyak 26 kali
- e. Erupsi Gunung Api sebanyak 1 kali
- f. Kekeringan sebanyak 2 kali
- g. Gempa bumi sebanyak 1 kali

Bencana non alam yang terjadi di tahun 2020 adalah wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tidak hanya terjadi di Jember, namun telah menjangkiti seluruh negara di dunia. Pandemi ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang



lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global. Di Kabupaten Jember, sampai dengan akhir Tahun 2020 Covid-19 telah menjangkiti 4.438 orang. Dari jumlah tersebut 3.593 orang sudah sembuh, 208 orang diantaranya meninggal dunia, dan sisanya masih dirawat atau isolasi mandiri.

Tabel 4.2
Perkembangan Hasil Pencapaian Pelaksanaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana Tahun 2016 – 2020

Uraian Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terciptanya penanggulangan bencana yang cepat dan akurat sehingga mengurangi beban masyarakat yang tertimpa bencana dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, koordinasi secara rutin, penyuluhan dan simulasi tentang bencana, pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi pengungsi korban bencana alam meliputi :					
1. Banjir Kec. Ambulu, Bangsalsari, Gumukmas, Jelbuk, Kalisat, Kaliwates, Mumbulsari, Patrang, Puger, Rambipuji, Sukorambi, Tempurejo, dan Wuluhan	10 x	20 x	40 x	15 x	17 x
2. Banjir Rob/Abrasi Kec. Puger	-	-	1 x	1 x	-
3. Tanah Longsor Kec. Arjasa, Jelbuk, Kaliwates, Ledokombo, Patrang, Puger, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sumberbaru, Tanggul dan Tempurejo	3 x	33 x	51 x	22 x	16 x
4. Angin Puting Beliung Kec. Ajung, Arjasa, Balung, Bangsalsari, Jenggawah, Jombang, Kalisat, Kaliwates, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Panti, Patrang, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sumberbaru, Summersari, Tempurejo, dan Wuluhan	26 x	49 x	58 x	86 x	57 x
5. Kebakaran Kec. Ajung, Ambulu, Arjasa, Balung, Gumukmas, Kalisat, Kaliwates, Ledokombo, Mayang, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Semboro, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumberjambe, Summersari dan, Wuluhan	85 x	19 x	54 x	67 x	26 x
6. Kebakaran Hutan dan Lahan Kec. Ajung, Ambulu, Gumukmas, Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, Pakusari, Panti, Patrang, Silo, Sumberjambe, Summersari,	-	2 x	9 x	35 x	-



Uraian Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tempurejo, dan Wuluhan					
7. Kekeringan	-	-	3 x	39 x	2 x
Kec. Ajung, Ambulu, Arjasa, Jelbuk, Jenggawah, Ledokombo, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumbersari, dan Wuluhan					
8. Gempa Bumi	-	8 x	8 x	21 x	1 x
Kec. Ambulu, Kencong, Ledokombo dan Patrang					
9. Erupsi Gunung Api	-	-	-	-	1 x
Kec. Sumberjambe, Ledokombo					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Melihat kondisi bencana di Kabupaten Jember pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terjadi pergeseran jenis bencana. Jumlah kejadian bencana alam berkurang sampai dengan 57,6%, yaitu dari 286 kali menjadi 121 kali, dan tidak ada korban meninggal dunia. Namun, kejadian bencana non alam, yaitu pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 208 orang meninggal dunia.

Kejadian bencana alam pada Tahun 2020 didominasi oleh angin puting beliung (57 kali) diikuti kebakaran (26 kali), banjir (17 kali), dan tanah longsor (16 kali).

Upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Penanggulangan bencana merupakan gerak terpadu antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Membentuk masyarakat yang tangguh, sekaligus siaga menghadapi bencana adalah kerja bersama yang harus diinisiasi, didukung dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dilakukan BPBD dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana diantaranya :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai wilayah (perhutani, BKSDA, Perkebunan) di Jember untuk melakukan kegiatan



- penghijauan/vegetasi untuk mengurangi daya tekanan air hujan pada tanah yang mudah bergerak (bahaya bencana hidrometeorologi).
- b. Melakukan langkah-langkah pengurangan resiko bencana diantaranya adalah :
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - 2) Bekerjasama dengan kelompok masyarakat/ relawan dan dunia usaha untuk memberikan inisiasi peningkatan kapasitas masyarakat.
 - 3) Melakukan kooordinasi dengan wilayah Kecamatan rawan bencana untuk menentukan tempat aman sementara dan melakukan simulasi.
- c. Memasang rambu bencana sebanyak 130 unit dan papan informasi bencana sebanyak 45 unit pada lokasi-lokasi yang rawan bencana, seperti kawasan rawan longsor, zona tsunami, zona erupsi dan larangan mandi/berenang di pantai selatan.
- d. Membentuk 9 Desa Tangguh Bencana pada daerah-daerah kawasan rawan bencana, seperti lereng gunung, pesisir laut, dataran rendah dan sebagainya, dengan rincian 5 desa melalui APBD, 1 desa melalui APBD Provinsi dan 3 desa melalui Dana Desa.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan melalui media cetak (brosur, surat kabar, spanduk, baliho) maupun media elektronik (radio dan televisi).
- f. Melakukan simulasi dan gladi kebencanaan pada instansi-instansi perkantoran, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- g. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mengadakan kerja bakti, perbaikan secara gotong royong dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- h. Pendistribusian bantuan berupa :
- i) Bantuan Sembako
 - ii) Bantuan Sandang dan Papan



- iii) Bantuan peralatan rumah tangga dan kebersihan
- i. Pemulihan rumah terdampak pasca bencana melalui bantuan stimulan bahan bangunan dan gotong royong memperbaiki rumah.
- j. Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 berupa :
 - 1) Pendirian Posko Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di Pendopo Wahyu Wibawagraha dan Jember Sport Garden
 - 2) Penyemprotan disinfektan pada rumah atau lingkungan warga terdampak.
 - 3) Pemakaman terhadap jenazah yang terinfeksi atau terduga Covid-19.
 - 4) Melaksanakan pengawasan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum di seluruh wilayah bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
 - 5) Melaksanakan operasi yustisi penggunaan masker untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Jember selama Tahun 2020 dikategorikan merupakan bencana lokal dan nasional, dimana penanganan bencana dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Jember. Status darurat bencana yang diterbitkan diantaranya :

- a. Surat Pernyataan Darurat Bencana tanggal 1 Februari 2020 Nomor 360/120/35.09.416/2020 terkait dengan banjir bandang di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.
- b. Surat Pernyataan Darurat Bencana tanggal 21 Februari 2020 Nomor 360/139/416/2020 terkait dengan bencana hidrometrologi yang mencakup 9 kecamatan, yang kemudian diperpanjang pada tanggal 7 Maret 2020 Nomor 360/631/416/2020, dan tanggal 21 Maret 2020 Nomor 360/771/416/2020



- c. Surat Pernyataan Darurat Bencana tanggal 2 Maret 2020 Nomor 360/569/416/2020 terkait dengan banjir Kalijompo dan longsornya pertokoan Kalijompo Kelurahan Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates.

Keputusan Bupati Jember tanggal 27 Maret 2020 Nomor 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Nono Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember Tahun 2020, yang kemudian digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

- a. Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berasal dari APBD Kabupaten Jember adalah sebesar Rp. 401.000.000.000,- (empat ratus satu milyar rupiah) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 78.400.000.000,- (tuju puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah) yang ada pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, realisasi untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp.182.240.412.547,62,- (Seratus Delapan Puluh Dua Milyard Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Enam puluh Dua sen) atau sebesar (30,01 %).
- b. Anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 mencapai Rp. 2.849.305.350,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tiha Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi persentase capaian sebesar 83,07% atau sebesar Rp.

2.366.916.717,- (Duat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh ratus Tujuh Belas Rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan 5 Program dan 25 Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Jember, dan pengecekan daerah berisiko bencana dengan memanfaatkan aplikasi inaRISK dari BNPB.
- b. Sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan relawan yang ada di wilayah rawan bencana.
- c. Mendorong gerakan partisipatif bersama masyarakat seperti memangkas cabang dahan pohon atau menebang pohon yang rawan tumbang.
- d. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan informasi awal mengenai bahaya bencana alam di lokasi-lokasi rawan bencana dan tanda-tanda peringatan bencana seperti pemasangan rambu dan papan informasi bencana pada jalur regional dan kawasan wisata, pemasangan spanduk dan baliho menjelang musim kemarau dan musim penghujan, pemasangan Flood Early Warning System (untuk banjir) di lokasi Kali Tanggul, pemeliharaan EWS Tsunami dan EWS Gerakan Tanah.
- e. Menyiapkan/memutakhirkan dan mensimulasikan Rencana Kontijensi Bencana dan menyusun Rencana Operasi atau SOPnya dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat termasuk TNI dan Polri
- f. Aktif dalam memantau informasi prakiraan cuaca yang diterbitkan oleh BMKG, terutama cuaca di daerah berisiko bencana.
- g. Menyiapkan stok bantuan pangan untuk korban bencana dan bantuan peralatan rumah tangga lainnya.



- h. Menyiapkan stok bantuan material bahan bangunan untuk perbaikan rumah warga terdampak bencana.
- i. Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) untuk seluruh kecamatan, yang keanggotaannya terdiri Muspika, Desa, Destana, tokoh masyarakat, dan pemuda relawan bencana.
- j. Mendirikan Posko Siaga Darurat Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dan seluruh kantor Kecamatan.
- k. Menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana dalam APBD Tahun 2020 melalui Belanja Tidak Terduga pada pos Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

- a. Banjir, retakan tanah daratan tinggi dan tanah longsor sebagai akibat penggundulan hutan terutama di wilayah utara.
- b. Erupsi Gunung Api Raung di Kabupaten Jember bagian timur.
- c. Gelombang pasang dan tsunami, rawan terjadi di daerah pantai selatan Kabupaten Jember.
- d. Angin puting beliung, rawan terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Jember.
- e. Kebakaran lahan dan hutan di lereng Gunung Argopuro, Gunung Watangan dan Gunung Manggar.

4.3.6 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban merupakan prasyarat mutlak bagi kenyamanan hidup penduduk, sekaligus menjadi landasan utama bagi pembangunan wilayah. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan unsur Pemerintahan Wajib dan menjadi Pelayanan Dasar. Pada



tahun 2020 terlihat bahwa kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Jember relatif stabil atau terkendali. namun kerap juga masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang berpotensi meningkatkan keresahan dan menimbulkan rasa tidak aman masyarakat, seperti konflik horisontal, aksi premanisme, unjuk rasa yang anarkis, dan tindakan kejahatan.

1. Gangguan Yang Terjadi

Gangguan yang seringkali terjadi bagi terciptanya ketertiban, kenyamanan serta ketentraman umum antara lain adalah kondisi masyarakat Jember yang heterogen dan cenderung mencari jalan pintas yang seringkali mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta tuntutan masyarakat akan gaya hidup yang tinggi. Namun demikian selama Tahun 2020 tidak terjadi gangguan yang sifatnya menonjol, tidak terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme ataupun konflik lainnya.

Sosialisasi peraturan daerah yang masih belum menyentuh pada semua lapisan masyarakat, seringkali dijadikan alat pembenar untuk melakukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan daerah, padahal sebagian besar peraturan daerah yang ada sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat dan seringkali para pelanggar peraturan daerah maupun kebijakan Bupati lainnya adalah orang-orang yang sama dan seringkali melakukan gangguan terhadap ketertiban umum.

Disadari bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk besar dan heterogenitas budaya yang memiliki banyak varian. Selain itu, letak geografis yang sangat strategis dan banyaknya potensi pariwisata menarik para investor lokal maupun manca negara untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Jember. Keadaan ini akan memberikan potensi negatif, diantaranya mudahnya budaya luar yang merusak, heterogenitas masyarakat yang tinggi cenderung



menimbulkan persoalan tersendiri dalam melakukan penertiban dan menjaga ketentraman lingkungan. Persinggungan antar budaya dan kebiasaan, tuntutan pola hidup modernitas tinggi, dan keberanekaragaman kepentingan cenderung akan melahirkan kondisi lingkungan yang resisten terjaganya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki tupoksi mencegah gangguan, menangani gangguan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Hal ini juga berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Situasi dan kondisi yang kondusif merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selalu dituntut untuk bertindak responsif dan lebih profesional. Demi tercapainya profesionalisme tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sejumlah 519 orang pegawai. Di MAKO sejumlah



167 pegawai, dan di Kecamatan se-Kab. Jember 352 pegawai dengan rincian :

a. Distribusi Pegawai Satpol PP berdasarkan Golongan

- Golongan I : 15 orang
- Golongan II : 118 orang
- Golongan III : 40 orang
- Golongan IV : 7 orang
- Non Golongan : 339 orang

b. Distribusi Pegawai Satpol PP berdasarkan Pendidikan Terakhir

- SD/Sederajat : 6 orang
- SMP/Sederajat : 33 orang
- SMA/Sederajat : 442 orang
- Diploma : 2 orang
- Strata I (S1) : 30 orang
- Strata II (S2) : 6 orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 pada pos DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sejumlah Rp.19.527.771.142,- (sembilan belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari Rp.9.037.354.942,- (sembilan milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan), sedangkan sisanya digunakan untuk Belanja Langsung (Program dan Kegiatan SKPD) sebesar Rp 10.490.416.200,- (sepuluh



milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).

5. Penanggulangan dan Kendala

Guna melakukan penanggungan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, selalu dilakukan upaya-upaya persuasif dan sosialisasi menyeluruh kepada segenap lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Penanggungan dalam hal ini hanya bersifat pencegahan. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum antara lain dengan mengadakan patroli rutin, penjagaan serta pembentukan dan pembinaan Satuan Linmas di tiap desa/kelurahan, bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam usaha menjaga situasi tetap kondusif, beberapa diantaranya adalah kerjasama dengan pihak aparat keamanan, dan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Dalam upaya penanggungan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tidak ditemui kendala yang berarti, karena usaha dan kerjasama penanggungan secara simultan terus dilaksanakan. Namun apabila diperlukan langkah-langkah represif dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang ada dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggungan

Dalam setiap penanggungan dan penindakan dalam rangka menertiban dan menjaga ketentraman lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya seperti pihak Kepolisian maupun TNI yang juga senantiasa berperan serta secara aktif dalam usaha penanggungan tersebut. Paduan antara 3 unsur aparatur keamanan dan ketertiban dengan dibantu masyarakat merupakan satu kekuatan yang sangat kokoh dalam usaha mewujudkan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.



Meskipun belum terlaksana secara maksimal, namun dari beberapa hasil yang telah dicapai diharapkan dapat dijadikan pelajaran dan pedoman bagi Polisi Pamong Praja agar ke depan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih baik, proposional dan profesional demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya berujung pangkal pada tercapainya kemakmuran bersama.

KABUPATEN JEMBER

5

Penutup

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Jember Akhir Tahun Anggaran 2020, sebagai bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati periode tahun 2016-2021 tahun kelima yang disampaikan oleh Bupati periode tahun 2021-2024.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 telah dilakukan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kinerja pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil optimal, di sisi lain masih ada kinerja pembangunan yang menunjukkan kenyataan kurang optimal dan membutuhkan perhatian kita bersama. Hal itu perlu dimaklumi karena pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi dimensi waktu, ekonomi, sosial budaya politik serta keamanan dan ketertiban.



Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya telah dicapai selama ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi dari semua pihak (*stakeholder*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Jember pada Tahun 2020 masih perlu mendapat masukan, saran dan koreksi dalam bentuk Rekomendasi DPRD agar menjadi sempurna. Saya berharap semua yang telah kita laksanakan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhlo-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.

Jember, Maret 2021

BUPATI JEMBER

HENDY S.